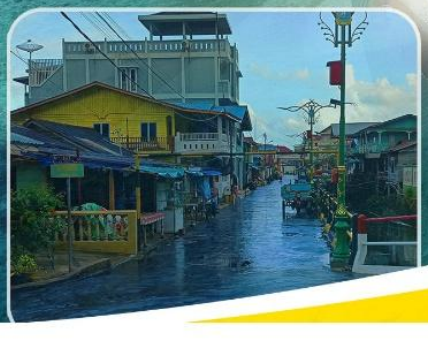








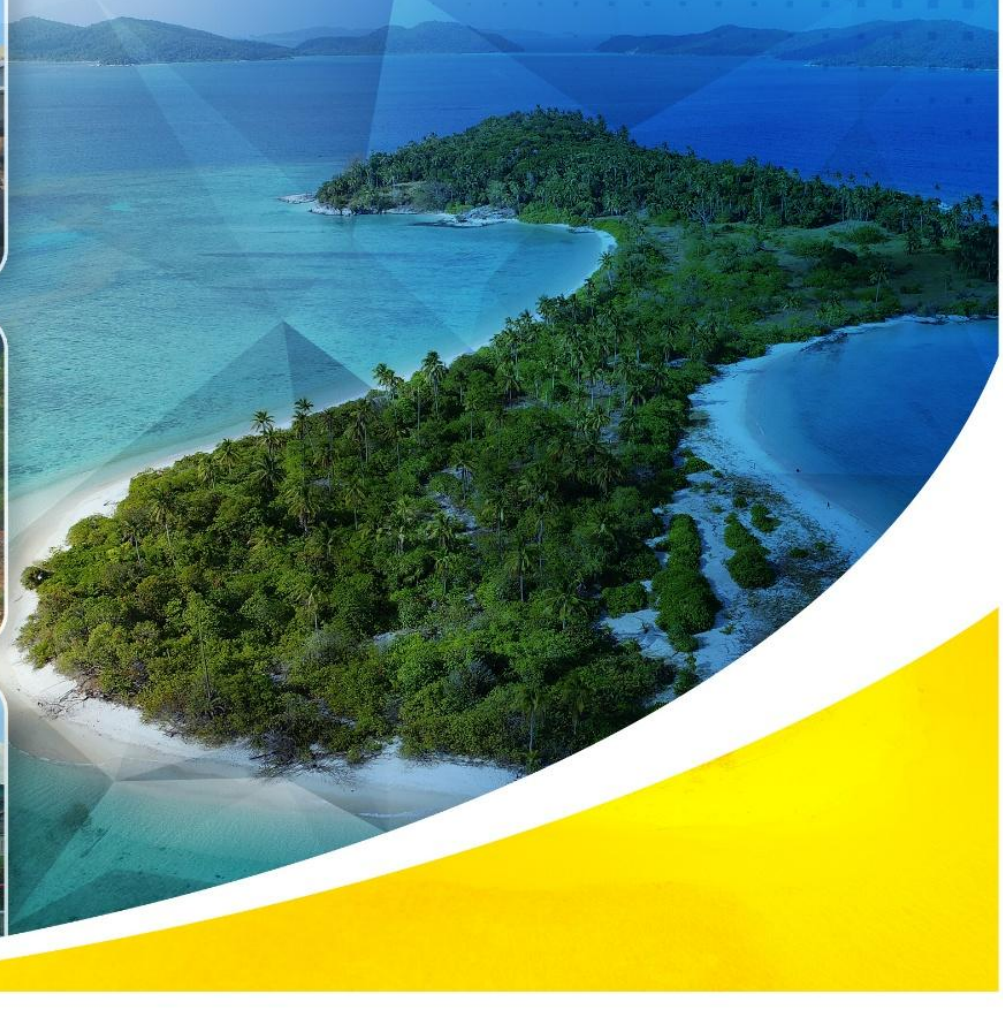




PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Perubahan Renja Perangkat Daerah

(Renja PD) Tahun 2025



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 453 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman kepada rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;

b. bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-

2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah perubahan perencanaan perangkat daerah untuk periode pada triwulan akhir tahun yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 453 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juli 2025

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 453 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RENJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Renja Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja PD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan Renja RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya dokumen Renja PD ini, dapat dilihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740311 200212 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
KATA PENGANTAR		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	I.1 Latar Belakang	1
	I.2 Landasan Hukum	2
	I.3 Maksud dan Tujuan	4
	I.4 Sistematika	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**	7
	II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
	II.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	25
	II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	27
	II.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
	II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III	**TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**	42
	III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
	III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	44
	III.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	51
BAB V	**PENUTUP**	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2021	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2021	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	26
Tabel 2.4	Rancangan Renja RKPD Rancangan Awal Renja 2025	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran	45
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	51

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Derah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Renstra PD sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

" KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERAH"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA DAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI LUHUR;
2. MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKEADILAN;

3. PELAYANAN PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI;
4. MEMPERKUAT PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI;
5. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Awal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutAwalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, Mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568).
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Sekretariat Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 60.135.291.521dengan 3 (Tiga) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 45.139.272.849,00 atau 75,06% dari keseluruhan rencana anggaran. Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
1 -	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		9	Penataan Organisasi
		10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	11	Administrasi Tata Pemerintahan
		12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		15	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		17	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel 2.2 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2025
1	2	3	4
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.675.821.843
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	19.393.957.089
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.738.577.729

4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	655.379.360
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp54.366.200
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70.331.140,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.142.422.125,
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	144.155.989

4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	156.811.887
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44.984.079
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	840.792.926
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	117.974.300
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	742.619.241
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.095.083.703

4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.735.638
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	563.735.638
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.180.115.022
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.486.771.754
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	593.343.268
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.642.651.617
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	582.770.780

4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	182.052.700
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	877.828.137
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	636.932.030
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.988.160
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	138.943.870
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	397.592.220
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	143.737.020

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	102.744.0000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	151.111.200
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tertatanya Penataan Organisasi	404.526.587
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	140.200.820
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	202.806.779
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.518.988
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.243.558.373
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	522.787.011
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	280.422.869

4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	440.348.493
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.811.280.616
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp305.768.924,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	133.544.571
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	104.696.571
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.760.546.773,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.607.041.871
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	umlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3.153.504.902
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Hukum	917.189.272

4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	438.303.700
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	363.969.572
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	114.916.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	1.778.955.756
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Rp310.853.110,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.375.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	76.203.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	408.425.680
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	19.387.000

4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	355.995.980,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	33.042.700
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.243.314.076,
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	128.003.900
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	966.185.105
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	149.125.071
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam	49.638.000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	24.890.000
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan	

		Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	24.748.000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Arah Kebijakan Pebangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan Awal untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastrukutur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

   Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan peventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

   Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.
3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

   Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.
4. Pengembangan infrastruktur wilayah

   Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

   Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030. Visi yang harus didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 adalah :

"KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Sekretariat Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA DAN MENGEDEPANKAN NILAI- NILAI LUHUR.
2. MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKEADILAN.
3. PELAYANAN PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI.
4. MEMPERKUAT PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
5. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah, yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Implementasi e-Govermance
		Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah
		Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
		Terwujudnya sistem pelaporan kinerja keuangan yang akuntabel
2	Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit level pemerintahan	Tewujudnya data kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya jiwa nasionalisme aparatur

3	Meningkatnya kualitas produk - produk	Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk - produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah

	perencanaan dan kebijakan daerah	Tercapainya Koordinasi perencanaan pembangunan daerah lokasi prioritas di KKA
		Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis
		Terwujudnya kebijakan daerah dalam peningkatan pembangunan daerah
		Tercapainya perencanaan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Stakeholder, BUMD dan Pelaku Usaha Masyarakat
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tersusunnya dan terlaksananya standar pelayanan oleh OPD
		Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
5	Menginternalisasikan nilai -nilai agama dalam kehidupan sehari - hari	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat
		Meningkatnya aktifitas penyuluh agama yang berbobot dan mencerahkan
		Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan

III.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan Sekretariat Daerah lebih menitikberatkan pada terselanggaranya Pemerintahan yang baik sebagai upaya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sistematis. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu " Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Sebagai Fondasi Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan".

Sebaran lokasi dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibukota Kabupaten, ini dikarenakan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah penetap Kebijakan dan membidangi urusan Pemerintahan Umum. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif, Lokasi, dan Kelompok Sasaran

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (2025)	Lokasi Kegiatan	Kelompok Sasaran
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
4.01.01.2.02					
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	18,738,577,729	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	655,379,360.00	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	70,331,140.00	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.06					
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	144,155,989.00	KKA	OPD
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	156,811,887.00	KKA	OPD
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	Rp100.000.000	KKA	OPD
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	840,792,926.00	KKA	OPD
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket	117,974,300.00	KKA	OPD
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	742,619,241.00	KKA	Masyarakat

4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	1,095,083,703.00	KKA	ASN
4.01.01.2.07					
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	563,735,638.00	KKA	OPD
4.01.01.2.08					
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Rp132.029.228	KKA	OPD
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	Rp1.593.520.154	KKA	OPD
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Laporan	Rp593.343.268	KKA	OPD
4.01.01.2.09					
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	Rp582.770.780	KKA	OPD
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	Rp182.052.700	KKA	OPD
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp1.106.926.838	KKA	OPD
4.01.01.2.11					
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	Rp177.988.160	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket	Rp138.943.870	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Rp20.000.000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Rp300.000.000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.12					
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0 Paket	Rp143.737.020	KKA	KEPALA DAERAH

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0 Paket	Rp102.744.000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Paket	Rp151.211.200	KKA	OPD
4.01.01.2.13					
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	Rp92.528.381	KKA	ASN
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	Rp72.279.610	KKA	OPD
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	Rp205.278.790	KKA	OPD
4.01.01.2.14					
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan	Rp305.110.000	KKA	ASN
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	Rp258.308.000	KKA	ASN
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30 Laporan	Rp174.177.493	KKA	ASN
4.01.02					
4.01.02.2.01					
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	Rp204.843.724	KKA	OPD
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Rp100.925.200	KKA	OPD
4.01.02.2.02					
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	Rp2.557.934.000	KKA	MASYARAKAT
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	20 Dokumen	Rp4.254.719.376	KKA	MASYARAKAT
4.01.02.2.03					
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	20 Dokumen	Rp385.441.700	KKA	OPD

4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	Rp592.538.000	KKA	OPD
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20 Dokumen	Rp135.465.000	KKA	OPD
4.01.03					
4.01.03.2.01					
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	Rp104.608.750	KKA	OPD
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	Rp206.244.360	KKA	OPD
4.01.03.2.02					
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20 Dokumen	Rp32.085.000	KKA	OPD
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	Rp575.191.200	KKA	OPD
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	Rp88.439.700	KKA	OPD
4.01.03.2.03					
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	Rp400.449.456	KKA	OPD
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	Rp311.203.875	KKA	OPD
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	Rp177.199.700	KKA	OPD
4.01.03.2.04					
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 Dokumen	Rp45.400.000	KKA	OPD
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10 Dokumen	Rp48.350.000	KKA	OPD

4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10 Dokumen	Rp52.000.000	KKA	OPD
TOTAL			**Rp.43.726.834.448**		

Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, juga berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- Pengarus Utamaan Gender (PUG)

  Sekretariat Daerah berkomitmen terhadap penerapan PUG dengan memberikan akses, peran/partisipasi, control dan manfaat antara laki – laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesenjangan / bias gender. Sejumlah aktivitas yang mencerminkan penerapan PUG diantaranya adalah dengan memberikan proporsi keterwakilan laki – laki dan perempuan dalam beberapa kegiatan yaitu:

  1. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi
  2. Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten
  3. Penyelenggaraan Ibadah Haji
  4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh

- Kabupaten/Kota Sehat

  Perwujudan kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian indikator kegiatan KKS. Indikator – indikator kegiatan KKS tersebut tidak di alokasikan secara khusus tetapi lebih bersifat menumpang pada kegiatan yang ada, namun secara substansi, indikator – indikator tersebut harus termuat dalam kegiatan – kegiatan perangkat daerah. Sehubungan dengan tatanan KKS, dimana salah satunya adalah sarana dan prasarana umum, Sekretariat Daerah juga telah menerapkan wilayah kantor Sekretariat Daerah sebagai daerah bebas asap rokok sebagaimana Peraturan Bupati No. 49 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.

- Kabupaten Layak Anak (KLA)

  Perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) dilakukan dengan memperhatikan sistem pembangunan yang berbasiskan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, progam dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Sekretariat Daerah berupaya dalam proses perencanaan pembangunan terkait terhadap pencapaian indikator KLA. Salah satu yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah Pengadaan Alat Bermain Anak-anak di Taman Bermadah, sebagai fasilitas untuk bermain bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

  Dalam penerapan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah berupaya agar setiap progam/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat di pertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat. Sebagaimana di atur oleh permendagri 86 tahun 2017 pasal 170 ayat 2 bahwa sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah melalui bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan bersama inspektorat dan Balitbangpeda dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupaya agar mempedomani sasaran Renstra PD, agar setelah RKT tersusun, perjanjian kinerja kepala OPD dapat legal formalkan serta di jabarkan oleh unit kerja dibawahnya dalam menterjemahkan capaian yang diperjanjikan.

- Sustainable Developmen Goals (SDGs)

  Berkenaan dengan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Daerah juga telah berupaya dengan memuat tujuan dan indikator SDGs. Sejumlah tujuan SDGs menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, salah satu upaya dalam pencapaian tujuan SDGs

adalah pengurangan tingkat kemiskinan meskipun tanpa pengangguran khusus, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan penerapan zakat profesi pegawai, pembayaran zakat, infaq, dan sodakoh yang dihimpun UPZ diharapkan mampu memberikan keringanan bagi asnaf penerima ZIS. Sekretariat Daerah berkeyakinan bahwa jika budaya ini di lakukan secara masif, maka akan berdampak signifikan kepada penurunan angka kemiskinan.

Meskipun ada beberapa tanpa penganggaran kegiatan khusus, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah diupayakan dalam pencapaian target SDGs, KLA, PUG, KKS dan AKIP. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, kedepannya Sekretariat Daerah akan melakukan perbaikan – perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar target – target yang ingin di capai dapat tercapai sebagaimana mestinya.

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/ kegiatan Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740311 200212 1 005

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JL. IMAM BONJOL NO. 31 TAREMPA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 Ayat 3, bahwa Rencana kerja PD dibuat sesuai dengan pokok dan fungsi serta mengacu pada RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD ini, dapat dilihat sejauh mana Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Tarempa, 16 Juli 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19730122 200312 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....17
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.....19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....34
3.3 Program dan Kegiatan.....35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 7
Tabel 2.2 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 13
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Utama Se kretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 17
Tabel 2.4 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.....19
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.....20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Konsepsi Perencanaan Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat kerangka Program/Kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, menjadikan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun Tema Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 adalah "Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan". Dengan prioritas pembangunan:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi KepulauanRiau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20212026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53).
22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomo 477);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kep. Anambas Tahun 2025 adalah:

a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menegah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, serta sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Sekretariat DPRD.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V. PENUTUP

Bab IV menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja, sangat penting dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk menyusun perencaaan program dan kegiatan instansi tahun sesudahnya. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 juga diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja pelaksanaan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan berbagai permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan Rencana Kerja tersebut.

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 35.647.686.618,- dengan realisasi mencapai 85,56% dari keseluruhan anggaran dengan rincian kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
11	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
12	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan
4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
13	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
19	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
27	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
28	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
8.	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**

29	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
30	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
II.	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
9.	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
31	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
32	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akdemik
10.	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**
33	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
34	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
35	Sub Kegiatan Pembahasan APBD
36	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
11.	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**
37	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
38	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
39	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
40	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
12.	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
41	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
42	Sub Kegiatan Penyusuna Pokok-Pokok Pikiran DPRD
43	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
13.	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**
44	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 35.647.686.618 dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 30.501.028.725.

Evaluasi berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 2 (Dua) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau tidak dapat dilaksanakan, yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Lebih Lanjut Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, adapun dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2023 sebesar Rp. 101.819.200,- dapat terealisasi sebesar Rp. 88.741.500,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 87,15% dan output dari rencana tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2023 sebesar Rp. 3.696.615.394,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.525.924.522,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 95,38 % dan output dari rencana tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.475.018.508,- terealisasi sebesar Rp. 839.284.771,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 56,89 % dan output dari rencana tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.674.672.017,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.403.157.045,- atau persentase sebesar 89,84 % dan output dari rencana tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2023 sebesar Rp. 428.413.299,- dapat terealisasi sebesar Rp. 157.346.250,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 36,72% dan output dari rencana tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
f. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan Anggaran yang tersedia pada Tahun 2023 sebesar Rp. 10.429.395.800,- dapat terealisasi sebesar Rp. 10.078.269.547,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 96,63% dan output dari rencana tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
g. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 404.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 250.671.000,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 62,02% dan output dari rencana tersedianya Layanan Administrasi DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Adapun Kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi DPRD yaitu terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.563.589.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.434.028.981,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 94,94% dan output dari rencana tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 474.921.900,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 292.228.370,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 61,53% dan output dari rencana tersedianya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.774.097.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.853.514.726,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 66,73% dan output dari rencana tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.364.411.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.640.348.680,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 78,47% dan output dari rencana tersedianya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
e. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran Tahun 2023 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.022.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.937.513.333,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 84,64% dan output dari rencana tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Adapun Realisasi Anggaran dan Fisik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK	
					REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN	
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	83.416.800	0,23	77.357.300	92,74	0,22	100,00	0,23
	01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.000.800	0,01	1.195.200	29,87	0,00	98,87	0,00
	01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.919.700	0,01	3.919.700	100,00	0,01	100,00	0,01
	01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.949.900	0,01	-	-	-	-	-
	01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.513.600	0,01	2.511.600	99,92	0,01	100,00	0,01
	01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.953.500	0,01	2.784.600	94,28	0,01	100,00	0,01
	01.07	EVALUASI KINERJA PERAGKAT DAERAH	2.064.900	0,01	973.100	47,13	0,00	95.86	0,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.494.099.294	9,80	3.326.004.522	95,19	9,33	100,00	9,80
	02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	199.920.000	0,56	199.920.000	100,00	0,56	100,00	0,56
	02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.596.100	0,01	-	-	-	100,00	0,01
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT PERLENGKAPANNYA	146.564.000	0,41	-	-	-	-	-
	05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.668.000	0,26	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	84.689.300	0,24	74.064.900	87,45	0,21	88,25	0,21

No		PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK	
					REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN	
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)
	06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	491.768.108	1,38	203.369.000	41,35	0,57	91,67	0,57
	06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	65.998.000	0,19	65.158.000	98,73	0,18	100,00	0,19
	06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	203.515.600	0,57	101.993.800	50,12	0,29	94,90	0,54
	06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	139.232.500	0,39	-	-	-	-	-
	06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000	0,14	3.600.000	7,20	0,01	82,50	0,02
	06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	100.010.000	0,28	98.288.500	98,28	0,28	100,00	0,28
	06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	339.805.000	0,95	292.810.571	86,17	0,82	100,00	0,95
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	179.630.400	0,50	178.791.400	99,53	0,50	100,00	0,50
	08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	244.916.625	0,69	128.921.295	52,64	0,36	81,74	0,56
	08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.250.124.992	6,31	2.095.444.350	93,13	5,88	100,00	6,31
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.225.030	0,24	14.015.900	16,64	0,04	67,52	0,04
	09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.507.200	0,17	22.680.350	37,48	0,06	42,34	0,07
	09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	283.681.069	0,80	120.650.000	42,53	0,34	44,32	0,35
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
	15.01	PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	9.517.138.520	26,70	9.317.393.056	97,90	26,14	100,00	26,70
	15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	355.814.280	1,00	260.800.000	73,30	0,73	75,54	0,75
	15.03	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	556.443.000	1,56	500.076.491	89,87	1,40	99,94	1,56
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD								
	16.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	152.009.700	0,43	29.407.500	19,35	0,08	19,70	0,08

No		PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK	
					REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN	
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)
	16.03	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	252.140.300	0,71	221.263.500	87,75	0,62	99,18	0,70
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								
	2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2.563.589.900	7,19	2.434.028.981	94,95	6,83	98,41	7,08
	2.01.04	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN/ ATAU NASKAH AKADEMIK	-	-	0	-	-	0,00	-
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran								
	2.02.01	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	22.432.500	0,06	22.130.840	99	0,06	100,00	0,06
	2.02.02	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	45.317.000	0,13	44.719.230	98,68	0,13	100,40	0,13
	2.02.03	PEMBAHASAN APBD	342.445.400	0,96	170.959.900	50	0,48	97,60	0,94
	2.02.04	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	64.727.000	0,18	54.418.400	84,07	0,15	87,09	0,16
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD								
	2.04.02	PEMDALAMAN TUGAS DPRD	1.116.040.000	3,13	699.423.763	62,67	1,96	99,48	3,11
	2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	3.623.696.000	10,17	2.517.669.000	69,48	7,06	99,36	10,10
	2.04.05	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	556.887.600	1,56	534.566.032	95,99	1,50	100,00	1,56
	2.04.07	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	477.474.000	1,34	101.855.931	21,33	0,29	74,67	1,00
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
	2.05.01	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	901.669.900	2,53	594.398.900	65,92	1,67	91,53	2,32
	2.05.02	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	371.544.100	1,04	330.969.180	89,08	0,93	100,00	1,04
	2.05.03	PELAKSANAAN RESES	2.091.197.000	5,87	1.714.980.600	82,01	4,81	85,50	5,02
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD								
	2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	4.022.350.000	11,28	3.937.513.333	97,89	11,05	99,60	11,24
			35.647.686.618	**100**	**30.501.028.725**	85,56	**85,56**		**94,79**

2.2 Analisis Kinerja Pelayananan PD

Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Dipimpin oleh Seorang Sekretaris Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang Mempunyai tugas pokok "menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan". Untuk Menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Mempunyai Fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu peroses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasiltasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottomup*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indokator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan dukungna terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	83%	86%	83%	88%	92%	94%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Tranparan dan Akuntabiltas	Nilai Akuntabiltas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	51,28 (CC)	B	38,55 (C)	B	56,25 (CC)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipasif.
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

5. Perubahan Peraturan Perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026, yaitu : "Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023".

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
e. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam aktivitas kinerja DPRD baik individu maupun lembaga.

Beberapa isu isu Penting selain dari isu isu yang terdapat dalam perangkat daerah adalah inovasi daerah dan pengarustamaan Gender. Inovasi daerah merupakan isu penting dimana perangkat daerah wajib berinovasi guna mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah dimana peran inovasi sebagai kunci keberhasilan penmbagunan daerah.Isu lain yang tidak kalah penting adalah Pengarustaaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas diatas juga menjadi "concern" tersendiri di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Anambas pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Di lingkungan Sekretaariat DPRD

N0	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan
1	Esselon II	1	-
2	Esselon III	2	1
3	Esselon IV	-	-
4	Jabatan Fungsional dan Pelaksana	10	8
Total		13	10

berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dilingkungan Sekretariat DPRD yaitu terdapat 1 orang pejabat eselon II adalah laki laki, 2 menjabat eselon III laki-laki, hanya 1 orang perempuan yang menjabat eselon III, satu-satunya jabatan eselon IV diisi oleh 1 orang perempuan selanjutnya untuk jabatan fungional dan pelaksana diisi oleh 10 laki-laki dan 8 perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 menitikberatkan pada analisa kebutuhan tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2025. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud sudah dilaksanakn pada Tahun 2024. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ini dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**KKA**	**CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 Persen**	**22.068.970.304**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**KKA**	**CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTS**	**100 Persen**	**23.321.948.833**	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	112.153.431	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	99.347.531	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	76.248.037	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	63.966.480	

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	3.240.502	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	8.186.850	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.174.924	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.408.967	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.389.419	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	5.764.110	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.035.773	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.901.750	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	22.392.531	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.374.979	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.672.245	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.744.395	
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.337.899.306	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.436.208.083	

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Jumlah Laporan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	4.160.291.983	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Jumlah Laporan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	4.160.291.983	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	175.446.000	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi	KKA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif	1 Dokumen	308.644.875	
						Keuangan SKPD		ikasi Keuangan SKPD			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.161.323	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.518.887	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	283.556.538	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	495.000.000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	118.617.858	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	395.000.000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	1 Dokumen	164.938.680	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	KKA	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	1 Dokumen	100.000.000	

4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.547.256.584	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.343.196.832	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	47.427.870	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	KKA	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	74.999.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	838.848.324	Penyediaan Peralatan dan	KKA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	471.519.620	
			Kantor yang disediakan			Perlengkapan Kantor		Kantor yang disediakan			
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	49.877.568	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	100.377.750	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Jumlah Paket Bahan Logsitik Kantor yang disediakan	3 Paket	143.841.452	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Jumlah Paket Bahan Logsitik Kantor yang disediakan	3 Paket	344.998.000	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	107.137.110	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	217.500.000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	KKA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang	1 Dokumen	12.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndang an	KKA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundan	1 Dokum en	200.000.000	

			an yang disediakan					gan yang disediakan			
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	67.311.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	200.000.000	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	280.663.260	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	590.943.000	
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	389.305.600	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	KKA	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75.000.000	
						PEMERINTAH DAERAH					
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	389.305.600	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	75.000.000	

6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	2.476.266.253	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	TERLAKSANAN YA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	100 Persen	2.524.458.426	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	134.924.819	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	165.000.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	178.382.466	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	195.547.860	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.162.958.968	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.163.910.566	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik	100 Persen	339.246.434	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	KKA	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	613.647.500	

			Daerah Perangkat Daerah			URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Perangkat Daerah			
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	68.188.469	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	131.810.000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	48.591.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	77.150.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi	2 Unit	222.466.065	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir e habilitasi	2 Unit	404.687.500	
8	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	12.020.106.208	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	12.175.520.800	

28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Dokumen	11.149.113.520	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Dokumen	11.350.152.260	
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	456.345.738	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	302.909.000	
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Medical Check Up DPRD	20 Dokumen	651.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Medical Check Up DPRD	20 Dokumen	609.644.000	
9	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	326.826.900	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Terlaksanaanya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	469.997.000	
31	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	123.127.857	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	119.997.000	
32	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	203.699..043	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	350.000.000	

2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**KKA**	**Capaian Penetapan Perda**	**100 Persen**	**16.881.726.721**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Capaian Penetapan Perda**	**100 Persen**	**16.207.622.850**	
10	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	3.128.599.713	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	4.223.409.600	
33	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda	2.702.969.900	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda	3.676.149.600	
34	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	425.629.813	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	547.260.000	
11	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	erlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	1.219.705.300	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	erlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	863.947.700	

35	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	180.242.500	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	22.477.000	
36	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	183.229.400	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	51.314.000	
37	Pembahasan APBD	KKA	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	446.224.400	Pembahasan APBD	KKA	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	373.563.600	
38	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	410.009.000	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	416.593.100	
12	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	4.440.291.251	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	4.660.930.820	
39	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	2.424.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.114.256.550	
40	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	1 Dokumen	991.139.396	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum	1 Dokumen	2,023,696,000	

			Dewan					Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
41	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan tenaga Ahli	10 Laporan	618.036.240	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan tenaga Ahli	10 Laporan	616,887,600	
42	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	407,155.615	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	375.343.800	
13	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	3.703.741.500	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	2.519.176.200	
43	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1.292.722.200	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	653.145.000	
44	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	600.574.400	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	432.054.000	
45	Pelaksanaan Reses	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1.810.444.900	Pelaksanaan Reses	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1.433.977.200	

			Reses					Reses			
14	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	4.389.388.957	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	4.486.273.000	
46	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	2.800.770.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	2.011.463.886	
47	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.588.618.957	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.000.000.000	
JUMLAH					**38.950.697.025**					**39,529.571.683**	

Penjelasan dari tabel 2.4 diatas adalah terdapat 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026. Dari rata-rata realisasi yang telah ditetapkan pada target setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian indikator telah mencapai target, namun tetap harus ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipati, proses *bottom-up* dan *top down.* Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Reaslisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehinggga di harapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipasi. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas diman realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum DKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja

SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang di Koordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahsan renja adalah sinkroniasasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, Provinsi maupun Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk isu Gender Analisis Pathway (GAP) yang menjadi target pembangunan jangka menengah Daerah, Sekretariat DPRD mengakomodir beberapa Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.162.958.968 ,- . Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam menjalankan produk pemerintahan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Sub kegiatan Pelaksanaan Reses. Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.125.960.369,-. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam menyampaikan aspirasi kaum perempuan untuk berpartisipasi menjalankan pembangunan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Kab. Kep. Anambas tahun 2025. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sekretariat DPRD sebagai Penyedia Fasilitas DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga peranan DPRD menjadi sangat luas dan penting bagi pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

- **Tujuan**

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah”** dan misi ke 3 (tiga) **Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi**, Sekretariat DPRD termasuk OPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Renja ini adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Meningkatnya fasiltasi pengawasan anggaran; dan
3. Meningkatnya dukungan pelayanan sekretariat DPRD terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pencapaian Prolegda	100%

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyedia fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk mendukung semua kegiatan DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan Profesionalisme dalam pelaksanaannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi DPRD sebagai penyerap Aspirasi masyarakat yang akan di tuangkan dalam Peraturan Daerah yang ditujukan demi kemakmuran masyarakat. Adapun Program dan Kegiatan

yang dirancang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 terdiri dari:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
    a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    i. Layanan Administrasi DPRD
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
    a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
    b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
    c. Peningkatan Kapasitas DPRD
    d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
    e. Fasilitasi Tugas DPRD

Direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan 2 (Dua) Program dan 13 (Tiga Belas) Kegiatan tidak jauh berbeda dengan tahun anggaran sebelumya dengan kebutuhan anggaran sebagaimana hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 38.950.697.025,-.

BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan adminstrtasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Fasilitasi terhadap Pimpinan Agenda Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh empat) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							38.950.697.025,00	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00							40.165.742.025,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							38.950.697.025,00	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00							40.165.742.025,00	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							38.950.697.025,00	35.974.533.197,00	24.791.407.561,00	-14.159.289.464,00							40.165.742.025,00	
1.	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan pemerintahan				100 Persen	100 Persen	22.068.970.304,00	20.375.898.010,00	18.445.156.512,00	28.045.000,00							22.097.015.304,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*				6 Dokumen	6 Dokumen	112.153.431,00	99.736.100,00	5.369.896,00	-106.783.535,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Pemerintah Daerah		117.153.431,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	79.248.037,00	44.646.100,00	86.000,00	-79.162.037,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			77.248.037,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.502,00	1.679.100,00	188.700,00	-3.051.802,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			4.240.502,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.174.924,00	1.612.800,00	34.498,00	-3.140.426,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			4.174.924,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.399.419,00	1.614.800,00	86.000,00	-2.303.419,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			3.399.419,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.035.773,00	1.020.000,00	86.000,00	-1.949.773,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			2.035.773,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.392.531,00	44.676.000,00	4.790.000,00	-17.602.531,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			23.392.531,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.672.245,00	1.373.500,00	188.700,00	-2.483.545,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatsn, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			2.672.245,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.337.699.306,00	6.139.168.910,00	5.861.060.033,00	1.523.160.727,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		4.339.699.306,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	4.160.291.963,00	5.930.652.610,00	5.653.756.033,00	1.493.464.050,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			4.160.291.963,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.446.000,00	207.000.000,00	206.963.000,00	31.517.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			176.446.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.161.323,00	1.516.300,00	341.000,00	-1.820.323,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			3.161.323,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	283.996.535,00	148.224.456,00	88.013.823,00	-195.542.715,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		286.501.535,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	118.617.656,00	55.564.456,00	87.890.000,00	-30.727.656,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			120.617.656,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	164.938.680,00	92.640.000,00	123.823,00	-164.514.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			165.063.680,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.547.256.984,00	560.283.068,00	271.076.880,00	-1.276.179.704,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	DPRD dan Perangkat Daerah		1.966.256.984,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	47.427.870,00	30.396.140,00	30.396.140,00	-17.031.730,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			50.427.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	838.848.324,00	443.788.831,00	6.882.859,00	-831.965.465,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			840.848.324,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.877.568,00	41.959.172,00	26.763.538,00	-23.114.030,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			50.877.568,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	143.841.462,00	76.178.930,00	54.148.930,00	-89.692.532,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			144.841.462,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	107.137.110,00	10.200.000,00	162.460,00	-106.974.650,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			110.137.110,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.150.000,00	2.054.295,00	176.953,00	-11.973.047,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			15.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	67.311.000,00	41.420.000,00	41.000.000,00	-26.311.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			66.311.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.883.280,00	204.708.000,00	111.588.000,00	-169.097.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			255.883.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	369.305.800,00	0,00	71.400,00	-369.234.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		340.305.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	369.305.800,00	0,00	71.400,00	-369.234.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			340.305.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.478.286.253,00	385.882.503,00	405.424.874,00	-2.070.841.579,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Pemerintah Daerah		2.479.286.253,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	134.924.619,00	147.994.742,00	97.671.290,00	-37.053.329,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			135.924.619,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	178.382.466,00	217.887.781,00	160.436.956,00	-17.945.510,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			160.382.466,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.162.950.968,00	0,00	147.114.420,00	-2.015.844.540,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			2.162.950.968,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	339.246.434,00	295.545.672,00	251.192.376,00	-88.054.058,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Pemerintah Daerah		343.246.434,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	68.188.469,00	43.330.000,00	25.660.000,00	-30.528.469,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			70.188.469,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	48.991.900,00	54.730.000,00	39.470.000,00	-9.121.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			90.991.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	222.466.065,00	197.265.672,00	183.062.376,00	-39.403.689,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			222.466.065,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	12.256.459.258,00	11.961.713.125,00	11.185.699.999,00	-1.070.759.259,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	DPRD		12.295.459.258,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	11.149.113.520,00	11.045.924.125,00	10.388.997.441,00	-760.116.079,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			11.149.113.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	456.345.738,00	288.949.000,00	530.529.000,00	74.183.262,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			456.345.738,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	601.000.000,00	626.840.000,00	265.173.008,00	-364.826.442,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dess	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			690.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	328.828.900,00	518.563.976,00	377.247.431,00	50.420.531,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	DPRD		328.828.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggarasan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	123.127.857,00	8.300.000,00	155.000,00	-122.972.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			125.127.857,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	203.699.043,00	910.263.976,00	377.092.431,00	173.393.388,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			203.699.043,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**capaian penetapan perda**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.881.726.721,00**	**15.598.835.187,00**	**6.346.251.049,00**	**-1.107.900.000,00**							**10.068.726.721,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.128.599.713,00	2.570.117.028,00	932.453.059,00	-2.196.146.654,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	DPRD dan Pemerintah daerah		3.428.599.713,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Perda Dokumen	4 Perda Dokumen	2.702.989.900,00	2.147.687.529,00	932.411.859,00	-1.770.578.041,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Terempa.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			3.002.989.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	425.629.813,00	622.429.499,00	41.200,00	-425.588.613,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			425.629.813,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 Persen	100 Persen	1.219.705.300,00	914.760.000,00	530.515.000,00	-689.187.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	DPRD dan Pemerintah Daerah		1.326.705.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

VO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN YANG AKAN DICAPAI TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KEWILAYAHAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RINCIAN OPD	APBD KOTA	PAGU PERUBAHAN OPD	Selisih/Kekurangan (13-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Outputs/ Hasil Pembinaan KUA dan ONAS				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta berkualitas pendidikan kesehatan, prioritas dalam pembangunan gender serta pengurangan peran antar daerah (APBD)	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.23.0202	Pembinaan Pelaksanaan KUA dan Pelaksana ONAS																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pembinaan Kelurahan KUA dan Pelaksana ONAS				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta berkualitas pendidikan kesehatan, prioritas dalam pembangunan gender serta pengurangan peran antar daerah (APBD)	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.23.0205	Pembinaan APDE																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pembinaan APDE				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta berkualitas pendidikan kesehatan, prioritas dalam pembangunan gender serta pengurangan peran antar daerah (APBD)	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.23.0204	Pembinaan APDE Perikanan																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pembinaan APDE Perikanan				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta berkualitas pendidikan kesehatan, prioritas dalam pembangunan gender serta pengurangan peran antar daerah (APBD)	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.24	Pengelolaan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Perwakilan Pelaksanaan Kapasitas OPD				00 Persen	00 Persen							-	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan	-			
	4.03.02.2.24.0201	Pendidikan Formal																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pelaksanaan Pendidikan Formal				-	Dokumen Anggaran					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TERIKAT PATAN APBD, LANGKAH TAPAT	-	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.24.0202	Pemberdayaan Pegawai ONAS																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pemberdayaan Pegawai ONAS				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)		Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta berkualitas pendidikan kesehatan, prioritas dalam pembangunan gender serta pengurangan peran antar daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten sumber daya manusia yang sesuai, unggul dan berkualitas serta				
	4.03.02.2.24.0203	Pemberdayaan Pegawai Non ONAS																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Pemberdayaan Pegawai Non ONAS				70 Orang	70 Orang					Kab. Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	-	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.24.0207	Penyusunan Program Kerja OPD																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Penyusunan Program Kerja OPD				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)		Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.24.0208	Penyusunan Dokumen RKA/DPA																		
			Jumlah Outputs/ Hasil Dokumen RKA dan DPA OPD				1 Tahun	1 Tahun					Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	TARIKAN DAERAH (PUSAT/ PROVINSI)	-	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan				
	4.03.02.2.24.02	Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan Lainnya	Persentase Perwakilan Pelaksanaan Kapasitas OPD				00 Persen	00 Persen							-	Opd mendorong terbentuk kelurahan Opd mendorong terbentuk kelurahan	-			
	4.03.02.2.25.0201	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KINERJA AKHIR DATA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setelah Dikurangi [13-12]	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD KOT	PERDA PERUBAHAN 2025				KABUPATEN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kunjungan Kerja DPRD				Dokumen	Dokumen	1.787.777.500,00	1.787.777.500,00	220.777.500,00	-1.567.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Tahun Anggaran 2025 (DAU)	Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi			1.787.777.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.02.2.09.0002	Penyediaan Pakaian Pakaian Khusus DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rapat Rapat DPRD Hasil Survei				Dokumen	Dokumen	600.777.500,00	600.777.500,00	22.977.500,00	-577.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Tahun Anggaran 2025 (DAU)	Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi			600.777.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.02.2.09.0005	Pengadaan Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Publik				Dokumen	Dokumen	1.400.777.500,00	1.400.777.500,00	140.777.500,00	-1.260.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Tahun Anggaran 2025 (DAU)	Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi			1.400.777.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.02.2.10	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD				100 Persen	100 Persen	4.309.333.337,00	5.855.033.333,00	2.351.042.150,00	-3.307.775.333,00			Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi	SEKDA dan Pemerintah Daerah		4.155.333.337,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.02.2.10.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				Dokumen	Dokumen	3.309.779.500,00	3.855.733.333,00	1.603.704.000,00	-1.307.333.334,00	Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Tahun Anggaran 2025 (DAU)	Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi			3.855.733.333,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.02.2.10.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				Dokumen	Dokumen	1.700.777.837,00	1.700.777.837,00	647.941.000,00	-1.052.777.837,00	Kab. Kepulauan Anambas Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Tahun Anggaran 2025 (DAU)	Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas Visi misi Bupati pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta teknologi pendidikan kesehatan, produksi dan tenaga kesehatan prioritas	Opd mandiri reformasi birokrasi Opd mandiri reformasi birokrasi			1.700.777.837,00	SEKRETARIAT DPRD
		JUMLAH					30.350.337.325,33	39.574.833.167,00	24.751.007.561,00	-14.823.825.605,33							40.163.713.025,00		

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang disusun secara sistematis, analistis dan koordinatif sehingga menghasilkan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Artinya Perencanaan Strategis akan membantu Organisasi ini untuk menentukan bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar atau dibutuhkan (*Doing the right thing*) organisasi ini di masa yang akan datang.

Dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan eksistensi dan kapasitasnya dalam menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan perkembangan lingkungan dan masyarakat di daerah, terutama dalam memberikan dukungan yang maksimal guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah. Hingga sejatinya dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan berdasarkan Motto Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu **"Kayuh Serentak Langkah Sepijak"**.

Tarempa, 16 Juli 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730122 200312 1 007

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

Jalan Raja Haji Fisabilillah Pasir Peti,
e-mail : inspektoratkabkepanambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Tarempa, 16 Juli 2025

INSPEKTUR DAERAH,

YUNIZAR, SE.,M.P., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 5

1.4. Sistimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 24

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 42

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB IV PENUTUP 108

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah 2025	13
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renja	21
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	22
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	27
Tabel 2.6	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ...	42
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepuluan Anambas Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari RPJD Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPJD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
22. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 180 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya.

Tujuan Dokumen Rencana Kerja ini menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektoarat Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistematika penyajian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masingmasing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Akhir Perubahan Renja yang terdiri dari:

1.1 Latar Belakang

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan RPJMD dan RPJPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun rencana, kaitanya dengan Renstra, dan isu strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan dokumen terkait pengaturan bab serta garis besar di dalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Sampai dengan Triwulan II .

Berisikan kajian terhadap Evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1) Perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah terkait dengan fungsi pembinaan dan

Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas terhadap capaian program nasional;

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti permasalahan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja,target dan pendanaan indikatif pada

perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 hasil inputan ke SIPD

BAB V PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah. Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang mencapai realisasi 35,70%;

Pagu Anggaran Pergeseran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 12.388.366.387,76 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). Seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 sejalan dan mendukung program kegiatan yang akan di capai oleh Kepala Daerah.

Tabel 2.1

Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik Triwulan II Tahun 2025

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	REALISASI ANGGARAN		
			REALISASI (Rp)	Keu %	FISIK %
1	*2*	*3*	*5*	*7*	*9*
INSPEKTORAT DAERAH		***12.388.366.387,76***	***4.422.340.340***	***35,70***	***37,64***
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		**11.347.657.262,49**	**3.901.263.323**		
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**12.150.000,00**	**-**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**12.150.000,00**	-	0,00	0,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**-**			
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**10.358.313.979,39**	**3.788.407.120**		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**10.323.873.379,39**	3.788.407.120	30,58	32,92
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**24.490.000**	-	0,00	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**9.950.600**	-	0,00	0,00
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		**37.428.000,00**	**-**		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**37.428.000,00**	-	0,00	0,00
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**297.605.660,00**	**-**		
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**4.150.000,00**	-	0,00	0,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**293.455.660,00**	-	0,00	0,00
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**299.478.301,00**	**25.129.220**		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**-**	-	0,00	0,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**52.126.847,00**	13.916.064	0,11	0,12
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**-**	-	0,00	0,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	REALISASI ANGGARAN		
			REALISASI (Rp)	Keu %	FISIK %
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**4.979.400,00**	-	0,00	0,00
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**9.160.300,00**	1.836.000	0,01	0,02
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**6.125.000,00**	-	0,00	0,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**227.086.754,00**	9.377.156	0,08	0,36
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**202.139.991,00**	**-**		
16	Pengadaan Mebel	**148.416.400,00**	-	0,00	0,00
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**-**	-	0,00	0,00
18	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**53.723.591,00**	-	0,00	0,00
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**87.726.983,00**	**87.726.983**		
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**-**	-	0,00	0,00
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**-**			
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**-**	-	0,00	0,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**87.726.983,00**	87.726.983	0,71	0,71
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**52.814.348,10**	**-**		
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**1.740.000,00**	-	0,00	0,00
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**1.350.000,00**	-	0,00	0,00
25	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**49.724.348,10**	-	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**635.101.575,01**	**245.794.092**		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		**547.506.898,12**	**227.715.092**		
26	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**50.021.555,00**	12.713.555	0,10	0,00
27	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**114.198.801,05**	81.724.000	0,66	0,34

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	REALISASI ANGGARAN		
			REALISASI (Rp)	Keu %	FISIK %
28	Reviu Laporan Kinerja	**22.078.929,00**	-	0,00	0,00
29	Reviu Laporan Keuangan	**19.977.500,01**	19.977.500	0,16	0,00
30	Pengawasan Desa	**56.675.000,00**	-	0,00	0,00
31	Kerjasama Pengawasan Internal	**98.340.037,00**	85.300.037	0,69	0,57
32	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**186.215.076,06**	28.000.000	0,23	0,23
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		**87.594.676,89**	**18.079.000**		
33	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	**-**	-	0,00	0,00
34	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**87.594.676,89**	18.079.000	0,15	0,15
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**405.607.550,26**	**275.282.925**		
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		**-**	**-**		
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	**-**	-	0,00	0,00
36	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	**-**	-		
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**405.607.550,26**	**275.282.925**		
37	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	**17.114.472,00**	-	0,00	0,00
38	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	**48.247.600,94**	8.635.100	0,07	0,07
39	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**338.887.177,32**	266.647.825	2,15	2,16
37	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	**1.358.300,00**	-	0,00	0,00
	JUMLAH	**12.388.366.387,76**	**4.422.340.340**	**35,70**	**37,64**

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s/d Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6					**Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan**									
6	01				**Inspektorat Daerah Daerah**									
6	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.67 % (24 dok)	50.00% (18 Dok)	33.33% (12 Dok)			66,67 (24 Dok)		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	6 Dok	4 Dok			8 Dok		
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	41 Orang	37 Orang			45 Orang		
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dok	15 Dok	10 Dok			20 Dok		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	**01**	**01**	**2.03**	**06**	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	**01**	**01**	**2.05**		**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	**01**	**01**	**2.05**	**01**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80%	60%	40%			4 Unit		
6	**01**	**01**	**2.05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	132 Stell	90 Stell	75Stell			4 Paket		
6	**01**	**01**	**2.05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	**01**	**01**	**2.05**	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang	78 Orang	52 Orang			104 Orang		
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.07		**Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket					12 Paket		
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	17 Unit	16 Unit			18 Unit		
6	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	80%	60%	40%			80.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	**01**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	**01**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	**01**	**01**	**2.08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	**01**	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	**01**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	17 Unit	15 Unit			20 Unit		
6	**01**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15 Unit	15 Unit			18 Unt		
6	**01**	**01**	**2.09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung			0		
6	**01**	**01**	**2.09**	**11**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung			4		
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase Terlaksananya**	**67.75%**	**51,62%**	**35,49%**			**67,75% (21 OPD)**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PENGAWASAN	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**(21 OPD)**	**16 OPD**	**(11 OPD)**					
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	80%	60%	40%			**80,00**		
6	**01**	**02**	**2.01**	**01**	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63 Lap	42 Lap	21 Lap			63 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**02**	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Lap	21 Lap	19Lap			23 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**03**	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48 Lap	24 Lap	12 Lap			24 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**04**	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**05**	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	21 Lap	18 Lap	16 Lap			20 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**06**	Kerja Sama Pengawas Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	2 Lap	1 Lap			3 Lap		
6	**01**	**02**	**2.01**	**07**	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Lap	12 Lap	8 Lap			16 Dok		
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**80%**	**60%**	**40%**			**80,00**		
6	**01**	**02**	**2.02**	**01**	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Lap	6 Lap	4 Lap			8 Lap		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	**01**	**02**	**2.02**	**02**	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	4 Lap	5 Lap			3 Lap		
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase (%) Perangkat Daerah yang Sudah di Nilai SPIP**	**61,29% 19 OPD**	**41,94% 13 OPD**	**25,81% 8 OPD**			**61,29% (19 OPD)**		
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**80%**	**60%**	**40%**			80		
6	**01**	**03**	2.01	**01**	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	63 PD	43 PD	23 PD			40 PD		
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi**	**80%**	**60%**	**40%**			**80,00**		
6	**01**	**03**	2.02	**01**	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58 PD	48 PD	38 PD			78 PD		
6	**01**	**03**	2.02	**02**	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	83 PD	62 PD	41 PD			83 PD		
6	**01**	**03**	2.02	**03**	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 LHP	48 LHP	32 LHP			64 LHP		
6	**01**	**03**	2.02	**04**	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	28 PD	21 PD	14 PD			28 PD		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penegakan Integritas								

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Akhir Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepuluan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2025	2023	2025	2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengawasan**		**Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kualitas Pengawasan	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel**		**Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah**	**CC (55,00)**	**B (65,00)**	**B (70,00)**	**BB (75,00)**	**BB (80,00)**	**BB (80,00)**
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Lalu		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (Tahun n)	2025 (Tahun n+1)	2026 (Tahun n+2)	2023 (Tahun n-2)	2024 (Tahun n-1)	2025 (Tahun n)	2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas**	-	-	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	
2	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	-	-	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%	63,80%	60,01%	66,00%	66,00%	
3	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	-	-	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	83,80%	83,80%	82,1%	90,00%	
4	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	
5	**Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah Daerah**	-	-	**B (65,00)**	**B (70,00)**	**BB (75,00)**	**BB (80,00)**	**BB (80,00)**	**B (64,29)**	**B (74,27)**	**BB (80,00)**	**BB (80,00)**	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	-	-	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	BB (78,02)	BB (72,25)	AA (86,00)	AA (86,00)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong
   - Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022, sehingga diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
   - Mekanisme Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah berorientasi kepada pencapaian kinerja;
   - Adanya kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan, serta komitment bersama pemangku kepentingan dalam bersama-sama mendukung peningkatan Kabupaten Anambas untuk lebih baik dalam segala bidang;
   - Dukungan alokasi anggaran yang baik dan layak merupakan salah satu faktor yang mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan;
   - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah mulai dilaksanankan dengan baik, dan
   - Adanya SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Penghambat
   - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Objek lainnya yang diperiksa;
   - Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mengoptimalkan SAKIP;

- Dan masih terdapat Pemerintah Desa yang lambat dan tidak mengerti dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan, dan terdapat perangkat desa yang belum bisa untuk menyelesaikan rekomendasi temuan atas pimpinan perangkat desa sebelumnya;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan; dan
- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas dan Kinerja Inspektorat Daerah.

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah adalah Lembaga Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Daerah Daerah berdasarkan sinergi pengawasan.

Permasalahan dan Hambatan yang Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

a. Masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan.
b. Masih kurangnya tenaga fungsional auditor dan P2UPD.
c. Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan.

Hambatan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

a. Kurang tanggapnya OPD dalam menindaklanjuti hasil temuan.
b. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
c. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat diikutsertakan pada setiap Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi yang dipegang di luar maupun di dalam Daerah, agar menambah wawasan dan pengetahuan, disamping berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam diri sendiri.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, telah melakukan inovasi daerah berupa digitalisasi penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai suatu website aplikasi yang bernama *Whistleblowing System* yang berfungsi untuk melaporkan dan menginformasikan suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Whistleblower System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak

pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower)* Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini bertujuan untuk menghindari/menekan tingkat penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem integritas pada tiap-tiap instansi pemerintah, dan tentunya diharapkan sebagai upaya pencegahan terjadinya KKN. Hal ini sebagai bentuk komitmen percepatan internalisasi dan proses reformasi birokrasi. Adapun alamat website *whistleblowing system* Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu : **https://wbs.anambaskab.go.id.**

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD

Reviu terhadap Rancangan RKPD, meliputi kegiatan identiikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identiikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20
						INSPEKTORAT DAERAH							**21.628.867.075,00**	**15.337.001.351,00**	**12.388.366.387,76**	
	6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.628.867.075,00**	**15.337.001.351,00**	**12.388.366.387,76**	
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**21.628.867.075,00**	**15.337.001.351,00**	**12.388.366.387,76**	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	17.902.957.313,00	11.852.864.184,87	11.347.657.262,49	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			83,33 (30 Dok) % (Dok)	83,33 (30 Dok) % (Dok)	182.499.998,00	53.513.160,00	53.513.160,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	53.513.160,00	12.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	9.999.998,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.975.000.000,00	9.892.181.931,77	9.892.181.931,77	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9.625.000.000,00	9.775.438.831,77	10.323.873.379,39	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	200.000.000,00	73.860.000,00	24.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	42.883.100,00	9.950.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	100 %	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.000.688.335,00	606.567.200,00	606.567.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.000.001,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	310.688.334,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	56.567.200,00	4.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				130 Orang	130 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	293.455.660,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.207.269.131,00	658.714.934,00	658.714.934,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	2.950.437,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.192.957.465,00	89.187.578,00	52.126.847,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	4.598.419,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	5.061.776,00	4.979.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	75.000.000,00	37.376.740,00	9.160.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	35.240.000,00	6.125.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	539.311.666,00	484.299.984,00	227.086.754,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	2.527.499.848,00	428.659.133,00	428.659.133,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	1.272.499.848,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	275.000.000,00	172.163.024,00	148.416.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	330.000.000,00	202.772.518,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	320.000.000,00	53.723.591,00	53.723.591,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	330.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.590.000.000,00	13.308.518,00	13.308.518,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	20.000.000,00	2.480.000,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	70.000.000,00	6.000.000,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	50.000.000,00	4.828.518,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.450.000.000,00	0,00	87.726.983,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	355.000.001,00	162.491.308,10	162.491.308,10	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	40.000.000,00	8.160.240,00	1.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	70.000.000,00	34.730.000,00	1.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	119.601.068,10	49.724.348,10	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.001,00	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan				83,87% (26 OPD) %/OPD	83,87% (26 OPD) %/OPD	2.282.500.152,00	2.222.269.634,13	635.101.575,01	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			100 %	100 %	1.697.500.152,00	1.849.781.484,13	1.849.781.484,13	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah				84 Laporan	84 Laporan	175.000.000,00	400.426.100,00	50.021.555,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Daerah									
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				25 Laporan	25 Laporan	185.000.000,00	119.899.432,00	114.198.801,05	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja										
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	102.723.400,00	22.078.929,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan										
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	112.972.400,00	19.977.500,01	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	22 Laporan	350.000.000,00	476.260.000,00	56.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal										
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	354.000.000,00	354.000.000,00	98.340.037,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				20 Dokumen	20 Dokumen	283.500.152,00	283.500.152,13	186.215.076,06	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 %	100 %	585.000.000,00	372.488.150,00	372.488.150,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	10 Laporan	235.000.000,00	22.488.150,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	87.594.676,89	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP				80,65% (25 OPD) %/OPD	80,65% (25 OPD) %/OPD	1.443.409.610,00	1.261.867.532,00	405.607.550,26	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			100 %	100 %	260.000.000,00	165.083.833,00	165.083.833,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				83 Rekomendasi	83 Rekomendasi	120.000.000,00	20.856.351,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				60 Rekomendasi	60 Rekomendasi	140.000.000,00	144.227.482,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	-			-	100 %	1.183.409.610,00	1.096.783.699,00	1.096.783.699,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				98 perangkat daerah	98 perangkat daerah	185.300.000,00	185.300.000,00	17.114.472,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				99 perangkat daerah	99 perangkat daerah	175.000.000,00	126.492.000,00	48.247.600,94	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				80 Kegiatan	80 Kegiatan	673.109.610,00	673.109.610,00	338.887.177,32	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	150.000.000,00	111.882.089,00	1.358.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
												JUMLAH	**21.628.867.075,00**	**15.337.001.351,00**	**12.388.366.387,76**	

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah serta tugas pengawasan lain yang diberikan kepala daerah kepada inspektorat daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada pelaksanaan pengawasan serta pembinaan inspektorat daerah masih menemui berbagai hambatan untuk melaksanakan tugas dengan baik, salah satu hambatan tersebut yaitu anggaran yang dimiliki terbatas serta pengendalian internal dari suatu organisasi pemerintah masih lemah. Pelaksanaan tugas yang banyak, perlu adanya dukungan anggaran yang optimal agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan target output tercapai. Selama ini anggaran yang diperlukan untuk melakukan reviu dan pemantauan atas pelaksanaan beban APBD atau APBDes sangat minim dan dirasa sangat kurang. Dalam rangka penguatan inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Surat Kepmendagri No. 700.1.1/8737/SJ perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah tanggal 09 Desember 2022 diberlakukan batas minimal alokasi anggaran pengawasan inspektorat di Pemerintah Daerah yaitu :

a. Sampai dengan Rp1 Triliun paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah;
b. Di atas Rp1 Triliun sampai dengan Rp2 Triliun paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan;
c. Di atas Rp2 Triliun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan Program Kegiatan Pengawasan Tahun Anggaran 2025 secara efektif dan efisien harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) disamping sebagai respon usulan para pemangku kepentingan baik dari Legislatif, Eksekutif, Kelompok Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat haruslah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutkan disampaikan kembali kepada OPD yang terkait terhadap Program dan Kegiatan dimaksud, untuk dimuatkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk dibahas kembali bersama Eksekutif dan Legislatif.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, merupakan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Kepulauan Anambas Priode 2025-2030, khususnya pada Misi ke 3 (tiga) yaitu ***" Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Yang Inovatif".*** Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 39 (tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						INSPEKTORAT DAERAH							21.628.867.075,00	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76							18.188.400.002,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							21.628.867.075,00	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76							18.188.400.002,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							21.628.867.075,00	15.337.001.351,00	12.388.366.387,76							18.188.400.002,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	17.902.957.313,00	11.852.864.184,87	11.347.657.262,49							15.498.400.002,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			83,33 (30 Dok) % (Dok)	83,33 (30 Dok) % (Dok)	182.499.998,00	53.513.160,00	53.513.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		151.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	53.513.160,00	12.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	9.999.998,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	9.975.000.000,00	9.892.181.931,77	9.892.181.931,77			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		9.547.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	9.625.000 .000,00	9.775.438 .831,77	10.323.87 3.379,39	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			9.342.400 .000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	200.000.000,00	73.860.000,00	24.490.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	42.883.100,00	9.950.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	100 %	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.000.688.335,00	606.567.200,00	606.567.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		810.000.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.000.001,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			5.000.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	310.688.334,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	56.567.200,00	4.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				130 Orang	130 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	293.455.660,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.207.269.131,00	658.714.934,00	658.714.934,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		1.355.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	2.950.437,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.192.957.465,00	89.187.578,00	52.126.847,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	4.598.419,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	5.061.776,00	4.979.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	75.000.000,00	37.376.740,00	9.160.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	35.240.000,00	6.125.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	539.311.666,00	484.299.984,00	227.086.754,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	2.527.499.848,00	428.659.133,00	428.659.133,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		1.420.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	1.272.499.848,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	275.000.000,00	172.163.024,00	148.416.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	330.000.000,00	202.772.518,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	320.000.000,00	53.723.591,00	53.723.591,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	330.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.590.000.000,00	13.308.518,00	13.308.518,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		1.630.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	20.000.000,00	2.480.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	70.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	50.000.000,00	4.828.518,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.450.000.000,00	0,00	87.726.983,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			1.450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	355.000.001,00	162.491.308,10	162.491.308,10			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		535.000.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	40.000.000,00	8.160.240,00	1.740.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	70.000.000,00	34.730.000,00	1.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	119.601.068,10	49.724.348,10	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.001,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			5.000.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan				83,87 % (26 OPD) %/OPD	83,87 % (26 OPD) %/OPD	2.282.500.152,00	2.222.269.634,13	635.101.575,01							1.400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			100 %	100 %	1.697.500.152,00	1.849.781.484,13	1.849.781.484,13			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				84 Laporan	84 Laporan	175.000.000,00	400.426.100,00	50.021.555,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				25 Laporan	25 Laporan	185.000.000,00	119.899.432,00	114.198.801,05	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	102.723.400,00	22.078.929,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	112.972.400,00	19.977.500,01	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	22 Laporan	350.000.000,00	476.260.000,00	56.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	354.000.000,00	354.000.000,00	98.340.037,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				20 Dokumen	20 Dokumen	283.500.152,00	283.500.152,13	186.215.076,06	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 %	100 %	585.000.000,00	372.488.150,00	372.488.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	10 Laporan	235.000.000,00	22.488.150,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	87.594.676,89	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP				80,65 % (25 OPD) %/OPD	80,65 % (25 OPD) %/OPD	1.443.409.610,00	1.261.867.532,00	405.607.550,26							1.290.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			100 %	100 %	260.000.000,00	165.083.833,00	165.083.833,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		290.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				83 Rekomendasi	83 Rekomendasi	120.000.000,00	20.856.351,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			145.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				60 Rekomendasi	60 Rekomendasi	140.000.000,00	144.227.482,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			145.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	-			-	100 %	1.183.409.610,00	1.096.783.699,00	1.096.783.699,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				98 perangkat daerah	98 perangkat daerah	185.300.000,00	185.300.000,00	17.114.472,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				99 perangkat daerah	99 perangkat daerah	175.000.000,00	126.492.000,00	48.247.600,94	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				80 Kegiatan	80 Kegiatan	673.109.610,00	673.109.610,00	338.887.177,32	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	150.000.000,00	111.882.089,00	1.358.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH												**21.628.867.075,00**	**15.337.001.351,00**	**12.388.366.387,76**							**18.188.400.002,00**	

BAB IV

P E N U T U P

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat. Kaidah Pelaksanaan Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan resiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas terpilih sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
2. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
3. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
4. Menyesuaikan target nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal sesuai ketentuan terbaru;
5. Melibatkan seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam membahas capaian kinerja yang telah direncanakan supaya seluruh pegawai paham, peduli dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
6. Laporan Kinerja yang disusun agar direviu oleh tim internal untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas;
7. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya baik oleh Inspektur Daerah maupun seluruh pegawai;
8. Evaluasi AKIP agar bisa menggunakan Teknologi Informasi;
9. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;

10. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
11. Pemenuhan dan Penguatan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara kualitas dan kuantitas;
12. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
13. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai;
14. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati;
15. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
16. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/instansi vertikal dan pemberi rekomendasi;
18. Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini disusun.

Tarempa, 16 Juli 2025

Inspektur Daerah,

YUNIZAR, SE., M.P., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA
RENJA 2025
BAPPEDA

ENERGI BARU ANAMBAS MAJU

Bappeda Kab. Kepulauan Anambas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Prepared By :

Bappeda
Kab. Kep. Anambas

+62-812-7730-7410

bappeda@anambaskab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
KATA PENGANTAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	5
	2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD	17
	3.2 Program dan Kegiatan	18
	3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB IV	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di lingkungan Bappeda	5
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Bappeda	5
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	7
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2025	15
Tabel 3.3	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2025	21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2024 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perangkat Daerah (PD) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada penetapan Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan Renja akan berfungsi sebagai pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD. Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja ini, dapat dilihat sejauh mana kinerja PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja ini, sangat diharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 17 Juli 2025

Kepala Bappeda

Kab. Kep. Anambas

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I

NIP. 19820701 201001 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap PD menyusun dan memiliki Perubahan Renja PD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Renstra PD sehingga Perubahan Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda sesuai arahan operasional dalam Perubahan RKPD;
2. Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan sebagaimana tindaklanjut dalam KUA dan PPAS dan perencanaan penganggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam R-PAPBD tahun 2025;
3. Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Bappeda untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh PD.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

"Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul Di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera".

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kab. Kep. Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kab. Kep. Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kab. Kep. Anambas;
8. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kep. Anambas (Lembaran Daerah Kab. Kep. Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kab. Kep. Anambas 2025-2029;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kab. Kep. Anambas selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini Memuat pelaksanaan capaian program/kegiatan, realisasi keuangan dan fisik Bappeda sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renja Bappeda, program/kegiatan Bappeda, dan rencana kerja dan pendanaan Bappeda yang berisikan program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan pembangunan, dan urusan penelitian dan pengembangan. Perencanaan yang responsif gender mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan tugas, Bappeda memiliki sejumlah 65 orang pegawai baik PNS maupun non PNS. Adapun informasi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di lingkungan Bappeda

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	1
3	Eselon IV	1	-
4	Fungsional dan Pelaksana	12	6
TOTAL		**18**	**7**

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Bappeda

No	Penempatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	8	10
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	4
3	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	4	2
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan	1	2
5	Bidang Riset Dan Inovasi Daerah	3	3
Total		**19**	**21**

Guna mendukung kebijakan yang berspektif gender maka diperlukan data mengenai persebaran pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dilingkungan Bappeda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 bahwa adanya keterwakilan perempuan pada pejabat di lingkungan

Bappeda. Selain itu, pada Tabel 2.2 terlihat penyebaran yang merata untuk penempatan kerja berdasarkan jenis kelamin.

Adapun alokasi anggaran belanja Bappeda pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.10.981.679.037,60 Dengan 4 (Empat) program, 15 kegiatan, dan 49 sub kegiatan. Adapun realisasi belanja Bappeda sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN			FISIK			
					REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		KAS	DPA
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.255.118.451**	**55,21**	**4.062.753.641**	**2.197.130.759**	**109**	**14,74**		**26,64**	**0,00**	**5.928.376.523**
1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**606.645.126**	**4,07**	**303.322.563**	**223.989.800**	36,92	**1,50**		**2,04**		**382.655.326**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	580.855.126	3,90	290.427.563	223.989.800	38,56	1,50	50,00	1,95		356.865.326
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.790.000	0,17	12.895.000	-	0,00	0,00	50,00	0,09		25.790.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.634.861.422**	**44,52**	**3.317.430.711**	**1.778.853.664**	26,81	**11,94**		**22,29**		**4.856.007.758**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.369.161.542	42,74	3.184.580.771	1.738.393.664	27,29	11,67	50,00	21,37		4.630.767.878
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	257.280.000	1,73	128.640.000	40.460.000	15,73	0,27	50,00	0,86		216.820.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.419.880	0,06	4.209.940	-	0,00	0,00	100,00	0,06		8.419.880
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**582.011.764**	**3,91**	**291.005.882**	**135.191.733**	23,23	**0,91**		**1,85**		**446.820.031**
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.236.634	0,08	5.618.317	-	0,00	0,00	0,00	0,00		11.236.634
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.703.581	0,57	42.351.791	5.436.150	6,42	0,04	50,00	0,28		79.267.431
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.552.913	0,14	10.276.457	-	0,00	0,00	0,00	0,00		20.552.913
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.197.000	0,63	47.098.500	3.400.000	3,61	0,02	50,00	0,32		90.797.000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.780.000	0,42	31.390.000	1.681.000	2,68	0,01	50,00	0,21		61.099.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000	0,00	50.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.441.636	1,95	145.220.818	124.674.583	42,93	0,84	50,00	0,97		165.767.053
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	0,12	9.000.000	-	0,00	0,00	50,00	0,06		18.000.000
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**143.899.875**	**0,78**	**71.949.937**	**-**	0,00	**0,00**		**0,00**		**143.899.875**
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.900.000	0,78	58.450.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00		116.900.000
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.999.875	0,18	13.499.937	-	0,00	0,00	50,00	0,00		26.999.875
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**271.260.619**	**1,82**	**70.824.725**	**59.095.562**	21,79	**0,40**		**0,47**		**82.553.888**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0,02	1.250.000	2.000.000	80,00	0,01	20,00	0,00		500.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.149.450	0,93	69.574.725	57.095.562	41,03	0,38	50,00	0,47		82.053.888
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.611.169	0,87	64.805.585	129.611.169	100,00	0,87	100,00	0,87		-
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.439.645**	**0,11**	**8.219.823**	**-**	0,00	**0,00**		**0,00**		**16.439.645**
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.560.025	0,04	3.280.013	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00		6.560.025
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.879.620	0,07	4.939.810	-	0,00	**0,00**	0,00	0,00		9.879.620
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.552.513.326**	**17,13**	**1.276.256.663**	**558.073.510**	21,86	**3,74**		**9,77**		**1.994.439.816**
7	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.242.924.920**	**15,05**	**1.121.462.460**	**300.565.920**	13,40	**2,02**		**7,88**		**1.942.359.000**
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	303.082.760	2,03	151.541.380	62.799.740	20,72	**0,42**	53,59	1,09		240.283.020
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.939.842.160	13,02	969.921.080	237.766.180	12,26	**1,60**	52,20	6,79		1.702.075.980
8	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**22.698.600**	**0,15**	**11.349.300**	**-**	0,00	**0,00**		**0,08**		**22.698.600**
23	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	22.698.600	0,15	11.349.300	-	0,00	**0,00**	50,00	0,08		22.698.600
9	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**286.889.806**	**1,93**	**143.444.903**	**257.507.590**	89,76	**1,73**		**1,81**		**29.382.216**
24	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	286.889.806	1,93	143.444.903	257.507.590	89,76	**1,73**	93,88	1,81		29.382.216

3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**173.847.260**	**1,17**	**86.923.630**	**-**	0,00	**0,00**		**0,58**		**173.847.260**
10	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**91.685.000**	**0,62**	**45.842.500**	**-**	0,00	**0,00**		**0,31**		**91.685.000**
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.276.000	0,15	11.138.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,07		22.276.000
26	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.748.400	0,06	4.374.200	-	0,00	**0,00**	50,00	0,03		8.748.400
27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.450.000	0,03	2.225.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,01		4.450.000
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.915.600	0,10	7.457.800	-	0,00	**0,00**	50,00	0,05		14.915.600
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.970.000	0,17	12.985.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,09		25.970.000
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.325.000	0,10	7.662.500	-	0,00	**0,00**	50,00	0,05		15.325.000
11	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**32.272.490**	**0,22**	**16.136.245**	**-**	0,00	**0,00**		**0,11**		**32.272.490**
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.695.020	0,09	6.347.510	-	0,00	**0,00**	50,00	0,04		12.695.020
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.862.270	0,11	7.931.135	-	0,00	**0,00**	50,00	0,05		15.862.270
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.715.200	0,02	1.857.600	-	0,00	**0,00**	50,00	0,01		3.715.200
12	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**49.889.770**	**0,33**	**24.944.885**	**-**	0,00	**0,00**		**0,17**		**49.889.770**
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.687.960	0,13	9.343.980	-	0,00	**0,00**	50,00	0,06		18.687.960

35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.003.810	0,11	8.501.905	-	0,00	**0,00**	50,00	0,06		17.003.810
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.100.000	0,03	2.050.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,01		4.100.000
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.098.000	0,07	5.049.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,03		10.098.000
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**200.000**	**0,00**	**100.000**	**-**	0,00	**0,00**		**0,00**		**200.000**
13	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100.000**	**0,00**	**50.000**	**-**	0,00	**0,00**		**0,00**		**100.000**
38	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100.000	0,00	50.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,00		100.000
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000	0,00	**50.000**	**-**	0,00	**0,00**		**0,00**		**100.000**
39	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.000	0,00	50.000	-	0,00	**0,00**	50,00	0,00		100.000
	TOTAL	**10.981.679.038**	**73,51**	**5.426.033.934**	**2.755.204.269**		**18,49**		**36,99**		

KAYUH SERENTAK LANGKAH SEPIJAK

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program, dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kep. Kep. Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kep. Kep. Anambas masih belum optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Frofesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kep. Kep.Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kep. Kep.Anambas dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan menuju lebih baik ;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;

4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
5. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah`

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;
3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kep. Kep.Anambas Tahun 2025-2029, maka strategi dan kebijakan berdasarkan indicator kinerja yang dilaksanakan pada Renja Bappeda Kep. Kep.Anambas adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
   - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
   - Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
   - Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
   - Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
   - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bappeda dalam rangka mewujudkan *open governace* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.

4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   - Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas melalui Bappeda Kep. Kep.Anambas dalam melaksanakan pembangunan yang terintergrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi melakukan inovasi, inovasi dan terobosan, terobosan dalam perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
   - Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kep. Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Bappeda yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi yang harus didukung oleh Bappeda Kep. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 adalah :

"Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul Di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera".

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Pada RPJMD Kep. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabuapaten Kepulauan Anambas, peran Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencana pembangunan;
3. Membangun kerjasama yang sinergis internal dan eksternal serta melakukan pengendalian perencanaan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan;
4. Mengembangkan kajian, penelitian sebagai ketersediaan data informasi yang akurat penunjang perencanaan dan pembangunan;
5. Mendorong terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Open Governance*.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Bappeda Kep. Kep. Anambas Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (%)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Indeks perencanaan	93,33	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	80
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Indeks RB Bappeda	B (69)	Manajamen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (82)
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahaan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	83,33	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	67,74

3.2 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Rp**	**10.981.679.038**
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Rp**	**10.981.679.038**
	5	**01**				**PERENCANAAN**	**Rp**	**10.981.479.038**
1	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp**	**8.255.178.932**

	5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.187.483.544**
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
							Rp	580.855.126
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							Rp	25.790.000
	5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**7.935.317.463**
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
							Rp	6.411.161.542
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
							Rp	257.280.000
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
							Rp	8.419.880
	5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**215.689.894**
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
							Rp	-
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
							Rp	-
	5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.116.466.792**
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
							Rp	11.236.634
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
							Rp	84.703.581
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
							Rp	20.552.913
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
							Rp	89.137.000
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
							Rp	62.780.000
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
							Rp	100.000
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
							Rp	290.441.636
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
							Rp	18.000.000
	5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp**	**800.654.384**
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							Rp	-

	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		
							Rp	-
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							Rp	116.900.000
	5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**189.081.800**
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
							Rp	2.500.000
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
							Rp	139.149.450
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
							Rp	129.611.169
	5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**96.288.178**
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							Rp	1.560.000
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		
							Rp	-
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							Rp	5.000.000
2	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**2.552.452.846**
	5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Rp**	**2.126.067.200**
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
							Rp	-
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
							Rp	303.022.280
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
							Rp	-
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
							Rp	1.939.842.160
	5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**93.284.420**
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
							Rp	22.698.600
	5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**152.515.580**
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		

							Rp	286.889.806
3	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp**	**173.847.260**
	5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rp**	**382.048.515**
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							Rp	22.276.000
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
							Rp	8.748.400
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
							Rp	4.450.000
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							Rp	14.915.600
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
							Rp	25.970.000
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
							Rp	15.325.000
	5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Rp**	**179.548.310**
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							Rp	-
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
							Rp	12.695.020
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
							Rp	-
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							Rp	15.862.270
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
							Rp	3.715.200
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
							Rp	-
	5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Rp**	**254.766.810**
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

							Rp	18.687.960
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
							Rp	17.003.810
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
							Rp	4.100.000
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
							Rp	10.098.000
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
							Rp	-
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
							Rp	-
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Rp**	**200.000**
4	**5**	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp**	**200.000**
	5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Rp**	**135.142.813**
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
							Rp	100.000
	5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Rp**	**1.673.971.800**
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
							Rp	100.000
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
							Rp	-
						J U M L A H	**Rp**	**10.981.679.038**

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Bappeda pada perubahan RKPD adalah sebesar Rp.10.981.679.038,- sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**15.686.795.791,00**	**16.538.327.502,25**	**10.981.679.037,60**	**-4.705.116.753,40**							**17.553.785.421,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.686.795.791,00**	**16.538.327.502,25**	**10.981.679.037,60**	**-4.705.116.753,40**							**17.553.785.421,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**14.966.795.791,00**	**14.729.212.889,25**	**10.981.479.037,60**	**-3.985.316.753,40**							**17.053.785.421,00**	
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**90 %**	**90 %**	**12.492.124.096,00**	**11.540.982.054,12**	**8.255.118.451,20**	**1.661.864.174,00**							**14.153.988.270,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan*				100 %	100 %	791.010.745,00	1.187.483.544,00	606.645.126,00	-184.365.619,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		33.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	432.165.700,00	1.062.462.544,00	580.855.126,00	148.689.426,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			26.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	358.845.045,00	125.021.000,00	25.790.000,00	-333.055.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD*				100 %	100 %	6.760.119.417,00	7.935.317.462,53	6.634.861.422,42	-125.257.994,58			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		6.521.728.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	6.373.159.417,00	7.598.037.462,53	6.369.161.542,42	-3.997.874,58	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			6.074.724.591,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	306.960.000,00	257.280.000,00	257.280.000,00	-49.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			342.748.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	8.419.880,00	-71.580.120,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			104.255.899,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu*				100 %	100 %	210.036.000,00	215.689.893,59	0,00	-210.036.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		395.493.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	159.380.000,00	79.689.893,00	0,00	-159.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			147.115.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	38 Orang	50.656.000,00	136.000.000,59	0,00	-50.656.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			248.377.910,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE*				100 %	100 %	1.059.942.959,00	1.116.466.792,00	582.011.764,18	-477.931.194,82			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		2.810.355.922,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	47.192.130,00	35.316.885,00	11.236.634,00	-35.955.496,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			6.752.163,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	51.794.279,00	106.032.902,00	84.703.581,00	32.909.302,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			113.695.351,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	31.516.936,00	33.266.731,01	20.552.913,00	-10.964.023,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			29.508.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				935 Paket	935 Paket	53.124.762,00	123.176.067,99	94.197.000,00	41.072.238,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			185.232.608,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.529.852,00	99.668.206,00	62.780.000,00	11.250.148,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			115.930.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			131.769.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	683.785.000,00	642.006.000,00	290.441.636,18	-393.343.363,82	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			1.979.902.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	136.000.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	-118.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			247.566.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	1.548.661.161,00	800.654.384,00	143.899.874,60	-1.404.761.286,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		1.484.597.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	154.460.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	652.156.798,00	343.835.423,00	0,00	-652.156.798,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	496.504.363,00	302.358.961,00	116.900.000,00	-379.604.363,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			457.597.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	26.999.874,60	26.999.874,60	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya*				100 %	100 %	1.978.315.794,00	189.081.800,00	271.260.619,00	-1.707.055.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		2.710.191.285,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	14.130.000,00	2.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			13.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.634.858,00	174.951.800,00	139.149.450,00	18.514.592,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			135.435.716,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.830.680.936,00	0,00	129.611.169,00	-1.701.069.767,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			2.561.445.569,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya*				100 %	100 %	144.038.020,00	96.288.178,00	16.439.645,00	-127.598.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lingkup Bappeda		198.346.433,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KAYUH SERENTAK LANGKAH SEPUJAK

	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	78.038.020,00	60.868.178,00	6.560.025,00	-71.477.995,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			58.374.333,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	36.000.000,00	35.420.000,00	9.879.620,00	-26.120.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			91.972.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD**				**100 %**	**100 %**	**1.518.491.185,00**	**2.371.867.200,00**	**2.552.513.326,40**	**-96.635.285,00**							**1.421.855.900,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten*				100 %	100 %	1.334.574.585,00	2.126.067.200,00	2.242.924.920,40	908.350.335,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarkat		1.175.081.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.250.000,00	3.880.000,00	0,00	-11.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			16.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	227.869.500,00	426.101.840,00	303.082.760,40	75.213.260,40	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			247.869.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				10 Usulan	10 Usulan	54.180.000,00	44.972.000,00	0,00	-54.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			86.161.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	1.041.275.085,00	1.651.113.360,00	1.939.842.160,00	898.567.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			825.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah Persentase ketersediaan data untuk perencanaan*				80 %	80 %	40.172.000,00	93.284.420,00	22.698.600,00	-17.473.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarkat		60.974.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				38 Orang	38 Orang	40.172.000,00	93.284.420,00	22.698.600,00	-17.473.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			60.974.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya*				85 %	85 %	143.744.600,00	152.515.580,00	286.889.806,00	143.145.206,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarkat		185.799.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	143.744.600,00	152.515.580,00	286.889.806,00	143.145.206,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			185.799.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas**				**94 %**	**94 %**	**956.180.510,00**	**816.363.635,13**	**173.847.260,00**	**521.760.741,00**							**1.477.941.251,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*				100 %	100 %	515.685.200,00	382.048.515,13	91.685.000,00	-424.000.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		533.871.663,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	124.926.000,00	123.998.174,00	22.276.000,00	-102.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			146.873.612,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	45.734.800,00	38.080.404,13	8.748.400,00	-36.986.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			71.484.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	56.875.000,00	16.875.200,00	4.450.000,00	-52.425.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			44.709.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	135.576.000,00	125.431.000,00	14.915.600,00	-120.660.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			116.340.048,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	86.198.400,00	45.630.437,00	25.970.000,00	-60.228.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			86.949.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	66.375.000,00	32.033.300,00	15.325.000,00	-51.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			67.514.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA*				100 %	100 %	185.954.810,00	179.548.310,00	32.272.490,00	-153.682.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		355.502.719,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.667.500,00	43.792.000,00	0,00	-11.667.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			107.668.946,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	43.792.000,00	10.261.000,00	12.695.020,00	-31.096.980,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			43.478.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	14.410.000,00	14.410.000,00	0,00	-14.410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			69.689.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	54.918.310,00	43.792.000,00	15.862.270,00	-39.056.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			56.248.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	43.792.000,00	54.918.310,00	3.715.200,00	-40.076.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			16.126.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	17.375.000,00	12.375.000,00	0,00	-17.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			62.290.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan*				100 %	100 %	254.540.500,00	254.766.810,00	49.889.770,00	-204.650.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		588.566.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	89.721.800,00	149.721.800,00	18.687.960,00	-71.033.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			122.672.946,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	62.692.000,00	32.899.110,00	17.003.810,00	-45.688.190,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			55.578.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	48.675.000,00	18.675.000,00	4.100.000,00	-44.575.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			81.789.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.896.700,00	12.056.810,00	10.098.000,00	-9.798.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			61.572.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	2.975.000,00	10.834.090,00	0,00	-2.975.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			207.790.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	30.580.000,00	30.580.000,00	0,00	-30.580.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			59.162.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**720.000.000,00**	**1.809.114.613,00**	**200.000,00**	**-719.800.000,00**							**500.000.000,00**	
1,	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan**				**82 %**	**82 %**	**720.000.000,00**	**1.809.114.613,00**	**200.000,00**	**-220.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan*				80 %	80 %	135.000.000,00	135.142.813,00	100.000,00	-134.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stake Holder dan Pemangku Kepentingan		185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	135.142.813,00	100.000,00	-134.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan*				70 %	70 %	585.000.000,00	1.673.971.800,00	100.000,00	-584.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarkat		315.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	1.556.800.000,00	100.000,00	-384.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	117.171.800,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**15.686.795.791,00**	**16.538.327.502,25**	**10.981.679.037,60**	**-4.705.116.753,40**							**17.553.785.421,00**	

Jumlah Program : 4 program
Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 49 Sub Kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi beserta sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian dan sinkronisasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat melalui monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Rancangan Akhir Perubahan Renja juga diharapkan mampu memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 17 Juli 2025

Kepala Bappeda

Kab. Kep. Anambas

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk.I

NIP. 19820701 201001 1 019

bkpsdm
anambas

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



MORE INFO

Jalan Raja Haji Fisabilillah Pasi Peti

bkpsdm.anambaskab@gmail.com

bkpsdm.anambaskab

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir Perubahan Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan acuan perencanaan perangkat daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran pertahun dari Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Besar harapan kami semoga Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini bermanfaat dalam mendukung dan mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA,

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II 6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 6
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6
2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 21
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 27
BAB III 28
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28
BAB IV 34
PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kepegawaian BKPSDM pada khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menegah dan tahunan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Rankhir Perubahan Renja PD) merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerahuntuk satu tahun anggaranyang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaannya.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan penjabaran dan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen kepegawaian. Diharapkan dari perencanaan tersebut, akan lahir aparatur yang kompeten, berintegritas, tepat guna, berdaya saing, maju dan tentunya juga dengan mengedepankan aspek akhlakul karimah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja-PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Selain itu

untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Akhir Perubahan Renja memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Seluruh kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selalu mengutamakan dan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai landasan hukum pada penyusunan Rancangan Perubahan Renjaini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ter dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ter dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta guna memadupadankan, menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program dan kegiatan dalam rangka menjamin integrasi, singkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Sedangkan tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja adalah sebagai pedoman untuk mengoptimalkan kinerja dalam satu tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja K/L dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBDP.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja-PD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 33 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan. Dari total anggaran yang berjumlah Rp. 7.426.583.467,11 besaran realisasi keseluruhan adalah 2.709.719.741,00 atau serapan dana APBD mencapai 36,49%. Berdasarkan dari Target yang telah ditetapkan pada awal tahun, maka evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi belanja langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan s.d Triwulan II Tahun 2025

NO			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA Rp	PROGRES/PERKEMBANGAN		
					KEUANGAN		FISIK
					Rp	(%)	(%)
1			2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.543.627.684,11**	**2.450.847.241,00**	**33,45**	**42,39**
	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.251.000**	**0**	**0**	**0**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	0	0	0
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000	0	0	0
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.310.707.861,91**	**2.336.681.541**	**31,46**	**35,20**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.124.993.862	2.310.225.541	31,11	57,14
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.714.000	26.456.000	0,36	41,67

	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**145.953.878,00**	**58.089.000,00**	**0,78**	**2,72**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	-	50,00
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.694.228	4.691.000	0,06	50,00
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.995.000	6.660.000	0,09	50,00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.052.800	630.000	0,01	50,00
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	-	50,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.310.600	46.108.000	0,62	50,00
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.901.250	0	-	50,00
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**16.503.169,20**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00
		2	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	100,00
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.503.169,20	0,00	0,00	100,00
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**57.076.700**	**55.576.700,00**	**0,76**	**4,16**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0,01	50,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000	1.000.000	0,01	50,00
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.076.700	54.076.700	0,73	50,00
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**11.135.075**	**0,00**	**0,00**	**0,13**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.135.075	0,00	0,00	50,00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	50,00
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**848.002.205,00**	**258.872.500,00**	**3,49**	**6,46**
	6	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**319.419.305,00**	**185.657.500 ,00**	**2,50**	**1,76**
		1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	275.168.305	184.957.500	2,49	50,00
		2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.000	0	-	00,00
		3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.250.000	700.000	0,01	73,80

	7	**Mutasi dan Promosi ASN**		**390.875.400**	**1.040.000,00**	**0,01**	**2,50**
		1	Pengelolaan Mutasi ASN	390.874.400	1.040.000,00	0,01	99,25
		2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.000	0,00	0,00	50,00
	8	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,81**	**1,46**
		1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,81	89,07
	9	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**77.707.500,00**	**12.175.000,00**	**0,16**	**0,74**
		1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.772.500	1.225.000,00	0,02	47,00
		2	Pembinaan Disiplin ASN	71.935.000	10.950.000,00	0,15	47,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**34.953.578,00**	**0,00**	**0,00**	**6,81**
	10	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**34.953.578,00**	**0,00**	**0,00**	**6,81**
		1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	34.953.578,00	0,00	0,00	6,81
JUMLAH TOTAL				**7.426.583.467,11**	**2.709.719.741,00**	**36,49**	**55,66**

Tabel 2.2 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Perubahan RenjaPerangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2016-2021) (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Reliasasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	
5.03.01.2.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	100%	24 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	
5.03.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	
5.03.01.2.02.05	Sub Kegiatan :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	3 Laporan	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
5.03.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	80%
5.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	3	3	3	0	0	0	
5.03.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0	0	0	0	0	0	
5.03.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0	0	0	0	3 Paket	0	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	13 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	4 Paket	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.06	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

5.03.01.2.07.01	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	4 Unit	
5.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	0	
5.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0	15 Unit	
5.03.01.2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
5.03.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	
5.03.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
5.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	63 Unit	
5.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	94 Unit	
5.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	2 Unit	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	86%	67%	67%	67%	100%	74%	74%	87%
	Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	86%	67%	67%	67%	100%	74%	74%	87%

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100%	250 Dokumen	1000 Dokumen	
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	0 Lembaga	6 Lembaga	
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	
	Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN	80%	76%	76%	76%	100%	78%	76%	95%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.282 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100%	220 Dokumen	952 Dokumen	
	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	25 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	289 Orang	15 Orang	80%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	2 Orang	15 Orang	
	Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik	96%	94%	94%	94%	100%	95%	94%	97%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	120 Orang	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	65%	57%	57%	57%	100%	61%	57%	87%
	Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	65%	57%	57%	57%	100%	61%	57%	87%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	

Dari tabel T-C.29 dapat dijelaskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 belum bisa dilakukan evaluasi realisasi program/kegiatan/sub kegiatan karena Tahun 2025 merupakan tahun berjalan Renja yang mana capaian realisasi belum dapat diukur. Dalam hal ini hanya dapat melakukan perbandingan antara target Renstra dan target renja Tahun 2024, yakni antara lain :

1. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja yang tidak memenuhi target Renstra dikarenakan adanya efisiensi dan refocusing anggaran
2. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja hampir sebagain besar memenuhi target renstra
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2026 untuk diadakan kembali program/kegiatan yang tidak terealisasi di Tahun 2025.

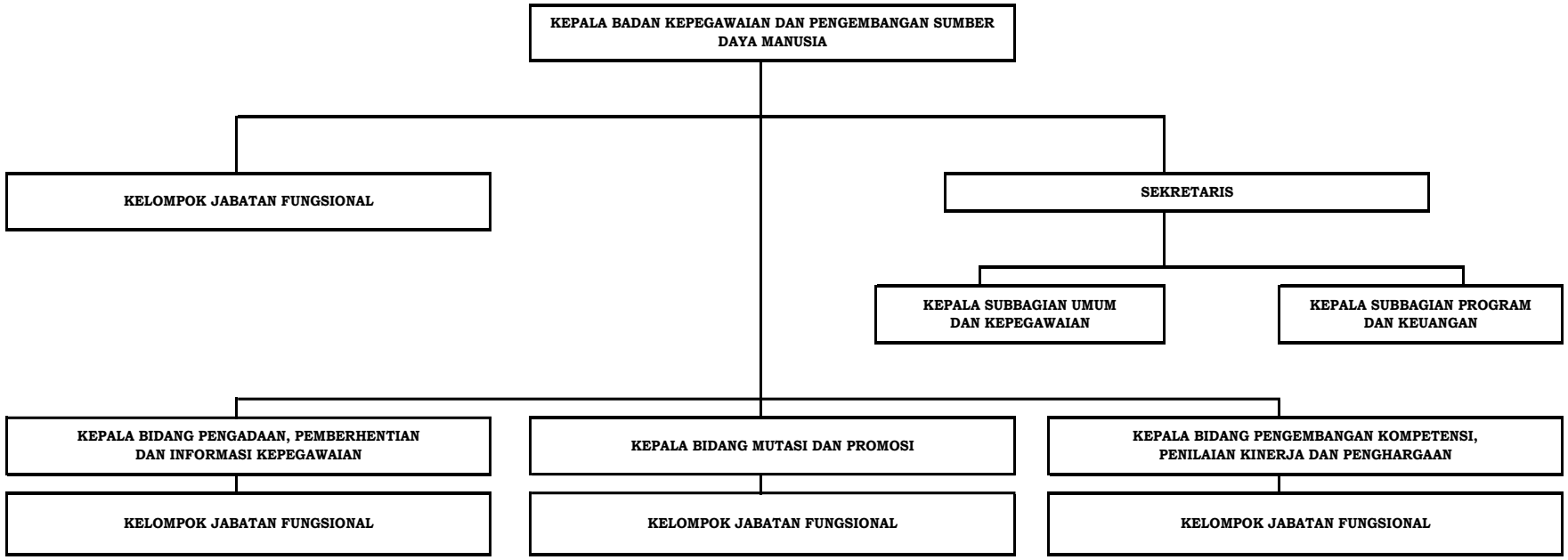
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 7 jabatan struktural dan rumpun jabatan fungsional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, dan pengembangan kompetensi ASN serta tugas pembantuan yang yang diberikan kepala Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaa dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPSDM;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPSDM;
7. Pengawasan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lembaga teknis daerah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dengan dibantu :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal BKPSDM;
b. Melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis, pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan BKPSDM;
d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
e. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
f. Menyiapkan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BKPSDM;
i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup BKPSDM;
b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BKPSDM;
c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BKPSDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menyusun perencanaan strategis BKPSDM;
e. Menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional BKPSDM;
f. Menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
g. Menyusun laporan kinerja BKPSDM;
h. Menyusun indikator kinerja utama BKPSDM;
i. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja Individu ASN di lingkup BKPSDM;
j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BKPSDM;
k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BKPSDM;
l. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
m. Melakukan koordinasi penggunaan anggaran BKPSDM;
n. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
o. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Program dan Keuangan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian. Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi dan promosi. Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan. Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi. Koordinator atau subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada setiap pengelompokan uraian fungsi.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan uraian di atas maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 (T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks profesionalitas ASN	-	-	47	50	54	57	60	49,56	49,94	54	57	60	
2	Indeks Sistem Merit	-	-	280	285	286	287	288	285	270,5	286	287	288	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	51,78 (CC)	62,00 (B)	64,00 (B)	66,00 (B)	68,00 (B)	64,77 (B)	64,54 (B)	64,00 (B)	66,00 (B)	68,00 (B)	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-	78,85 (B)	82,26 (A)	83,48 (A)	84,50 (A)	85,64 (A)	81,29 (A)	73,06 (BB)	83,48 (A)	84,50 (A)	85,64 (A)	
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	78,93 (B)	79,13 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Perubahan Renja) BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN;
2. Pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK terkait penyelesaian penataan pegawai Non-ASN;
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelengaraan Diklat/Bimtek/Workshop dan lain-lain;
4. Tuntutan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Pelaksanaan Sistem Merit dan Manajemen Talenta

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD dan kondisi eksisting untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan maka dalam menindaklajuti isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi aparatur harus terus dilanjutkan demi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti pemberian bantuan pendidikan dan tugas belajar serta Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan. Diklat penunjang tugas dan fungsi aparatur perlu dianggarkan kembali dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja;
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
4. Pengadaan ASN yang terdiri dari CPNS dan PPPK dimana khusus untuk formasi PPPK berfokus pada penyelesaian status tenaga Non ASN;

5. Perlunya pengembangan kompetensi jabatan fungsional khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada formasi teknis;
6. Khusus untuk pengembangan kompetensi manajerial perlu dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) bagi pejabat pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi.Khusus untuk pengganggaran pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk diklatpim perlu diprioritaskan karena dapat berdampak terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan capaian visi dan misi kepala daerah;
7. Pengadaan fasilitas *Computer Assisted Test* (CAT) perlu diprioritaskan dalam usulan kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung pengadaan Seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pendukung terlaksananya kegiatan lainnya seperti ujian sertifikasi dan diklat bagi aparatur;
8. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi setiap tingkatan jabatan secara transparan, adil, dan bebas intervensi perlu untuk dilakukan guna mewujudkan pejabat yang berkompetensi.

Selain isu-isu penting yang telah diuraikan diatas Agenda kegiatan tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian adalah terkait Arah kebijakan untuk pemenuhan ASN yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar dan berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, dimana dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan dalam Pasal 66 agar penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024, yang artinya tidak ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya tahun 2025 di Pemerintahan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan alokasi pemenuhan ASN sebanyak 3.911 formasi yang terdiri dari 158 formasi CPNS dan 3.753 formasi PPPK, dimana seluruh formasi PPPK yang dibuka diperuntukan bagi pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagaimana kesepakatan Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN, seleksi pengadaan ASN yang dilaksanakan pada tahun 2024, kemudian akan ditetapkan menjadi PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu yang secara bertahap diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah pada tahun 2025.

Agenda selanjutnya yang diupayakan lebih optimal adalah pelaksanaan inovasi daerah, dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial untuk diintegrasikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu inovasi terkait manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

dengan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dimana aplikasi ini merupakan Replika Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ini merupakan Implementasi dari Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik khususnya dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah, sebagai wujud dalam pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) BKPSDM melaksanakan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui pengintegrasian perspektif gender pada setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan..

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan Tahun 2024, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Secara umum rumusan program dan kegiatan serta kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Unsur Penunjang urusan Permerintahan				**7.426.583.467,11**	**Unsur Penunjang urusan Permerintahan**				**7.575.023.467,11**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**6.543.627.684**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**6.543.627.684**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**2.251.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**2.251.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.250.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.310.707.862**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.310.707.862**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	6.124.993.861,91	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	6.124.993.861,91	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.714.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.714.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0%**	**0,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**0,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**145.953.878**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**145.953.878**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.901.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.901.250	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.694.228	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.694.228	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.995.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.995.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.052.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.052.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.310.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.310.600	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**16.503.169,20**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**16.503.169,20**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.503.169,20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.503.169,20	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**57.076.700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**57.076.700**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.076.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.076.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**11.135.075**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**11.135.075**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	11.135.075	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	11.135.075	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0	
	Program Kepegawaian Daerah		**Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab**	**74%**	**848.002.205**	**Program Kepegawaian Daerah**		**Persentase jumlah pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab**	**74%**	**996.442.205**	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		**Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan**	**74%**	**319.419.305**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**		**Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan**	**74%**	**319.419.305**	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	275.168.305	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	275.168.305	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	1.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	1.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	44.250.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	44.250.000	
	Mutasi dan Promosi ASN		**Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN**	**80%**	**390.875.400**	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN**	**78%**	**539.315.400**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	390.874.400	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	539.314.400	**Kebutuhan Anggaran Guna Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen	1.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen	1.000	

	Pengembangan Kompetensi ASN		**Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan**	**1 Orang**	**60.000.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan**	**1 Orang**	**60.000.000**	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	60.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	60.000.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Persentase Aparatur Berkinerja Baik**	**96%**	**77.707.500**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Persentase Aparatur Berkinerja Baik**	**92%**	**77.707.500**	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	5.772.500	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	5.772.500	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	71.935.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	71.935.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		**Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur**	**65%**	**34.953.578**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur**	**65%**	**34.953.578**	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**65%**	**34.953.578**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**65%**	**34.953.578**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	34.953.578	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	34.953.578	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun rencana 2025, BKPSDM mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 7.426.583.467,11. Pada perubahan rencana kerja pagu anggaran mengalami penambahan sebesar Rp. 148.440.000,00 pada Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN sehingga menjadikan pagu anggaran BKPSDM pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 7.575.023.467,11. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD Tahun 2025				Catatan Penting	APBD-P Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**03**			**KEPEGAWAIAN**	**PERSENTASE JUMLAH PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN ANJAB DAN ABK**		**100%**	**7.391.629.889**	**DAU**		**100%**	**7.575.023.467,11**
5	**03**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**6.543.627.684**	**DAU**		**100%**	**6.543.627.684**
5	**03**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan**		**100%**	**2.251.000**			**100%**	**2.251.000**
5	03	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Dokumen	2.250.000			5 Dokumen	2.250.000
5	03	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	1.000			1 Laporan	1.000
5	**03**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**6.310.707.862**			**100%**	**6.310.707.862**
5	03	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	24 Orang	6.124.993.861,91			24 Orang	6.124.993.861,91

5	03	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	12 Dokumen	185.714.000			12 Dokumen	185.714.000
5	03	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0
5	**03**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**0**			**100%**	**0**
5	03	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	0 Paket	0			0 Paket	0
5	03	01	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	0 Orang	0			0 Orang	0
5	**03**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**145.953.878**			**100%**	**145.953.878**
5	03	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	0			1 Paket	0
5	03	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	6.901.250			3 Paket	6.901.250
5	03	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket	4.694.228			2 Paket	4.694.228
5	03	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	11.995.000			3 Paket	11.995.000
5	03	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	3 Paket	10.052.800			3 Paket	10.052.800

5	03	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM	1 Laporan	0			1 Laporan	0
5	03	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	1 Laporan	112.310.600			1 Laporan	112.310.600
5	**03**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**16.503.169,20**			**100%**	**16.503.169,00**
5	03	01	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM	0 Unit	0,00			0 Unit	0,00
5	03	01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKPSDM	0 Unit	0,00			0 Unit	0,00
5	03	01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	0 Unit	0,00			0 Unit	0,00
5	03	01	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	1 Unit	16.503.169,20			1 Unit	16.503.169,00
5	**03**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**57.076.700**				**57.076.700**
5	03	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	1 Laporan	1.000.000			1 Laporan	1.000.000
5	03	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	1 Laporan	2.000.000			1 Laporan	2.000.000
5	03	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	54.076.700			12 Laporan	54.076.700
5	**03**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**11.135.075**				**11.135.075**

5	03	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM	15 Unit	11.135.075			15 Unit	11.135.075
5	03	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM	20 Unit	0,00			20 Unit	0,00
5	**03**	**02**		**Program Kepegawaian Daerah**				**848.002.205**				**996.442.205**
5	**03**	**02**	**2.01**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**319.419.305**				**319.419.305**
5	03	02	2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	250 Dokumen	275.168.305			250 Dokumen	275.168.305
5	03	02	2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	0 Lembaga	1.000			0 Lembaga	1.000
5	03	02	2.01.10	Pengembangan Sistem Informasi Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	44.250.000			1 Dokumen	44.250.000
5	**03**	**02**	**2.02**	**Mutasi dan Promosi ASN**				**390.875.400**				**539.315.400**
5	03	02	2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	4 Dokumen	390.874.400			4 Dokumen	539.314.400
5	03	02	2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	220 Dokumen	1.000			220 Dokumen	1.000
5	**03**	**02**	**2.03**	**Pengembangan Kompetensi ASN**				**60.000.000,00**				**60.000.000,00**
5	03	02	2.03.01	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	2 Orang	60.000.000,00			2 Orang	60.000.000,00
5	**03**	**02**	**2.04**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**77.707.500**				**77.707.500**

5	03	02	2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	5.772.500			1 Dokumen	5.772.500
5	03	02	2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	30 Orang	71.935.000			30 Orang	71.935.000
5	**04**			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**34.953.578**				**34.953.578**
5	**04**	**02**		**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**34.953.578**				**34.953.578**
5	**04**	**02**	**2.02**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**34.953.578**				**34.953.578**
5	04	02	2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	1 Laporan	34.953.578			1 Laporan	34.953.578
JUMLAH TOTAL								**7.426.583.467,11**				**7.575.023.467,11**

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tujuan peningkatan kualitas pelayanan bidang kepegawaian dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Hal ini tentunya akan dicapai melalui program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat menjadi indikator pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara terorganisir baik itu dalam sebuah tim, individu maupun institusi organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan. Melalui Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 maka penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian akan lebih terkoordinasi dan sinergis dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan skala prioritasnya sehingga akan terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA,

Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002

KABUPATEN

KEPULAUAN ANAMBAS

2025





RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

bpkpd.anambas@gmail.com

Jln. imam Bonjol, No 36 Tarempa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025.

Disamping itu melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja pada setiap unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025.

Akhir kata, dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua, Aamiin..., Berbagai kelemahan yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 16 Juli 2025
Kepala Badan,

Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
BAB I.	Pendahuluan	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Landasan Hukum	2
I.3	Maksud dan Tujuan	7
I.4	Sistematika Penulis	8
BAB II.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	10
II.1	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
II.2	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
BAB III.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	40
BAB IV.	Penutup	48

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 180 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka perlu disusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui:

1. Program dan kegiatan BPKPD Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD Tahun 2025;
3. Indikator kinerja BPKPD Tahun 2025;
4. Kelompok sasaran BPKPD Tahun 2025;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsitensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan penganggaran tahunan perangkat daerah;

3. Mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi BPKPD Tahun sebelumnya;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
6. Perumusan tujuan dan sasaran BPKPD Tahun 2025;

I.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja), landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja).

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 baik yang mengalami perubahan atau pergeseran dalam hal nama kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, maupun kelompok sasaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat uraian penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, diperlukan evaluasi hasil capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2025. Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 sejumlah Rp304.357.441.215,63 (Tiga ratus empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah enam puluh tiga sen). Dalam pelaksanaannya program tersebut sudah terealisasi anggarannya sebesar Rp45.732.372.344,00 (Empat

puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 19,20%.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan triwulan II tahun 2025 secara rinci sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator yaitu Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPKPD dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 32,66%. Anggaran Program ini sebesar Rp13.890.739.596,57 dengan realisasi sebesar Rp4.536.491.453,00. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp300.000,00 belum terealisasi dengan output Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp12.701.513.629,21 terealisasi sebesar Rp4.174.184.713,00 atau 32,86% dengan output Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp393.785.866,00 terealisasi sebesar Rp152.607.650,00 atau 38,75% dengan output Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah dari rencana anggaran Rp305.102.445,36 belum terealisasi dengan output Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran Rp316.466.156,00 terealisasi sebesar Rp199.217.290,00 atau 62,95% dengan output Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerahsebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran Rp173.571.500,00 terealisasi sebesar Rp10.481.800,00 atau 6,04% dengan output Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase Silpa terhadap APBD. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 14,18%. Anggaran program ini sebesar Rp289.830.866.660,25 dengan realisasi sebesar Rp41.103.995.591,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran dari rencana anggaran Rp1.041.384.518,00 terealisasi sebesar Rp291.077.348,00 atau 27,95% dengan output Persentase

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dari rencana anggaran Rp67.172.000,00 terealisasi sebesar Rp15.627.100,00 atau 23,26% dengan output Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp245.451.500,00 terealisasi sebesar Rp74.001.600,00 atau 30,15% dengan output Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp288.330.338.642,25 terealisasi sebesar Rp40.723.289.543,00 atau 14,12% dengan output Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp146.520.000,00 belum terealisasi dengan output Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Cakupan pengelolaan asset daerah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 11,97%. Anggaran program ini sebesar Rp315.124.900,81 dengan realisasi

sebesar Rp37.724.100,00. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp315.124.900,81 terealisasi sebesar Rp37.724.100,00 atau 11,97% dengan output Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase tingkat pertumbuhan PAD. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 16,89%. Anggaran program ini sebesar Rp320.710.058,00 dengan realisasi sebesar Rp54.161.200,00. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp320.710.058,00 terealisasi sebesar Rp54.161.200,00 atau 16,89% dengan output Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.1 Realisasi Fisik dan Keuangan BPKPD
Kabupaten Kepulauan Anambas s.d. Triwulan II Tahun 2025

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN				
			KEUANGAN			FISIK	
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN	
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.890.739.596,57**	**4.536.491.453,00**				
1	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**300,000.00**	**0.00**				
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**12.701.51333.629,21**	**4.74.184.713,00**				
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.209.325.629,21	3.924.474.713,00	32.14	1.29	49.27	1.98
4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN	492.038.000,00	249.710.000,00	50.75	0.08	58.33	0.09

	PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD						
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	150.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
3	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**494,895,555.00**	**74,792,100.00**				
6	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.686.696,00	3.362.000,00	13.09	0.00	32.68	0.00
7	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.303.170,00	38.724.000,00	53.56	0.01	56.75	0.01
8	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.144.400,00	19.900.750,00	32.02	0.01	50.00	0.01
9	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	46.200.000,00	22.990.000,00	49.76	0.01	50.00	0.01
10	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.451.600,00	67.630.900,00	36.08	0.02	50.00	0.03
4	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**392,109,228.36**	**0.00**				
11	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	79.800.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	225.302.445,36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**428,640,895.64**	**186,601,390.00**				
13	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	72.316.000,00	8.242.250,00	11.40	0.00	50.00	0.01
14	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.094.716,00	16.919.600,00	24.14	0.01	41.73	0.01
15	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	174.055.440,00	174.055.440,00	100.00	0.06	100.00	0.06

6	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHN DAERAH**	**230,891,500.00**	**7,261,800.00**				
16	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.947.500,00	5.528.500,00	12.58	0.00	21.81	0.00
17	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.530.000,00	4.953.300,00	16.77	0.00	37.83	0.00
18	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.094.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**178,643,130,056.59**	**28,733,521,873.00**				
7	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**1,890,307,675.00**	**89,050,448.00**				
19	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	25.663.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	24.188.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	12.142.970,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	8.160.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	461.469.448,00	95.239.848,00	20.64	0.03	21.99	0.03

24	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	447.707.000,00	195.837.500,00	43.74	0.06	53.48	0.08
25	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	24.956.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	37.098.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**313,926,000.00**	**0.00**				
27	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	66.776.000,00	15.627.100,00	23.40	0.01	45.66	0.01
28	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	396.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	**824,413,500.00**	**38,801,600.00**	**4.71**			
29	REKONSILIASI DAN VERIVIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	3.300.00,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	141.445.500,00	74.001.600,00	52.32	0.02	54.44	0.03

31	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	7.200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	82.828.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMRINTAH KABUPATEN/KOTA	10.678.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**174,554,535,981.59**	**28,605,669,825.00**				
34	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	183.117.023.983,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	105.213.314.659,00	40.723.289.543,00	38.71	13.38	48.53	16.78
11	**PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH**	1,059,946,900.00	0.00				
36	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM	146.520.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH						
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1,446,889,440.00**	**22,474,700.00**				
12	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1,446,889,440.00**	**22,474,700.00**				
37	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	185.031.000,00	13.971.400,00	7.55	0.00	8.39	0.01
38	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	49.213.200,81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	57.973.800,00	1.278.000,00	2.20	0.00	14.42	0.00
40	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	22.906.900k,00	22.474.700,00	98.11	0.01	100.00	0.01
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**480,711,659.00**	**0.00**				
13	**PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**480,711,659.00**	**0.00**				
41	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	19.260.000,00	10.620.000,00	55.14	0.00	58.33	0.00
42	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	291.975.078,00	40.000.000,00	13.70	0.01	34.25	0.03
43	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	7.569.000,00	3.541.20000	46.79	0.00	50.00	0.00
44	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	1.905.980,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	**304.357.441.215,63**	**45.732.372.344,00**		**15,03**		**19,20**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja pada Review Renstra Tahun 2021-2024 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

Tabel II.2 Capaian Hasil Indikator Kinerja
BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	Formulasi	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026
Penunjang Urusan												
Semua Bidang												
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)	B (63,46)	-	-	BB (71)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	BB (80)	BB (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)	BB (74,71)	BB (71,86)	BB (72,61)	A (81,50)
Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan												
3	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bidang Anggaran												
4	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P tahun berjalan yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen yang harus disusun tepat waktu*100%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah												
5	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah												
6	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	3,40%	2,53%	2,77%	6 %

Dari Tabel II.3 Capaian Hasil Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehinggatidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (80,60) namun hanya terealisasi sebesar BB (72,61), hal ini disebabkan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
5. Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Sangat Rendah dengan realisasi hanya 2,77% dari target 6%, dengan capaian Kinerja hanya 46,17%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:
   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
   b. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen;

c. Belum adanya penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak seperti berupa penyegelan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama ini metode yang dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dan sanksi yang diberikan juga berupa sanksi administratif yakni dengan mengenakan denda;
d. Personil di Bidang Pengelolaan PAD yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas (yang berkompeten) maupun kuantitas. Sementara pengawasan pajak yang ada di beberapa Kecamatan yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah harus terus dilakukan;
e. Penyusunan target pajak yang terlalu tinggi, tidak melihat realisasi tahun sebelumnya.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal diatas menjadi concern tersendiri di BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Kondisi Pegawai ASN BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Klamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	40 Orang
2.	Perempuan	32 Orang
	Total	**72 Orang**

Dari total 72 orang jumlah pegawai ASN di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu sebanyak 40 orang sementara perempuan hanya

berjumlah 32 orang. Adapun untuk jumlah ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di lingkungan BPKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	6	-
3.	Eselon IV	9	2
4.	Fungsional dan Pelaksana	32	22
	Total	**48**	**24**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di lingkungan BPKPD yaitu terdapat 1 orang laki-laki pejabat eselon II, 6 orang laki-laki yang menjabat eselon III, 9 orang laki-laki yang menjabat eselon IV dan 2 orang perempuan yang menjabat eselon IV, selanjutnya untuk jabatan fungsional dan pelaksana diisi oleh 32 laki-laki dan 24 orang perempuan.

Tabel II.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Setiap Tahun						Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota**	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	97	96	97
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	90	100

5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	90	100
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	97	96	97
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah	Persentase Silpa terhadap APBD	7,25	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	0,76	1,93	
8.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	90	91	100
12.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan asset daerah	66,67	73,30	80	86,60	93,30	100	69,70	70,59	88,24%
13.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	95	98	100

IV.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	3,92	3,98	4,02	4,13	4,47	4,62	-10,92	-2,14	-6,13
14.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	90	92	100

Penjelasan dari tabel II.8 diatas adalah terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Dari rata-rata realiasi yang telah ditetapkan pada target setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian indikator telah mencapai target, namun tetap ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator program dan kegiatan, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan antara lain:

- Peningkatan anggaran: perlu dilakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.
- Pengembangan sumber daya manusia: perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan jabatan dan berkelanjutan.
- Penguatan koordinasi: perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergi.

- Peningkatan monitoring dan evaluasi: perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
g. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam proses perencanaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selalu mengedepankan pendekatan pembangunan yang reponsif *gender*, dimana pertimbangan terhadap kebutuhan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan selalu menjadi perhatian khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi mendalam terhadap Renja PD di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilakukan dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Capaian kinerja pelayanan BPKPD pada Review Renstra Tahun 2021-2024 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam table berikut:

Tabel II.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	Formulasi	Target Renstra PD (%)						Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah											
1	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang harus disusun *100%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah											
3	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan BMD yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pendapatan Asli Daerah											
4	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	3,40%	2,53%	2,77%

Dari tabel diatas dapat diketahui bawa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki tiga urusan utama yaitu urusan pengelolaan keuangan daerah, urusan pengelolaan barang milik daerah dan urusan pendapatan asli daerah. Urusan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
  - Penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audited, Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD, Laporan DTH persemester.
  - Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD-P, seperti Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD, Dokumen Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS, Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD.

  Capaian indikator pada urusan pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari:
  - Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen APBD dan APBD-P.
  - Tingkat kesesuaian laporan keuangan dan dokumen APBD dan APBD-P dengan peraturan perundang-undangan.
- Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Urusan Pengelolaan BMD meliputi Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan, seperti Laporan Rekonsiliasi BMD dan Laporan Penyusunan Standar Harga. Capaian indikator pada urusan pengelolaan barang milik daerah dapat diukur dari:
  - Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga.

- Tingkat kesesuaian laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga dengan peraturan perundang-undangan.

- Urusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

  Urusan pengelolaan PAD meliputi kegiatan pengeloaan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Capaian indikator pada urusan pengelolaan pendapatan asli daerah dapat diukur dari:

  - Jumlah Penerimaan PAD yang meningkat setiap tahunnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelakasanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan Global Nomor XVI yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk semua , dan membangun kelembagaan yang efektif , akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan. Sasaran Globalnya yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan disemua tingkat.Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi :

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selalu berkembang;
2. Belum Perwujudan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK;
3. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku;
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah sehingga belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;

8. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah;
9. Rendahnya kapasitas fiskal;
10. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi.

Permasalahan dan isu penting di atas secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, seperti SPM dan SDG's. Untuk itu optimalisasi terhadap pelaksanaan pogram/kegiatan/ sub kegiatan perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjunya penghapusan terhadap pogram/kegiatan/ sub kegiatan yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir yang disebut dengan *stunting,* dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan stunting dengan prevelensi stunting tahun 2023 sebesar 5,07% menurun menjadi 3,9% pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai

upaya mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pemabangunan inovatif yang bersifat holistic-tematic, integratif dan spasial untuk diintegrasikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah yang wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu inovasi pelaksanaan digitalisasi pengusulan sampai dengan pelaporan perjalanan dinas yang merupakan pengembangan dan bagian dari *Anambas Single Information System (ASIS)* yang terintegrasi dengan sistem absensi harian (Presensi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sistem Transaksi non tunai melalui *Anambas Single Information System (ASIS),* dengan pembuatan Aplikasi ASIPEDI diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam percepatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan memberikan stimulus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik salah satunya Digitaliasi Pelayanan Publik.

Agenda kegiatan tahun 2025 akan berupaya lebih optimal pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki banyak potensi inovasi daerah yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dikategorikan sebagai daerah yang inovatif. Optimalisasi terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen berbagai pihak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah;
    2. Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan mengali potensi pendapatan yang ada;
    3. Meningkatkan manajemen dalam pengelolaan barang milik daerah.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur
    1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus/pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
    2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
    3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana
    1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik;
    2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;

3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dan Prakiraan Maju tahun anggaran 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**181.018.395.343,00**	**145.343.397.673,51**	**131.258.840.343,21**	**-49.759.554.999,79**							**126.332.696.363,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**181.018.395.343,00**	**145.343.397.673,51**	**131.258.840.343,21**	**-49.759.554.999,79**							**126.332.696.363,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**181.018.395.343,00**	**145.343.397.673,51**	**131.258.840.343,21**	**-49.759.554.999,79**							**126.332.696.363,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**23.869.169.220,00**	**23.845.144.851,99**	**13.885.389.346,57**	**-6.927.977.848,00**							**16.941.191.372,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan*				100 %	100 %	102.259.000,00	29.201.000,00	300.000,00	-101.959.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		22.403.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	75.634.000,00	27.351.000,00	150.000,00	-75.484.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			15.805.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	26.625.000,00	1.850.000,00	150.000,00	-26.475.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			6.598.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD*				100 %	100 %	18.565.115.566,00	22.254.117.234,99	12.641.356.603,21	-5.923.758.962,79			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		12.365.052.784,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	17.741.132.308,00	21.598.269.234,99	12.149.168.603,21	-5.591.963.704,79	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			11.541.069.526,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	817.920.000,00	654.648.000,00	492.038.000,00	-325.882.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			817.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.063.258,00	1.200.000,00	150.000,00	-5.913.258,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			6.063.258,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu*				100 %	100 %	415.397.040,00	0,00	0,00	-415.397.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				184 Paket	184 Paket	218.603.040,00	0,00	0,00	-218.603.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	196.794.000,00	0,00	0,00	-196.794.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas*				100 %	100 %	1.062.544.366,00	682.611.455,00	450.967.966,00	-611.576.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		950.991.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	136.762.118,00	63.333.033,00	25.686.696,00	-111.075.422,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			60.514.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	123.760.248,00	106.731.122,00	72.303.170,00	-51.457.078,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			215.723.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.990.000,00	91.761.300,00	58.312.500,00	-63.677.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			2.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	631.432.000,00	374.586.000,00	248.465.600,00	-382.966.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			478.354.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	798.268.638,00	393.732.909,36	305.102.445,36	-493.166.192,64			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		352.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	78.329.900,00	0,00	0,00	-78.329.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			39.164.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	494.636.293,00	168.430.464,00	79.800.000,00	-414.836.293,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			87.532.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	225.302.445,00	225.302.445,36	225.302.445,36	0,36	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			225.302.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya*				100 %	100 %	2.687.013.110,00	254.590.752,64	314.090.832,00	-2.372.922.278,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		2.858.112.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	119.679.600,00	108.612.994,64	72.316.000,00	-47.363.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			119.679.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.675.326,00	145.977.758,00	67.719.392,00	-81.955.934,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			320.774.456,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.417.658.184,00	0,00	174.055.440,00	-2.243.602.744,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			2.417.658.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	238.571.500,00	230.891.500,00	173.571.500,00	-65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		304.630.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	84.047.500,00	76.367.500,00	43.947.500,00	-40.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			118.244.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	54.430.000,00	54.430.000,00	29.530.000,00	-24.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			86.292.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.094.000,00	100.094.000,00	100.094.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			100.094.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Silpa terhadap APBD**				**5,50 %**	**5,50 %**	**151.712.521.623,00**	**119.099.484.722,52**	**116.737.616.037,83**	**-46.676.944.882,00**							**105.035.576.741,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	3.132.225.130,00	2.362.684.675,00	1.041.384.518,00	-2.090.840.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		3.701.238.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	61.410.860,00	47.557.750,00	25.663.100,00	-35.747.760,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			116.530.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.700.000,00	38.400.000,00	24.188.000,00	-26.512.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			113.511.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			56.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			45.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	64.351.150,00	40.557.425,00	12.142.970,00	-52.208.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			195.807.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	54.600.000,00	30.600.000,00	8.160.000,00	-46.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			116.827.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.900.000,00	772.122.000,00	461.469.448,00	-339.430.552,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			826.680.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	733.732.000,00	729.942.000,00	447.707.000,00	-286.025.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			792.355.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	757.933.920,00	439.645.500,00	24.956.000,00	-732.977.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			749.107.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	191.459.500,00	263.860.000,00	37.098.000,00	-154.361.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			198.359.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	122.167.500,00	0,00	0,00	-122.167.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			186.843.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.736.100,00	0,00	0,00	-52.736.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			91.193.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	214.634.100,00	0,00	0,00	-214.634.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			212.864.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 %	100 %	362.641.000,00	374.912.000,00	67.172.000,00	-295.469.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		309.738.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	247.525.000,00	181.912.000,00	66.776.000,00	-180.749.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			125.410.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	115.116.000,00	193.000.000,00	396.000,00	-114.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			184.328.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun*				100 %	100 %	793.696.560,00	1.011.511.500,00	250.790.500,00	-542.906.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		960.395.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	84.658.800,00	84.605.000,00	3.300.000,00	-81.358.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			104.216.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	414.402.000,00	386.152.000,00	146.784.500,00	-267.617.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			456.530.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	187.784.000,00	161.384.000,00	7.200.000,00	-180.584.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			187.784.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	88.090.000,00	93.506.000,00	82.828.000,00	-5.262.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			118.329.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	102 Orang	18.761.760,00	285.864.500,00	10.678.000,00	-8.083.760,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			93.536.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun*				100 %	100 %	146.450.997.973,00	114.194.327.647,52	115.231.749.019,83	-31.219.248.953,17			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		99.297.441.941,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	8.981.012.988,52	13.147.263.978,83	11.147.263.978,83	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	144.450.997.973,00	105.213.314.659,00	102.084.485.041,00	-42.366.512.932,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			97.297.441.941,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				100 %	100 %	972.960.960,00	1.156.048.900,00	146.520.000,00	-826.440.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		766.763.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	972.960.960,00	1.156.048.900,00	146.520.000,00	-826.440.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			766.763.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan pengelolaan asset daerah**				**93,30 %**	**93,30 %**	**4.744.407.800,00**	**1.814.301.440,00**	**315.124.900,81**	**-2.074.407.800,00**							**2.670.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun*				100 %	100 %	4.744.407.800,00	1.814.301.440,00	315.124.900,81	-4.429.282.899,19			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		2.670.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	766.119.000,00	0,00	0,00	-766.119.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			766.119.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	209.108.000,00	0,00	0,00	-209.108.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			209.108.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	780.441.600,00	0,00	0,00	-780.441.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			754.773.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.299.810.600,00	689.332.000,00	185.031.000,00	-1.114.779.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	270.282.300,00	446.788.440,00	49.213.200,81	-221.069.099,19	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	559.726.700,00	0,00	0,00	-559.726.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	280.607.600,00	462.432.000,00	57.973.800,00	-222.633.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	578.312.000,00	215.749.000,00	22.906.900,00	-555.405.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tingkat pertumbuhan PAD**				**4,47 %**	**4,47 %**	**692.296.700,00**	**584.466.659,00**	**320.710.058,00**	**993.631.550,00**							**1.685.928.250,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun*				100 %	100 %	692.296.700,00	584.466.659,00	320.710.058,00	-371.586.642,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		1.685.928.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.429.000,00	0,00	0,00	-85.429.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			565.064.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	173.950.200,00	102.058.000,00	19.260.000,00	-154.690.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			101.826.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Unit	9 Unit	146.086.000,00	291.975.078,00	291.975.078,00	145.889.078,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			207.102.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	179.007.000,00	107.879.601,00	7.569.000,00	-171.438.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			559.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	107.824.500,00	82.553.980,00	1.905.980,00	-105.918.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			252.060.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**181.018.395.343,00**	**145.343.397.673,51**	**131.258.840.343,21**	**-548.753.730.731,26**							**126.332.696.363,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-5, periode tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 akan dijadikan pedoman/acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas serta peran aktif stakeholders dan masyarakat.

Demikian Rancangan Perubahan Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas BPKPD tahun 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025
Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



(RANCANGAN AKHIR RENJA)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrakhmanirrakhiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Akhir Kerja (Rancangan Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Akhir Kerja (Rancangan Akhir Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Akhir Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Akhir Kerja (Rancangan Awal Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001

Hal.

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA OPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD 14
2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja BPBD Tahun 2025 21
3.3 Program dan Kegiatan 22

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

Bab V PENUTUP 28

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Derah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan (Rancangan Akhir Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Sebagai dokumen rencana Tahunan, Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran Rencana Kerja lima Tahunan berupa Renstra PD sehingga Rancangan Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Rancangan Akhir Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan, merupakan rencana pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,

yaitu :

"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

   (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
   Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana Pembangunan jangka menengan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang

klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikaso dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ Tahun 2021 penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2026, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sebgai hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan Tahunan dalam jangka 1 (satu) Tahun yang akan dimuat dalam Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RANCANGAN AKHIR RENJA) Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai acuan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) Tahun perencanaan. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Rancangan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju Tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan diperkirakan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Fungsi Evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2026. Selain itu juga dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan proyeksi reailisasi Anggaran Tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 11.853.276.586 dengan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.571.333.728 Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

No	Program	No	Kegiatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	7	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		8	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		9	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		10	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terpenuhinyaProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum ada secara menetap
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang belum memadai
3. Belum adanya pelatihan penanganan dan Penanggulangan dalam menghadapi bencana secara *massif* dan menggandeng lintas sektor serta masyrakat
4. Belum terbentuknya peningkatan peran lintas sektor dan penggalangan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
5. Belum Maksimalnya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Belum maksimalnya gudang penyimpanan logistik penanggulangan bencana
7. Perlu adanya peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk kegiatan lapangan
8. Perlu adanya kegiatan simulasi kebencanaan yang melibatkan lintas sektor (Basarnas, TNI, Polri, serta relawan bencana), agar

tercipta *trust* antar tim penanggulangan bencana

9. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanggulangan bencana
10. Perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan bencana
11. Belum adanya Kajian Kebutuhan Pasca Bencana untuk mengidentifikasi dampak dari kejadian bencana

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan Tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12		16	17	
1	Predikat AKIP	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	-
2	Nilai AKIP	-	-	76.00%	77.00%	78.00%	80.00%	75.00%	77.00%	78.00%	75.00 %	76.00%	-
3	Indeks Resiko Bencana	-	-	89.62	89.37	89.12	88.87	89.62	89.37	89.12	89.87	89.62	-
4	Indeks Ketahanan Daeerah	-	-	0.46	0.47	0.47	0.49	0.46	0.47	0.47	0.45	0.46	-

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang kompleks dan dinamis. Permasalahan tersebut meliputi tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, dan dampak perubahan iklim.

Isu strategis yang muncul mencakup perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran serta masyarakat, serta pengembangan strategi adaptif yang berbasis data dan teknologi. Keseluruhan tantangan ini menuntut pendekatan perencanaan yang komprehensif dan responsif agar BPBD mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tangguh terhadap bencana.

Melalui pengidentifikasian permasalahan dan isu strategis secara menyeluruh, BPBD berupaya untuk menyusun kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang aman, sejahtera, dan berorientasi pada keberlanjutan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati

Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 hanya menitikberatkan pada analisa kebutuhan Tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan tidak memiliki perbedaan baik dari tolak ukur dan pagu indikatif dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Plafon Anggaran Sementara Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Rancangan RKPD					Kebutuhan Analisis Kebutuhan				
Program /Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah bulan terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah bulan terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	1.887.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	60.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	8.330.583.945	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	11.738.444.848

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	300.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	251.338.180	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	300.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	12 Bulan	229.158.004	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	12 Bulan	2.100.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	427.419.432	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	150.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	140.385.080	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	400.640.000

Program Penanggulangan Bencana	**Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana**				**Program Penanggulangan Bencana**	**Jumlah bulan Pelayanan Penanggulangan Bencana**			
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KKA	12 Bulan	25.000.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KKA	12 Bulan	200.000.000
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	12 Bulan	6.000.200	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	12 Bulan	400.000.000
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	12 Bulan	61.352.000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	12 Bulan	470.000.000
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	12 Bulan	100.095.000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	12 Bulan	300.414.600

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas Tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rancangan Akhir Renja adalah rutinitas perencanan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

I. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka

panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima Tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

b. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada "Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastrukutur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri". Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

   Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan peventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

   Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan,

pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

   Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

   Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungandarat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

   Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam meyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana. Untuk

itu, disusun kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030. Visi yang harus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2025-2030 adalah :

> *"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasat dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembang Sumber Daya Manusia yang Inovatif".*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyatadalam bentuk misi sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaiberikut :

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dansetara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana (Kajian Resiko Bencana dan Penanganan Resiko Bencana);
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengacu pada Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pememrintahan yang Berkualitas
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya Ketahanan Daerah yang Tangguh

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih menitikberatkan pada hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada

Potensi Lokal Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu **" Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong".**

Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibu kota Kabupaten yaitu Tarempa hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bencana. Sebagai OPD yang memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hampir semua program/ kegiatan yang sasarannya adalah seluruh daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4. 1.

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk

mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai. Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota
b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadapbencana
c) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadapbencana
d) Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Masih terdapat beberapa kendala dalam penganggaran di subkegiatan, terutama pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penaggulangan Bencana yang dari beberapa tahun yang lalu mengalamai kekurangan anggaran sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan dasar								
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bulanterpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**KKA**	**12 Bulan**	**1.887**	**DAU**		**12 Bulan**	**110.402.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya JasaPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	1.887	DAU		12 Bulan	110.402.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**KKA**	**12 Bulan**	**8.330.583.945**	**DAU**		**12 Bulan**	**12.011.438.421**
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dantunjangannya	KKA	12 Bulan	8.124.878.445	DAU		12 Bulan	11.775.770.421

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	KKA	12 Bulan	205.705.500	DAU		12 Bulan	235.668.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KKA**	**12 Bulan**	**0**	**DAU**		**12 Bulan**	**300.000.000**
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	300.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KKA**	**12 Bulan**	**251.338.180**	**DAU**		**12 Bulan**	**1.109.853.400**
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	KKA	12 Bulan	8.465.130	DAU		12 Bulan	13.333.500
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yangdiadakan	KKA	12 Bulan	98.060.000	DAU		12 Bulan	126.174.900
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	KKA	12 Bulan	70.468	DAU		12 Bulan	43.698.200
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	KKA	12 Bulan	34.582.582	DAU		12 Bulan	99.693.000
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yangtersedia	KKA	12 Bulan	30.404.000	DAU		12 Bulan	41.302.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yangdihadiri	KKA	12 Bulan	79.756.000	DAU		12 Bulan	785.651.800

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KKA**	**12 Bulan**	**229.158.004**	**DAU**		**12 Bulan**	**1.358.248.174**
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	175.615.000
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran perorangan dinas/ kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	165.377.000
13	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	239.056.500
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	KKA	12 Bulan	221.064.004	DAU		12 Bulan	244.484.854
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	KKA	12 Bulan	8.094.000	DAU		12 Bulan	533.714.820
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**12 Bulan**	**427.419.432**	**DAU**		**12 Bulan**	**100.000.000**
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	KKA	12 Bulan	68.310.000	DAU		12 Bulan	70.000.000

17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase PPKD, pengelola BMD dan pegawai tidaktetap yang dibayarkan honorariumnya	KKA	12 Bulan	359.109.432	DAU		12 Bulan	30.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**12 Bulan**	**140.385.080**	**DAU**		**12 Bulan**	**210.210.730**
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara danmemiliki izin	KKA	12 Bulan	128.585.080	DAU		12 Bulan	176.710.730
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	KKA	12 Bulan	11.800.000	DAU		12 Bulan	33.500.000
Program Penanggulangan Bencana		**Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana**							
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**KKA**	**12 Bulan**	**25.000.000**	**DAU**		**12 Bulan**	**100.000.000**
20	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	KKA	12 Bulan	25.000.000	DAU		12 Bulan	100.000.000

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**KKA**	**12 Bulan**	**6.000.200**	**DAU**		**12 Bulan**	**501.519.796**
22	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	130.000.000
22	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	KKA	12 Bulan	100	DAU		12 Bulan	95.516.600
23	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	KKA	12 Bulan	6.000.000	DAU		12 Bulan	150.707.696
24	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	KKA	12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	66.961.500
25	Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana	KKA	12 Bulan	100	DAU		12 Bulan	58.334.000
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**KKA**	**12 Bulan**	**61.352.000**	**DAU**		**12 Bulan**	**518.659.200,00**
26	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana	KKA	12 Bulan	33.800.000	DAU		12 Bulan	58.334.000

27	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	KKA	12 Bulan	20.952.000	DAU		12 Bulan	283.248.700
28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	12 Bulan	6.600.000	DAU		12 Bulan	177.076.500
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**KKA**	**12 Bulan**	**100.095.000**	**DAU**		**12 Bulan**	**217.961.300,00**
29	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	KKA	12 Bulan	10.000	DAU		12 Bulan	154.362.600
30	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	KKA	12 Bulan	100.085.000	DAU		12 Bulan	63.598.700
	Jumlah				**9.571.333.728**				**16.538.293.021**

Jumlah Program : 2
Jumlah Kegiatan : 11
Jumlah Sub Kegiatan : 30

BAB V
PENUT
UP

Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RANCANGAN AKHIR RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RANCANGAN AKHIR RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RANCANGAN AKHIR RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Jalan Ibrahim Sattah – Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bppd@anambaskab.go.id

Tarempa, 16 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

Di
Tarempa

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/900.1.12.1/071/BPPD/SD/06/2025

No	Barang yang Dikirimkan	Jumlah	Ket
1	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	1 Berkas	Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Badan Pengelolan Perbatasan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

TETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19790101200212009

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

TAHUN 2025

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah.Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan untuk menyinkronkan dan menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tema "Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur". Program dan Kegiatan dimaksud mengakomodir tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan daerah.

Dalam rangka mensinergikan tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender DalamPembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 dalam rangka :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di bidang pengelolaan perbatasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan perbatasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada dokumen Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan DPA PD Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program,11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan persentase realisasi sebesar 29.47% sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Jumlah Anggaran, Rp. 3.750.000
- Jumlah Realisasi Rp. 3.750.000
- Realisasi Keuangan (%) = 100%
- Realisasi Fisik (%) = 100%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Jumlah Anggaran, Rp. 2.652.310.599
   - Jumlah Realisasi Rp 928.843.014
   - Realisasi Keuangan (%) = 37.03%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Jumlah Anggaran, Rp. 121.480.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 9.370.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 8.33%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Jumlah Anggaran, Rp. 6.474.500
   - Jumlah Realisasi Rp. 3.150.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 50%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Jumlah Anggaran, Rp. 9.744.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 609.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 16 %
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Jumlah Anggaran, Rp. 0
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 0%

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Jumlah Anggaran, Rp. 11.873.810
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Jumlah Anggaran, Rp. 7.329.656
   - Jumlah Realisasi Rp. 000
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

c. Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor
   - Jumlah Anggaran, Rp. 59.767889,31
   - Jumlah Realisasi Rp. 11.784.870
   - Realisasi Keuangan (%) = 23.50%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Jumlah Anggaran, Rp. 32.718.190
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Jumlah Anggaran, Rp. 90.278.200
   - Jumlah Realisasi Rp. 20.675.600
   - Realisasi Keuangan (%) = 23%
   - Realisasi Fisik (%) = 16,3%
   -

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
   - Jumlah Anggaran, Rp. 79.614.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 79.614.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 100%
   - Realisasi Fisik (%) = 100%

b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   - Jumlah Anggaran, Rp. 38.000.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 100%

c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
   - Jumlah Anggaran, Rp. 33.049.862
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
   - Jumlah Anggaran, Rp. 94.534.848
   - Jumlah Realisasi Rp. 94.534.848
   - Realisasi Keuangan (%) = 100%
   - Realisasi Fisik (%) = 100%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Jumlah Anggaran, Rp. 61.414.362
   - Jumlah Realisasi Rp. 0%
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Jumlah Anggaran, Rp. 28.682.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%%

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Jumlah Anggaran, Rp. 15.700.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 15.700.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 100%
   - Realisasi Fisik (%) = 100%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Jumlah Anggaran, Rp. 7.531.500
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Jumlah Anggaran, Rp. 5.239.400
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 50%

II. Program Pengelolaan Perbatasan

1. Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencanan Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
   - Jumlah Anggaran, Rp. 12.970.300
   - Jumlah Realisasi Rp. 0%
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%

- Realisasi Fisik (%) = 11,10%

2. Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan

a. Sub Kegiatan Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara

- Jumlah Anggaran, Rp. 23.122.900
- Jumlah Realisasi Rp 4.7813.00
- Realisasi (%) = 12%
- Realisasi Fisik (%) = 33,59%

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

- Jumlah Anggaran, Rp. 40.388.100
- Jumlah Realisasi Rp 8.924.800%
- Realisasi (%) = 14,11%
- Realisasi Fisik (%) = 14,11%

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sembilan) kegiatan dan 23 (sembilan belas) sub kegiatan yang terakomodir pada DPA Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan prakiraan capaian kinerjanya, dimana capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, BPPD Kabupaten Kepuluan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) BPPD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92
		Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)

Analisis kinerja pelayanan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK		Target Renstra BPPD					Realisasi Capaian Tahun Lalu			Proyeksi		Catattan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*		*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri			26,65%	29,32%	32,25%	35,47%	39,02%	42,92%	19,81%	26,81%	20,34%	35,47%	39,02%	
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara			20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	20%	20%	80%	100%	
3.	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	C (40,49)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 BPPD Tidak dilakukan penilaian	B (61,2)	BB (71)	
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	D (22,2)	B (65,75)	B (61,2)	BB (71)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong
   - BPPD merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk sehingga masih memiliki energi dan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan.

b. Faktor Penghambat
   - Belum memadainya jumlah ASN pada BPPD.
   - Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan baik antar instansi horizontal maupun vertikal, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
   - Masih lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.
   - Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan dan penjagaan tanda batas wilayah negara tidak berjalan maksimal.
   - Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas dan Kinerja BPPD.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menujukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah
   a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
   b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;

c. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur
   a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
   b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
   c. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
   a. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
   b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
   c. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Kecamatan Lokpri dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pembangunan perbatasan negara di Kecamatan Lokpri

2. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Strategi Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   - Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
   - Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
   - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas perencanan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian
   Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2. Menjamin Keadilan
   Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum.
3. Menjaga Keberlanjutan
   Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan

pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Infrastruktur digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 - 2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas yang difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara
   Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.
2. Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara
   Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.
3. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
   Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan

   Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berdasarkankan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah menetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yaitu :

1. **Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel;**
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. **Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara;**
2. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih.**

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan

indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2021-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Mewujudkan koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Persen	39.02
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Persen	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas.Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini memuat 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
I	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**3.964.678.356**	**APBD**	**100%**	**3.209.078.254**	**(755.600.102)**
1	**5.06.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**KKA**	**100%**	**30.000.000**	**APBD**	**100%**	**3.750.000**	**(26.250.000)**
1.	5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	KKA	6 Dok	30.000.000	APBD	6 Dok	**3.750.000**	(26.250.000)
2	**5.06.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**3.126.160.606**	**APBD**	**100%**	**2.780.265.059**	**(345.895.547)**
1.	5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	14 Orang/ Bulan	2.994.120.606	APBD	14 Orang/ Bulan	2.652.310.599	(341.810.007)
2.	5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	1 Dok	121.480.000	9.040.000
3.	5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	APBD	1 Laporan	6.474.500	(13.125.500)
3	**5.06.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**7.308.000**	**APBD**	**100%**	**9.744.000**	**2.436.000**
1.	5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000	APBD	1 Laporan	9.744.000	2.436.000

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
4	**5.06.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**65.735.707**	**APBD**	**100%**	0	**(65.735.707)**
1.	5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	65.735.707	APBD	1 Paket	0	(65.735.707)
5	**5.06.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**404.270.145**	**APBD**	**100%**	**202.217.085**	**(202.053.060)**
1.	5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	APBD	1 Paket	11.873.810	6.858.646
2.	5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	APBD	1 Paket	7.578.996	(3.287.521)
3.	5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	50.147.720	APBD	1 Paket	59.767.889,31	9.620.196,31
4.	5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	18.378.000	APBD	1 Paket	32.718.190	14.340.190
5.	5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	319.862.744	APBD	1 Laporan	90.278.200	(229.584.544)
6	**5.06.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KKA**	**100%**	**247.448.636**	**APBD**	**100%**	**245.198.710**	**(2.249.926)**
1.	5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	KKA	3 Unit	32.292.080	APBD	3 Unit	79.614.000	47.321.920

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
2.	5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	2 Paket	35.547.330	APBD	2 Paket	38.000.000	2.452.670
3.	5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	11 Unit	85.074.378	APBD	11 Unit	33.049.862	52.026.516
4.	5.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.534.848	APBD	1 Unit	94.534.848	0
7	**5.06.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**68.916.162**	**APBD**	**100%**	**105.796.362**	**36.880.200**
1.	5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	35.427.162	APBD	1 Laporan	61.414.362	25.987.200
2.	5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	33.489.000	APBD	1 Laporan	28.682.000	(4.807.000)
3.	5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	15.700.000	15.700.000
8	**5.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**14.839.100**	**APBD**	**100%**	**12.770.900**	**(2.068.200)**
	5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	3 unit	9.599.100	APBD	3 Unit	7.531.500	(2.067.200)
1.	5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	5 Unit	5.240.000	APBD	5 Unit	5.239.400	(600)

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
II	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri**	**KKA**	**32,25%**	**298.056.625**	**APBD**	**32,25%**	**76.431.300**	**(221625.325)**
1	**5.06.02.2.01**	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**KKA**	**100%**	**101.954.730**	**APBD**	**100%**	**12.970.300**	**(88.984.430)**
1.	5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	101.954.730	APBD	1 Dok	12.970.300	(88.984.430)
2	**5.06.02.2.02**	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri**	**KKA**	**100%**	**89.836.045**	**APBD**	**100%**	**23.122.900**	**(66.713.145)**
1.	5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	89.836.045	APBD	1 Dok	23.122.900	(66.713.145)
3	**5.06.02.2.03**	**Monitoring dan Evaluasi**	**Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**	**KKA**	**100%**	**106.265.850**	**APBD**	**100%**	**40.338.100**	**(65.927.750)**
1.	5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	106.265.850	APBD	1 Dok	40.338.100	(65.927.750)
Jumlah						**4.262.734.981**			**3.436.173.416,31**	**(826.561.564.69)**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencan Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2024. Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan DaerahKabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun Rincian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1.berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
I	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**3.964.678.356**	**APBD**	**100%**	**3.209.078.254**	**(755.600.102)**
1	**5.06.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**KKA**	**100%**	**30.000.000**	**APBD**	**100%**	**3.750.000**	**(26.250.000)**
1.	5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	KKA	6 Dok	30.000.000	APBD	6 Dok	**3.750.000**	(26.250.000)
2	**5.06.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**3.126.160.606**	**APBD**	**100%**	**2.780.265.059**	**(345.895.547)**
1.	5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	14 Orang/ Bulan	2.994.120.606	APBD	14 Orang/ Bulan	2.652.310.599	(341.810.007)
2.	5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	1 Dok	121.480.000	9.040.000
3.	5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	APBD	1 Laporan	6.474.500	(13.125.500)
3	**5.06.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**7.308.000**	**APBD**	**100%**	**9.744.000**	**2.436.000**
1.	5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	KKA	1 Laporan	7.308.000	APBD	1 Lapora	9.744.000	2.436.000

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
			Milik Daerah pada SKPD					n		
4	**5.06.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**65.735.707**	**APBD**	**100%**	0	**(65.735.707)**
1.	5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	65.735.707	APBD	1 Paket	0	(65.735.707)
5	**5.06.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KKA**	**100%**	**404.270.145**	**APBD**	**100%**	**202.217.085**	**(202.053.060)**
1.	5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	APBD	1 Paket	11.873.810	6.858.646
2.	5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	APBD	1 Paket	7.578.996	(3.287.521)
3.	5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	50.147.720	APBD	1 Paket	59.767.889,31	9.620.196,31
4.	5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	18.378.000	APBD	1 Paket	32.718.190	14.340.190
5.	5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	319.862.744	APBD	1 Laporan	90.278.200	(229.584.544)
6	**5.06.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KKA**	**100%**	**247.448.636**	**APBD**	**100%**	**245.198.710**	**(2.249.926)**
1.	5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	KKA	3 Unit	32.292.080	APBD	3 Unit	79.614.000	47.321.920

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
2.	5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	2 Paket	35.547.330	APBD	2 Paket	38.000.000	2.452.670
3.	5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	11 Unit	85.074.378	APBD	11 Unit	33.049.862	52.026.516
4.	5.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.534.848	APBD	1 Unit	94.534.848	0
7	**5.06.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**68.916.162**	**APBD**	**100%**	**105.796.362**	**36.880.200**
1.	5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	35.427.162	APBD	1 Laporan	61.414.362	25.987.200
2.	5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	33.489.000	APBD	1 Laporan	28.682.000	(4.807.000)
3.	5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	15.700.000	15.700.000
8	**5.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KKA**	**100%**	**14.839.100**	**APBD**	**100%**	**12.770.900**	**(2.068.200)**
	5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	3 unit	9.599.100	APBD	3 Unit	7.531.500	(2.067.200)
1.	5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatan dan	KKA	5 Unit		APBD	5 Unit	5.239.400	(600)

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		dan Mesin Lainnya	mesin yang dipelihara			5.240.000				
II	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri**	**KKA**	**32,25%**	**298.056.625**	**APBD**	**32,25%**	**76.431.300**	**(221625.325)**
1	**5.06.02.2.01**	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**KKA**	**100%**	**101.954.730**	**APBD**	**100%**	**12.970.300**	**(88.984.430)**
1.	5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	101.954.730	APBD	1 Dok	12.970.300	(88.984.430)
2	**5.06.02.2.02**	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri**	**KKA**	**100%**	**89.836.045**	**APBD**	**100%**	**23.122.900**	**(66.713.145)**
1.	5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	89.836.045	APBD	1 Dok	23.122.900	(66.713.145)
3	**5.06.02.2.03**	**Monitoring dan Evaluasi**	**Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**	**KKA**	**100%**	**106.265.850**	**APBD**	**100%**	**40.338.100**	**(65.927.750)**
1.	5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	106.265.850	APBD	1 Dok	40.338.100	(65.927.750)
Jumlah						**4.262.734.981**			**3.436.173.416,31**	**(826.561.564.69)**

BAB V

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumberdaya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBDP Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja.Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 16 Juli 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH



TETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia - Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana sub kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerjaini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua stakeholder dan/atau pihak pemangku kepentingan.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 16 Juli 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH



FETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAANRENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 16

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 20

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23

3.3. Program dan Kegiatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikatordan Target Renstra..... 14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas..15

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025..... 24

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 26

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025..... 31

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BAKESBANGPOL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, serta memperhatikan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan panduan yang jelas bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **2**

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **8**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **33**

3.1. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 14

3.2. Perubahan Rencana Kerja 15

BAB IV PENUTUP **20**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas pokok Bakesbangpol mencakup berbagai aspek, termasuk pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, penguatan persatuan, serta deteksi dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Fungsi ini menjadi semakin vital dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan sosial-politik yang terus berubah.

Dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politk berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan daya saing daerah. Tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yaitu "Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional", sejalan dengan tugas dan fungsi. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politk berupaya membangun lingkungan yang stabil dan aman bagi investor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa Politk Kabupaten Kepulauan Anambas juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu dan nasional. Kebudayaan Melayu yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kesopanan menjadi landasan moral dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan. Dengan demikian, upaya peningkatan daya saing daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga

memperhatikan aspek sosial dan budaya yang menjadi identitas serta kebanggaan masyarakat Anambas.

Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya mengintegrasikan berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi daerah yang berkelanjutan. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak lepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan dan kerjasama yang optimal, sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat tercapai dengan baik. Dengan latar belakang ini, kami optimis bahwa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2025 akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan daya saing daerah yang lebih baik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragam;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembang Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi ORMAS;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 disusun dalam rangka lebih mensinkronkan terkait kebijakan pemerintah pada masa pandemi serta meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 untuk lebih memfocus pada tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 serta lebih terarahnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2025 pada Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Menggambarkan Pelaksanaan Renja 2025 serta permasalahannya, perubahan anggaran program dan kegiatan, Rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 serta penjelasan perubahan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Rangkuman singkat penjelasan bagian-bagian pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 diarahkan dan berorientasi pada Urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu meningkatkan penanganan kantrantibmas, pendidikan politik bagi parpol dan masyarakat, pembinaan ormas dan OKP serta peningkatan peran forum-forum di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan target capaian rencana kerja yang sudah di tetapkan.

Pada evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian realisasi fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tahun 2025 sebesar 40,89 % dan dan realisasi keuangan mencapai 24,05%. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan capaiaan antara realisasi fisik dan keuangan di sebabkan diantaranya:

1. efisiensi anggaran
2. belum terbayarnya tambahan penghasilan pegawai secara keseluruhan
3. belum terbayarnya belanja sewa gedung kantor.
4. belum terbayarnya tunda bayar tahun 2024.

Selanjutnya pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025, berdasarkan rencana kerja selain terjadi efisensi anggaran juga terdapat program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sedang dalam pelaksanaan sehingga realisasi fisik kegiatan masih kurang dari target yang di rencana.

Pada akhir triwulan kedua pada tahun 2025 program dan kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kegiatan yang selesai di laksanakan yaitu

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2. Pelaksanaan tugas Paskibraka Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya.

Tabel. 2. 1
Evaluasi Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II tahun 2025

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2026(Akhir Periode) (RENSTRA)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Sampai Dengan Tahun 2025	
									Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
8					**Unsur Pemerintahan Umum**								
8	**1**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
8	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Penunjang urusanpemerintah daerah**	**100**						**85,71**
8	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumenperencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100**						**85,71**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5 Dokumen	1 Laporam	1 Laporan	100	6 Laporan	85,71
8	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan**	**100**						**84,92**
8	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50	60 Bulan	83,33
8	1	1	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175 Dokumen	125 Dokumen	25 Dokumen	15 Dokumen	60	150 Dokumen	85,71
8	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	85,71
8	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum**	**100%**						**84,76**
8	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	36 Paket	7 Paket	3 Paket	42,86	42 Paket	85,71
8	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	84 Paket	60 Paket	12 Paket	10 Paket	83,33	72 Paket	85,71
8	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	84 Paket	60 Paket	12 Paket	5 Paket	41,46	712 Paket	85,71

8	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8 Paket	2 Paket	1 Paket	50.00	10 Paket	83,33
8	1	1	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	100 Laporan	25 Laporan	15 Laporan	60.00	125 Laporan	83,33
8	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan sarana danprasarna sesuai kebutuhan**	**100%**						**100**
8	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	25 Unit	0	5 unit	5 unit	20.00	0 unit	0
8	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	**100**
8	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah**	**100%**						**100**
8	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50.00	Nihil	
8	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	12 Laporan	**100**
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	2 Laporan	**100**
8	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	50.00	12 Laporan	**100**
8	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarara danprasarana perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**
8	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	100
8	**1**	**2**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Indeks kepuasan masyarakat di bidangIdeologi dan wawasan kebangsaan**	**77,00 (Baik)**						**77,00 (Baik)**
8	1	2	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang IdeologiPancasila dan Karakter Kebangsaan**								
8	1	2	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	21 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	23,81	4 Dokumen	100
8	1	2	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokuemn	-	1 Dokuemn	1 Dokuemn	25,00	1 Dokuemn	100
8	1	2	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 orang	-	50 Orang	50 Orang	25,00	374 Orang	100
8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 Orang	30 Oang	30 Oang	120 Orang	57,14	300 Orang	100
8	1	2	2.01	05	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	25,00	4 Laporan	100

8	**1**	**3**				Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (VotersTurnout)	84%						84%
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan EtikaSerta Budaya Politik	Indeks kepuasan masyarakat dibidangpoldagri	78,50 (BAIK)						78,50(BAIK)
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaankekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	20 Kasus						0 Kasus
8	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								
8	1	3	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	840 Orang	20	200	240	28,57	100	116,95
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	50,00	11 Laporan	100
8	**1**	**4**			**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas	79,00 (BAIK)	**90,74**	77,50(BAIK)	98,73	77,00	87,30	112,28
						Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	20 Kasus	0	4 Kasus	0	200	0	200
						Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap	6 Ormas	0	1 Ormas	0	200	0	200
						Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauananambas	8 Ormas	0	3 Ormas	0	0	30 Ormas	100
8	**1**	**4**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan OrganisasiKemasyarakatan**								
8	1	4	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	170 Orang	30 Orang	30 Orang	80 Orang	47,06	30 Ormas	100
8	1	4	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14 Laporan	37,84	1 Laporan	100
8	**1**	**5**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya danagama**	77,50 (Baik)	**90,74**	76,69 (Baik)	83,33 (BAIK)	**107,52**	87,30 (BAIK)	**112,28**

						Jumlah aturan tertulis yang membatasikebebasan menjalankan ibadah agama	6 aturan	0	1 aturan	0	200	1 aturan	100
						Jumlah kasus tindakan/pernyataanpejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	5 kasus	0	2 kasus	0	200	Nihil	Nihil
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkaitajaran agama	5 kasus	0	2 kasus	0	200	0	200
						Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	1225	147	-	147	12,00	300 Orang	100
						Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25 kali	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
						Jumlah laporan di bidang ketahananekonomi sosial budaya dan agama	30 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	16,67	2 laporan	100
						Jumlah koordinasi/ komunikasi denganForum Kerukunan Umat Beragama	32 kali	2 kali	2 kali	2 kali	6,25	2 kali	100
						Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yangterbentuk	1 tim/ forum/ gugustugas	1 tim/forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugustugas	100	Nihil	Nihil
						Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat	5 kali	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
						Jumlah kegiatan RAN P4GN	5 kali	2	Nihil	**2**	40,00	**1 Kegiatan**	100
8	**1**	**5**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								
8	1	5	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya	41 Dokunen	4 Dokumen	9 Dokumen	13 Dokumen	31,71	100	
8	1	5	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Eko nomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Ber agama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	Jumlah Kebijakan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Nihil	1 Dokuen	1 Dokuen	25,00	100	
8	1	5	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	174 Orang	29 Orang	29 Orang	87 Orang	25,00	100	
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah	217 Orang	31 Orang	31 Orang	124 Orang	57,14	100	
8	1	5	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	40,00	100	
8	**1**	**6**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas DanFasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial didaerah**	**85%**	80%	80%	80%	94,12	80	

8	**1**	**6**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan KewaspadaanNasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**jumlah fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dinidan penanganan konflik di daerah**	**60 Rapat**	10 **Rapat**	10 **Rapat**	**30 Rapat**	50,00	**100**	
8	1	6	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewas padaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	50	
8	1	6	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelem bagaan Bidang Kewaspa daan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerahyang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	100	
8	1	6	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspa daan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	0	20 Orang	20 Orang	20,00	100	
8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, peman tauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	20 Orang	20 Orang	60 Orang	50,00	100	
8	1	6	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelem bagaan Bidang Kewas padaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2190 LaporanHarian	365 LaporanHarian	365 LaporanHarian	1095 LaporanHarian	50.00	100	
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokunen	2 Dokunen	6 Dokunen	50,00	100	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

3.1. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rencana kerja tahun 2025 yang terdiri dari 5 (Lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan serta 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pada pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan ke II hampir semua kegiatan telah dilaksanakan, baik kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dalam pelaksanaan.

Pada renja tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga berpengaruh pada Pembinaan dan koordinasi ormas di kabupaten kepulauan anambas terkait isu yang berkembang dan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan ormas, serta pendidikan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan bagi aparatur, masyarakat dan pelajar dalam rangka penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa dan politik dalam negeri.

Kegiatan dalam pelaksanaa seperti pembinaan keberagaman suku, budaya dan agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dimaksimalkan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan di setiap kecamatan dan pembentukan serta pembinaan forum kerukunan umat beragama dan forum pembauran kebangsaan sebagai wadah bersosialisasi dan diskusi sehingga permasalahan yang terjadi ditingkat kecamatan dapat diselesai pada tingkatnya.

Pada akhir triwulan ke II pada renja tahun 2025 masih terdapat program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga berdampak lambatnya pencapaian target yang diharapkan dan pada akhirnya pada perubahan anggaran tahun 2025 perlu di lakukan evaluasi kinerja serta melakukan perubahan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

3.2. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu menselaraskan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan pencapaian target Renstra.

Dengan menselaraskan perubahan rencana kerja pemerintah daerah berdampak perubahan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025. Perubahan pertama terjadi pada belanja tidak langsung yaitu penyesuaian belanja pegawai terhadap penambahan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya perubahan anggaran pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dan dilakukan pada perubahan anggaran tahun 2025 dalam rangka pembinaan serta mendorong penguatan ideologi dan kesatuan bangsa

Selanjutnya upaya mendeteksi permasalahan yang terjadi di daerah yang merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana kesatuan bangsa didaerah dengan mensiasati permasalahan yang ada sehingga permasalahan tidak muncul ke permukaan sebagai bentuk pencegahan dini di masyarakat, upaya deteksi dini diperkuat dengan berkoordinasi pihak terkait dan tim kewaspadaan dini di daerah serta tim pengumpul data dengan memaksimalkan penganggaran yang memadai. Dengan perubahan rencana kerja diharapkan memulihkan kembali kondisi penganggaran serta mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelum perubahan sehingga pencapaian kinerja yang diharapkan.

Rencana perubahan rencana kerja yang dimaksud diatas berupa program dan kegiatan yang di rencana pada Rancangan Akhir Renja Kerja tahun 2025. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam Matrik Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan Tahun Anggaran 2025.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	APBD Tahun 2025				Perubahan APBD Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
8					**Unsur Pemerintahan Umum**								
8	**1**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**				**7.542.236.186**			**6.786.545.272**	
8	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Penunjang urusanpemerintah daerah**	**KKA**	**100%**	**5.007.677.758**	**APBD**	**100%**	**4.712.339.744**	**APBDP**
8	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumenperencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**KKA**	**100%**	**0**	**APBD**	**100%**	**0**	**APBDP**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0	s	1 Dokumen	0	
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporam	0		1 Laporam	0	
8	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan**		**100%**	**4.170.030.504**		**100%**	**4.096.537.626**	
8	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	4.045.350.504		12 Bulan	3.957.717.626	
8	1	1	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25 Dokumen	124.680.000		25 Dokumen	138.820.000	
8	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0	
8	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum**		**100%**	**448.286.585**		**100%**	**252.632.880**	
8	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	53.955.995		7 Paket	25.900.320	
8	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	10.399.730		12 Paket	13.626.396	
8	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan		12 Paket	60.167.460		12 Paket	53.311.600	
8	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	15.677.400		2 Paket	3.170.600	

8	1	1	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	308.086.000		25 Laporan	156.623.964	
8	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan**		**100%**	**336.971.936**		**100%**	**284.369.600**	
8	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	43.338.372		0	0	
8	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan		1 Unit	118.963.964		1 Unit	109.700.000	
8	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	174.669.600		1 Unit	174.669.600	
8	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah**		**100%**	**26.670.733**		**100%**	**59.633.638**	
8	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	0		12 Laporan	0	
8	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	22.420.733		12 Laporan	19.907.624	
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4.250.000		12 Laporan	1.350.000	
8	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	0		12 Laporan	38.376.014	
8	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarara danprasarana perkantoran**		**100%**	**9.290.000**		**100%**	**0**	
8	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	4.400.000		0	0	
8	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara		2 Unit	4.890.000	0	0	0	
8	**1**	**2**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Indeks kepuasan masyarakat di bidangIdeologi dan wawasan kebangsaan**		**77,00**	**1.403.983.449**		**77,00**	**1.140.163.748**	
8	1	2	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang IdeologiPancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan** **Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara** **Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan** **Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas –** **Terlaksananya kegiatan GNRM** **Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan - Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan** **Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan**		**1 Forum** **1 Kali** **1 Tim** **2 Kali** **4 Kali** **50 Orang**	**1.403.983.449**		**1 Forum** **1 Kali** **1 Tim** **2 Kali** **4 Kali** **50 Orang**	**1.140.163.748**	
8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 Oang	100.000.000		30 Oang	48.184.626,00	
8	1	2	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		45 Orang	1.303.983.449		45 Orang	1.011.979.122	

8	**1**	**3**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan EtikaSerta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (VotersTurnout)**		**84%**	**488.058.589**		**84%**	**488.058.589**	
						Indeks kepuasan masyarakat dibidangpoldagri		**78,50(BAIK)**			**78,50(BAIK)**		
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaankekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat		**20 Kasus**			**0 Kasus**		
8	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik - Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik - Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik - Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik**		**0 Partai 1 Rapat 20 Orang 4 Rapat 60 Orang**	**442.071.589**		**0 Partai 1 Rapat 20 Orang 4 Rapat 60 Orang**	**488.058.589**	
8	1	3	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		30 Orang	442.071.589		30 Orang	427.507.589	
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Laporan	0		1 Laporan	0	
8	1	3	2.01	06	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		1 Laporan	0		1 Laporan	60.551.000	
8	**1**	**4**			**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas**		**79,00(BAIK)**	100.000.000		**79,00(BAIK)**	**0**	
						Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat		**20 Kasus**			**20 Kasus**		
						Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap		**6 Ormas**			**6 Ormas**		
						Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauananambas		8 Ormas			8 Ormas	0	
8	**1**	**4**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan OrganisasiKemasyarakatan**	**Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana ibah Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan**		10 Kecamatan 1 Tim 40 Orang 8 Ormas 8 Rapat	100.000.000		0	0	

						Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas							
8	1	4	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporam	100.000.000			0	
8	**1**	**5**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya danagama**		**77,50 (Baik)**	**259.891.870**		**77,50 (Baik)**	**119.393.944**	
8	**1**	**5**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah aturan tertulis yang membatasikebebasan menjalankan ibadah agama**		**1 aturan**			**1 aturan**		
						Jumlah kasus tindakan/pernyataanpejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama		Nihil			Nihil		
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkaitajaran agama		0			0		
						Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba		300 Orang			300 Orang		
						Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Nihil	**259.891.870**		Nihil	**119.393.944**	
						Jumlah laporan di bidang ketahananekonomi sosial budaya dan agama		2 laporan			2 laporan		
						Jumlah koordinasi/ komunikasi denganForum Kerukunan Umat Beragama		2 kali			2 kali		
						Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yangterbentuk		Nihil			Nihil		
						Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat		Nihil			Nihil		
						Jumlah kegiatan RAN P4GN		**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**		
8	1	5	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Eko nomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Ber agama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	Jumlah Kebijakan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	50.013.870		1 Dokumen	39.393.944	
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah		30 Orang	209.878.000		30 Orang	80.000.000	
8	**1**	**6**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas DanFasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial didaerah**		**80%**	**428.611.520**		**80%**	**326.589.247**	
8	**1**	**6**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan KewaspadaanNasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**jumlah fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dinidan penanganan konflik di daerah**		**10 Rapat**	**428.611.520**		**10 Rapat**	**326.589.247**	
8	1	6	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspa daan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah		30 Orang	0		0	0	
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota		1 Dokunen	428.611.520		1 Dokunen	326.589.247	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai gambaran kondisi yang diinginkan untuk mencapai target dan sasaran dalam rencana kerja tahun 2025 yang landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan pertimbangan terkait tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta mengacu pada ketentuan yang berlaku .

Selanjutnya evaluasi capaian rencana kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan kedua terdapat 2 (dua) kegiatan yang belum di laksanakan. Kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu secara spesifik kegiatan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dan pada perubahan anggaran tahun 2025 diupayakan untuk direalisasikan, selanjutnya kegiatan yang sifatnya bulanan dan rutinitas kantor masih berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian kiranya disampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025, semoga dapat menjadi pertimbangan dan menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam perumusan rencana kerja.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 200312 1 004

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* kami panjatkan kehadirat Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam berbagai tujuan, sasaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran berjalan, khususnya terkait dengan ketersediaan anggaran belanja daerah dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan guna mengakomodir kebutuhan perangkat daerah.

Dengan adanya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ZAIRIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 200003 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025 ..... **11**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **18**

BAB IV PENUTUP **25**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai

dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Forum Perangkat Daereah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setia Perangkaat Daerah, yang disusun sesuai berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025 serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah, Taca Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Taca Cara Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veerifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepualuan Anambas Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684).

32. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
33. Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 180 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan;
f. Efisiensi belanja perangkat daerah sesuai dengan Instruksi Presiden dan Instruksi Bupati Kepulauan Anambas nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah ddalam rangka Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Anambas Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik terdiri dari Latar Belakang Penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada BAB ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini memuat program, kegiataan dan sub kegiatan tahun 2025 yang mengalamai perubahan atau pergeseran dalam hal nama kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan maupun kelompok sasaran.

BAB IV PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang diraih selama tahun anggaran berjalan.

Perlu disampaikan bahwa dalam periode Triwulan II Tahun 2025, terdapat perubahan/penyesuaian anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditujukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan efisiensi anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu, perubahan/penyesuaian juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pembayaran Utang Belanja Tahun Anggaran 2024. Proses perubahan/penyesuaian dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Dengan adanya pergeseran tersebut, maka pagu belanja yang semula sebesar **Rp.12.783.760.215,00** diefisiensi sebesar **Rp.3.103.351.613,00** sehingga mengalami penurunan pagu anggaran menjadi **Rp.9.680.408.613,00**.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa evaluasi Renja dilakukan untuk realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II bulan Juni 2025 dengan nilai realisasi kinerja sebesar **48,50%** dan realisasi anggaran mencapai **Rp.2.934.478.628,00** atau **24,74%.**

Secara rincian hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan angaran sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Reaslisasi s.d Triwulan I (%)		Kendala yang Dihadapi
						I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (7/5)*100		11
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**9.632.003.563**	**32,13**	**1.437.574.242**	**41,59**	**2.363.938.268**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**41,59**	**24,54**	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Persen	100	200.000	30,00	0	50,00	0	0,00	0	0,00	0	**50,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	5	100.000	2	0	3	0	0	0	0	0	60,00	0,00	
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	100.000	1	0	2	0	0	0	0	0	40,00	0,00	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persen	100	8.423.756.713	38,78	873.122.036	59,18	1.786.581.740	0,00	0	0,00	0	**59,18**	**21,21**	
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	28	8.319.676.713	28	851.742.036	28	1.765.201.740	0	0	0	0	100,00	21,22	

1.05.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	70	104.080.000	10	21.380.000	30	21.380.000	0	0	0	0	42,86	20,54	
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	Persen	100	33.564.000	0,00	3.326.000	0,00	3.326.000	0,00	0	0,00	0	**0,00**	**9,91**	
1.05.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	33.564.000	0	3.326.000	0	3.326.000	0	0	0	0	0,00	9,91	
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	Persen	100	70.468.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	**0,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	70.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Persen	100	218.087.879	28,97	55.681.460	39,25	61.785.460	0,00	0	0,00	0	**39,25**	**28,33**	
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	5.250.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	68.245.031	2	12.008.500	5	12.008.500	0	0	0	0	50,00	17,60	
1.05.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	6.001.844	8	1.834.800	8	1.834.800	0	0	0	0	53,33	30,57	

1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	32.682.980	3	13.986.000	5	19.110.000	0	0	0	0	50,00	58,47	
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.897.100	3	4.568.760	6	4.568.760	0	0	0	0	50,00	77,47	
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	100.010.000	15	23.283.400	18	24.263.400	0	0	0	0	36,00	24,26	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	344.735.421	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	**100,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	344.735.421	1	0	1	0	0,00	0	0,00	0	100,00	0,00	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	529.752.702	25,00	494.624.466	50,00	501.424.788	0,00	0	0,00	0	**50,00**	**94,65**	
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43.350.000	3	8.221.764	6	15.022.086	0	0	0	0	50,00	34,65	
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	486.402.702	3	486.402.702	6	486.402.702	0	0	0	0	50,00	100,00	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	11.438.848	34,29	10.820.280	34,29	10.820.280	0,00	0	0,00	0	**36,09**	**94,59**	

1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	10.828.848	12	10.820.280	12	10.820.280	0	0	0	0	60,00	99,92	
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan**	**Persen**	**92**	**48.405.050**	**25,00**	**2.490.000**	**50,00**	**30.540.000**		**-**		**-**	**54,35**	**63,09**	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	**Persen**	**100**		**27,75**		**53,90**						**53,90**		
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	92	18.405.000	14,29	2.490.000	42,86	2.490.000	0,00	0	0,00	0	**46,58**	**13,53**	
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dok	12	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.05.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Dok	12	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

	dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum														
1.05.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	35	18.205.000	5	2.490.000	15	2.490.000	0	0	0	0	42,86	13,68	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	Persen	92	200.000	0,00	0	50,00	0	0,00	0	0,00	0	**54,35**	**0,00**	
1.05.02.2.02.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Laporan	10	100.000	0	0	5	0	0	0	0	0	50,00	0,00	
1.05.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	40	100.000	0	0	20	0	0	0	0	0	50,00	0,00	

1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS yang aktif	Persen	60	29.800.050	0,00	0	0,00	28.050.000		0		0	**0,00**	**94,13**	
1.05.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1	100.050	0	0	0	0					0,00	0,00	
1.05.02.2.03.05	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	12	29.700.000	0	0	6	28.050.000					50,00	94,44	
JUMLAH				**100,00**	**9.680.408.613**	**28,29**	**1.440.064.242**	**48,50**	**2.394.478.268**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**48,50**	**24,74**	

Catatan : *Pagu anggaran sebelum pergeseran adalah sebesar* ***Rp.12.783.760.215,00***

Dengan memperhatikan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong dan juga penghambat dalam pencapaian kinjera, yaitu:

1. Faktor Pendorong

- Adanya persiapan yang baik dari pelaksana kegiatan;
- Terjalinnya komunikasi dari semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- Adanya komunikasi yang baik dari penanggung jawab kegiatan, baik secara vertikal maupun horisontal;

2. Faktor Penghambat

- Kualifikasi dan klasifikasi aparatur yang masih terbatas;
- Jumlah personil yang masih terbatas;
- Kurangnya sarana dan prasarana;
- Adanya efisiensi anggaran sehingga proses pengajuan untuk pencairan dana baik berupa Belanja UP/GU maupun Belanja LS tidak berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II, untuk tahun 2025 untuk penambahan program, kegiatan tidak terdapat penambahan. Penambahan hanya dilakukan pada Sub kegiatan.

Pada awal tahun anggaran berjalan terdapat beberapa kondisi dimana kepada setiap perangkat daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian kembali anggaran belanja tahun berjalan. Dan kondisi ini juga berlanjut hingga diadakannya Rapat Percepatan pelaksanaan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari hasil rapat tersebut terdapat beberapa catatan hasil rapat yaitu :

1. Perhitungan gaji PNS dan PPPK sebelum formasi tahun 2024 dianggarkan sebanyak 14 bulan;
2. Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan PPPK sebelum formasi tahun 2024 dianggarkan sebanyak 14 bulan;
3. Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dianggarkan sebanyak 7 bulan terhitung mulai bulan Juni 2025 dengan besaran 80% dari gaji PNS;
4. Gaji PPPK Tahap I dianggarkan sebanyak 7 bulan terhitung mulai bulan Juni 2025;
5. Gaji PPPK Tahap II dianggarkan sebanyak 3 bulan terhitung mulai bulan Oktober 2025;
6. Belanja Mandatory (DAK, DAU SG, DD, ADD dan BHPRD) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditentukan;
7. Utang belanja tahun anggaran 2024 dianggarkan sesuai hasil reviu APIP terhadap Pengakuan Utang Daerah.

Disamping kebijakan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat beberapa catatan lain yang terkait dengan Belanja Rutinitas Perkantoran dan Belanja Kegiatan Wajib Perangkat Daerah yaitu :

1. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dianggarkan sesuai dengan pagu anggaran hasil efisiensi dengan jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dikurangi;
2. Untuk OPD yang masih menyewa, Belanja Sewa Gedung/Gudang/Rumah tetap dianggarkan;
3. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dianggarkan sekitar 30 s.d 50 juta;
4. Belanja Logistik Kantor dianggarkan sekitar 20 s.d 30 juta;
5. Belanja Listrik, Air dan Internet kantor dianggarkan sesuai kebutuhan real (At Cost);
6. Belanja bahan bakar diutamakan untuk ambulance, PUSKEL, RORO dan angkutan persampahan;
7. Belanja Perjalanan Dinas dipusatkan pada pada sub kegiatan Rutin OPD dengan besaran sekitar 70 s.d 150 juta;
8. Untuk belanja Kegiatan Wajib OPD hanya dianggarkan untuk Pelayanan Dasar dan kegiatan yang menunjang Agenda Utama Daerah;
9. Sub kegiatan yang diefisiensi pagunya jangan sampai Rp.0,00 (Nol) terutama pada sub kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Mandatory.

Dalam rangka mengakomodir kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan perhitungan tambah kurang terhadap setiap komponen belanja pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk juga menambah 1 (satu) sub kegiatan baru untuk mengakomodir utang belanja tahun 2024.

Dalam rangka efisiensi anggaran belanja tahun 2025, pagu belanja untuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk perubahan APBD tahun anggaran 2025 dipatok sebesar **Rp.9.980.408.613,23** Jadi Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp.2.803.351.601,77** atau sebesar **21,93%.** dari pagu anggaran yang semula sebesar **Rp.12.783.760.215,-**

Adapun rincian terkait Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dalam rangka efisiensi dengan nilai pagu sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**13.065.556.448,00**	**12.783.760.215,00**	**9.980.408.613,23**	**-3.085.147.834,77**							**21.655.978.801,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.065.556.448,00**	**12.783.760.215,00**	**9.980.408.613,23**	**-3.085.147.834,77**							**21.655.978.801,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13.065.556.448,00**	**12.783.760.215,00**	**9.980.408.613,23**	**-3.085.147.834,77**							**21.655.978.801,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**12.578.897.448,00**	**12.483.563.876,00**	**9.936.343.563,23**	**4.277.081.353,00**							**16.855.978.801,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	39.827.000,00	200.000,00	-29.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	19.877.000,00	100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	19.950.000,00	100.000,00	-19.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan*				100 Persen	100 Persen	5.302.348.104,00	11.453.133.534,00	8.920.029.788,66	3.617.681.684,66			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		7.032.152.543,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.174.068.104,00	11.324.853.534,00	8.842.969.788,66	3.668.901.684,66	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			6.871.232.543,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				70 Dokumen	70 Dokumen	128.280.000,00	128.280.000,00	77.060.000,00	-51.220.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			160.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan*				100 Persen	100 Persen	33.564.000,00	33.564.000,00	16.782.000,00	-16.782.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.564.000,00	33.564.000,00	16.782.000,00	-16.782.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan*				100 Persen	100 Persen	239.220.000,00	156.678.000,00	100.500,00	-239.119.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	26 Orang	239.220.000,00	156.678.000,00	100.500,00	-239.119.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan*				100 Persen	100 Persen	461.535.938,00	366.329.639,00	112.187.455,00	-349.348.483,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		960.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.246.737,00	5.250.924,00	101.568,00	-5.145.169,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	90.847.784,00	71.645.031,00	43.943.810,00	-46.903.974,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	9.596.177,00	8.270.284,00	2.379.697,00	-7.216.480,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	83.872.240,00	47.560.500,00	26.475.680,00	-57.396.560,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.529.000,00	13.887.900,00	4.574.700,00	-8.954.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	258.444.000,00	219.715.000,00	34.712.000,00	-223.732.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	416.183.300,00	353.105.325,00	353.105.325,00	-63.077.975,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	366.183.300,00	353.105.325,00	353.105.325,00	-13.077.975,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	6.061.158.576,00	43.350.000,00	522.816.702,00	-5.538.341.874,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		6.593.826.258,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.350.000,00	43.350.000,00	36.414.000,00	-6.936.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			90.856.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.017.808.576,00	0,00	486.402.702,00	-5.531.405.874,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			6.502.970.208,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				95 Persen	95 Persen	34.887.530,00	37.576.378,00	11.121.792,57	-23.765.737,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	26.967.530,00	32.906.378,00	10.828.848,00	-16.138.682,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.920.000,00	4.670.000,00	292.944,57	-7.627.055,43	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**				**100 92 Persen Persen**	**100 92 Persen Persen**	**486.659.000,00**	**300.196.339,00**	**44.065.050,00**	**4.313.341.000,00**							**4.800.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti*				92 Persen	92 Persen	230.295.000,00	126.009.199,00	14.065.000,00	-216.230.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Msyarakat		2.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.740.000,00	100.000,00	-19.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.083.103,00	100.000,00	-19.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				35 laporan	35 laporan	140.295.000,00	105.186.096,00	13.865.000,00	-126.430.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani*				92 Persen	92 %	93.630.000,00	33.433.140,00	200.000,00	-93.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Msyarakat		2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	16.493.140,00	100.000,00	-49.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40 Laporan	40 Laporan	43.630.000,00	16.940.000,00	100.000,00	-43.530.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS yang aktif*				60 Persen	60 Persen	162.734.000,00	140.754.000,00	29.800.050,00	-132.933.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.584.000,00	80.104.000,00	100.050,00	-79.483.950,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				12 Laporan	12 Laporan	83.150.000,00	60.650.000,00	29.700.000,00	-53.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**13.065.556.448,00**	**12.783.760.215,00**	**9.980.408.613,23**	**-548.753.730.731,26**							**21.655.978.801,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir dinamika perubahan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan diharapkan dapat mempertajam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditentukan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam rangka perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah:

1. Untuk mengakomodir kebutuhan untuk pembayaran Utang belanja tahun anggaran 2024;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Bupati Kepulauan Anambas nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Anambas Tahun Anggaran 2025.
3. Rasionalisasi belanja gaji dan tunjangan ASN dalam rangka mengakomodir penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Optimalisasi dan efektifitas belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan prangkat daerah;
5. Penyesuaian belanja pendukung operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perubahan dilakukan dengan menggeser, mengurangi dan menambah beberapa komponen belanja dari sub-sub kegiatan menyesuaikan dengan kondisi real dari kebutuhan belanja tersebut dengan catatan bahwa masih diperlukan tambahan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai hingga akhir tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 16 Juli 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ZAIRIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 200003 1 005



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA



TAHUN 2025



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

disdikpora16@gmail.com

Disdikpora Anambas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perangkat Daerah dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan Akhir perubahan Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Secara konstektual, Renja memuat visi, misi, nilai-nilai dan faktor tertentu penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan akan dicapai.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2025 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pendidikan. Secara spesifik Renja memuat indikator program dan kegiatan bidang – bidang yang menjadi kompetensi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan Rancangan yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan prakiraan maju pada tahun 2026 sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai pada tahun 2025 akan menjadi bahan pertimbangan untuk diperbaiki pada tahun 2026 mendatang dengan peningkatan kinerja melalui disiplin dalam pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati dan dapat mengakomodir

semua program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam penyusunan dokumen Renja ini. Dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197306022003121013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14
2.2 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Anambas tahun 2024 29
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 34
BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Disdikpora Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....14
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Disdikpora Kab. Kep. Anambas sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 15
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdikpora Kab. Kep. Anambas 23
Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdikpora Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 27
Tabel 3.3 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Disdikpora Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyampaikan diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah jangka pendek pada rentang waktu (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) maupun jangka menengah dalam rentang waktu (lima tahunan) yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Dari rentang waktu tersebut maka dari itu acuan penyelenggaraan pembangunan daerah jangka pendek Rencana Kerja (Renja) perlu dipersiapkan.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, tantangan dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan Pembangunan merupakan modal utama mewujudkan harapan tersebut.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Akhir Perubahan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

"Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul Di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera".

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyeseuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah meliputi:

A. Pendahuluan;
B. Hasil evaluasi Renja PD sampai triwulan II tahun berkenaan;
C. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
D. Penutup.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam hal ini Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2025. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Persiapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun sekarang dan selanjutnya akan lebih ditingkatkan secara matang dengan beberapa penambahan inovasi di tahun 2024 dan akan terus dijalankan dengan sebaik-baiknya ditahun yang akan dilaksanakan, salah satu dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yakni :

1. Cerdas Anambas Tahun 2024
2. Pohon Ragi dan Ara Tahun 2024
3. Si Paling Mudah Tahun 2024
4. Gasing Pora Tahun 2024
5. Aku Inspirasimu Tahun 2024.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD. Renstra-OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 3 Kabupaten Kepulauan Anambas

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
18. Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini, adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan, dengan tujuan agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang merupakan salah satu Dinas Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Menuju tercapainya integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, efisiensi dan bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun dengan Rencana Strategis Dinas terkait di daerah dan Tingkat Provinsi serta Tingkat Pemerintah Pusat.

Substansi cakupan Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2025 ini, adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang khusus diturunkan dari uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai bidang terkait dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan RPJMD sebagai rujukan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Terkait dengan hal tersebut, Perangkat Daerah menyusun rencana pembangunan berupa :

1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).
2) Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi dari Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis dan operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat: visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang disampaikan pada saat Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah selama periode rencana, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program-program pembangunan yang disertai dengan rencana-rencana kegiatan baik dalam kerangka anggaran maupun dalam kerangka regulasi.

Sedangkan RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali.

Hubungan antara Renja, Renstra, RPJMD Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana digambarkan berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan Renja, Renstra, RPJMD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 baik yang mengalami perubahan atau pergeseran dalam hal nama kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, maupun kelompok sasaran (tabel pendanaan menggunakan sipd).

Bab IV. Penutup

Memuat uraian penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2024 dan target tahun 2025 (tahun berjalan).

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025, implementasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas diatas juga menjadi "*concern*" tersendiri dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kab. Kep. Anambas pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Disdikpora Kab. Kep. Anambas Tahun 2025
Berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	42 Orang
2.	Perempuan	41 Orang
Jumlah		**83 Orang**

Dari tabel diatas, kondisi pegawai Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sejumlah 83 orang, yang terdiri dari 42 orang (50,6%) pegawai laki-laki dan 41 orang (49,4%) pegawai perempuan. Pelaksanaan Perubahan Renja Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan laki- laki dan perempuan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 sebesar Rp.59,120.294.320,- atau sebesar 25,16 persen dari total anggaran sebesar Rp.234,992.106.233,79,-. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan dan realisasi pelaksanan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kep. Anambas
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
					KEUANGAN			FISIK				
					REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		KAS	DPA	
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**181.899.221.414,99**	**77,41**		**56.165.095.249,00**	**30,88**	**39,89**		**22,62**		**125.734.126.165,99**	
1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 150.000,00**	0,00		**Rp -**	**0,00**	**0,00**		**-**		**150.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.000	0,00		-	-	0,00	-	-		150.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 176.428.574.729,19**	**75,08**		**Rp 53.062.536.335**	**30,08**	**22,58**	**30,08**	**22,58**		**123.366.038.394**	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 174.828.807.449,19	74,40		52.931.576.335	30,28	22,52	30,28	22,52		121.897.231.114	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.599.767.280,00	0,68		130.960.000	8,19	0,06	8,19	0,06		1.468.807.280	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 25.000.000,00**	**0,01**		**Rp -**	**-**			**-**		**25.000.000**	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp 25.000.000	0,01			-	0,00	-	-		25.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 1.103.916.929,02**	**0,47**		**Rp 64.175.000**	**5,81**	**0,03**		**0,03**		**1.039.741.929**	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp 200.000.000,00	0,09		-	-	0,00	-	-		200.000.000	
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 283.825.874,00	0,12		-	-	0,00	-	-		283.825.874	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 111.800.000,00	0,05			-	0,00	-	-		111.800.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 306.882.326,00	0,13		36.255.000	11,81	0,02	11,81	0,02		270.627.326	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 15.300.000,00	0,01		15.200.000	99,35	0,01	99,35	0,01		100.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 186.108.729,02	0,08		12.720.000	6,83	0,01	6,83	0,01		173.388.729	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 100.000.000,00**	**0,04**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**100.000.000**	
11	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 100.000.000	0,04		-	-	0,00	-	-		100.000.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 3.562.550.798,78**	**1,52**		**Rp 3.028.623.914**	**85,01**	**1,29**		**0,01**		**Rp 533.926.884,78**	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 201.803.411,78	0,09		8.110.000	4,02	0,00	4,02	0,00		193.693.411,78	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 188.774.937,00	0,08		22.041.464	11,68	0,01	11,68	0,01		166.733.473	
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 90.300.000,00	0,04		6.600.000	7,31	0,00	7,31	0,00		83.700.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3.081.672.450,00	1,31		2.991.872.450	97,09	1,27	97,09	1,27		89.800.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 679.028.958**	**0,29**		**Rp 9.760.000**	**1,44**	**0,00**		**0,00**		**669.268.958**	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 316.027.602	0,13		-	-	0,00	-	-		316.027.602	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 164.061.756	0,07		-	-	0,00	-	-		164.061.756	
18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 150.000.000	0,06		-	-	0,00	-	-		150.000.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 48.939.600	0,02		9.760.000	19,94	0,00	19,94	0,00		39.179.600	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**45.250.846.390,03**	**19,26**		**Rp 2.955.199.071**	**6,53**	**1,26**		**12,72**		**42.295.647.319,03**	
8	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**20.261.902.598,30**	**8,62**		**Rp 1.436.130.695**	**7,09**	**0,61**		**6,51**		**18.825.771.903,30**	
20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 200.000.000,00	0,09		-	-	0,00	-	-		200.000.000,00	
21	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp -	0,00		-	-	0,00	-	-		-	
22	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 220.450.781,00	0,09		178.544.641		0,00	-	-		41.906.140,00	
23	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.457.556.420,00	0,62		579.411.112	39,75	0,25	39,75	0,25		878.145.308,00	
24	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 324.641.344,00	0,14		233.646.919	71,97	0,10	71,97	0,10		90.994.425,00	
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 56.621.733,00	0,02			-	0,00	-	-		56.621.733,00	
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 269.794.970,10	0,11		-	-		-	-		269.794.970,10	
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 1.246.875.532,00	0,53		-	-	0,00	-	-		1.246.875.532,00	
28	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 2.057.379.228,00	0,88		-	-	0,00	-	-		2.057.379.228,00	
29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 127.024.705,00	0,05		-	-	0,00	-	-		127.024.705,00	
30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 112.740.260,00	0,05		-	-	0,00	-	-		112.740.260,00	

31	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	296.528.890,00	0,13		-	-	0,00	-	-		296.528.890,00	
32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	16.500.084,00	0,01		-	-	0,00	-	-		16.500.084,00	
33	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Rp	7.591.807.000,00	3,23		-	-	0,00	-	-		7.591.807.000,00	
34	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Rp	3.655.000,00	0,00			-	0,00	-	-		3.655.000,00	
35	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp	6.498.500,00	0,00		-	-	0,00	-	-		6.498.500,00	
36	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp	3.655.000,00	0,00		-	-	0,00	-	-		3.655.000,00	
37	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	167.935.780,00	0,07		-	-	0,00	-	-		167.935.780,00	
38	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	162.733.145,00	0,07		-	-	0,00	-	-		162.733.145,00	
39	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	3.544.923,00	0,00			-	0,00	-	-		3.544.923,00	
40	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp	150.318.000,00	0,06		-	-	0,00	-	-		150.318.000,00	
41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp	483.678.469,00	0,21			-	0,00	-	-		483.678.469,00	
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	449.683.943,00	0,19		355.920.023	79,15	0,15	79,15	0,15		93.763.920,00	
43	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp	199.332.800,00	0,08		-	-	0,00	-	-		199.332.800,00	
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp	1.538.466.091,20	0,65			-	0,00	-	-		1.538.466.091,20	
45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp	2.615.180.000,00	1,11		88.608.000	3,39	0,04	3,39	0,04		2.526.572.000,00	
46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp	499.300.000,00	0,21		-	-	0,00	5,38	0,15		499.300.000,00	
9	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**16.631.123.223,86**	**7,08**		**Rp 1.519.068.376**	**9,13**	**0,65**		**0,52**		**15.112.054.847,86**	
47	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp	425.546.758,00	0,18		143.747.363	33,78	0,06	33,78	0,06		281.799.395,00	
48	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp	215.755.421,00	0,09		147.473.576		0,00	-	-		68.281.845,00	
49	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp	-	0,00		-		0,00	-	-		0,00	
50	Pembangunan Laboratorium	Rp	1.508.543.627,00	0,64		755.864.330	50,11	0,32	50,11	0,32		752.679.297,00	
51	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	543.614.915,00	0,23		288.947.107	53,15	0,12	53,15	0,12		254.667.808,00	
52	Pembangunan Kantin Sekolah	Rp	310.902.558,12	0,13		-	-	0,00	-	-		310.902.558,12	
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	1.868.868.127,31	0,80		-	-	0,00	-	-		1.868.868.127,31	
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp	90.561.369,00	0,04		-	-	0,00	-	-		90.561.369,00	
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		0,00	
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	1.541.626.033,10	0,66		-	-	0,00	-	-		1.541.626.033,10	
57	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp	1.432.070.588,00	0,61		-	-	0,00	-	-		1.432.070.588,00	
58	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp	2.113.577.800,00	0,90		183.036.000	8,66	0,08	8,66	0,08		1.930.541.800,00	
59	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp	121.359.935,00	0,05		-	-	0,00	-	-		121.359.935,00	
60	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	144.437.910,00	0,06		-	-	0,00	-	-		144.437.910,00	
61	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	289.583.651,00	0,12		-	-	0,00	-	-		289.583.651,00	
62	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		0,00	
63	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp	4.599.480.000,00	1,96		-		0,00	-	-		4.599.480.000,00	
64	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	194.046.311,00	0,08		-		0,00	-	-		194.046.311,00	
65	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	140.862.290,00	0,06		-		0,00	-	-		140.862.290,00	
66	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp	129.114.000,00	0,05		-		0,00	-	-		129.114.000,00	
67	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	-	0,00		-		0,00	-	-		0,00	
68	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp	229.626.960,00	0,10		-		0,00	-	-		229.626.960,00	
69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp	332.944.970,33	0,14		-		0,00	-	-		332.944.970,33	
70	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp	398.600.000,00	0,17		-		0,00	-	-		398.600.000,00	
10	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**8.013.340.567,87**	**3,41**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**8.013.340.567,87**	
70	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp	2.170.477.394,27	0,92		-	-	0,00	-	-		2.170.477.394,27	
71	Pengadaan Mebel PAUD	Rp	388.228.684,00	0,17		-		0,00	-			388.228.684,00	
72	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp	901.635.085,20	0,38		-		0,00	-			901.635.085,20	
73	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp	1.958.800.000,00	0,83		-		0,00	-	-		1.958.800.000,00	
74	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp	23.661.000,00	0,01		-	-	0,00	-			23.661.000,00	
75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp	109.434.560,00	0,05		-	-	0,00	-			109.434.560,00	
76	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	71.850.000,00	0,03		-	-	0,00	-			71.850.000,00	
77	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-			0,00	
78	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-			0,00	
79	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-			0,00	

80	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp	823.597.390,00	0,35		-	-	0,00	-			823.597.390,00	
81	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp	369.385.720,00	0,16		-	-	0,00	-			369.385.720,00	
82	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp	439.394.985,00	0,19		-	-	0,00	-			439.394.985,00	
83	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp	756.875.749,40	0,32		-	-	0,00	-	-		756.875.749,40	
11	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**344.480.000,00**	**0,15**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**344.480.000,00**	
84	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp	314.480.000,00	0,13		-	-	0,00	-	-		314.480.000	
85	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp	30.000.000,00	0,01		-	-	0,00	-	-		30.000.000	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Rp**	**820.065.000,00**	**0,35**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 820.065.000,00**	
12	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Rp**	**820.065.000,00**	**0,35**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**820.065.000,00**	
86	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	284.971.000,00	0,12		-	-	0,00	-			284.971.000,00	
87	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	250.000.000,00	0,11		-	-	0,00	-			250.000.000,00	
88	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	285.094.000,00	0,12		-	-	0,00	-			285.094.000,00	
IV	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rp**	**133.403.200,00**	**0,06**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 133.403.200,00**	
13	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Rp**	**133.403.200,00**	**0,06**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 133.403.200,00**	
89	Penataan penditribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp	133.403.200,00	0,06				0,00		-		Rp 133.403.200,00	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Rp**	**19.910.050,00**	**0,00**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 19.910.050,00**	
14	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masayarakat**	**Rp**	**19.910.050,00**	**0,01**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 19.910.050,00**	
90	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	17.189.800,00	0,01		-	-	0,00	-	-		Rp 17.189.800,00	
91	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	2.720.250,00	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp 2.720.250,00	
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rp**	**525.439.409,00**	**0,22**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 525.439.409,00**	
15	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kepulauan/Kota**	**Rp**	**525.339.409,00**	**0,22**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 525.339.409,00**	
92	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Rp	109.004.675,00	0,05		-	-	0,00	-	-		Rp 109.004.675,00	
93	Koordinasi, Sinkronasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp -	
94	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp -	
95	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	208.969.629,00	0,09		-	-	0,00	-	-		Rp 208.969.629,00	
96	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp	207.365.105,00	0,09		-	-	0,00	-	-		Rp 207.365.105,00	
16	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**100.000,00**	**0,00**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp 100.000,00**	

97	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp	100.000,00	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp	100.000,00	
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Rp**	**6.221.764.769,77**	**2,65**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**6.221.764.769,77**	
17	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**-**	**0,00**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**			**-**	
98	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-			-	
18	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**301.180.000,00**	**0,13**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**301.180.000,00**	
99	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	201.522.000,00	0,09		-	-	0,00	-	-		Rp	201.522.000,00	
100	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp	99.658.000,00	0,04		-	-	0,00	-	-		Rp	99.658.000,00	
19	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp**	**250.277.903,00**	**0,11**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**250.277.903,00**	
101	Seleksi Atlet Daerah	Rp	78.512.500,00	0,03		Rp0,00	-	0,00	-	-		Rp	78.512.500,00	
102	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp	171.765.403,00	0,07		Rp0,00	-	0,00	-	-		Rp	171.765.403,00	
20	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Rp**	**207.841.070,00**	**0,09**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**207.841.070,00**	
103	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp	207.841.070,00	0,09			-	0,00		-		Rp	207.841.070,00	
21	**Pembinaan dan Pengembanga Olahraga Rekreasi**	**Rp**	**5.462.465.796,77**	**2,32**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**5.462.465.796,77**	
104	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Rp	5.462.465.796,77	2,32		Rp0,00	-	0,00	-	-		Rp	5.462.465.796,77	
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Rp**	**121.456.000,00**	**0,05**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**121.456.000,00**	
22	**Pembinaan dan Pengembagan Organisasi Kepramukaan**	**Rp**	**121.456.000,00**	**0,05**		**Rp -**	**-**	**0,00**		**-**		**Rp**	**121.456.000,00**	
105	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Rp	-	0,00		-	-	0,00	25,00	-		Rp	-	
106	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	121.356.000,00	0,05		-	-	0,00	25,00	-		Rp	121.356.000,00	
107	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp	-	
108	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp	-	
109	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp	-	0,00		-	-	0,00	-	-		Rp	-	
110	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Rp	100.000,00	0,00		-	-	0,00	75,00	-		Rp	100.000,00	
	TOTAL	Rp	234.992.106.233,79	**100,00**		**59.120.294.320**	**25,16**	**41,15**	**-**	**26,00**	**-**	**Rp**	**175.871.811.913,79**	

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan aksebilitas pendidikan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi olahraga dengan sasaran meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah;
4. Meningkatkan pembangunan/renovasi/rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitasi rumah dinas pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdapat pada Misi Pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur".

Misi ini menjadi landasan utama bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun rancangan strateginya. Penekanan pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya menjadi arah kebijakan yang sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Disdikpora. Beberapa isu-isu yang perlu mendapat perhatian:

1. Program Zero Buta Huruf

Program Zero Buta Huruf merupakan program unggulan yang bertujuan untuk menuntaskan permasalahan buta huruf di Kabupaten Kepulauan Anambas. Implementasi program ini dalam rancangan strategi Disdikpora dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kondisi Eksisting:

- Masih terdapat kantong-kantong buta huruf terutama di pulau-pulau terpencil
- Keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terisolasi
- Angka partisipasi pendidikan orang dewasa yang relatif rendah di beberapa kecamatan

Penerapan dalam Rancangan Strategi:

a. Pemetaan dan Pendataan:
   - Melakukan pemetaan komprehensif penduduk buta huruf di seluruh pulau
   - Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring perkembangan program

b. Pengembangan Model Pembelajaran:
   - Merancang metode pembelajaran keaksaraan fungsional yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat kepulauan
   - Mengembangkan modul pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir

c. Penguatan Kelembagaan:
   - Membentuk pusat kegiatan belajar masyarakat di setiap desa/kelurahan
   - Merevitalisasi peran Balai Pengajian dan Masjid sebagai pusat pembelajaran keaksaraan

d. Mobilisasi Sumber Daya:
   - Merekrut dan melatih tutor lokal dari masyarakat setempat
   - Melibatkan mahasiswa dalam program KKN tematik pemberantasan buta huruf

e. Monitoring dan Evaluasi:
   - Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengukur capaian program
   - Melakukan evaluasi berkala untuk penyesuaian strategi implementasi

Target Capaian:

- Menurunkan angka buta huruf
- Meningkatkan tingkat literasi fungsional masyarakat di seluruh kecamatan
- Menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Program Bantuan Perlengkapan Sekolah PAUD, SD dan SMP

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki akses terhadap perlengkapan sekolah yang memadai, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka.

Kondisi Eksisting:

- Tingginya biaya pendidikan terutama untuk perlengkapan sekolah bagi keluarga prasejahtera
- Disparitas kualitas pendidikan antar sekolah di pulau utama dengan pulau terpencil

Penerapan dalam Rancangan Strategi:

1. Identifikasi Kebutuhan:
    - Melakukan pemetaan komprehensif kebutuhan perlengkapan sekolah di seluruh PAUD, SD dan SMP
    - Mengidentifikasi siswa dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan bantuan prioritas
2. Pengembangan Mekanisme Distribusi:
    - Merancang sistem distribusi yang efektif untuk menjangkau sekolah-sekolah di pulau terpencil
    - Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta untuk dukungan logistik
3. Penguatan Komitmen Stakeholder:
    - Melibatkan peran komite sekolah dalam pengelolaan dan pengawasan program
    - Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam program adopsi sekolah

4. Diversifikasi Bantuan:
    - Memberikan bantuan seragam, sepatu, tas, dan alat tulis.
    - Menyediakan buku pelajaran dan penunjang untuk perpustakaan kelas.
    - Mengembangkan kit pembelajaran praktik untuk mata pelajaran sains dan keterampilan.
5. Integrasi dengan Program Pendidikan Lainnya:
    - Mengintegrasikan dengan program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
    - Menyelaraskan dengan program peningkatan gizi sekolah untuk memastikan kesiapan belajar siswa.

Target Capaian:

- Seluruh siswa dari keluarga prasejahtera mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah.
- Menurunkan tingkat putus sekolah di tingkat SD dan SMP hingga di level terbawah.
- Meningkatkan kehadiran siswa di sekolah terutama di daerah terpencil.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factors), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya yang ada dalam pelaksanaan aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diuraikan berikut ini :

Tabel 3. 1 Strategi dan Kebijakan

Visi		**:**	**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**		
Misi		**:**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;**		
No.	**Program Unggulan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**Program Zero Buta Huruf**	Mengentaskan buta huruf di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Meningkatkan tingkat literasi fungsional masyarakat pesisir. Membangun budaya belajar sepanjang hayat.	Angka buta huruf 0% di semua kecamatan. Akses pendidikan keaksaraan tersedia di setiap desa/kelurahan. Partisipasi pendidikan orang dewasa di daerah terpencil ≥95%.	Pemetaan Kantong Buta Huruf dan Pengembangan Sistem Informasi Digital	Membentuk forum koordinasi antara OPD, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk validasi data. Menetapkan regulasi wajib belajar minimal 9 tahun dengan fokus pada kelompok rentan (ibu rumah tangga, nelayan). Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk

Visi		**:**	**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**		
Misi		**:**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;**		
No.	**Program Unggulan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
					survei dan pemantauan real-time.
				Pengembangan Modul Kontekstual Berbasis Kehidupan Maritim	Mengintegrasikan nilai-nilai luhur maritim (misalnya, literasi ekonomi nelayan, pengelolaan sumber daya laut) dalam kurikulum keaksaraan. Menyediakan modul cetak dan digital yang dapat diakses tanpa internet (offline). Melibatkan guru agama dan tokoh adat dalam penyusunan materi agar relevan dengan budaya lokal.
				Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi	Memberikan insentif bagi tutor lokal yang berkontribusi dalam program keaksaraan. Mengalokasikan dana CSR dari sektor maritim (perikanan, pariwisata) untuk membangun dan memelihara PKBM.

Visi		**:**	**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**		
Misi		**:**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;**		
No.	**Program Unggulan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
					Menetapkan masjid/mushola sebagai pusat pembelajaran keagamaan dan keaksaraan melalui SK Bupati.
2	**Program Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP**	Memastikan akses merata perlengkapan pendidikan bagi siswa prasejahtera. Mengurangi disparitas kualitas pendidikan antar-pulau. Menurunkan angka putus sekolah hingga ≤ 1%.	100% siswa prasejahtera mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Kehadiran siswa di sekolah terpencil ≥95%.	Pendataan Akurat Melalui Dapodik dan Pemetaan Disparitas	Mengintegrasikan data Dapodik dengan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos untuk memvalidasi penerima manfaat. Menetapkan kriteria penerima bantuan berbasis geospasial (pulau terpencil, zona rawan kemiskinan). Membentuk tim monitoring dari komite sekolah dan LSM untuk transparansi distribusi.
				Distribusi Logistik Berbasis Kapal Laut/Truk Laut	Menjalin kerja sama dengan BUMN (Pelni, ASDP) untuk distribusi logistik ke pulau terpencil. Menggunakan pelabuhan perintis sebagai titik distribusi bantuan. Menetapkan QR Code pada perlengkapan sekolah untuk memastikan akuntabilitas.

Visi		**:**	**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**		
Misi		**:**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;**		
No.	**Program Unggulan**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				Diversifikasi Bantuan (Seragam, Buku, Kit Praktikum)	Menyediakan paket lengkap perlengkapan sekolah (seragam, buku, alat tulis, sepatu, tas). Menambahkan kit praktikum sederhana untuk mata pelajaran sains dan vokasi. Mengintegrasikan dengan program gizi sekolah (makanan tambahan) untuk meningkatkan kesiapan belajar

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdikpora Kab. Kep. Anambas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	*2*	*3*	*4*
Mewujudkan Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.		Indeks Pendidikan	70
	Meningkatnya kualitas dan tingkat Partisipasi pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	96
		Tingkat partisipasi warga negara 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD dan SMP)	88
		Tingkat partisipasi warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	75
		Persentase tenaga pendidik yang melaksanakan peningkatan kompetensinya	90
		Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana pendidikan	70
Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Tingkat pengembangan kepemudaaan, olahraga dan kepramukaan	65%
	Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan kepemudaan, dan pramuka serta pengembangan prestasi di bidang olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	40
		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang di bangun/direhabilitasi	70
		Tingkat partisipasi Kepramukaan	92

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	*2*	*3*	*4*
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	BB(71)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga KKA	BB(73)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A(86)
Meningkatkan Pembanguna/ Renovasi/ Rehabilitasi Rumah Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Ketersediaan Pembangunan /Renovas/ Rehabilitasi Rumah Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan Pembangunan/Renovasi/ Rehabilitasi (100 rumah)	90
		Persentase Pembangunan yang dilakukan	80
		Persentasi Renovasi/ Rehabilitasi yang dilakukan	85

3.2 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Kep. Anambas tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
				19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pengelolaan Pendidikan	7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				22	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				23	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				24	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				25	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				27	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				28	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				29	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				31	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				32	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				33	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				34	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				36	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				37	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				38	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				39	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				40	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				42	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				43	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				44	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				45	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				50	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				51	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				52	Pembangunan Laboratorium
				53	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				54	Pembangunan Kantin Sekolah
				55	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				56	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				57	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				58	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				59	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				60	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				61	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				62	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				63	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				62	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				63	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				64	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				65	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				66	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				67	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				68	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				69	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				70	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
				71	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				72	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				73	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				74	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				76	Pengadaan Mebel PAUD
				77	Pengadaan Perlengkapan PAUD
				78	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
				79	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
				80	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				81	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				82	Pengelolaan Dana BOP PAUD
				83	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				84	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				85	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				86	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				87	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				88	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
				89	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
				90	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	91	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
				92	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3	Program Pengembangan Kurikulum	11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	93	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				94	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				95	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	96	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	13	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	97	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		14	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	98	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				99	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	15	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
				101	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				102	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
				103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
				104	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
		16	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	106	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
		18	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				108	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
		19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	109	Seleksi Atlet Daerah
				110	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
		20	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	111	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
		21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	112	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	22	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	113	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
				114	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
				115	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
				116	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
				117	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada perubahan RKPD adalah sebesar Rp. 249.670.730.771,79 sebagaimana ditunjukkan ditabel 3.3:

Tabel 3.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				271.432.177.396,00	244.247.376.230,70	249.670.730.771,79	237.306.691.452,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	203.970.521.212,00	186.795.160.053,78	181.899.221.414,99	207.647.648.963,00
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	61.271.000,00	61.271.000,00	370.000.000,00
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	61.271.000,00	150.000,00	370.000.000,00
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	152.726.987.575,00	182.976.369.459,00	182.976.369.459,00	159.264.216.261,00
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	500 Orang/bulan	151.126.987.575,00	181.376.369.459,00	174.828.807.449,19	157.664.216.261,00
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.599.767.280,00	1.600.000.000,00
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.319.829.300,00	150.000.000,00	150.000.000,00	1.579.828.812,00
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket	1.169.829.300,00	0,00	0,00	1.169.829.300,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	409.999.512,00
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.674.979,00	2.098.950.788,00	2.098.950.788,00	1.217.523.407,00
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	909.382.500,00	1.002.538.462,00	283.825.874,00	0,00
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	630.769.072,00	111.800.000,00	111.800.000,00	0,00
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	710.523.407,00	324.882.326,00	306.882.326,00	417.523.407,00
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
	1					NON URUSAN				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	203.970.521.212,00	186.795.160.053,78	181.899.221.414,99	207.647.648.963,00
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.674.979,00	2.098.950.788,00	2.098.950.788,00	1.217.523.407,00
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				255.237.477.517,00	234.839.045.273,93	242.802.070.593,02	236.156.691.452,00
3	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	203.970.521.212,00	186.795.160.053,78	181.899.221.414,99	207.647.648.963,00
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.674.979,00	2.098.950.788,00	2.098.950.788,00	1.217.523.407,00
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	444.430.000,00	186.108.729,02	800.000.000,00
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	43.500.000.000,00	584.739.848,78	584.739.848,78	44.609.140.637,00
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	235.925.063,00	305.664.911,78	201.803.411,78	216.863.200,00
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	188.774.937,00	188.774.937,00	188.774.937,00	188.774.937,00
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	90.300.000,00	90.300.000,00	90.300.000,00	81.675.300,00
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	42.985.000.000,00	0,00	3.081.672.450,00	44.121.827.200,00
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokentasi	1 Dokentasi	2.923.029.358,00	823.828.958,00	823.828.958,00	506.939.846,00
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	316.027.602,00	316.027.602,00	316.027.602,00	254.452.846,00
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	164.061.756,00	164.061.756,00	164.061.756,00	102.487.000,00
	1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	2.292.940.000,00	193.739.600,00	48.939.600,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Dipelihara/Direhabilitasi						
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	49.616.956.305,00	46.632.867.720,15	59.929.470.928,03	26.959.042.489,00
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar	1182 Ruang/Sekolah/ Unit/Buah/Set/ Siswa/Orang/Tahun	1182 Ruang/Sekolah/Unit/Buah/ Set/Siswa/Orang/Tahun	23.672.609.505,00	23.582.381.891,56	23.582.381.891,56	10.576.321.009,00
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	1.400.000.000,00	595.778.326,20	200.000.000,00	0,00
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1.180.589.605,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	1.200.000.000,00	0,00	220.450.781,00	1.602.000.000,00
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	9 Unit	3.800.000.000,00	3.190.319.748,97	3.518.756.420,00	0,00
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	2.000.000.000,00	556.156.835,40	324.641.344,00	3.000.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	1.500.000.000,00	282.758.470,10	308.774.599,98	1.602.000.000,00
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	800.000.000,00	518.574.410,25	545.794.970,10	0,00
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	10 Unit	1.800.000.000,00	734.514.928,22	2.250.375.532,00	2.000.000.000,00
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	2.350.000.000,00	2.067.979.228,00	2.057.379.228,00	0,00
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17 Peserta Didik	17 Peserta Didik	350.000.000,00	199.774.705,00	127.024.705,00	500.000.000,00
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	10 Orang	250.000.000,00	171.085.900,00	112.740.260,00	0,00
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	100 Orang	100 Orang	690.000.000,00	379.218.703,00	296.528.890,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Kompetensi dan Kualifikasi						
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	3.300.084,00	16.500.084,00	0,00
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	7.591.807.000,00	7.591.807.000,00	100.000.000,00
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	30 Orang	350.000.000,00	7.310.000,00	150.000.220,00	0,00
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	350.000.000,00	6.498.500,00	6.498.500,00	0,00
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	7.310.000,00	150.000.000,02	350.000.000,00
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	267.876.780,00	167.935.780,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	243.566.145,00	162.733.145,00	0,00
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas	300.000.000,00	6.429.923,00	100.022.228,00	0,00
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400.000.000,00	182.352.000,00	150.318.000,00	0,00
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	1.020.000.000,00	499.778.336,00	1.581.424.933,00	0,00
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	449.683.943,00	0,00
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	25 Orang	325.000.000,00	247.905.000,00	199.332.800,00	0,00
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang	950.000.000,00	1.340.446.968,42	3.276.764.091,20	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	404 Peserta Didik	404 Peserta Didik	747.019.900,00	3.982.339.900,00	2.615.180.000,00	822.321.009,00
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	500.000.000,00	499.300.000,00	499.300.000,00	600.000.000,00
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar	226 Ruang/Sekolah/ Unit	226 Ruang/Sekolah/Unit	18.700.746.800,00	14.518.080.716,19	14.518.080.716,19	13.746.721.480,00
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	770.000.000,00	170.000.000,00	685.546.758,00	0,00
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	600.000.000,00	0,00	215.755.421,00	800.000.000,00
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.602.000.000,00
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium							
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.508.543.627,00	0,00
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	543.614.915,00	0,00
	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah							
							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	450.000.000,00	324.927.558,12	310.902.558,12	700.000.000,00
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	1.400.000.000,00	1.892.222.140,64	2.811.368.127,31	0,00
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	750.000.000,00	72.400.000,00	787.561.369,00	800.000.000,00
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	30 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	8 Unit	1.200.000.000,00	972.596.172,10	2.014.626.033,10	1.602.000.000,00
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	27 Paket	27 Paket	1.000.000.000,00	1.642.970.588,00	1.432.070.588,00	0,00
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	985 Peserta Didik	985 Peserta Didik	129.746.800,00	1.890.800.800,00	2.113.577.800,00	142.721.480,00
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	299.000.000,00	199.211.935,00	121.359.935,00	500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	197.354.910,00	144.437.910,00	200.000.000,00
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang	580.000.000,00	374.621.081,00	289.583.651,00	600.000.000,00
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	4.599.480.000,00	4.599.480.000,00	200.000.000,00
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	250.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	0,00	100.000,00	500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	287.000.000,00	285.583.311,00	194.046.311,00	0,00
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	226.042.290,00	140.862.290,00	300.000.000,00
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas	250.000.000,00	0,00	100.000,00	300.000.000,00
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	208.698.000,00	129.114.000,00	500.000.000,00
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1.200.000.000,00	0,00	100.000,00	1.300.000.000,00
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	27 Paket	27 Paket	700.000.000,00	229.626.960,00	1.687.955.062,00	0,00
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20 Ruang	1.000.000.000,00	332.944.970,33	557.944.970,33	0,00
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	250 Paket	400.000.000,00	398.600.000,00	398.600.000,00	0,00
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya Pengelolaan PAUD	23 Unit/Ruang/Lembaga	23 Unit/Ruang/Lembaga	7.159.500.000,00	8.157.925.112,40	8.157.925.112,40	2.550.500.000,00
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	8 Unit	1.500.000.000,00	1.654.802.260,20	3.434.733.502,27	0,00
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD							
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	800.000.000,00	484.101.808,00	388.228.684,00	0,00
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	500.000.000,00	943.435.085,20	1.008.108.655,20	800.000.000,00
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1800 Peserta Didik	1800 Peserta Didik	500.000,00	1.958.800.000,00	1.958.800.000,00	500.000,00
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	374.966,00	150.000.000,00
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	27.316.000,00	23.661.000,00	0,00
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	98.904.560,00	109.434.560,00	0,00
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	9.000.000,00	120.000.000,00	71.850.000,00	0,00
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	600.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1780 Paket	1780 Paket	1.200.000.000,00	1.131.359.210,00	1.869.657.790,00	0,00
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	400.000.000,00	369.385.720,00	369.385.720,00	0,00
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	569.820.469,00	904.394.985,00	0,00
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	10 Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00	1.478.942.285,40	800.000.000,00
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	26 Lembaga/Orang	26 Lembaga/Orang	84.100.000,00	374.480.000,00	374.480.000,00	85.500.000,00
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	120 Peserta Didik	500.000,00	314.480.000,00	514.480.000,00	500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	83.600.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	85.000.000,00
5	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	-	1.100.000.000,00	1.040.307.000,00	820.065.000,00	1.100.000.000,00
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurikulum	123 Kurikulum/Lembaga	123 Kurikulum/Lembaga	1.100.000.000,00	1.040.307.000,00	1.040.307.000,00	1.100.000.000,00
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	95 Dokumen	95 Dokumen	450.000.000,00	394.633.000,00	284.971.000,00	450.000.000,00
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	231 Buku	231 Buku	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	95 Orang	95 Orang	400.000.000,00	395.674.000,00	285.094.000,00	400.000.000,00
6	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	133.403.200,00	300.000.000,00
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang lainnya	1295 Ruang/Sekolah/Unit	1295 Ruang/Sekolah/Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	133.403.200,00	300.000.000,00
7	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	-	350.000.000,00	170.710.500,00	19.910.050,00	150.000.000,00
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	1 Sekolah	1 Sekolah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	1 Sekolah	1 Sekolah	250.000.000,00	170.710.500,00	170.710.500,00	150.000.000,00
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	124.950.000,00	17.189.800,00	100.000.000,00
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	45.760.500,00	2.720.250,00	50.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.194.699.879,00	9.408.330.956,77	6.868.660.178,77	1.150.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				16.194.699.879,00	9.408.330.956,77	6.868.660.178,77	1.150.000.000,00
8	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	1.200.000.000,00	815.845.329,00	525.439.409,00	750.000.000,00
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	622.212.409,00	622.212.409,00	750.000.000,00
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota							
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	143.571.675,00	109.004.675,00	300.000.000,00
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda							
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang	60 Orang	250.000.000,00	241.197.629,00	208.969.629,00	0,00
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	237.443.105,00	207.365.105,00	0,00
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	193.632.920,00	193.632.920,00	0,00
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	193.632.920,00	100.000,00	0,00
9	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	13.444.699.879,00	8.007.102.517,77	6.221.764.769,77	100.000.000,00
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	207.060.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	207.060.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	442.903.000,00	442.903.000,00	0,00
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	201.522.000,00	0,00
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	192.903.000,00	99.658.000,00	0,00
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	343.528.903,00	343.528.903,00	0,00
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah							
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	80 Orang	150.000.000,00	125.357.500,00	78.512.500,00	0,00
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota							
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	80 Orang	250.000.000,00	218.171.403,00	171.765.403,00	0,00
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	293.385.070,00	293.385.070,00	0,00
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait							
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	293.385.070,00	207.841.070,00	0,00
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.087.639.879,00	6.927.285.544,77	6.927.285.544,77	0,00
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan							
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	12.087.639.879,00	6.927.285.544,77	5.462.465.796,77	0,00
10	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	1.550.000.000,00	585.383.110,00	121.456.000,00	300.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000,00	585.383.110,00	585.383.110,00	300.000.000,00
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik							
							Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	350.000.000,00	121.356.000,00	0,00
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	5	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan							
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	235.383.110,00	100.000,00	0,00
	J U M L A H									**271.432.177.396,00**	**244.247.376.230,70**	**249.670.730.771,79**	**237.306.691.452,00**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 memuat total pagu sebesar Rp.249.670.730.771,79 Pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka merealisasikan sasaran yang ingin dicapai tidak terlepas dari dukungan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025. Rencana atau target baik sasaran maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pihak penerima amanat berharap Rencana Kerja ini menjadi dasar bagi penilaian yang objektif yang dapat disempurnakan dimasa mendatang. Objektivitas penilaian atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas sangat diperlukan oleh semua pihak terkait, sehingga tujuan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dapat dicapai secara optimal dalam mewujudkan *Good Goverment* di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tony Karnain, Ph.D
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197306022003121013



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jln. Imam Bonjol No 50 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan
Kabupaten Kepulauan Anambas

KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dapat dilihat pula sejauh mana kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 18 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Anambas,

YESSY ARIESSANDY, S.Farm, Apt., Apt.,M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810418 2006042019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …… ii

DAFTAR TABEL …… iii

DAFTAR GAMBAR …… iv

BAB I. PENDAHULUAN …… 1

I.1 Latar Belakang …… 1

I.2 Landasan Hukum …… 2

I.3 Maksud dan Tujuan …… 5

I.4 Sistematika Penulisan …… 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH TAHUN LALU …… 8

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …… 8

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 30

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …… 38

II.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD …… 38

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 312

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 313

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 313

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 314

III.3 Program dan Kegiatan 316

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....…… 317

BAB V. PENUTUP …… 1032

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Tabel 2.2 Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.5 Hasil Skoring Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 3.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2.2 Keterkaitan Tema RKP 2025, Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025, dengan Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dimulai dari menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan ini adalah sebagai penjabaran pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diakhiri dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang. Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah pagu anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas beserta aspirasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memperhatikan kepada hasil kinerja pembangunan

yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor kesehatan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran 2025 dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai Prioritas Pembangunan Daerah dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
26. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru,yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan dating serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN II TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Denagan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dnas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana pada Tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Pagu Anggaran Dinas Keshatan Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebesar Rp. 183.338.036.021 terdiri dari 8 (Delapan) program, 87 (Delapan Puluh Tujuh) kegiatan, dan 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) sub kegiatan, dengan keberhasilan serapan keuangan mencapai 89,86%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU DPA (Rp)	REALISASI LAPORAN	
		Rp	%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	***164.135.193.998, 46***	**35.000.289.303**	**21,32**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.799.406.452,64	35.000.289.303	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.921.948.035,30		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.045.333.035,30	**32.139.257.720**	33,81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.876.615.000,00	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	**12.435.000**	82,90
Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.810.500,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.089.000,00	-	-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.860.000,00	**8.568.000**	7,80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.205.000,00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.656.500,00	**67.045.302**	43,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.096.905.583,42		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.145.550,00	**2.090.000**	8,66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.488.940,00	**34.387.000**	32,91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.860.000,00	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.961.411.093,42	**2.736.506.281**	30,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.042.333,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.048.000,00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298.994.333,92	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.700.000,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.700.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.441.944.545,82		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.206.123.988,60		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.255.166.534,00	**1.742.034.645**	8,60
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.529.765.759,60	-	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	169.613.000,00	-	-
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	741.525.000,00	-	-
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.770.100.195,00	**6.489.800**	0,04
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	3.599.337.000,00	-	-
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	140.616.500,00	-	-

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.226.552.449,22		76,99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	192.600.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	146.101.530,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.160.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.171.200,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	489.793.500,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	137.042.000,00	**23.410.000**	17,08
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	79.140.000,00	-	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	264.864.000,00	**18.510.000**	6,99
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.218.183.469,22	**3.694.596.625**	40,08
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	27.700.000,00	-	-
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	19.107.000,00	-	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	162.417.750,00	-	-
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.665.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	243.607.000,00	**31.273.500**	12,84
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.268.108,00	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	549.901.000,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	549.901.000,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	549.901.000,00	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	192.000.000,00		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	192.000.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	**14.640.000**	24,40

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	48.000.000,00	**6.500.000**	13,54
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	84.000.000,00	**12.151.460**	14,47
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.639.142.000,00		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	868.000.000,00		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	343.000.000,00	-	-
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	200.000.000,00	-	-
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	**1.157.100**	0,93
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	-	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	432.000.000,00		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	432.000.000,00	**6.918.500**	1,60
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	193.542.000,00		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.660.000,00	-	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	162.550.000,00	**8.905.000**	5,48
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.332.000,00	-	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	145.600.000,00		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	145.600.000,00	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	512.800.000,00		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	130.000.000,00		

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	-	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	382.800.000,00		
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	174.000.000,00	**87.000.000**	50,00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	208.800.000,00	-	-
RSUD Tarempa	**3.978.256.652,00**	**269.098.646**	6,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.890.556.652,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.621.552,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.621.552,00	**84.312.176**	31,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**32.926.800**	65,85
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.700.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.700.000,00	**151.859.670**	51,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.000.000,00	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.058.235.100,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.058.235.100,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.700.000,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.700.000,00		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87.700.000,00	-	-
RSUD Jemaja	**896.030.109,00**	**97.251.838**	10,85

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	895.930.109,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.903.208,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000,00	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.748.984,00	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.904.224,00	**43.256.438**	16,77
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000,00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.050.000,00	**7.785.600**	31,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.360.801,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.646.401,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.464.400,00	**46.209.800**	19,62
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.250.000,00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.666.100,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.566.100,00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000,00	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	300.000.000,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	300.000.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000,00	-	-
RSUD Palmatak	**2.991.617.603,00**	**175.714.779**	5,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.991.567.603,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.867.603,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.577.864,00	-	-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.289.739,00	**54.829.000**	20,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**20.518.300**	41,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.676.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.676.000,00	**100.367.479**	43,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.024.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.024.000,00	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.400.000.000,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.400.000.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000,00		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000,00	-	-
Puskesmas Siantan Tengah	**1.296.352.657,00**	**197.668.250**	15,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	673.113.963,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.787.133,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355.787.133,00	**135.108.340**	37,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.901.870,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.901.870,00	**9.921.910**	21,62
Peningkatan Pelayanan BLUD	271.424.960,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	271.424.960,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	613.467.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.467.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.400.000,00	**17.662.000**	18,51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.510.000,00	-	-

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.000.000,00	**1.400.000**	10,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.956.000,00	**1.595.000**	0,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.000.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.570.000,00	**4.190.000**	33,33
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.510.000,00	**3.870.000**	15,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.000.000,00	-	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.199.000,00	**9.035.000**	12,18
Operasional Pelayanan Puskesmas	164.082.000,00	**8.536.000**	5,20
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.595.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.325.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.535.000,00	**350.000**	22,80
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12.000.000,00	**3.000.000**	25,00
Pengelolaan Layanan Imunisasi	22.785.000,00	**3.000.000**	13,17
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.771.694,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.771.694,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.771.694,00	-	-
Puskesmas Letung	**1.237.376.116,00**	**197.674.922**	15,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	635.561.116,00		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.991.116,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.991.116,00	**7.343.012**	12,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.570.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.570.000,00	**13.087.500**	34,83
Peningkatan Pelayanan BLUD	540.000.000,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	540.000.000,00	-	-

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	596.655.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	596.655.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.140.000,00	**10.357.500**	24,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.980.000,00	**3.990.000**	15,97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.360.000,00	**1.320.000**	8,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.320.000,00	**5.160.000**	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	206.270.000,00	**114.681.910**	55,60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	46.800.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.040.000,00	-	-
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.800.000,00	**1.980.000**	11,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.400.000,00	**2.380.000**	14,51
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.660.000,00	**14.900.000**	37,57
Operasional Pelayanan Puskesmas	63.767.000,00	-	-
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.198.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.880.000,00	**2.035.000**	8,18
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.160.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	20.640.000,00	**10.660.000**	51,65
Pengelolaan Layanan Imunisasi	45.240.000,00	**9.780.000**	21,62
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.160.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.160.000,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.160.000,00	-	-
Puskesmas Jemaja Timur	**807.607.010,00**	**123.662.300**	15,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	324.032.010,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.148.000,00		

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.148.000,00	**10.702.000**	15,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.479.600,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.479.600,00	**12.975.300**	49,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	228.404.410,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	228.404.410,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	476.226.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	476.226.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.880.000,00	**7.920.000**	20,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.040.000,00	**11.550.000**	39,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.960.000,00	**3.960.000**	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.830.000,00	**12.210.000**	72,55
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.770.000,00	**16.175.000**	16,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.940.000,00	**3.960.000**	66,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.940.000,00	**5.940.000**	100,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.720.000,00	**5.060.000**	27,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.040.000,00	**5.280.000**	75,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.500.000,00	**31.470.000**	46,62
Operasional Pelayanan Puskesmas	133.756.000,00	**6.000.000**	4,49
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.320.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.400.000,00	**12.420.000**	86,25
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.120.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.890.000,00	**6.600.000**	60,61
Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.120.000,00	**9.240.000**	43,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.349.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.349.000,00		

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.349.000,00	**3.450.000**	46,95
Puskesmas Palmatak	**1.478.376.184,00**	**195.264.100**	13,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	968.922.298,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.822.298,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.822.298,00	**26.000.000**	28,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.400.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000,00	**14.825.100**	23,76
Peningkatan Pelayanan BLUD	815.700.000,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	815.700.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	504.261.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	504.261.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.600.000,00	**47.860.000**	45,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.490.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.320.000,00	**1.330.000**	25,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.970.000,00	**3.860.000**	32,25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.835.000,00	**55.864.000**	40,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.660.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.320.000,00	-	-
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.140.000,00	**3.160.000**	26,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.660.000,00	**1.330.000**	36,34
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.910.000,00	**29.940.000**	33,67
Operasional Pelayanan Puskesmas	111.520.000,00	**9.265.000**	8,31
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.660.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.245.000,00	-	-

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.271.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.660.000,00	**1.830.000**	50,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.192.886,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.192.886,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.192.886,00	-	-
Puskesmas Tarempa	**1.935.614.879,00**	**167.923.800**	8,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.256.905.059,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.888.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.888.000,00	**4.780.800**	12,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.626.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.626.000,00	**20.068.000**	36,08
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.162.391.059,00	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.162.391.059,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	663.105.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	663.105.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.250.000,00	**7.000.000**	10,57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.400.000,00	**4.700.000**	6,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.400.000,00	**1.600.000**	19,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.000.000,00	**2.800.000**	40,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120.925.000,00	**32.225.000**	26,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.400.000,00	**300.000**	2,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	**4.400.000**	22,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.750.000,00	**1.400.000**	10,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.000.000,00	-	-

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.500.000,00	**27.200.000**	49,91
Operasional Pelayanan Puskesmas	145.700.000,00	**25.000.000**	17,16
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.630.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.400.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	36.000.000,00	**5.800.000**	16,11
Pengelolaan Layanan Imunisasi	70.450.000,00	**30.650.000**	43,51
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.604.820,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.604.820,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.604.820,00	-	-
Puskesmas Siantan Selatan	**1.413.497.210,44**	**67.613.400**	4,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	656.624.210,44		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.689.765,44		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.689.765,44	**20.784.000**	8,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.245,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.245,00	**4.129.400**	20,65
Peningkatan Pelayanan BLUD	361.934.200,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	361.934.200,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	750.198.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.198.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.647.000,00	**7.000.000**	9,91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.750.000,00	**3.200.000**	4,40
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.290.000,00	**2.500.000**	8,84

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.830.000,00	**5.350.000**	31,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.110.000,00	**4.550.000**	2,20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.800.000,00	**1.200.000**	4,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.790.000,00	**5.850.000**	28,14
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.985.000,00	**1.700.000**	11,34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.780.000,00	**2.500.000**	19,56
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.245.000,00	**6.400.000**	6,79
Operasional Pelayanan Puskesmas	104.376.000,00	**800.000**	0,77
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.150.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.755.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	10.230.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	53.460.000,00	**1.650.000**	3,09
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.675.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.675.000,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.675.000,00	-	-
Puskesmas Siantan Timur	**1.173.307.163,00**	**147.307.100**	12,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	612.756.163,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.164.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.164.000,00	**50.775.000**	23,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.785.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.785.000,00	**4.868.100**	10,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.240.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.240.000,00	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	334.567.163,00		

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	334.567.163,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	548.695.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	548.695.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.100.000,00	**19.420.000**	20,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.500.000,00	**3.500.000**	33,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.000.000,00	**7.000.000**	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.205.000,00	**17.500.000**	11,42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.500.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.000.000,00	**3.500.000**	50,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.335.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.000.000,00	**3.500.000**	50,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.565.000,00	**24.500.000**	28,63
Operasional Pelayanan Puskesmas	85.498.000,00	**5.744.000**	6,72
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.100.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.098.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.794.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	21.000.000,00	**7.000.000**	33,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.856.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.856.000,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.856.000,00	-	-
Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	**156.536.768,00**	**55.817.000**	35,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.536.768,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.464.360,00		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.408.220,00	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.928.140,00	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.228.000,00	**6.670.000**	81,06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.900.000,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.442.408,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.851.200,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.591.208,00	**49.147.000**	49,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.630.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.140.000,00	-	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.490.000,00	-	-
Puskesmas Jemaja Barat	**541.517.810,50**	**124.144.329**	22,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.785.010,50		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.320.023,50		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.894.000,00	**2.348.899**	39,85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.989.500,00	**2.806.231**	46,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.883.060,00	**8.647.500**	20,17
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.010.000,00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.543.463,50	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.054.987,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.054.987,00	**509.699**	5,07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.410.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.410.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	419.054.000,00		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	419.054.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.425.000,00	**11.500.000**	29,93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.800.000,00	**7.000.000**	22,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.200.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.800.000,00	**2.800.000**	28,57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	101.705.000,00	**26.490.000**	26,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.400.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.000.000,00	**2.800.000**	40,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.200.000,00	**5.000.000**	30,86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.800.000,00	**1.400.000**	50,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.200.000,00	**20.200.000**	41,91
Operasional Pelayanan Puskesmas	112.024.000,00	**20.042.000**	17,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.400.000,00	-	-
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.900.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	8.400.000,00	**2.800.000**	33,33
Pengelolaan Layanan Imunisasi	30.800.000,00	**9.800.000**	31,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.678.800,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.678.800,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.678.800,00	-	-
Puskesmas Siantan Utara	**513.708.061,00**	**80.462.787**	15,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.694.061,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.517.084,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.222.325,00	**1.182.572**	96,75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.680.011,00	-	-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.100.000,00	**8.070.900**	26,81
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	**1.795.710**	71,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.014.748,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.176.977,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.704.977,00	**2.769.480**	8,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.472.000,00	**1.083.625**	43,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	402.279.000,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	402.279.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.800.000,00	**14.295.000**	19,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.240.000,00	**1.080.000**	33,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.040.000,00	**3.040.000**	21,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72.231.000,00	**6.480.000**	8,97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.620.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.120.000,00	**5.400.000**	35,71
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.680.000,00	-	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.340.000,00	**16.920.000**	26,71
Operasional Pelayanan Puskesmas	113.528.000,00	-	-
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.080.000,00	**4.785.500**	443,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.720.000,00	**9.240.000**	49,36
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.880.000,00	**4.320.000**	36,36
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.735.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.735.000,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.735.000,00	-	-

Puskesmas Kute Siantan	**783.043.800,00**	**123.350.000**	15,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.000.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	**1.006.000**	3,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	693.863.800,00		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	684.863.800,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.720.000,00	**17.160.000**	20,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.300.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.640.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.640.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.045.000,00	**64.346.000**	65,63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.760.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.560.000,00	**2.860.000**	27,08
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.650.000,00	**1.000.000**	11,56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.320.000,00	-	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	31.670.000,00	**3.620.000**	11,43
Operasional Pelayanan Puskesmas	358.248.800,00	**7.348.000**	2,05
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.640.000,00	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.000.000,00	**5.610.000**	56,10

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	990.000,00	**330.000**	33,33
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.840.000,00	**2.310.000**	14,58
Pengelolaan Layanan Imunisasi	53.840.000,00	**9.900.000**	18,39
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.000.000,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.000.000,00	**7.860.000**	87,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.180.000,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.180.000,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.180.000,00	-	
TOTAL KESELURUHAN	183.338.036.021,40	42.676.829.184	23,28

Tabel 2.2
Capaian Hasil Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Target Kinerja			Capaian Setiap Tahun
			2023	2025	2025	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Umur Harapan Hidup	67,21	67,8	67,99	68,19	68,1
2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10.3/1000 Kelahiran Hidup (KH)	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	97,12
3	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%	91,00%
4	Angka Annual Parasite Insidens (API)	0,31	0,28	0,25	0,25	0%
5	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	95,56%	97,47%	98,44%	98,44%	100%
6	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	76,90%

7	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	25,00%	73,00%	82,00%	100,00%	65.00%
8	Persentase Posyandu Aktif	65,00%	78,00%	84,00%	88,00%	100%
9	Persentase Desa Siaga Aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
10	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	55,73	60,22	61,73	63,22	61,36
11	Persentase Kampung Kb yang dibina	25,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100%
12	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	76,00%	78,00%	78,00%	79,00%	100%
13	Indeks Reformasi Birokrasi	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	N/A
14	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	CC(59,66)
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	C (75)	B (81)	B (81)	B (82)	N/A

Dari Tabel II.3 Capaian Hasil Indikator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2023 beberapa masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, dalam Renstra tahun 2021-2026. Namun tetap ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.:

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator program dan kegiatan, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan antara lain:

1. Peningkatan anggaran: perlu dilakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.
2. Pengembangan sumber daya manusia: perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan jabatan dan berkelanjutan.
3. Penguatan koordinasi: perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi: perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.\

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dan farmasi, bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan;
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait ainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:
   2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian
   2.2. Subbag Keuangan
   2.3. Subbag Penyusunan Program
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
   3.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
   3.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
   4.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan, membawahi:
   5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
   5.2. Seksi Kefarmasian dan Alkes;
   5.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   6.1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Kerja
   6.2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
   6.3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
   7.1. Puskesmas Tarempa
   7.2. Puskesmas Letung
   7.3. Puskesmas Palmatak
   7.4. Puskesmas Siantan Timur
   7.5. Puskesmas Siantan Selatan
   7.6. Puskesmas Jemaja Timur
   7.7. Puskesmas Siantan tengah
   7.8. Puskesmas Kute Siantan

7.9. Puskesmas Siantan Utara

7.10. Puskesmas Jemaja Barat

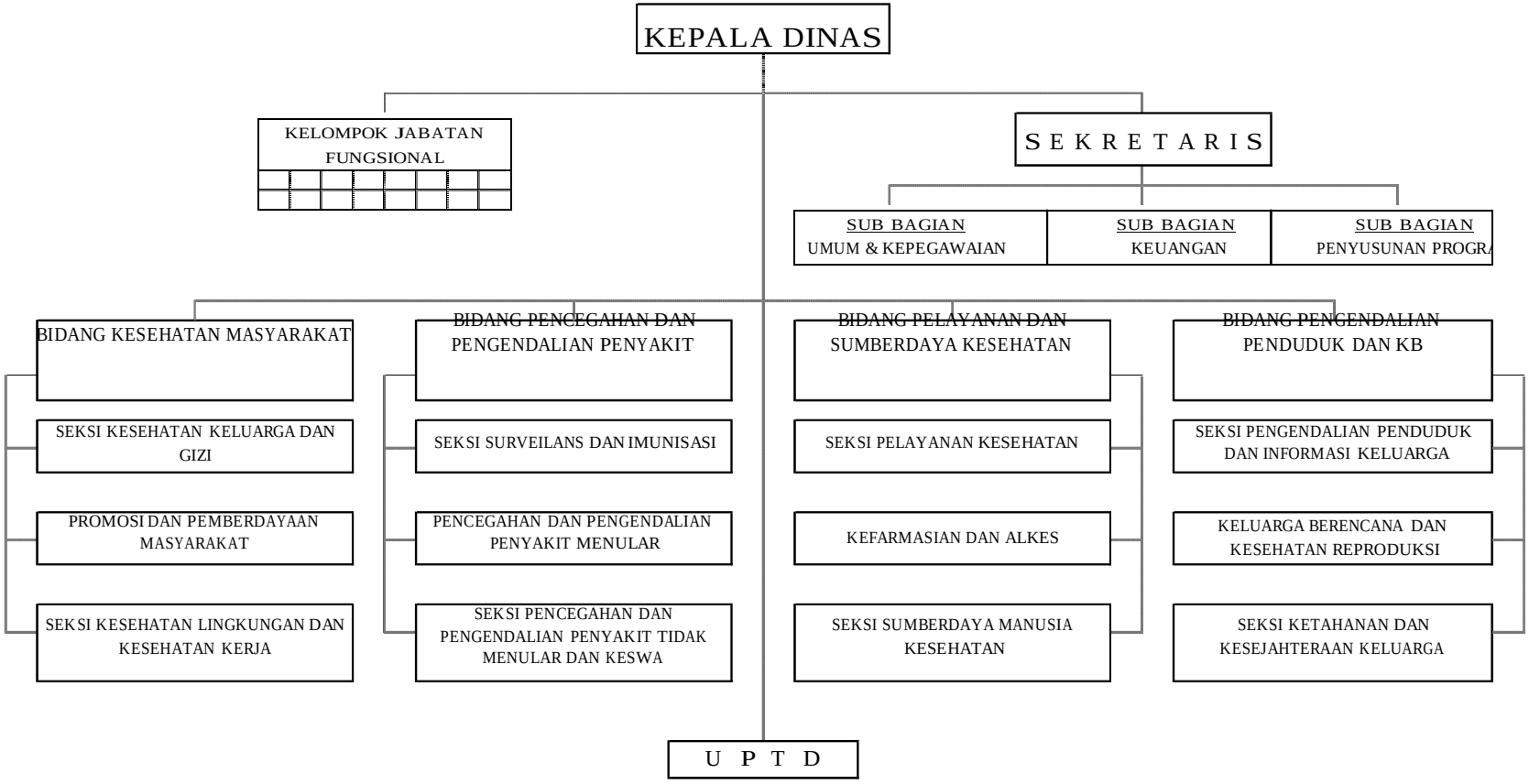
7.11. Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Kesehatan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan Anambas yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan, farmasi dan perbekalan kesehatan, makanan minuman dan perizinan
- Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan remaja dan usia lanjut serta upaya perbaikan gizi masyarakat.
- Melaksanakan perencanaan serta bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi kesehatan haji serta penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum, serta kualitas air.
- Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan dibidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



B. Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai *leading sector* kesehatan di daerah. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi erta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan

- permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan dan keluarga berencana	Belum optimalnya kapasitas penanganan kesehatan dan layanan program keluarga berencana	Ketersediaan prasarana kesehatan yang belum memadai di fasilitas kesehatan, baik di tingkat rumah sakit hingga tingkat puskesmas, khususnya untuk menangani pasien kritis
		Pengadaan alat yang belum tentu sesuai dengan kapasitas SDM yang dimiliki mengakibatkan banyaknya alat yang sudah dibeli tidak terpakai.
		Sistem pelaporan kasus untuk cepat tanggap penanganan belum optimal
		Belum ada fasilitas berupa tempat khusus

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penanganan pasien ODGJ
		Sarana dan peralatan penanganan persalinan belum memadai di tingkat pustu
		Perawatan/maintenance peralatan kesehatan belum optimal
		Belum meratanya fasilitas klinik keluarga berencana
Infrastruktur dan sarana transportasi penunjang pelayanan kesehatan yang belum memadai	Belum optimalnya kecepatan penanganan terhadap penyakit menular maupun tidak menular, pasien kritis, dan pertolongan persalinan	Faktor geografis yang sulit dijangkau
		Kondisi cuaca yang tidak menentu
		Ketersediaan transportasi laut yang sangat terbatas
Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Sistem pendeteksian atau screening penyakit tidak menular di KKA masih belum berjalan optimal.	Pemantauan penyakit tidak menular oleh tenaga kesehatan belum optimal karena bergantung pada partisipasi aktif melalui pengecekan dan laporan dari masyarakat.
	Keterbatasan ketersediaan obat	Kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah untuk pembinaan terhadap sarana farmasi dan alkes
		Obat yang tersedia untuk dibeli terkadang memiliki rentang waktu kadaluarsa yang relatif cepat
	Belum optimalnya penanganan penyakit menular	Pengobatan TB hingga selesai dan sembuh masih belum optimal
		Kasus kematian akibat malaria di KKA secara persentase masih tinggi
		Sistem screening HIV masih belum optimal
Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di	Kualitas SDM kesehatan yang relatif rendah	Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
		Keterbatasan jumlah dokter spesialis, terapis, ahli anestesi, dan ahli epidemiologi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
bidang kesehatan		Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di wilayah terpencil
		Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi
		Pemerataan persebaran SDM Kesehatan Kab. Kep. Anambas yang belum optimal
		Rangkap jabatan tenaga kesehatan sekaligus tenaga manajerial di fasilitas kesehatan dapat menyebabkan kualitas kinerja menurun
		Proses rekrutmen tenaga non-medis yang belum terlaksana
		Kurangnya minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk berkarir di Kab. Kep. Anambas
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah di bidang kesehatan	Wacana pemerintah untuk memberikan sarana prasarana, alat kesehatan, dan fasilitas untuk menunjang SDM kesehatan belum terlaksana	Kurangnya komitmen Pemda untuk merealisasikan anggaran yang direncanakan (baik melalui DAK maupun APBD) di bidang kesehatan
	Belum optimalnya penanganan isu - isu terkait SPM kesehatan	Kurangnya sarana dan fasilitas kesehatan pendukung yang dibutuhkan karena anggaran belum mencukupi
	Minimnya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	Program terkait peningkatan kapasitas SDM Kesehatan belum menjadi prioritas anggaran
	Belum optimalnya alokasi pendanaan untuk pengentasan Malaria, TB, dan HIV	Pendanaan penyakit menular masih digabungkan dengan pendanaan penyakit tidak menular

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengembangan rumah sakit tipe D dan kelengkapan fasilitas, layanan, dan SDM kesehatan rumah sakit terhambat	Rumah sakit di Kab. Kep. Anambas masih menggunakan anggaran APBD, belum menjadi BLUD
Kinerja di bidang kesehatan keluarga yang belum optimal	Masih terdapat kasus Stunting	Masih rendahnya pemahaman pola asuh orang tua dan kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat
	Masih terdapat kasus AKI	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis
	Belum optimalnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi wanita kawin 15-49 tahun	Masih rendahnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana.
	Sosialisasi dan pelaksanaan Vaksinasi dan Imunisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas belum optimal	Kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan vaksinasi belum cukup baik
Kondisi kesehatan lingkungan yang belum optimal	Meningkatnya jumlah limbah medis akibat pandemi covid	Belum adanya mekanisme tersendiri untuk pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan masing - masing yang sudah diatur pemda
	Sulitnya mendapatkan akses air bersih dan sanitasi untuk kesehatan keluarga dan masih terdapat jamban yang belum sesuai standar	Kondisi geografis pesisir yang dikelilingi air laut menyebabkan sulit mendapat air bersih
Pandemi Covid -19	Pelayanan kesehatan masyarakat terhambat	Banyak tenaga kesehatan terpapar Covid
		Penggunaan posyandu / puskesmas terbatas
		Kekhawatiran masyarakat untuk terpapar Covid-19 meningkat apabila datang ke fasilitas kesehatan

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah
Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	1.1.1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	1.1.1.1 Penguatan dan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
			1.1.1.2 Penerapan standar mutu pelayanan kesehatan
			1.1.1.3 Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak dan remaja
			1.1.1.4 Peningkatan kualitas hidup Lansia
		1.1.2 Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit	1.1.2.1 Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular
			1.1.2.2 Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
			1.1.2.3 Peningkatan sosialisasi terkait vaksin dan imunisasi
			1.1.2.4 Optimalisasi surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.
			1.1.2.5 Penanggulangan *new emerging desease* dan *re-emerging desease*.
			1.1.2.6 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pengendalian faktor risiko.
		1.1.3 Meningkatkan kinerja organisasi	1.1.3.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			1.1.3.2 Penataan data dan sistem informasi Kesehatan
			1.1.3.3 Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja
	1.2 Meningkatnya sumber daya kesehatan dan upaya paradigma sehat	1.2.1 Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas	1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan.
			1.2.1.2 Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan.
			1.2.1.3 Penataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standart.
			1.2.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDMK.

			1.2.1.5 Mengupayakan tercapainya pembiayaan
		1.2.2 Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya dan mendorong kemandirian	1.2.2.1 Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pola hidup bersih dan sehat
			1.2.2.2 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui Desa Siaga.
			1.2.2.3 Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM.
			1.2.2.4 Pengembangan kemitraan masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan.
			1.2.2.5 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.
			1.2.2.6 Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita.
			1.2.27 Peningkatan jumlah desa bebas masalah kesehatan prioritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera	2.1.1 Meningkatkan penyuluhan dan layanan terkait Pengendalian Penduduk dan KB	2.1.1.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
			2.1.1.2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
			2.1.1.3 Pemerataan pelayanan KB dan kebutuhan alat kontrasepsi
			2.1.1.4 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB
		2.1.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga	2.1.2.1 Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			2.1.2.2 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan dalam pembangunan keluarga
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1.1 Meningkatkan Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai Renstra Dinas Kesehatan PPKB	3.1.1.1 Memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan kinerja SDM
		3.1.2 Melanjutkan penyelesaian agenda Reformasi Birokrasi dan SAKIP	3.1.2.1 Penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
		3.1.3 Meningkatan kualitas pelayanan publik	3.1.3.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk memberikan dasar yang kuat dalam memberikan advokasi dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan lain, diperlukan perumusan isu-isu strategis yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil skoring menggunakan kriteria di atas, berikut adalah hasil prioritas isu strategis yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas :

Tabel 2.5 Hasil Skoring Isu - Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Isu Strategis	Total Skor
1	Sosialiasi untuk pelayanan kesehatan, vaksinasi, dan imunisasi	85,36
2	Pengendalian dan penanganan COVID-19	84,88
3	Sarana Dan Prasarana Kesehatan dan PPKB	83,99
4	Ketersediaan tenaga kesehatan/SDM Kesehatan dan PPKB	83,12
5	SPM Kesehatan: Kasus AKI dan AKB	83,09
6	Kualitas SDM Kesehatan dan PPKB	81,81
7	SPM Kesehatan: Penyebaran Penyakit Menular (malaria, TB, dan HIV)	79,64
8	Capaian Prevalensi Stunting	79,30
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	78,53
10	Keadaan geografis yang menghambat pelayanan Kesehatan dan PPKB	78,27
11	SPM Kesehatan: Pendeteksian dini penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Hipertensi, Kolesterol, Asam Urat) dan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa)	77,92
12	Tata Kelola kesiapan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD	76,92

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021-2026

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Menginjak usia yang sudah melebihi satu dasawarsa pada tahun 2025 mendatang, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi banyak permasalahan-permasalahan dasar yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isu strategis yang nantinya akan dianalisisdan akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025.

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pad tahun ke 2 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu RKP tahun 2025 serta RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Matriks Keterkaitan perencanaan pembangunan nasional, regional Kepulauan Riau dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Keterkaitan Tema RKP 2025, Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025,
dengan Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025



Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Rancangan Akhir Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan						
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	Catatan Penting
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				182.268.814.739,90					178.338.548.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	113.829.075.433,19		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-	53.940.213,93	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	100 %	0,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	53.940.213,93		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	0,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	96.353.633.035,30	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	92.062.270.975,66		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1 Orang/bulan	95.045.333.035,30		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1 Orang/bulan	90.599.211.975,66		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	1.308.300.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	1.463.059.000,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah*	-	30.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah*	100 %	15.000.000,00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	14 Laporan	30.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	14 Laporan	15.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.545.700,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	165.407.329,15		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	120.089.000,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	13.028.636,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	153.624.300,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	109.860.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	74.846.753,88		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	41.205.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	311.313.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	155.656.500,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	119.186.380,33		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	24.145.550,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	104.488.940,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	104.488.940,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	30.730.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	6.860.000,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	8.735.742.526,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	5.600.909.761,04		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan*	100 Persen	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan*	100 Persen	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	41.834.600,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	37.048.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	35.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	298.994.333,92		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	298.994.333,92		
Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	49.522.800,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.700.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 100 183/100.00 0KH 76,25 83,3 % % Persen %	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 100 183/100.00 0KH 76,25 83,3 % % Persen %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya*	100 %	41.562.039.821,60	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya*	100 %	43.005.354.610,95		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	13 Unit	19.031.432.510,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	13 Unit	20.248.921.049,10		

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 Unit	3.529.765.759,60		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 Unit	3.247.391.866,51		
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	14 Unit	669.614.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	14 Unit	169.613.000,00		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	14 Unit	600.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	14 Unit	741.525.000,00		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	14.032.254.552,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	14.770.100.195,34		
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan*	-	3.599.337.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan*	3 0	3.599.337.000,00		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	13 Paket	98.486.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	13 Paket	140.616.500,00		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	192.600.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	192.600.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	32369 Orang	100.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	32369 Orang	146.101.530,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	200.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	129.160.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	48.171.200,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	48.171.200,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	310.013.500,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	480.361.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	137.042.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	137.042.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	1 Dokumen	0,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	10 Dokumen	79.140.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	10 Dokumen	79.140.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	10 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	10 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	10 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	10 Orang	0,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	10 Dokumen	379.774.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	10 Dokumen	264.864.000,00		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	12 Dokumen	9.133.131.125,22		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	12 Dokumen	10.828.463.469,22		
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	15 Paket	27.700.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	15 Paket	27.700.000,00		
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	67.268.074,13		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	19.107.000,00		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	162.417.750,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	162.417.750,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	0,00		
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	-	68.665.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	5 Dokumen	68.665.000,00		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	1 Unit	0,00		

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	7 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	7 Laporan	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	0,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	243.607.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	243.607.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-	9.268.108,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 0	9.268.108,00		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Fasilitas Kesehatan dan dibina dan dievaluasi SDM Kesehatan	0	549.901.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Fasilitas Kesehatan dan dibina dan dievaluasi SDM Kesehatan	100 %	549.901.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan evaluasi SDMK*	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan evaluasi SDMK*	100 %	0,00		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan*	-	549.901.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan*	90 %	549.901.000,00		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	1 Orang	549.901.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	1 Orang	549.901.000,00		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan	-	0,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan	100 %	0,00		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan*	-	0,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan*	100 %	0,00		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	1 Dokumen	0,00		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Sertifikat PIRT yang diterbitkan*	-	0,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Sertifikat PIRT yang diterbitkan*	60 %	0,00		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	0,00		
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		*Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi*	-	0,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		*Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi*	60 %	0,00		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	1 Unit	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Peningkatan Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Purnama	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Peningkatan Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Purnama	88 %	84.203.200,00		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Posyandu aktif purnama*	-	0,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Posyandu aktif purnama*	88 %	0,00		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	0,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah UKBM Aktif*	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah UKBM Aktif*	100 %	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	0,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.884.142.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.343.942.000,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.884.142.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.343.942.000,00		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	192.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 %	192.000.000,00		

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		*Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)*	-	192.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		*Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)*	100 %	192.000.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	1 Laporan	60.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	1 Laporan	60.000.000,00		
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	1 Laporan	48.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	1 Laporan	48.000.000,00		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	1 Dokumen	84.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	1 Dokumen	84.000.000,00		
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk*	1 Unit	0,00		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB	-	2.179.342.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB	100 %	1.639.142.000,00		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		*Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif*	-	868.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		*Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif*	100 %	868.000.000,00		
Pengendalian Program KKBPK											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	1 Laporan	0,00		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	1 Laporan	343.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	1 Laporan	343.000.000,00		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	1 Laporan	200.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	1 Laporan	200.000.000,00		
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	1 Dokumen	125.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	1 Dokumen	125.000.000,00		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*	1 Dokumen	0,00		
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	1Organisasi	200.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	1Organisasi	200.000.000,00		

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		*Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan*	-	972.200.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		*Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan*	100 %	432.000.000,00		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	1 Orang	972.200.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	1 Orang	432.000.000,00		

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		*Peserta KB aktif modern*	-	193.542.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		*Peserta KB aktif modern*	35,5 %	193.542.000,00		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	1 Laporan	11.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	1 Laporan	11.660.000,00		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1 Orang	162.550.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1 Orang	162.550.000,00		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*	1 Unit	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*	1 Unit	0,00		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	1 Laporan	19.332.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	1 Laporan	19.332.000,00		
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*	1 Orang	0,00		

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		*Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB*	-	145.600.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		*Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB*	100 %	145.600.000,00		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB										
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	1 Dokumen	0,00		
Pembinaan Terpadu Kampung KB										

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB*	1 Laporan	0,00		
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*	1 Unit	0,00		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	1 Kampung	145.600.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	1 Kampung	145.600.000,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan	-	512.800.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan	100 %	512.800.000,00		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R*	-	130.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R*	100 %	130.000.000,00		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	1 Unit	130.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	1 Unit	130.000.000,00		
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)*	-	382.800.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)*	100 %	382.800.000,00		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	1 Organisasi	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	1 Organisasi	0,00		

Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	1 laporan	174.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	1 laporan	174.000.000,00		
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	1 laporan	208.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	1 laporan	208.800.000,00		
RSUD TAREMPA											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		

Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	120.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	266.621.552,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	266.621.552,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	100.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	50.000.000,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	293.700.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	390.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	222.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	222.000.000,00		
Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	3.058.235.100,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	4.337.052.374,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %	61.531.426.468,17		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	-	41.562.039.821,60	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	100 %	43.005.354.610,95		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	87.700.000,00		
RSUD JEMAJA											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		

Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	75.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	18.748.984,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	18.748.984,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	225.188.224,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	257.904.224,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	100.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	50.100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	25.050.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	21.692.901,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	36.646.401,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	170.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	235.464.400,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	15.250.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	15.250.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	44.700.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	6.566.100,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	100.000,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	300.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	300.000.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	-	41.562.039.821,60	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	100 %	43.005.354.610,95		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	100.000,00		
RSUD PALMATAK											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	6.577.864,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	6.577.864,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	120.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	270.289.739,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	270.289.739,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	100.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	50.000.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	231.676.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	231.676.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	33.024.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	33.024.000,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.400.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.400.000.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	-	41.562.039.821,60	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*	100 %	43.005.354.610,95		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	50.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	50.000,00		
PUSKESMAS SIANTAN TENGAH											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	355.787.133,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	455.746.378,07		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined*	100 %undefined undefined	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	45.901.870,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	45.901.870,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	0,00		
Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	271.424.960,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	271.424.960,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat* *Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* *Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah* *Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat* *Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* *Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah* *Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	95.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	95.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	4.510.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	4.510.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	3.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	3.000.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	13.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	13.000.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	161.956.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	161.956.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	16.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	16.000.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.570.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.570.000,00		

Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	25.510.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	25.510.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	1.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	1.000.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	74.199.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	74.199.000,00		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	0,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	-	164.082.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	164.082.000,00		

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	1.595.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1.595.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.325.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.325.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.535.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.535.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	12.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	12.000.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	22.785.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	22.785.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	9.771.694,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	9.771.694,00		

PUSKESMAS LETUNG											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	57.991.116,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	57.991.116,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
N ON URUSAN				179.384.672.739,90	N ON URUSAN				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				175.994.606.101,36		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	37.570.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	32.570.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	540.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	774.680.268,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	43.140.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	43.140.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	24.980.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	28.420.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	15.360.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	15.360.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	10.320.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	10.320.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	206.270.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	193.255.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	46.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	23.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.040.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	19.040.000,00		

Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	16.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	21.280.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	16.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	16.400.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	39.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	59.100.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	63.767.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	63.767.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	5.198.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1.783.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	24.880.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	25.870.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	5.160.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.720.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	20.640.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	28.560.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	45.240.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	45.240.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.160.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.160.000,00		
PUSKESMAS JEMAJA TIMUR											

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	69.148.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	69.148.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	26.479.600,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	26.479.600,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	228.404.410,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	248.404.410,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	38.880.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	38.880.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	29.040.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	29.040.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	3.960.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	3.960.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	16.830.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	16.830.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	98.770.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	98.770.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	5.940.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	5.940.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	5.940.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	5.940.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	18.720.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	18.720.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	7.040.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	7.040.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	67.500.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	67.500.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	133.756.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	133.756.000,00		

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	1.320.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1.320.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	14.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	14.400.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	2.120.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	2.120.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	10.890.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	10.890.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	21.120.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	21.120.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	7.349.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	7.349.000,00		

PUSKESMAS PALMATAK											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	90.822.298,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	90.822.298,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	62.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	62.400.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	815.700.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.149.700.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatanPersentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatanPersentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	10076,2583,33 %%%	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	105.600.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	105.600.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	5.490.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	5.490.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	5.320.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	5.320.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	11.970.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	11.970.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	136.835.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	136.835.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	2.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	2.660.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	6.320.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	6.320.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.140.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.140.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	3.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	3.660.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	88.910.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	88.910.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	111.520.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	111.520.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	2.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	2.660.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.245.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.245.000,00		

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	3.271.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	3.271.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	3.660.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	3.660.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.192.886,00		Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.192.886,00		
PUSKESMAS TAREMPA											

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	38.888.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	38.888.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		
N ON URUSAN				179.384.672.739,90	N ON URUSAN				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				175.994.606.101,36		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	55.626.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	55.626.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.162.391.059,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.249.525.447,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	66.250.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	66.250.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	75.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	75.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	8.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	8.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	7.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	7.000.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	120.925.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	120.925.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	13.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	13.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	20.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	20.000.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.750.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.750.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	8.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	8.000.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	54.500.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	54.500.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	145.700.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	145.700.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	300.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	300.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	22.630.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	22.630.000,00		

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	36.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	36.000.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	70.450.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	70.450.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	15.604.820,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	15.604.820,00		
PUSKESMAS SIANTAN SELATAN											

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	234.689.765,44		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	100.000.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	40.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	40.000.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	20.000.245,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	20.000.245,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		

Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	361.934.200,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	361.934.200,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	70.647.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	70.647.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	72.750.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	72.750.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	28.290.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	28.290.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	16.830.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	16.830.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	207.110.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	207.110.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	28.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	28.800.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	20.790.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	20.790.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	14.985.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	14.985.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	12.780.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	12.780.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	94.245.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	94.245.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	104.376.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	104.376.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	3.150.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	3.150.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	11.755.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	11.755.000,00		

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	10.230.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	10.230.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	53.460.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	53.460.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.675.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.675.000,00		
PUSKESMAS SIANTAN TIMUR											

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	-	213.164.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	140.000.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	44.785.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	44.785.000,00		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	20.240.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	10.000.000,00		
Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-	9.522.179.692,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %	11.429.988.822,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	334.567.163,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	334.567.163,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		- Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		- Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	0 100 76,25 76,25 83,33 % % Persen %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	97.100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	97.100.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	10.500.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	10.500.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	14.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	14.000.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	14.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	14.000.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	153.205.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	153.205.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	3.500.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	3.500.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.000.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.335.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.335.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	7.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	7.000.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	85.565.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	85.565.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	85.498.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	85.498.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	2.100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	2.100.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	-	34.098.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	34.098.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.794.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.794.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	21.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	21.000.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	11.856.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	11.856.000,00		
BALAI PENGELOLA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN (BPFAK)											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		

Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.408.220,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.408.220,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	7.928.140,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	7.928.140,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	8.228.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	8.228.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.900.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.900.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	12.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	10.851.200,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	10.851.200,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	99.591.208,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	99.591.208,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	7.140.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	7.140.000,00		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	10.490.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	10.490.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		
PUSKESMAS JEMAJA BARAT											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		

Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	5.894.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	5.894.000,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	5.989.500,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	5.989.500,00		
N ON URUSAN				179.384.672.739,90	N ON URUSAN				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				175.994.606.101,36		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	42.883.060,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	21.848.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.010.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.010.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	19.997.053,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	6.543.463,50		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	10.054.987,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	10.054.987,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	50.010.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	28.410.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	38.425.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	38.425.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	30.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	30.800.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	4.200.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	4.200.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	9.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	9.800.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	101.705.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	101.705.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1.400.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.000.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	16.200.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	16.200.000,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	2.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	2.800.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	48.200.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	48.200.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	112.024.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	133.624.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.400.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											

	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	4.900.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	4.900.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	8.400.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	8.400.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	30.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	30.800.000,00		

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	12.678.800,00		Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	12.678.800,00		
PUSKESMAS SIANTAN UTARA											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		

Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.222.325,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.182.572,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	11.681.085,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	3.018.000,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	7.680.011,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	6.341.831,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	30.100.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	15.097.411,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.500.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.499.510,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	10.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	24.074.748,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	32.275.940,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	28.542.239,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	2.472.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	4.937.750,00		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	100 %	683.872.433,92		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	3.962.700,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	0,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	20.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	100.000,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % % %	61.531.426.468,17		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM*	100 % 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	74.800.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	74.800.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	3.240.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	3.240.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	14.040.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	14.040.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	72.231.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	72.231.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	3.620.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	3.620.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.120.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.120.000,00		

Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	10.680.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	10.680.000,00		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	63.340.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	63.340.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	97.328.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	113.528.000,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	1.080.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1.080.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	18.720.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	18.720.000,00		

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	11.880.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	11.880.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	0,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.735.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.735.000,00		
PUSKESMAS KUTE SIANTAN											

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	9.000.000,00		

	Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	20.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	20.000.000,00		

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	35.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	26.000.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	818.495.633,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	683.872.433,92		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	30.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	30.000.000,00		

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	-	58.372.441.378,95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 76,25 83,33 % Persen %	61.531.426.468,17		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat* *Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* *Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah* *Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM* *Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota*	-	16.792.133.449,35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat* *Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* *Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah* *Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM* *Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota*	100 % 100 Persen 55 % 98 % 98,4 %	18.507.803.749,22		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	82.720.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	82.720.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	3.300.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	3.300.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	-	2.640.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1 Orang	2.640.000,00		

	Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	2.640.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	2.640.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	1 Orang	0,00		

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	98.045.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	98.045.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	-	1.760.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1.760.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.560.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.560.000,00		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.650.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.650.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	-	1.320.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	1.320.000,00		

	Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	31.670.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	31.670.000,00		
Operasional Pelayanan Puskesmas											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	358.248.800,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	358.248.800,00		

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	-	2.640.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	2.640.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	10.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	10.000.000,00		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	990.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	990.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	-	15.840.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	15.840.000,00		
Pengelolaan Layanan Imunisasi											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	53.840.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	53.840.000,00		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	-	18.268.108,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*	98,4 %	18.268.108,00		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											

	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	9.000.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	9.000.000,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	84.203.200,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	84.203.200,00		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.180.000,00		Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.180.000,00		

LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				175.994.606.101,36		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				179.384.672.739,90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				175.994.606.101,36		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.378.127.160,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113.829.075.433,19		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	3.352.403.788,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	2.484.762.050,57		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	APBD 2025	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RKPD PERUBAHAN 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	
			SEBELUM					SESUDAH			
3	14	4	8	11	3	14	4	9	12	6	

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	10.247.474.797,33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	7.153.181.151,04		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	0,00		
				182.268.814.739,90					178.338.548.101,36		

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rencana Kerja (Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rencana Kerja (Renja) adalah Pembangunan Puskesmas Kecamatan Jemaja Barat, Pembangunan Pustu Air Putih dan Pembangunan Puskesmas Siantan Utara.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu ;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencan dituntut untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanah pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2021-2026 yaitu "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah" yang berarti Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana urusan kesehatan berada pada misi ke satu yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah dan misi ketiga yaitu Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayaniserta Otonomi Desa yang Bersinergi.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Periode 2021-2026. Tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Tabel 3.1

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	**Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah**	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas		Umur Harapan Hidup	68,19
			1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH
				Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,00%
				Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.25
				Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	98,44%
				Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100.00%
			1.2 Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	100.00%
				Persentase Posyandu Aktif	88,00%
				Persentase Desa Siaga Aktif	100,00%
		2. Mewujudkan Keluarga yang		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	63,22
		Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	Persentase Kampung KB yang dibina	100,00%
			2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	79,00%
	Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan	3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (60,2)
			3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	BB (60,2)

	Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82)

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dan Prakiraan Maju tahun anggaran 2026 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							189.850.712.536,00	182.268.814.739,90	178.338.548.101,36	-11.512.164.434,64							250.697.880.134,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							188.599.173.368,00	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64							250.090.311.134,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESE							188.599.173.368,00	179.384.672.739,90	175.994.606.101,36	-12.604.567.266,64							250.090.311.134,00	

		HATAN																	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				-	100 %	45.762.000,00	53.940.213,93	0,00	-45.762.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		45.762.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.762.000,00	53.940.213,93	0,00	-45.762.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			45.762.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	69.156.028.761,00	96.353.633.035,30	92.062.270.975,66	22.906.242.214,66			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya	-		69.156.028.761,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	67.901.858.761,00	95.045.333.035,30	90.599.211.975,66	22.697.353.214,66	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			67.901.858.761,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																ya saing				
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.254.170.000,00	1.308.300.000,00	1.463.059.000,00	208.889.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.254.170.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah*				-	100 %	60.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-45.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	60.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.545.700,00	10.545.700,00	0,00	-10.545.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pema			10.545.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ntapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	234.157.556,00	165.407.329,15	120.089.000,00	-114.068.556,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			234.157.556,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.550.000,00	13.028.636,00	0,00	-55.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			55.550.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	297.021.973,00	153.624.300,00	109.860.000,00	-187.161.973,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya			297.021.973,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.569.000,00	74.846.753,88	41.205.000,00	-145.364.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			186.569.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	860.097.200,00	311.313.000,00	155.656.500,00	-704.440.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			860.097.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	365.894.126,00	119.186.380,33	24.145.550,00	-341.748.576,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			365.894.126,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	104.488.940,00	104.488.940,00	-145.511.060,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132.370.000,00	30.730.000,00	6.860.000,00	-125.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			132.370.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.235.877.238,00	8.735.742.526,00	5.600.909.761,04	-20.634.967.476,96	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			26.235.877.238,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan*				100 Persen	100 Persen	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.001.000,00	41.834.600,00	37.048.000,00	-12.953.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			50.001.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	516.066.269,00	298.994.333,92	298.994.333,92	-217.071.935,08	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			516.066.269,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	200.000.000,00	49.522.800,00	2.700.000,00	-197.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan**				**100 100 183 /100.00 0KH 76,25 83,3 % % Persen %**	**100 100 183/ 100.00 0KH 76,25 83,3 % % Persen %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat																	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya*				100 %	100 %	53.844.585.931,00	41.562.039.821,60	43.005.354.610,95	-10.839.231.320,05			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Desa dan Kecamatan		112.870.589.537,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta pengu atan n pera n pere mpu an, pem uda (gen erasi mile nial dan gene rasi Z), dan peny anda ng disa bilita s.	ya saing				
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				13 Unit	13 Unit	29.364.804.102,00	19.031.432.510,00	20.248.921.049,10	-9.115.883.052,90	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK FISIK - BIDANG KESEHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			69.860.214.079,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														TAN DAN KB-PEN UG ASA N-PEN URU NAN AKI DAN AKB DAK FISIK - BIDA NG K ESE HAT AN-PEN GUA TAN SIST EM KES EHA TAN PEN DAP ATA N BAGI HASI L PAJA K ROK OK	peny anda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.650.000.000,00	3.529.765.759,60	3.247.391.866,51	-2.402.608.133,49	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			14.658.390.023,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Region				14 Unit	14 Unit	3.306.387.483,00	669.614.000,00	169.613.000,00	-3.136.774.483,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			3.306.387.483,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			al/Regional Maintainance Center												ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				14 Unit	14 Unit	889.957.302,00	600.000.000,00	741.525.000,00	-148.432.302,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.889.957.302,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	13.977.796.394,00	14.032.254.552,00	14.770.100.195,34	792.303.801,34	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK - BOK KB- BOK PENDAPATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														N BAGI HASIL PAJAK ROKOK	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan				-	3 0	0,00	3.599.337.000,00	3.599.337.000,00	3.599.337.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Pengembangan													manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				13 Paket	13 Paket	157.654.830,00	98.486.000,00	140.616.500,00	-17.038.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK PEN DAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			157.654.830,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terinteg*				100 % 55 % 98 % 98,4 %	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			rasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	63.115.000,00	0,00	0,00	-63.115.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	141.459.054,00	192.600.000,00	192.600.000,00	51.140.946,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			141.459.054,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			

			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32369 Orang	32369 Orang	147.810.000,00	100.000.000,00	146.101.530,00	-1.708.470,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB- BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			147.810.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	247.043.650,00	200.000.000,00	129.160.000,00	-117.883.650,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB- BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			247.043.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														ROKOK	asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	48.171.200,00	48.171.200,00	48.171.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	310.013.500,00	480.361.000,00	450.361.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK - BOK KB-BOK PEN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			489.152.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														DAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	137.042.000,00	137.042.000,00	112.042.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			163.545.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	59.485.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00	19.655.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			59.485.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	49.790.000,00	0,00	0,00	-49.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	471.478.202,00	379.774.000,00	264.864.000,00	-206.614.202,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REG ULER DAK NON FISIK-BOK KB-BOK PEN DAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			471.478.202,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	11.836.638.517,00	9.133.131.125,22	10.828.463.469,22	-1.008.175.047,78	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			11.836.638.517,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				15 Paket	15 Paket	57.950.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	-30.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			57.950.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	177.376.000,00	67.268.074,13	19.107.000,00	-158.269.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK PEN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			177.376.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														DAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	162.417.750,00	162.417.750,00	161.417.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	5 Dokumen	0,00	68.665.000,00	68.665.000,00	68.665.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				7 Laporan	7 Laporan	28.590.000,00	0,00	0,00	-28.590.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	243.607.000,00	243.607.000,00	233.607.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	-		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 0	0,00	9.268.108,00	9.268.108,00	9.268.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Persentase Fasilitas Keseha**				**0**	**100 %**	**295.560.000,00**	**549.901.000,00**	**549.901.000,00**	**257.204.200,00**							**552.764.200,00**	

		KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**tan dan dibina dan dievaluasi SDM Kesehatan**																
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan evaluasi SDMK*				-	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pem	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan*				-	90 %	285.560.000,00	549.901.000,00	549.901.000,00	264.341.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		552.764.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	285.560.000,00	549.901.000,00	549.901.000,00	264.341.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			552.764.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
4,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga**				**-**	**100 %**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	

		MINUMAN	**kesehatan**																
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan*				-	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diprod	*Jumlah Sertifikat PIRT yang diterbitkan*				-	60 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		uksi oleh Industri Rumah Tangga													kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi*				-	60 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
5,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Purnama**				**-**	**88 %**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Posyandu aktif purnama*				-	88 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Posyandu		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah UKBM Aktif*				-	100 %	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA**							**1.251.539.168,00**	**2.884.142.000,00**	**2.343.942.000,00**	**1.092.402.832,00**							**607.569.000,00**	

		YANAN DASAR																	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.251.539.168,00**	**2.884.142.000,00**	**2.343.942.000,00**	**1.092.402.832,00**							**607.569.000,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan**				**-**	**100 %**	**70.100.000,00**	**192.000.000,00**	**192.000.000,00**	**-10.000.000,00**							**60.100.000,00**	

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)*				-	100 %	70.100.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	121.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		60.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	15.600.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	32.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			15.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	34.500.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	49.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			34.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		

			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**				**-**	**100 %**	**794.439.168,00**	**2.179.342.000,00**	**1.639.142.000,00**	**-281.770.168,00**							**512.669.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifa	*Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif*				-	100 %	216.195.168,00	868.000.000,00	868.000.000,00	651.804.832,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		248.075.168,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		n Buday a Lokal													, pend idika n, kese hata n, prest asi olahr aga, kese tara an gend er, serta peng uata n pera n pere mpu an, pemu da (gen erasi mile nial dan gene rasi Z), dan peny anda ng disa bilita s.	Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang sehat, ungg ul dan berda ya saing				
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																			

			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	18.120.000,00	0,00	0,00	-18.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK B	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	343.000.000,00	343.000.000,00	338.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	- -			64.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat				1 Laporan	1 Laporan	34.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	165.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			34.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,				1 Dokumen	1 Dokumen	14.688.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	110.312.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			14.688.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.						
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1Organisasi	1Organisasi	134.687.168,00	200.000.000,00	200.000.000,00	65.312.832,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			134.687.168,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan*				-	100 %	83.590.832,00	972.200.000,00	432.000.000,00	348.409.168,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		83.590.832,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1 Orang	1 Orang	83.590.832,00	972.200.000,00	432.000.000,00	348.409.168,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			83.590.832,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Peserta KB aktif modern*				-	35,5 %	62.140.000,00	193.542.000,00	193.542.000,00	131.402.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		112.677.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	19.140.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	-7.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			19.140.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1 Orang	1 Orang	12.000.000,00	162.550.000,00	162.550.000,00	150.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK B	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	19.332.000,00	19.332.000,00	8.332.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			81.537.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan keserta an Ber-KB*				-	100 %	432.513.168,00	145.600.000,00	145.600.000,00	-286.913.168,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		68.326.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	225.750.000,00	0,00	0,00	-225.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	1 Unit	134.687.168,00	0,00	0,00	-134.687.168,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepend				1 Kampung	1 Kampung	68.326.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	77.274.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK B	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			68.326.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			udukan, dan Keluarga Berencana)												asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan**				**-**	**100 %**	**387.000.000,00**	**512.800.000,00**	**512.800.000,00**	**-352.200.000,00**							**34.800.000,00**	

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R*				-	100 %	12.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	118.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.						
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	*Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan*				-	100 %	375.000.000,00	382.800.000,00	382.800.000,00	7.800.000,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	-		22.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		dan Kesejahteraan Keluarga	*Ekonomi Keluarga/UPPKS)*													sehat, unggul dan berdaya saing				
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	1 Organisasi	352.200.000,00	0,00	0,00	-352.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1 laporan	17.400.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	156.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			17.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,				1 laporan	1 laporan	5.400.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	203.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua	DAK NON FISIK - BOK KB-BOKB	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan										Kel/Desa			l dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
		RSUD TAREMPA							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketaranan gender, serta peng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.336.938,00	1.000.000,00	0,00	-41.336.938,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			41.336.938,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	215.059.736,00	120.000.000,00	0,00	-215.059.736,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			215.059.736,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.626.000,00	1.000.000,00	0,00	-63.626.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			63.626.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	292.846.627,00	266.621.552,00	266.621.552,00	-26.225.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			292.846.627,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.554.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	1.446.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			48.554.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	197.736.269,00	1.000.000,00	0,00	-197.736.269,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			197.736.269,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	293.700.000,00	390.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.337.800,00	1.000.000,00	0,00	-50.337.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.337.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	95.678.900,00	1.000.000,00	0,00	-95.678.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			95.678.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	341.788.166,00	222.000.000,00	222.000.000,00	-119.788.166,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			341.788.166,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.559.350.000,00	3.058.235.100,00	4.337.052.374,00	-222.297.626,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			4.559.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya**				**-**	**100 %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranandan prasarananya*				-	100 %	53.844.585.931,00	41.562.039.821,60	43.005.354.610,95	-10.839.231.320,05			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		112.870.589.537,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	355.300.000,00	1.000.000,00	87.700.000,00	-267.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			355.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		RSUD JEMAJA							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESE**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

		HATAN																	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.665.170,00	100.000,00	100.000,00	-14.565.170,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			14.665.170,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.225.549,00	75.000.000,00	0,00	-16.225.549,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			16.225.549,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.999.616,00	18.748.984,00	18.748.984,00	-22.250.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			40.999.616,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	225.188.224,00	225.188.224,00	257.904.224,00	32.716.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			225.188.224,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.204.000,00	100.000,00	100.000,00	-6.104.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			6.204.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	50.100.000,00	25.050.000,00	-49.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	42.638.926,00	21.692.901,00	36.646.401,00	-5.992.525,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			42.638.926,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	170.000.000,00	235.464.400,00	35.464.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			118.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.851.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	-11.601.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			26.851.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.380.000,00	44.700.000,00	6.566.100,00	-21.813.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			28.380.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.151.500,00	100.000,00	100.000,00	-50.051.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			50.151.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	761.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-461.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			761.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya**				**-**	**100 %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*				-	100 %	53.844.585.931,00	41.562.039.821,60	43.005.354.610,95	-10.839.231.320,05			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		112.870.589.537,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	42.685.820,00	100.000,00	100.000,00	-42.585.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			42.685.820,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		RSUD PALMATAK							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESE**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

		HATAN																	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																ya saing				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.109.220,00	6.577.864,00	6.577.864,00	-21.531.356,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			28.109.220,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	208.856.174,00	120.000.000,00	0,00	-208.856.174,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			208.856.174,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	137.649.425,00	0,00	0,00	-137.649.425,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	390.837.056,00	270.289.739,00	270.289.739,00	-120.547.317,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			390.837.056,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																ya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.800.000,00	0,00	0,00	-35.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	97.152.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-47.152.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			97.152.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.397.347,00	0,00	0,00	-50.397.347,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	214.448.885,00	231.676.000,00	231.676.000,00	17.227.115,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			214.448.885,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.018.500,00	0,00	0,00	-37.018.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	33.024.000,00	33.024.000,00	-166.976.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.058.235.100,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-1.658.235.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			4.058.235.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya**				**-**	**100 %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya*				-	100 %	53.844.585.931,00	41.562.039.821,60	43.005.354.610,95	-10.839.231.320,05			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		112.870.589.537,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-99.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PUSKESMAS SIANTAN TENGAH							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESE**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	

		HATAN																	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	226.569.778,00	355.787.133,00	455.746.378,07	229.176.600,07	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			226.569.778,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined*				-	100 %undefined undefined	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.119.225,00	45.901.870,00	45.901.870,00	-14.217.355,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			60.119.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	571.274.960,00	271.424.960,00	271.424.960,00	-299.850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			571.274.960,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupa**				**-**	**100 76,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			ten sehat																	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyar*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat yang melaksanakan Posbindu PTM												pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	94.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sianta n Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	3.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	161.956.000,00	161.956.000,00	160.956.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan				-	1 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat,			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

			Olahraga										Kel/Desa			unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.570.000,00	12.570.000,00	11.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	25.510.000,00	25.510.000,00	24.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	74.199.000,00	74.199.000,00	73.199.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	119.295.228,00	0,00	0,00	-119.295.228,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	164.082.000,00	164.082.000,00	164.082.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			164.082.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00	3.325.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	535.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00	21.785.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	9.771.694,00	9.771.694,00	8.771.694,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)													saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
		PUSKESMAS LETUNG							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.368.000,00	0,00	0,00	-5.368.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.327.403,00	0,00	0,00	-15.327.403,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	57.991.116,00	57.991.116,00	-7.008.884,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			37.991.116,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.900.000,00	0,00	0,00	-5.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1	**ONURUSAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.575.000,00	0,00	0,00	-27.575.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penyandang disabilitas.					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	14.463.910,00	0,00	0,00	-14.463.910,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37.570.000,00	37.570.000,00	32.570.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			37.570.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	9.515.475,00	0,00	0,00	-9.515.475,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	564.000.000,00	540.000.000,00	774.680.268,00	210.680.268,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			514.166.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
1,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembin**				**-**	**10076,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			aan tatanan Kabupaten sehat																	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	43.140.000,00	43.140.000,00	42.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	24.980.000,00	28.420.000,00	27.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	206.270.000,00	193.255.000,00	192.255.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	46.800.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.040.000,00	19.040.000,00	18.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	16.800.000,00	21.280.000,00	20.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	39.660.000,00	59.100.000,00	58.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	63.767.000,00	63.767.000,00	3.767.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	5.198.000,00	1.783.000,00	1.783.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	24.880.000,00	25.870.000,00	24.870.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.160.000,00	1.720.000,00	720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	20.640.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	45.240.000,00	45.240.000,00	44.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
2,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
		akat (UKBM)																			
		PUSKESMAS JEMAJA TIMUR							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	260.225,00	0,00	0,00	-260.225,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	132.000.000,00	69.148.000,00	69.148.000,00	-62.852.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesegender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			49.148.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.897.875,00	0,00	0,00	-8.897.875,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	22.117.300,00	0,00	0,00	-22.117.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.479.600,00	26.479.600,00	26.479.600,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			26.479.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.050.000,00	0,00	0,00	-100.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.844.400,00	0,00	0,00	-37.844.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	216.000.000,00	228.404.410,00	248.404.410,00	32.404.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			530.104.410,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persent**				**-**	**10076,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			ase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat																	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	500.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	38.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	28.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	16.830.000,00	16.830.000,00	16.830.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.						
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	98.770.000,00	98.770.000,00	97.770.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	4.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	17.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	66.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	133.756.000,00	133.756.000,00	133.256.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			82.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	13.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	10.890.000,00	10.890.000,00	10.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	20.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	7.349.000,00	7.349.000,00	6.349.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)													saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
		PUSKESMAS PALMATAK							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.704.798,00	90.822.298,00	90.822.298,00	-36.882.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			127.704.798,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	145.517.500,00	62.400.000,00	62.400.000,00	-83.117.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			145.517.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	925.994.915,00	815.700.000,00	1.149.700.000,00	223.705.085,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			925.994.915,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatanPersentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase**				**-**	**1007 6,2583,33 %%%**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatana*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			n Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	104.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	4.490.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	10.970.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	136.835.000,00	136.835.000,00	135.835.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan				-	1 Dokumen	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat,			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

			Olahraga													unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	5.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.140.000,00	12.140.000,00	11.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	88.910.000,00	88.910.000,00	87.910.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	111.520.000,00	111.520.000,00	41.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00	3.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	3.271.000,00	3.271.000,00	2.271.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.192.886,00	5.192.886,00	4.192.886,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS TAREMPA							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	

	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.480.000,00	38.888.000,00	38.888.000,00	-26.592.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			234.402.233,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.100.000,00	0,00	0,00	-11.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													auan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1	**ONURUSAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

		BIDANG XX																	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.168.000,00	55.626.000,00	55.626.000,00	-16.542.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			160.120.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														rasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketaragan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	11.420.000,00	0,00	0,00	-11.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.020.000.000,00	1.162.391.059,00	1.249.525.447,00	229.525.447,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.180.391.059,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persent**				**-**	**10076,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			ase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00	65.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00	74.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	120.925.000,00	120.925.000,00	119.925.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan				-	1 Dokumen	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat,			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

			Olahraga													unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	11.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	53.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	105.346.820,00	145.700.000,00	145.700.000,00	40.353.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			105.346.820,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	22.630.000,00	22.630.000,00	21.630.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	70.450.000,00	70.450.000,00	69.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	15.604.820,00	15.604.820,00	14.604.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SIANTAN SELATAN						**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	

	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	234.689.765,44	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.245,00	0,00	0,00	-40.000.245,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.416.800,00	0,00	0,00	-10.416.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.245,00	20.000.245,00	245,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharа dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	407.538.429,00	361.934.200,00	361.934.200,00	-45.604.229,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			407.538.429,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan keseha**				**-**	**100 76,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**tan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat**																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggara*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			a n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	70.647.000,00	70.647.000,00	69.647.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00	71.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	28.290.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	16.830.000,00	16.830.000,00	15.830.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	207.110.000,00	207.110.000,00	206.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	20.790.000,00	20.790.000,00	19.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	13.985.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	94.245.000,00	94.245.000,00	93.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketaranan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	104.842.000,00	104.376.000,00	104.376.000,00	-466.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			104.842.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	11.755.000,00	11.755.000,00	10.755.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	9.230.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	53.460.000,00	53.460.000,00	53.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	5.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)													saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
		PUSKESMAS SIANTAN TIMUR							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	151.273.565,00	0,00	0,00	-151.273.565,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	213.164.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			213.164.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.025.000,00	44.785.000,00	44.785.000,00	-20.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			65.025.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	20.240.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	13.817.960.567,00	9.522.179.692,00	11.429.988.822,00	-2.387.971.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Puskesmas		14.242.622.036,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	534.567.163,00	334.567.163,00	334.567.163,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			534.567.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**- Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase cakupa**				**-**	**0 100 76,25 76,25 83,33 % % Persen %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**						**130.673.491.119,00**	

			n layana n Keseha tan masyar akat yang terpenu hi Persent ase desa dan kelurah an yang dilakuk an pembin aan tatanan Kabupa ten sehat																
	1.02.0 2.2.02	Penye diaan Layana n Keseh atan untuk UKM dan UKP Rujuka n Tingkat Daerah Kabup aten/K ota	*Mening katkan Masyar akat yang Berperil aku Hidup Bersih dan Sehat Persent ase Desa/ke lurahan Univers al Child Immuni zation (UCI) Persent ase Penyele nggara a n Aplikasi Sistem Informa*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.0 11.490,0 0	16.792.1 33.449,3 5	18.507.8 03.749,2 2	3.900.792. 259,22			Mem perk uat pem bang unan sum ber daya man usia (SD M), sain s, tekn ologi , pend idika n, kese hata n, prest asi olahr aga,	Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang sehat, ungg ul dan berda ya saing Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang	Masa yarak at Kabu pate Kepul auan Anam bas		17.701.90 1.582,00	DINAS KESEH ATAN, PENGE NDALIA N PENDU DUK DAN KELUA RGA BEREN CANA

			si Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	97.100.000,00	97.100.000,00	96.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	153.205.000,00	153.205.000,00	152.205.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.335.000,00	12.335.000,00	11.335.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	85.565.000,00	85.565.000,00	84.565.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	95.289.000,00	85.498.000,00	85.498.000,00	-9.791.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			95.289.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	34.098.000,00	34.098.000,00	34.098.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	794.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.				
	1.02.0 2.2.03	Penyel enggar aan Sistem Inform asi Keseh atan Secara Terinte grasi	*Jumlah Penyele nggara an Aplikasi Sistem Informa si Keseha tan secara Terinteg rasi di perangk at daerah*				-	98,4 %	10.000.0 00,00	18.268.1 08,00	18.268.1 08,00	8.268.108, 00			Mem perk uat pemb angu nan sum ber daya man usia (SD M), sain s, tekn ologi , pend idika n, kese hata n, prest asi olahr aga, kese tara an gend er, serta peng uata n	Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang sehat, ungg ul dan berda ya saing Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang sehat, ungg ul dan berda ya saing	Dinas Kese hatan , Ruma h Sakit dan Pusk esma s		101.000.0 00,00	DINAS KESEH ATAN, PENGE NDALIA N PENDU DUK DAN KELUA RGA BEREN CANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	11.856.000,00	11.856.000,00	10.856.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)													saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
		BALAI PENGELOLA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN (BPFAK)							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.408.220,00	1.408.220,00	1.408.220,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			21.408.220,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.928.140,00	7.928.140,00	7.928.140,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			17.928.140,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			18.228.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-28.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			38.900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.060.000,00	12.000.000,00	0,00	-21.060.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			21.060.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	56.851.200,00	10.851.200,00	10.851.200,00	-46.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			56.851.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109.528.600,00	99.591.208,00	99.591.208,00	-9.937.392,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			109.528.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	117.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	-110.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			117.140.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	110.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			110.490.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PUSKESMAS JEMAJA BARAT							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESE**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	

		HATAN																	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.800.000,00	5.894.000,00	5.894.000,00	-3.906.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			25.891.050,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.989.500,00	5.989.500,00	5.989.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			25.989.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1	**ON URUSAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

		KESEHATAN																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.800.000,00	42.883.060,00	21.848.000,00	-15.952.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi mile	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			59.940.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															nial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.100.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	-90.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	- -			50.010.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.900.000,00	19.997.053,00	6.543.463,50	-19.356.536,50	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			54.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.054.987,00	10.054.987,00	-445.013,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			60.054.990,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketarangan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.394.490,00	0,00	0,00	-33.394.490,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.200.000,00	50.010.000,00	28.410.000,00	-31.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			50.010.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
1,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**	**Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase**				**-**	**10076,25 83,33 % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat**																	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaran Aplikasi Sistem*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahr	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												aga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	38.425.000,00	38.425.000,00	37.425.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pema			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ntapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	29.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	101.705.000,00	101.705.000,00	100.705.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	47.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	42.500.000,00	112.024.000,00	133.624.000,00	91.124.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			53.550.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	29.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manu	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
2,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESE**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

		HATAN																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Keseha				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.678.800,00	12.678.800,00	11.678.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

			tan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										Kel/Desa			sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				BERENCANA
		PUSKESMAS SIANTAN UTARA							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**							**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**							**250.090.311.134,00**	

1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**							**118.854.055.815,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketaranan gender, serta peng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.222.325,00	1.222.325,00	1.182.572,00	-39.753,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.222.325,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.681.085,00	11.681.085,00	3.018.000,00	-8.663.085,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			11.681.085,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.984.389,00	7.680.011,00	6.341.831,00	-1.642.558,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			7.984.389,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.986.680,00	30.100.000,00	15.097.411,00	-11.889.269,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			26.986.680,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.510,00	-490,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.590.000,00	10.000.000,00	24.074.748,00	-15.515.252,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			39.590.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	46.980.961,00	32.275.940,00	28.542.239,00	-18.438.722,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			46.980.961,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.472.000,00	2.472.000,00	4.937.750,00	2.465.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			2.472.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*				-	100 %	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.962.700,00	3.962.700,00	0,00	-3.962.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			3.962.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000,00	-19.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persent**				**-**	**10076,25 83,33 % % %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

			ase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase*				-	100 % 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	74.800.000,00	74.800.000,00	73.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	2.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	13.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	72.231.000,00	72.231.000,00	71.231.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	14.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	9.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00	62.340.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	70.728.000,00	97.328.000,00	113.528.000,00	42.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			70.728.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	17.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketaran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	5.735.000,00	5.735.000,00	4.735.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)													saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
		PUSKESMAS KUTE SIANTAN							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.158.450,00	0,00	0,00	-5.158.450,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.153.890,00	0,00	0,00	-33.153.890,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													Kel/Desa		hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa			l dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.136.500,00	0,00	0,00	-10.136.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat,			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															taraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	12.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														Semua Kel/Desa		n, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.234.500,00	0,00	0,00	-9.234.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.350.000,00	0,00	0,00	-27.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.271.300,00	0,00	0,00	-18.271.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapa			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														n, Semua Kel/Desa		idikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	35.000.000,00	26.000.000,00	19.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.167.101.400,00	818.495.633,92	683.872.433,92	-1.483.228.966,08			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		1.678.668.535,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	**Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat**				**-**	**10076,25 83,33 % Persen %**	**68.461.597.421,00**	**58.372.441.378,95**	**61.531.426.468,17**	**62.211.893.698,00**							**130.673.491.119,00**	

		MASYARAKAT	**yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat**																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangk*				-	100 % 100 Persen 55 % 98 % 98,4 %	14.607.011.490,00	16.792.133.449,35	18.507.803.749,22	3.900.792.259,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kabupate Kepulauan Anambas		17.701.901.582,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			at daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota												uatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	82.720.000,00	82.720.000,00	81.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semu	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													a Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anam	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													bas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa			saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	1.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gend	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumb			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													Kel/Desa		n, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	er daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	98.045.000,00	98.045.000,00	97.045.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	9.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	1 Orang	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	31.670.000,00	31.670.000,00	30.670.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	300.775.019,00	358.248.800,00	358.248.800,00	57.473.781,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetara	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggu			300.775.019,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	l dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semu	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualit			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

													a Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	as sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Sianta n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gene	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															rasi Z), dan penyanda ng disa bilita s.					
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	53.840.000,00	53.840.000,00	52.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah*				-	98,4 %	10.000.000,00	18.268.108,00	18.268.108,00	8.268.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berda	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		101.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ya saing				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
3,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**84.203.200,00**	**84.203.200,00**	**-20.000.000,00**							**10.000.000,00**	

	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	84.203.200,00	84.203.200,00	64.203.200,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	3.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anam	DAK NON FISIK - BOK KB-BOK	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			akat (UKBM)										bas, Kute Sianta n, Semu a Kel/D esa			saing Pema ntapa n kualit as sumb er daya manu sia yang sehat, ungg ul dan berda ya saing					
		LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT							**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**188.599.173.368,00**	**179.384.672.739,90**	**175.994.606.101,36**	**-12.604.567.266,64**								**250.090.311.134,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUS**	**Persentase OPD Dinkes PPKB dan**				**-**	**100 %**	**119.782.015.947,00**	**120.378.127.160,95**	**113.829.075.433,19**	**-927.960.132,00**								**118.854.055.815,00**	

		AN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	5.562.947.032,00	3.352.403.788,47	2.484.762.050,57	-3.078.184.981,43			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas		4.899.301.163,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kese	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				

				A OPD	HUN 2023	TAHUN 2024														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi mile	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															nial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, tekn	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															ologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				

	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	28.972.216.187,00	10.247.474.797,33	7.153.181.151,04	-21.819.035.035,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Laboratorium Kesehatan Masyarakat		28.771.673.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prest	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															asi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

																	penyandang disabilitas.						
	J U M L A H								**189.850.712.536,00**	**182.268.814.739,90**	**178.338.548.101,36**	**-11.512.164.434,64**								**250.697.880.134,00**	

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru,yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai ahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 18 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Anambas,

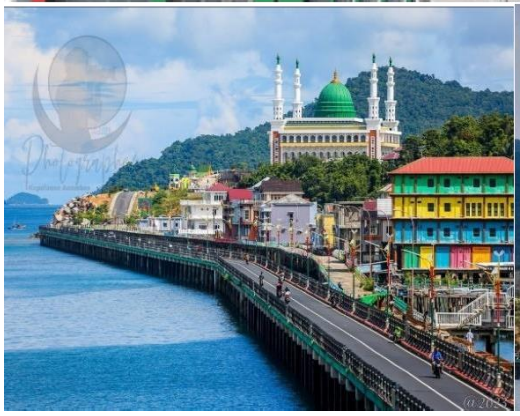
JESSY ARJESSANDY, S.Farm, Apt., Apt.,M.H

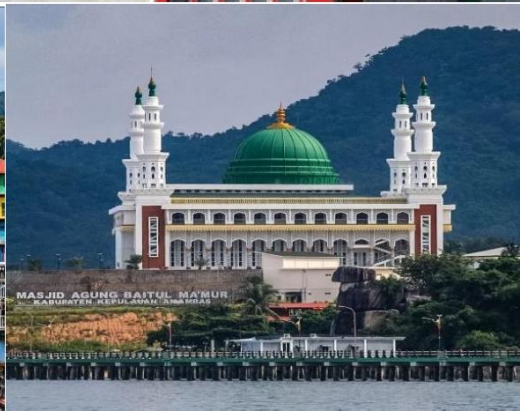
Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810418 2006042019

DOKUMEN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025







DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penganggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, perkiraan realisasi 2025 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026. Selain itu, penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2025 juga mengacu pada arah kebijakan Daerah dan juga Aspirasi Masyarakat.

Secara berjenjang Rancangan Akhir Perubahan Renja PD ini juga kemudian harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Program dan Kegiatan masing masing Bidang dan Bagian. Dengan adanya sinkronisasi antar unit di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA-OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

SYARIF AHMAD, S.E, M.Si

NIP. 19770720 201001 1 016

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD 8

2.2 Analisis Kerja Pelayanan OPD 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD. 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 27

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 37

3.3 Program Dan Kegiatan 40

BAB IV PENUTUP 46

4.1Kesimpulan 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstuktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing OPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruh oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral OPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Akhir Perubahan Renja PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan APBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD ini adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, menyatakan hasil sebagai berikut:

Terdapat realisasi 17 Program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:

Tabel. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kabupaten : Kepulauan Anambas

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Belanja Langsung	**94.135.495.213**	**66.698.314.721**	**71,95**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**17.198.340.570**	**13.551.786.704**	**14,40**
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**45.000.000,00**	**-**	**0,00**
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**45.000.000,00**	**-**	**0,00**
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.064.006.377,00**	**8.035.542.367**	**8,54**
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	**8.952.998.377,00**	**7.578.914.367**	**8,05**
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**1.111.008.000,00**	**456.628.000**	**0,49**
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**3.373.357.037,00**	**2.615.505.940**	**2,78**
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**904.625.390,60**	**624.150.160**	**0,66**
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SPAM	**963.915.020,00**	**768.454.667**	**0,82**
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1.504.816.626,40**	**1.222.901.113**	**1,30**
	4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**3.165.709.952,00**	**2.616.438.194**	**2,78**
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**3.165.709.952,00**	**2.616.438.194**	**2,78**
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**550.267.204,00**	**284.300.203**	**0,30**
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**429.999.480,00**	**193.116.670**	**0,21**
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**120.267.724,00**	**91.183.533**	**0,10**
II	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**1.129.356.745**	**650.950.538**	**0,69**

	6	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.129.356.745,00**	**650.950.538**	**0,69**
		- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	**217.484.000,00**	**10.618.900**	**0,01**
		- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	**911.872.745,00**	**640.331.638**	**0,68**
III	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**		**327.550.000**	**223.379.200**	**0,24**
	7	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**327.550.000,00**	**223.379.200**	**0,24**
		- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	**327.550.000,00**	**223.379.200**	**0,24**
IV	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**		**11.212.537.520**	**3.379.041.977**	**3,59**
	8	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**11.212.537.520,20**	**3.379.041.977**	**3,59**
		- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	**11.212.537.520,20**	**3.379.041.977**	**3,59**
V	**Program Penataan Bangunan Gedung**		**8.322.199.766**	**4.760.171.899**	**5,06**
	9	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**8.322.199.766,07**	**4.760.171.899**	**5,06**
		- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	**175.689.050,00**	**80.809.831**	**0,09**
		- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**8.146.510.716,07**	**4.679.362.068**	**4,97**
VI	**Program Penyelenggaraan Jalan**		**53.352.107.304**	**43.650.821.895**	**46,37**
	10	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**53.352.107.304,00**	**43.650.821.895**	**46,37**
		- Pembangunan Jalan	**18.164.108.987,00**	**12.638.005.184**	**13,43**
		- Rekonstruksi Jalan	**30.082.455.085,00**	**25.915.742.779**	**27,53**
		- Rehabilitasi Jalan	**5.105.543.232,00**	**5.097.073.932**	**5,41**

VII	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**		**119.995.900**	**68.820.000**	**0,07**
	11	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**119.995.900,00**	**68.820.000**	**0,07**
		- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	**119.995.900,00**	**68.820.000**	**0,07**
VIII	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**317.012.415**	**61.389.800**	**0,07**
	12	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**200.033.300,00**	**-**	**0,00**
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	**99.987.300,00**	**-**	**0,00**
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	**100.046.000,00**	**-**	**0,00**
	13	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**116.979.115,00**	**61.389.800**	**0,07**
		- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	**116.979.115,00**	**61.389.800**	**0,07**
IX	**Program Pengembangan Perumahan**		**25.600.000**	**20.585.000**	**0,02**
	14	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**25.600.000,00**	**20.585.000**	**0,02**
		- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	**25.600.000,00**	**20.585.000**	**0,02**
X	**Program Kawasan Permukiman**		**1.261.312.038**	**1.031.634.000**	**1,10**
	15	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1.261.312.038,00**	**1.031.634.000**	**1,10**
		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	**1.261.312.038,00**	**1.031.634.000**	**1,10**
XI	**Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum (PSU)**		**735.608.955**	**245.523.108**	**0,26**
	16	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**735.608.954,73**	**245.523.108**	**0,26**
		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	**735.608.954,73**	**245.523.108**	**0,26**
XII	**Program Penatagunaan Tanah**		**133.874.000**	**85.844.600**	**0,09**
	17	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**133.874.000,00**	**85.844.600**	**0,09**
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	**133.874.000,00**	**85.844.600**	**0,09**
	JUMLAH		**94.135.495.213**	**66.698.314.721**	**71,95**

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada tabel berikut:

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 meliputi:

1. Perbaikan konektivitas wilayah
2. Penyediaan Air minum atau Air Bersih
3. Pembangunan Gedung Prasarana Pemerintah Daerah
4. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2024, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan sasaran-sasaran dan target-target kinerja program di RPJM, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Daftar Prioritas Pembangunan Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
1	Peningkatan aksesibilitas wilayah	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	Perhubungan
			Jumlah bandara perintis	1	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	
			Jumlah bandara perintis	1	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turru)	NA	
			Jumlah bandara perintis	1	
		Kerjasama Pembangunan	Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	Perencanaan Pembangunan
		Pengembangan Wilayah Perbatasan	Infrastruktur perbatasan negara dan kabupaten	NA	
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	Pemerintahan Umum
		Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terdepan	Jumlah pulau terdepan berpenghuni yang meningkat aksesibilitasnya	NA	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Coverage area telekomunikasi seluler (%)	100%	Komunikasi dan Informatika
			Akses masyarakat perdesaan terhadap komunikasi, informasi, dan media massa	NA	
			Warnet di setiap kecamatan	Ada	
2	Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	Kesehatan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan	14	
			Jumlah Pustu menjadi Puskesmas	22	
3	Pemerataan akses terhadap layanan pendidikan	Pengadaan dan Pembangunan Sekolah Luar Biasa	Jumlah Sekolah Luar Biasa	1	Pendidikan
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,50	
		Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah (2008)	90,69	
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan	Ada	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
			tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas		
4	Peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Penduduk berakses air minum (jiwa)	25.649	Pekerjaan Umum
		Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	NA	Pemerintahan Umum
		Pengembangan Media Partisipasi Masyarakat	Media komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan	2	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori "baik" dengan nilai indeks > 3,00	>3,00	Seluruh Urusan
			Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	NA	
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70	≥0,70	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan sumber daya aparatur	NA	
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	80	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pengembangan pariwisata bahari	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	NA	Pariwisata
			Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	NA	
		Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi Pariwisata	NA	
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah destinasi wisata bahari	NA	Lingkungan Hidup
6	Peningkatan investasi dan pemasaran produk bidang pertanian tanaman, kelautan, dan perikanan	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi PMA dan PMDN	NA	Penanaman Modal
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	NA	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Volume perdagangan produk pertanian/perkebunan	NA	Pertanian
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Volume perdagangan produk peternakan	NA	
		Pengembangan Budidaya Perikanan	Nilai produksi perikanan budidaya (kg) 2009	420 ribu	Kelautan dan Perikanan
			Jumlah pembudidaya ikan (orang)	1700	
			Produktivitas perikanan budidaya		

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap (kg) 2009	7,3 juta	
			Armada tangkap	NA	
			Produktivitas perikanan tangkap (*cost per unit ratio*)	NA	
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai perdagangan produksi perikanan	NA	
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya	NA	
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah industri pengolahan perikanan	NA	

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Anambas berkorelasi terhadap prioritas pembangunan no. 4 Peningkatan Pelayanan Publik oleh Aparatur Pemerintah dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur. Selain itu, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan perbedaan terhadap rancangan RKPD. Temuan-temuan tersebut antara lain meliputi:

1. **Bidang Cipta Karya meliputi :**
   1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/KotaPendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

   1.2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

   1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

   1.4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

   1.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

2. **Bidang Bina Marga meliputi :**

   2.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

   2.2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

3. Bidang Sumber Daya Air meliputi :

3.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Bidang Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang meliputi :

4.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

4.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

4.4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

4.5. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

4.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4.8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4.9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

5.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.4. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.5. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.6. Penerbitan Izin Membuka Tanah

5.7. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Bidang Perumahan dan permukiman

5.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

5.2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

5.3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

5.4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

5.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

5.6. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

5.7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

5.8. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

5.9. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

6. Bidang sekretariat meliputi :

6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. UPTD SPAM SIANTAN

7.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 2.4

METRIKS KEGIATAN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
											Target 2025	
											Sesudah	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						38.168.815.909,40
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.168.815.909,40
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						37.154.518.270,40
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan				100 Persen	12.196.324.087,47
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0,00
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				14.112.443.317,02
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	9.748.637.840,75
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	606.852.000,00
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0,00
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				50.000.000,00
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				0,00
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	0,00
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				2.324.351.473,00
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	642.951.299,99
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	550.929.856,73
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				279.323.264,00
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65.000.000,00
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	244.558.603,00

	1	0 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				235.900.324,00
	1	0 3	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	110.438.000,00
	1	0 3	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	226.956.487,00
2	1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.396.730.565,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	005 1	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku						
							Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	006 8	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya						
							Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Penampung Air Alami	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	008 0	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	008 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	009 3	Normalisasi/Restorasi Sungai						
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1.2 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	010 1	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	010 2	Pembangunan Breakwater						

							Panjang Breakwater yang Dibangun				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	010 3	Peningkatan Tanggul Sungai						
							Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	010 9	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	011 0	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	011 4	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				0 Unit	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	011 5	Pembangunan Tanggul Sungai						
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.2 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	011 7	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 0	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 4	Pembangunan Polder/Kolam Retensi						
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				0 Unit	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 6	Rehabilitasi Tanggul Sungai						
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 KM	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 7	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 2	2.0 1	012 8	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						

							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0,00
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0,00
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0,00
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	0,00
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0,00
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	564.851.234,00
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.492.060.000,00
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	0,00
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	263.297.234,00
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						

							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				3 Liter/Detik	0,00
	1	0 3	0 3	2.0 1	002 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0,00
	1	0 3	0 3	2.0 1	003 1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				0 Unit	0,00
4	1	0 3	0 4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan				100 Persen	150.000,00
	1	0 3	0 4	2.0 1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-				237.778.000,00
	1	0 3	0 4	2.0 1	001 0	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	150.000,00
	1	0 3	0 4	2.0 1	001 3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				0 Ton/hari	0,00
	1	0 3	0 4	2.0 1	001 5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 4	2.0 1	001 7	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	0,00
5	1	0 3	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	87.712.200,00
	1	0 3	0 5	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	342.228.000,00
	1	0 3	0 5	2.0 1	002 2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						

							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				0.1 M^3/Hari	87.712.200,00
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat						
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M^3/Hari	0,00
	1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat						
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				0 M^3/Hari	0,00
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				0 M^3/Hari	0,00
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0 Dokumen	0,00
6	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	381.089.728,00
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.449.631.955,00
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				200 M	0,00
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Meter	0,00
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						

							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 6	2.0 1	002 4	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	381.089.728,00
	1	0 3	0 6	2.0 1	002 8	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00
	1	0 3	0 6	2.0 1	002 9	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00
	1	0 3	0 6	2.0 1	003 0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	0,00
7	1	0 3	0 7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun				800 80 unit Persen	0,00
	1	0 3	0 7	2.0 1		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00
	1	0 3	0 7	2.0 1	000 9	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				0 Ton/hari	0,00
	1	0 3	0 7	2.0 1	001 5	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Ton/hari	0,00
	1	0 3	0 7	2.0 1	001 9	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						
							Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Ton/hari	0,00
	1	0 3	0 7	2.0 1	002 1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota						

							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Liter/Detik	0,00
8	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	3.947.187.573,93
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	15.260.769.613,00
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				0 Bangunan Gedung	209.536.230,93
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0 Dokumen	0,00
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	3.663.531.343,00
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				0 Orang	0,00
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan				5 Dokumen	74.120.000,00

							Bangunan Gedung melalui SIMBG					
9	1	0 3	0 9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	0,00
	1	0 3	0 9	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	649.141.298,00
	1	0 3	0 9	2.0 1	000 7	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan						
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 9	2.0 1	000 8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	0,00
	1	0 3	0 9	2.0 1	000 9	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	0 9	2.0 1	001 0	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00
10	1	0 3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan				90 persen	19.977.203.447, 00
	1	0 3	1 0	2.0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana trasportasi darat	-			35 KM	44.344.217.400, 03

	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	0,00
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan						
							Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	15.325.229.174,00
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan						
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	3.510.577.713,00
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan						
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				8 KM	0,00
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan						
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	0,00
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				10 KM	0,00
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan						
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.8 KM	776.150.000,00
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan						
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4 KM	365.246.560,00
11	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	0,00
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	0,00
	1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						
							Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	0,00
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	0,00
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						

							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 1	001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				15 Orang	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 2	001 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 3		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-	-			-	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 3	000 7	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 4		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	160.000.000,00
	1	0 3	1 1	2.0 4	000 4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	0,00
	1	0 3	1 1	2.0 4	000 8	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						
							Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				0 Dokumen	0,00
12	1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	0,00

	1	0 3	1 2	2.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 1	000 6	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 1	001 0	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 1	001 3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 2	000 4	Penyusunan Peta Dasar						
							Jumlah data SHP Peta Dasar				0 Peta	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 2	000 5	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	142.671.413,50
	1	0 3	1 2	2.0 3	000 3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 3	000 4	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				0 Layanan	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 3	1 2	2.0 4	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00

	1	0 3	1 2	2.0 4	001 3	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang						
							Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang				0 Berita Acara	0,00
	1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.014.297.639,0 0
13	1	0 4	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	2.000.000,00
	1	0 4	0 2	2.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 1	000 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				0 Dokumen	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 1	000 9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 2		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 2	000 6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan						
							Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 2	001 0	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				0 Orang	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00
	1	0 4	0 2	2.0 3	000 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	1.400.000,00
	1	0 4	0 2	2.0 3	000 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						

							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit Rumah	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 3	000 9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Unit Rumah	0,00
	1	0 4	0 2	2.0 3	001 1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Unit Rumah	600.000,00
14	1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	200.150.000,00
	1	0 4	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	0,00
	1	0 4	0 3	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				0 Laporan	0,00
	1	0 4	0 3	2.0 2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	150.000.000,00
	1	0 4	0 3	2.0 2	001 2	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				0 Kelompok Masyaraka t	0,00
	1	0 4	0 3	2.0 2	001 4	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	150.000,00
	1	0 4	0 3	2.0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	0,00
	1	0 4	0 3	2.0 3	000 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				120 Unit Rumah	200.000.000,00
	1	0 4	0 3	2.0 3	000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	0,00
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Unit	0,00
15	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	0,00
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0,00
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				0 Unit	0,00
16	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil				280 80 KK Persen	812.147.639,00
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman	-			280 KK	37.495.817.840,00
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	0,00
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						

							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	812.147.639,00
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	0,00
	1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				0 Lokasi	0,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						0,00
17	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	0,00
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Berita Acara	0,00
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00
18	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	0,00
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.051.990,00
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				0 Dokumen	0,00

	2	1 0	0 5	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00
	2	1 0	0 5	2.0 1	000 4	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				0 Laporan	0,00
	2	1 0	0 5	2.0 1	000 5	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	0,00
19	2	1 0	0 6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-				-	0,00
	2	1 0	0 6	2.0 1		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	2	1 0	0 6	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00
	2	1 0	0 6	2.0 2		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00
	2	1 0	0 6	2.0 2	000 2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						

							Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00
20	2	1 0	0 8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-				-	0,00
	2	1 0	0 8	2.0 1		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-			-	0,00
	2	1 0	0 8	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	0,00
	2	1 0	0 8	2.0 2		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	0,00
	2	1 0	0 8	2.0 2	000 1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				0 Laporan	0,00
	2	1 0	0 8	2.0 2	000 3	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong						
							Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				0 Berita Acara	0,00
21	2	1 0	0 9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-				-	0,00
	2	1 0	0 9	2.0 1		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			-	0,00
	2	1 0	0 9	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				0 Dokumen	0,00
22	2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	0,00
	2	1 0	1 0	2.0 1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	111.818.000,00
	2	1 0	1 0	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00
	2	1 0	1 0	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00
						UPTD SPAM SIANTAN						38.168.815.909,40
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.168.815.909,40
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						37.154.518.270,40
23	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	12.196.324.087,47
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				2.324.351.473,00
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	0,00
24	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan				56,7 persen	564.851.234,00
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan cakupan distribusi air bersih;	-			341 SR	1.492.060.000,00
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	301.554.000,00
	J U M L A H											**38.168.815.909,40**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terakait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti yang ditunjukan pada tabel berikut ini:

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)			
A	Nasional		
	1. Program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja;		
	2. Program-program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah,dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta terisolir		
	3. Program-program pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat		
	4. Penerapan prinsip-prinsip green construction dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PU dan permukiman		
	5. mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan		

	infrastruktur PU dan permukiman yang berbasiskan penataan ruang		
	6. pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim		
	7. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif		
	8. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas		
	9. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk		

	mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*		
2.	Provinsi		
	1. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah dan pengembangan pemukiman		
	2. Menata Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Daerah Pasir Peti dan Tersedianya Prasarana Pendukung Pusat Pemerintahan Desa-Desa		
	3. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.		
	4. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.		
	5. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan		

	dengan kebijakan tata ruang wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi		
	6. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan prasarana jalan dan jembatan		
	7. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan berbasis pulau (Siantan, Palmatak, Jemaja, Siantan Tengah dan Siantan Timur)		
	8. Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM), yaitu melalui peningkatan manajemen serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).		
	9. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum		
	10. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum		

	11. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah		
	12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.		
	13. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah		
	14. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase		
	15. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase		
	16. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase		
	17. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase		
	18. Meningkatkan pembinaan dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung		
	19. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional		
	20. Meningkatkan dukungan terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif		

	21. Meningkatkan pembinaan usaha konstruksi yang kompetitif dan professional		
	22. Meningkatkan pembinaan konstruksi secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat		
	23. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*		
	24. Melaksanakan pengawasan sebagai *Quality Assurer* dan konsultan		
	25. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisiensi dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Permukiman		
	26. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan		
	27. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman		

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Renja OPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran
1	**Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air**	1	Meningkatkan cakupan layanan pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan SDA
		2	Tersedianya sarana/prasarana air baku untuk air minum yang layak untuk masyrakat
		3	Terlindunginya kawasan sumber air baku
		4	Terlindung dari bahaya banjir melalui pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir
		5	Terlindungnya Panjang garis pantai dan pemukiman di daerah pesisir dari bahaya abrasi dan gelombang melalui pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai
2	**Terbangun daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan yang baik**	1	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
		2	Meningkatkan panjang struktur/pelebaran jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
		3	Meningkatkan panjang jalan dan jembatan baru yang dibangun di Kabupaten Kepulauan Anambas
3	**Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman**	1	Tertatanya kawasan kumuh di Ibukota Kecamatan
		2	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum
		3	Terbinanya PDAM

		4	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		5	Meningkatkan pelayanan sanitasi
		6	Meningkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan
		7	Meningkatkan Kawasan-Kawasan Pusat Pertumbuhan
4	**Meningkatkan penataan kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas**	1	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas
5	**Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum**	1	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	**Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan Suber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum**	1	Menurunkan temuan administratif dalam pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2	Menurunkan tingkat kebocoran dalam pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	**Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kontruksi**	1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi
		2	Meningkatkan kompetensi SDM konstruksi sesuai standar kompetensi kerja nasional

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih menitikberatkan pada hal :Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu**,** yaitu:

1.1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

1.2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

1.3. Penyediaan dan pengelolaan air baku.

1.4. Pembangunan infrastruktur pedesaan.

1.5. Pengembangan kinerja pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan air lainnya

1.6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor:

- Insfrastruktur Pekerjaan Umum
- Infrastruktur Pemukiman
- Kapasitas Sumberdaya Manusia
- Pencapaian MDGS
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir

Dimana Faktor tersebut dapat dicapai melalui :

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan;
3. Meningkatkan mutu Sumber daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia;
4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting sebagaimana tercantum pada Sub Bab 2.3 Jumlah keseluruhan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 berjumlah 21 program dengan jumlah seluruh kegiatan mencapai 24 kegiatan. Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di Kecamatan Siantan, hal tersebut dikarena Kecamatan sebagai pusat kota sekaligus sebagai ibukota Kabupaten sekaligus pusat pemerintahan yang memerlukan perhatian khusus untuk menggiatkan pembangunan dan penataan/pembenahan kota itu sendiri guna untuk meningkatkan citra Anambas sebagai kota yang memiliki tata ruang yang bersih.

Terdapat 21 program yang tersebar hampir diseluruh lokasi Kecamatan/ Desa yang terdiri dari :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3	**PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	- Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yag terhubung lingkungan dengan sungau dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	- Penyelenggaraan Penataan Bnagunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaran dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
13	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
14	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
15	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
16	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH**	- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
17	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	- Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

20	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- Administrasi Umum Perangkat Daerah
21	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Jumlah Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan Total Perkiraan Anggaran yang dibutuhkan dari APBD-P 2025 sebesar Rp. **38.168.815.909,40** (*Tiga Puluh Delapan Milya rSeratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Empat Puluh Rupiah).*

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan aktivitas operasional organisasi. Karena, semua pihak mulai dari unsur pimpinan dan staf bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan pencapaian berbagai target yang telah disepakati.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab untuk menjaga konsisten antara program yang tercantum didalam Renja ini dengan program yang tercantum dalam arah dan kebijakan umum maupun strategi dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya dapat tercapai.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berkedudukan dan berfungsi sebagai rujukan penilaian kinerja Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur yaitu : masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Oleh karenanya Rancangan Akhir Perubahan Renja PD ini merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan stafnya.

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

SYARIF AHMAD, S.E, M.Si
NIP. 19770720 201001 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Pos-el dpmptsp@anambaskab.go.id

Tarempa, 16 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 007.2/102 /DPMPTP/07.2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami kirimkan Rancangan Perubahan Akhir Renja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.	1 (satu) Berkas	Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretaris,

Zaili, S.Pi, M.M
Penata Tk. I
NIP. 197602102011011001

Tanggal Terima :
Yang Menerima

_____
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* dipersembahkan kehadirat Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025**.** Sesuai rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang mempunyai tujuan, sasaran kebijakan dan program. kemudian dari pada itu rancangan rencana kerja Tahun 2025 ini dapat gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2025 agar pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan terukur.

Penyusunan dokumen rancangan Akhir Perubahan Renja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun mendatang dan tidak melenceng dari rencana yang sudah ditetapkan. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 16 juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL RASYID, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BABIPENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 5
D. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra 8
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
C. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah 17
D. Permasalahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20
BAB V PENUTUP 24

TANJAK
BERTUAH

DAFTAR TABEL

Tabel II.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2025 9
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 16
Tabel III.1
Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 21

TANJAK
BERTUAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang pada hakikatnya dapat mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada Renstra perlu pengawalan yang terstuktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi

Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja Organisasi Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya musyawarah perencanaan pembangunan atau yang dikenal dengan istilah musrenbang, yang pelaksanaannya dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan penyesuaian urusan tersebut, perubahan nomenkolatur Organisasi Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja untuk Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Organisasi Perangkat Daerahini memiliki peran strategis dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Selain itu, Renja pada Organisai Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025, serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan rencana Kerja ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten kepulauan Anambas (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, tambahan Lmbaran Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Noor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepualuan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Anambas;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Maksud danTujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah:

a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kepulauan Anambas yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;

d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sistematika dalam penyusunan RENJA Akhir DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancanagn Perubahan Renja Perangkat daerah terdiri dari latar belakang Penyusunan, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Perubahan Rencana Kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun berjalan dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, revieu terhadap rancangan awal RKPD Organisasi Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan atau pergeseran .

BAB V PENUTUP

Bab penutup Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

TANJAK
BERTUAH

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023. Tabel II.1 memperlihatkan alokasi APBD yang dikelola Perangkat Daerah baik sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, berdasarkan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebanyak 5(lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan Presentase Realisasi sebesar 14,54 % dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 24,76% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.1
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN			SISA ANGGARAN DPPA
			KEUANGAN		FISIK	
			Rp	%	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**11.878.000**	3,491,800			**8,386.200**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.878.000	3,491,800	29,40	34,45	8,386.200
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**4.122.684.757,98**	**1.590.339.847**	**38,58**		**2.532.344.911**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1	4.015.844.757,98	1.571.399.847	39,13	49,76	2.444.444.911
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Perifikasi Keuangan SKPD	106.840.000	18.940.000	17,73	50,00	87.900.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0
3	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***	**17.116.000**	**3.176.000**			**-**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	17.116.000	3.176.000	18,56	50,00	13.940.000
4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**132.841.831**	**45.619.330**			**87.222.501**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.197.263	0	0,00	50,00	1.197.263
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.400.000	1.500.000	44,12	58,33	1.900.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.352.644	1.906.000	56,85	50,00	1.466.644
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.950.000	2.510.000	19,38	50,00	10.440.000
	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	10.203.924,10	0	0,00	25,00	10.203.924
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.738.330	39.703.330	39,03	39,03	62.034.670
5	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**27.803.100**	**0**			**27.803.100**
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	27.803.100	0	0,00	50,00	27.803.100

6	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**50.523.477**	**32.738.480**	**64,80**		**17.784.997**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.481.605	0	0,00	50,00	16.481.605
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	1.723.392	420.000	24,37	50,00	1.303.392
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.318.480	32.318.480	100	100	0
7	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**11.539.459**	**2.766.000**	**23,97**		**8.773.459**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.029.459	2.766.000	39,35	50,00	4.263.459
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.510.000	0	0,00	50,00	4,510.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00**		**0**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0,00		0
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
9	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00**		**0**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
10	***Pelayan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota***	**224.607.000**	**24.916.461**	**11,09**		**199.690.539**
	Penyediaan Pelayan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasisi Sistem Pelayan Perizinan Usaha Berintegrasi Secara Elektronik	203.680.000	18.476.361	9,07	49,59	185.203.639
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20.927.000	6.440.100	30,77	30,77	14,486,900
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
11	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota***	**0**	**0**			**0**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0	0	0,00		0
		4.598.993.625,08	**1.699.556.118**	**36,95**	**49,67**	**2.899.437.507**

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada awal Tahun Anggaran sebesar Rp.5.760.080.421; Angka ini mengalami perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp.5.496.746.421 dan mengalami pergeseran lagi sebesar Rp.4.598.993.625,08 Dari jumlah tersebut yang terealisasi sebanyak Rp 1.6999.556.118 atau 36.95 % serta fisik 49,67% Sehingga dapat diketahui besar selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2025 mencapai Rp 2.899.437.507 atau 63,05 %. Selanjutnya dengan capaian kinerja tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskalan Nasional (PMDN/PMA);
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;
4. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Sejalan dengan kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran makro ekonomi dan makro sosial yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam kontek Perencanaan Pembangunan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisilain, dalam era globalisasi DPMPTSP dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mempu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir satu Program dan Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu program pelayanan penanaman modal. Melalui program program pelayanan penanaman modal penerapan pengarusutamaan gender dapat diimplikasikan dengan pelayanan yang menerapkan kesetaraan tanpa pembedaan jenis kelamin serta memenuhi sarana dan prasarana pelayanan yang ramah terhadap pemohon layanan perempuan terutama ibu hamil dengan menyediakan ruang laktasi.

B. Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan taget indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas diamanatkan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Yaitu penanaman modal,

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka semakin jelas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas bertugas mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debiroktratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada SPM serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan.

Peluang investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan memiliki kepastian hukum, dengan adanya PERBUP No. 48 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 89 jenis perizinan dan 6 NonPerizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub bab ini menjelaskan sejauh mana realisasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2021. Dari segi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi. Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan iklim investasi di daerah. Kedua hal ini saling mempengaruhi satu sama lain, dengan pelayanan yang

perima dan mudah serta murah diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat investor. Ukuran pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat sebagai berikut:

TANJAK
BERTUAH

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator Kinerja	Target						Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	4.2	6.17	6,83	0,38
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	7.50	7.50	9.00	10.00	7.33	8.00	13	21.5	23,5	2,7
3	Nilai RB Perangkat Daerah	B (61.00)	B (62.00)	B (63.30)	B (70.00)	B (71.00)	B (72.00)	B (61.32)	B (64.08)	-	-
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC (65)	B (68)	B (70)	B (71)	B (72)	B (72,05)	B (67,59)	B (69,05)	B (71,85)	B (70,35)
5	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B (81.00)	B (82.00)	B (83.00)	B (84.00)	B (85.00)	B (86.00)	B (81.27)	B (84.77)	B (84,88)	B (88,29)

TANJAK BERTUAH

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah serta kondisi kekinian, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dalam rangka penentuan isu-isu strategis. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang;
b. Lemahnya daya kontrol pemerintah pada sektor Penanaman Modal, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme memperlambat perizinan;
c. Kapasitas dan kualitas sarana prasarana belum memadai;
d. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan;
e. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat;
f. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau diperburuk lagi dengan iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif yaitu pada bulan-bulan tertentu;
g. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
h. Keterbatasan alokasi anggaran;
i. Masih lemahnya koordinasi antar sektor;
j. Belum adanya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada penertiban Tata Ruang;
k. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron;
l. Pelaksanaan proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui Online Single Submmision (OSS) yang terkadang terdapat kendala teknis;
m. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan usser id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya;
n. Investor yang memperoleh izin melalui Online Single Submmition (OSS) tidak mendapat penekanan melakukan LKPM Online;
o. Belum terdapat kajian peluang investasi pada Kabupaten Kepulauan Anambas;
p. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SiCantik Cloud.

Selain adanya beberapa permasalahan, juga terdapat banyak peluang yang mempunyai potensi jika digarap secara optimal dalam upaya pengembangan pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peluang dimaksud meliputi:

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;
2. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Penanaman Modal di Kepulauan Anambas;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
4. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
6. Tekat pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
7. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
8. Potensi sumber daya alam yang dapat dikelola secara optimal;
9. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan dan peluang yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Adapun isu-isu strategis dimaksud meliputi:

1. Belum tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan pelayanan perizinan;
2. Kapasitas pemahaman penduduk tentang pelayanan investasi dan penanaman modal masih rendah;
3. Partisipasi dan kontribusi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal terkait peningkatan iklim investasi;
4. Belum meratanya sebaran investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;

5. Belum optimalnya kegiatan promosi setiap sektor;
6. Belum memadainya informasi potensi investasi.

D. .Permasalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan serta forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh masyarakat serta perangkat Desa/Kecamatan. Dari semua usulan yang terkumpul, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di usulkan oleh masyarakat.

TANJAK
BERTUAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berdasar kepada potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang dicapai. Adapun Rincian Program/Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

TANJAK
BERTUAH

Tabel III.1
Program/ Kegiatan DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Renja Perubahan Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	100%	4,374,386,625,08	APBD		100%	7,312,343,348
	0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	DPMPTSP	100%	11,878,000	APBD		100%	32,109,000
	0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	100%	4,122,684,757,98	APBD		100%	5,766,111,071
	0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	100%	17,116,000	APBD		100%	19,800,000
	0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	100%	132,841,831	APBD		100%	426,932,750
	0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	100%	27,803,100	APBD		100%	27,803,100
	0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100%	50,523,477	APBD		100%	919,319,927
	0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100%	11,539,959	APBD		100%	120,267,500

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Renja Perubahan Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio Peningkatan Investasi PMDN dan PMA	DPMPTSP	1.071	0	APBD		1.090	680,000,000
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas /Insentif di bidang Penanaman Modal yang ditetapkan atau diberikan	DPMPTSP	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	430,000,000
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Terlaksananya Pendataan Potensi Investasi	DPMPTSP	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	250,000,000
3	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Daerah	DPMPTSP	100%	0	APBD		100%	398,000,000
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Investor dan Dunia Usaha untuk Berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas	DPMPTSP	1 Kali	0	APBD		1 Kali	398,000,000
4	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Perizinan (PMDN dan PMA)	DPMPTSP	20 PMDN dan 2 PMA	0	APBD		24 PMDN dan 3 PMA	1,040,823,000
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	115 PNP (77%)	224,607,000	APBD		120 PNP (87%)	1,040,823,000
5	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	DPMPTSP	85%	32,610,000	APBD		90%	385,838,000
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	85%	32,610,000	APBD		90%	385,838,000

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Renja Perubahan Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	PrakiraanMaju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
6	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Sistem Informasi	DPMPTSP	85%	0	APBD		96%	175,000,000
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinanyang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	85%	0	APBD		96%	170,000,000
JUMLAH						4,598,993,625,08				10,482,285,998

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL RASYID,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan investasi dapat disejalankan dengan rumusan RPJMD periode 2021-2026 serta dalam RKPD 2025. Tentunya apa yang dirumuskan dalam rencana kerja 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas akan merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembangunan investasi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada telah ada baik dalam hal sumber dana ataupun dalam hal sumber daya manusia. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini, Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Perubahan Renja ini, maka :

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini yang kemudian menjadi Renja yang akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2025.

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009

TANJAK
BERTUAH

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja yang akan datang. Semoga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat berguna dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program kerja khususnya di sektor perikanan, pertanian dan pangan.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **6**

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **16**

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 16

BAB IV PENUTUP **23**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....11
Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2025 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan; sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian dan pangan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan program perikanan, pertanian dan pangan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan, pertanian dan pangan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan, pertanian dan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berpedoman pada hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk satu tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan hasil

musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 12 Program dan 21 Kegiatan dengan anggaran Rp.12.585.993.889,29 ((Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah). Adapun Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 senilai Rp.4.050.820.311,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 32,19% dan realisasi fisik mencapai 39,84%. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

   Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi memiliki 1 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran senilai Rp.3.179.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.695.000 atau 53,31% dan realisasi Fisik sebesar 58,46%.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdapat 1 Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia senilai Rp.1.500 dengan realisasi Rp.0 atau 0% dan realisasi Fisik sebesar 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

   Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan salah satu kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mendukung hal tersebut. CPPD memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian. Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan

kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.

3. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

   Terdapat 1 Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia senilai Rp.400.000 dengan realisasi Rp.0 atau 0% dan realisasi Fisik sebesar 1,37%.

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.11.316.428.765,71 dan realisasi mencapai Rp.3.647.296.500 atau 32,23%. Dari realisasi keuangan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 6 bulan. Selain itu, pada kegiatan ini juga terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp.151.480.000 dan realisasi mencapai Rp.34.540.000 atau 22,80%.

5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.54.968.000 dan realisasi mencapai Rp.6.728.000 atau 12,24%. Kegiatan ini merupakan honorarium untuk pengelola barang milik daerah.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 6 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 1.000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp.10.000.000 terealisasi senilai Rp.2.680.000 atau 26,80%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp.10.247.384 terealisasi senilai Rp.1.600.000 atau 15,61%, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.10.000.000 terealisasi senilai Rp.1.775.000 atau 17,75%, Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp.1000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.111.545.028,58 terealisasi senilai Rp.34.441.000 atau 30,88%.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp.1000 terealisasi Rp.0 atau 0%, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.200.000 terealisasi Rp.0 atau 0%, dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya dengan anggaran Rp.342.876.095 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp.41.612.000 terealisasi senilai Rp.27.006.620 atau 64,90%, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.50.516.445 terealisasi senilai Rp.8.875.000 atau 17,57%, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp.279.931.791 terealisasi senilai Rp.278.533.191 atau 99,50%.

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.1.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%

10. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan anggaran Rp.4.700.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan anggaran Rp.68.213.000 terealisasi senilai Rp.3.500.000 atau 5,13%.

    Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil merupakan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan. Hal ini guna meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bermuara pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan kecil,

11. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

    Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

12. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

    Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.20.400.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.20.400.000 terealisasi 0%, dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%.

13. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

    Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan dengan realisasi fisik sebesar 0%. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

14. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

    Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.2.150.000 terealisasi senilai Rp.2.150.000 atau 100% dan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

15. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

    Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran Rp.35.927.880. pada kegiatan ini belum tedapat realisasi keuangan.

16. Pengembangan Prasarana Pertanian

Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

17. Pembangunan Prasarana Pertanian

    Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

18. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

19. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran Rp.25.000.000. pada kegiatan ini belum tedapat realisasi keuangan.

20. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

    Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan anggaran Rp.1.500. Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran.

21. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

    Pelaksanaan Penyuluhan Pertanianterdiri atas 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp.3.000.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0% dan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dengan anggaran Rp.22.800.000 terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian merupakan sub kegiatan pengampu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).

Tabel 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	Realisasi Keuangan s/d Triwulan II		Realisasi Fisik s/d Triwulan II
			Rp	%	%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**3.179.500**	**1.695.000**	**53,31**	**58,46**
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**3.179.500**	**1.695.000**	**53,31**	**58,46**
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.179.500	1.695.000	53,31	58,46
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**1.500**	**-**	**0,00**	**3,53**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1.500**	**-**	**0,00**	**3,53**
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	**0,00**	3,53
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**400.000**	**-**	**0,00**	**1,37**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**400.000**	**-**	**0,00**	**1,37**
3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	400.000	-	**0,00**	1,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12.379.811.509**	**4.043.475.311**	**32,66**	**33,49**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11.467.908.766**	**3.681.836.500**	**32,11**	**48,11**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.316.428.765,71	3.647.296.500	**32,23**	49,55
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.480.000	34.540.000	**22,80**	46,67

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**54.968.000**	**6.728.000**	**12,24**	**33,33**
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.968.000	6.728.000	**12,24**	33,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**141.794.413**	**40.496.000**	**28,56**	**29,03**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000	-	**0,00**	0,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	2.680.000	**26,80**	30,76
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.247.384	1.600.000	**15,61**	20,83
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	1.775.000	**17,75**	20,83
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000	-	**0,00**	0,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.545.028,58	34.441.000	**30,88**	43,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**343.077.095**	**-**	**0,00**	**5,55**
13	Pengadaan Mebel	1.000	-	**0,00**	0,00
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000	-	**0,00**	8,33
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaLainnya	342.876.095	-	**0,00**	8,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**372.060.236**	**314.414.811**	**84,51**	**84,94**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.612.000	27.006.620	**64,90**	70,33
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.516.445	8.875.000	**17,57**	45,83
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.931.791	278.533.191	**99,50**	99,55

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.000**	**-**	**0,00**	**0,00**
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000	-	**0,00**	0,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000	-	**0,00**	0,00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000	-	**0,00**	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**72.913.000**	**3.500.000**	**4,80**	**25,00**
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**72.913.000**	**3.500.000**	**4,80**	**25,00**
22	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.700.000	-	**0,00**	25,00
23	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	68.213.000	3.500.000	**5,13**	25,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**40.803.000**	**-**	**0,00**	**0,00**
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
24	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.500	-	**0,00**	0,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**40.801.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
25	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000	-	**0,00**	0,00
26	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000	-	**0,00**	0,00
27	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	**0,00**	0,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**2.151.500**	**2.150.000**	**99,93**	**100,00**
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**

28	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1.500	-	**0,00**	0,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**2.150.000**	**2.150.000**	**100,00**	**100,00**
29	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.150.000	2.150.000	**100,00**	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**35.927.880**	**-**	**0,00**	**0,00**
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**35.927.880**	**-**	**0,00**	**0,00**
30	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	35.927.880	-	**0,00**	0,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**3.000**	**-**	**0,00**	**0,00**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
31	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1.500	-	**0,00**	0,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
32	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.500	-	**0,00**	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**25.001.500**	**-**	**0,00**	**29,16**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
33	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	-	**0,00**	0,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**25.000.000**	**-**	**0,00**	**29,16**

34	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	25.000.000	-	**0,00**	29,16
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**1.500**	**-**	**0,00**	**0,00**
35	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.500	-	**0,00**	0,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**25.800.000**	**-**	**0,00**	**33,33**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**25.800.000**	**-**	**0,00**	**33,33**
36	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.000.000	-	**0,00**	33,33
37	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	22.800.000	-	**0,00**	33,33
TOTAL		**12.585.993.889,29**	**4.050.820.311**	**32,19**	**39,84**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Adapun matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 yang berisikan rekapitulasi rumusan program dan kegiatan: perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan 12 Program dan 21 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.12.585.993.889,29 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).

Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Kute Siantan dan di Kecamatan Siantan Selatan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN							**21.448.632.327,00**	**22.922.919.100,00**	**12.585.993.889,29**	**-8.862.638.437,71**							**21.835.804.764,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.000.000,00**	**208.393.531,00**	**3.581.000,00**	**-221.419.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**225.000.000,00**	**208.393.531,00**	**3.581.000,00**	**-221.419.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan**				**84 %**	**84 %**	**74.911.100,00**	**80.265.700,00**	**3.179.500,00**	**25.088.900,00**							**100.000.000,00**	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	74.911.100,00	80.265.700,00	3.179.500,00	-71.731.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	74.911.100,00	80.265.700,00	3.179.500,00	-71.731.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan kerawanan pangan**				**56 %**	**56 %**	**122.574.400,00**	**113.567.931,00**	**1.500,00**	**27.425.600,00**							**150.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	122.574.400,00	113.567.931,00	1.500,00	-122.572.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	122.574.400,00	113.567.931,00	1.500,00	-122.572.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan**				**80 %**	**80 %**	**27.514.500,00**	**14.559.900,00**	**400.000,00**	**22.485.500,00**							**50.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar*				100 %	100 %	27.514.500,00	14.559.900,00	400.000,00	-27.114.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.514.500,00	14.559.900,00	400.000,00	-27.114.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.223.632.327,00**	**22.714.525.569,00**	**12.582.412.889,29**	**-8.641.219.437,71**							**21.535.804.764,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**20.077.637.043,00**	**21.457.166.655,00**	**12.495.679.009,29**	**-7.581.958.033,71**							**19.977.254.764,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.024.902.843,00**	**14.632.032.455,00**	**12.379.811.509,29**	**241.951.921,00**							**14.266.854.764,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan keuangan dinas*				100 %	100 %	8.993.694.493,00	13.446.549.616,00	11.467.908.765,71	2.474.214.272,71			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		9.006.136.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	8.797.374.493,00	13.204.389.616,00	11.316.428.765,71	2.519.054.272,71	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			8.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	196.320.000,00	242.160.000,00	151.480.000,00	-44.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			206.136.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan Administrasi BMD*				100 %	100 %	43.800.000,00	40.368.000,00	54.968.000,00	11.168.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		45.990.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43.800.000,00	40.368.000,00	54.968.000,00	11.168.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.990.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan kepegawaian*				100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	497.042.900,00	460.131.473,00	141.794.412,58	-355.248.487,42			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		500.895.045,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.479.000,00	6.479.000,00	1.000,00	-6.478.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			6.802.950,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.093.100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-18.093.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			29.497.755,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43.448.400,00	20.000.000,00	10.247.384,00	-33.201.016,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.620.820,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	43.652.473,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			52.500.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.692.400,00	3.880.000,00	1.000,00	-18.691.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			19.627.020,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	330.330.000,00	376.120.000,00	111.545.028,58	-218.784.971,42	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			346.846.500,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya BMD*				100 %	100 %	369.269.978,00	472.556.504,00	343.077.095,00	-26.192.883,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		387.733.476,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.930.701,00	64.974.183,00	1.000,00	-13.929.701,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			14.627.236,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.063.182,00	64.706.226,00	200.000,00	-9.863.182,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			10.566.341,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	345.276.095,00	342.876.095,00	342.876.095,00	-2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			362.539.899,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda*				100 %	100 %	4.058.299.671,00	163.220.490,00	372.060.236,00	-3.686.239.435,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		4.261.214.654,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	118.049.410,00	112.704.045,00	41.612.000,00	-76.437.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			123.951.880,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.516.445,00	50.516.445,00	50.516.445,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			53.042.267,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.889.733.816,00	0,00	279.931.791,00	-3.609.802.025,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			4.084.220.507,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*				100 %	100 %	61.795.801,00	49.206.372,00	3.000,00	-61.792.801,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		64.885.589,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	13.822.515,00	13.822.515,00	1.000,00	-13.821.515,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			14.513.640,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	15.383.857,00	15.383.857,00	1.000,00	-15.382.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			16.153.049,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	32.589.429,00	20.000.000,00	1.000,00	-32.588.429,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			34.218.900,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**				**5 %**	**5 %**	**3.712.734.200,00**	**5.022.734.200,00**	**72.913.000,00**	**-502.734.200,00**							**3.210.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi*				16 Kelompok	16 Kelompok	3.712.734.200,00	5.022.734.200,00	72.913.000,00	-3.639.821.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas		3.210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				160 Orang	160 Orang	3.642.734.200,00	4.952.734.200,00	4.700.000,00	-3.638.034.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				16 Kelompok	16 Kelompok	70.000.000,00	70.000.000,00	68.213.000,00	-1.787.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Genting Pulur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Produksi Perikanan Budidaya**				**65 %**	**65 %**	**2.020.000.000,00**	**1.570.000.000,00**	**40.803.000,00**	**150.400.000,00**							**2.170.400.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah POKDAKAN yang dibina*				30 Kelompok	30 Kelompok	1.220.000.000,00	920.000.000,00	1.500,00	-1.219.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pembudidaya Ikan		1.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	30 Kelompok	1.220.000.000,00	920.000.000,00	1.500,00	-1.219.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			1.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Produksi Perikanan Budidaya*				235 Ton	235 Ton	800.000.000,00	650.000.000,00	40.801.500,00	-759.198.500,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pembudidaya Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas		920.400.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			20.400.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	20.400.000,00	-79.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	600.000.000,00	1.500,00	-699.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			750.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Produksi Pengolahan Perikanan**				**83.30 %**	**83.30 %**	**320.000.000,00**	**232.400.000,00**	**2.151.500,00**	**10.000.000,00**							**330.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran*				200 Dokumen	200 Dokumen	143.298.800,00	31.972.000,00	1.500,00	-143.297.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				200 Dokumen	200 Dokumen	143.298.800,00	31.972.000,00	1.500,00	-143.297.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan*				100 %	100 %	176.701.200,00	200.428.000,00	2.150.000,00	-174.551.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	176.701.200,00	200.428.000,00	2.150.000,00	-174.551.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.145.995.284,00**	**1.257.358.914,00**	**86.733.880,00**	**-1.059.261.404,00**							**1.558.550.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan Sarana Pertanian**				**80 %**	**80 %**	**448.995.284,00**	**551.358.914,00**	**35.927.880,00**	**1.004.716,00**							**450.000.000,00**	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	448.995.284,00	551.358.914,00	35.927.880,00	-413.067.404,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Petani, Pekebun, Peternak		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	448.995.284,00	551.358.914,00	35.927.880,00	-413.067.404,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian**				**88.20 %**	**88.20 %**	**626.000.000,00**	**435.000.000,00**	**3.000,00**	**14.000.000,00**							**640.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan*				1 Unit	1 Unit	201.000.000,00	30.000.000,00	1.500,00	-200.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000,00	30.000.000,00	1.500,00	-200.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian*				1 Unit	1 Unit	425.000.000,00	405.000.000,00	1.500,00	-424.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Petani, Pekebun, Peternak		430.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	425.000.000,00	405.000.000,00	1.500,00	-424.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			430.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet**				**86 %**	**86 %**	**30.000.000,00**	**230.000.000,00**	**25.001.500,00**	**370.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penjaminan kesehatan hewan*				1300 Ekor	1300 Ekor	15.000.000,00	15.000.000,00	1.500,00	-14.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Peternak, pengguna jasa medik veteriner		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	1.500,00	-14.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelayanan jasa medik veteriner*				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Peternak, pengguna jasa medik veteriner		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**75 %**	**75 %**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**1.500,00**	**4.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan*				85 %	85 %	26.000.000,00	26.000.000,00	1.500,00	-25.998.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	1 Ha	26.000.000,00	26.000.000,00	1.500,00	-25.998.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani**				**95 %**	**95 %**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**25.800.000,00**	**23.550.000,00**							**38.550.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				12 Kali	12 Kali	15.000.000,00	15.000.000,00	25.800.000,00	10.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Kelompok Tani		38.550.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			15.750.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	5 Orang	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			22.800.000,00	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	J U M L A H								**21.448.632.327,00**	**22.922.919.100,00**	**12.585.993.889,29**	**-548.753.730.731,26**							**21.835.804.764,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir perubahan Renja merupakan suatu dokumen perencanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan ini merupakan hasil kerja dari semua pihak dan dari berbagai sektor serta tentunya dukungan dari masyarakat serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petani dan masyarakat umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Semoga dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja ini dapat menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

Tarempa, 16 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :B/000.7.2.4/ 187 /DISHUBLH.SPNG/07/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja *(Renja)* Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas ***(Soft Copy dan Hard Copy)***	1 Dokumen	Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal : .....
Yang menerima
Nama : .....
NIP/NIPTT : .....

Tanda tangan : .....

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,

Abdul Kadir, ST.M.,Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Rancangan AKHIR Perubahan RENJA PD 2025

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP








Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perangkat Daerah (PD) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada penetapan RKPD. Renja akan berfungsi sebagai pedoman PD dalam menyusun RKA PD. Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Diharapkan nantinya Renja ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas,

Abdul Kadir, ST.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II 2025..... 5

II.2 Evaluasi Capaian Renja DISHUBLH Triwulan II 2025 ... 5

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD 11

II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 12

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH 13

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan 14

III.2 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup 15

III.3 Tujuan dan Saran Renja Perangkat Daerah..... 17

III.4 Analisis Kinerja PD 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 23

IV.1 Program kerja PD..... 23

IV.2 Kegiatan PD..... 24

IV.3 Sub Kegiatan PD..... 25

IV.4 Tabel Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 28

BAB V PENUTUP 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-PD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruh oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral Perangkat Daerah atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan Fdalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan perkiraan pencapaian kinerja Program/Kegiatan baik pada Renja PD dan Renstra-PD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Rancangan Tema Pembangunan :
  "Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan"

- Rancangan Prioritas Pembangunan :
  1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
  2. Pemantapan kualitas sumber daya yang sehat, unggul dan berdaya saing;
  3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
  4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Rancangan Akhir perubahan Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan, Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulaun Anambas Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813).
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : B/000.7.2.4/125/BAPPEDA/SD/7/2025 tentang Permintaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1. 3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun program dan kegiatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

❖ Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025;
3. Untuk memastikan dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1. 4 Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Rancangan Akhir perubahan renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renja Perangkat Daerah, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun berkenaan (tahun berjalan), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sudah disahkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini dituangkan dalam bentuk tabel yang berisi rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah (tahun berjalan).

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

II. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025.

II. 2 Evaluasi Capaian Renja Triwulan II Tahun 2025

Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana awal dikarenakan adanya perkembangan isu strategis daerah, global dan nasional, sehingga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Melalui Rancangan Akhir perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2025.

Rencana Kerja Triwulan ke II Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 10 Program, 21 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.832.656.622,13 Dari pagu itu telah terealisasi sebesar Rp. 3.101.221.275,00 (22,42 %) dan realisasi fisik (51.26 %).

Program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel data berikut : (*halaman selanjutnya)*

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

No.			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
				Rp.	Rp.	%	%	
P	K	S	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**381,629,160.95**	**97,108,700.00**	**25.45**	**33.68**	**284,520,460.95**
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**308,897,950.00**	**82,352,400.00**	**26.66**	**28.13**	**226,545,550.00**
	1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7,016,000.00**	**-**	**-**	**64.65**	**7,016,000.00**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00	-
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00	-
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	5,216,000.00	-	0.00	52.45	5,216,000.00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00	-
		5	Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00	-
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	1,800,000.00	-	0.00	100.00	1,800,000.00
	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9,730,750.00**	**-**	**0.00**	**19.88**	**9,730,750.00**
		7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	2,790,000.00	-	0.00	0.00	2,790,000.00
		8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	6,940,750.00	-	0.00	19.88	6,940,750.00
	3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292,151,200.00**	**82,352,400.00**	**28.19**	**49.36**	**209,798,800.00**
		9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	292,151,200.00	82,352,400.00	28.19	49.36	209,798,800.00
		10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0	-
2			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**14,747,400.00**	**6,195,000.00**	**42.01**	**42.01**	**8,552,400.00**
	4		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**14,747,400.00**	**6,195,000.00**	**42.01**	**42.01**	**8,552,400.00**
		11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	14,747,400.00	6,195,000.00	42.01	42.01	8,552,400.00

3			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**15,931,418.95**	**580,000.00**	**3.64**	**71.31**	**15,351,418.95**
	5		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**15,931,418.95**	**580,000.00**	**3.64**	**71.31**	**15,351,418.95**
		12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	15,931,418.95	580,000.00	3.64	71.31	15,351,418.95
4			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**18,960,900.00**	**5,556,300.00**	**29.30**	**69.58**	**13,404,600.00**
	6		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**18,960,900.00**	**5,556,300.00**	**29.30**	**69.58**	**13,404,600.00**
		13	Pengawasan Perizinan Berusah atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	18,960,900.00	5,556,300.00	29.30	69.58	13,404,600.00
5			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**18,457,492.00**	**1,225,000.00**	**6.64**	**59.33**	**17,232,492.00**
	7		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**18,457,492.00**	**1,225,000.00**	**6.64**	**59.33**	**17,232,492.00**
		14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	18,457,492.00	1,225,000.00	6.64	59.33	17,232,492.00
6			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**4,634,000.00**	**1,200,000.00**	**26.76**	**100.00**	**3,434,000.00**
	8		**Pengelolaan Sampah**	**4,634,000.00**	**1,200,000.00**	**26.76**	**100.00**	**3,434,000.00**
		15	Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	4,484,000.00	1,200,000.00	26.76	100.00	3,284,000.00
		16	Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	150,000.00	-	0.00	0.00	150,000.00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**13,451,027,461.18**	**3,004,112,575.00**	**22.33**	**38.36**	**10,446,914,886.18**
7			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10,997,878,464.17**	**2,956,984,225.00**	**26.89**	**34.49**	**8,040,894,239.17**
	9		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0.02**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
		17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	0.01	-	0.00	0.00	0.01

		18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	0.01	-	0.00	0.00	0.01
	10		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8,886,088,947.21**	**2,409,749,390.00**	**27.12**	**34.28**	**6,476,339,557.21**
		19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	8,647,660,947.21	2,409,749,390.00	**27.87**	33.63	6,237,911,557.21
		20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	238,428,000.00	-	**0.00**	57.95	238,428,000.00
	11		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335,387,318.94**	**32,390,715.00**	**9.66**	**82.79**	**302,996,603.94**
		21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	7,164,061.00	-	0	51.66	7,164,061.00
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	55,800,000.00	-	0	100.00	55,800,000.00
		23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	106,285,929.00	18,870,000.00	17.75	52.16	87,415,929.00
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	28,246,828.94	-	0	62.41	28,246,828.94
		25	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	27,206,500.00	-	0	63.24	27,206,500.00
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	110,684,000.00	13,520,715.00	12.22	41.47	97,163,285.00
	12		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,423,664,143.00**	**499,839,120.00**	**35.11**	**38.53**	**923,825,023.00**
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	56,081,683.00	-	0.00	45.92	56,081,683.00
		28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	50,042,000.00	10,003,000.00	19.99	29.98	40,039,000.00
		29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	19,029,464.00	-	0.00	47.01	19,029,464.00
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	1,298,510,996.00	489,836,120.00	37.72	38.42	808,674,876.00
	13		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**352,738,055.00**	**15,005,000.00**	**11.33**	**15.70**	**337,733,055.00**
		31	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	308,375,625.00	5,785,000.00	1.88	3.59	302,590,625.00

		32	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	44,362,430.00	9,220,000.00	20.78	99.88	35,142,430.00
8			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**257,312,833.00**	**30,952,950.00**	**12.03**	**32.46**	**226,359,883.00**
	14		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200,072,553.00**	**25,781,650.00**	12.89	**39.16**	**174,290,903.00**
		33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	2,528,799.00	2,181,150.00	86.25	86.25	347,649.00
		34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	-	-	0.00	0.00	-
		35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	3,104,820.00	1,775,000.00	57.17	57.17	1,329,820.00
		36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	168,058,934.00	16,425,500.00	9.77	41.05	151,633,434.00
		37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	16,380,000.00	5,400,000.00	32.97	32.97	10,980,000.00
		38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	10,000,000.00	-	0.00	0.00	10,000,000.00
	15		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	-
		39	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	-	-	0.00	0.00	-
	16		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52,350,280.00**	**5,171,300.00**	**13.09**	**13.09**	**47,178,980.00**
		40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	12,834,280.00	-	0.00	0.00	12,834,280.00
		41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	39,516,000.00	5,171,300.00	13.09	13.09	34,344,700.00
	17		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4,890,000.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**4,890,000.00**
		42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	4,890,000.00	-	0.00	0.00	4,890,000.00
		43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	-	-	0.00	0.00	-
9			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**157,723,800.01**	**1,200,000.00**	**0.76**	**97.53**	**156,523,800.01**
	18		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**127,051,800.00**	**1,200,000.00**	**0.94**	**96.93**	**125,851,800.00**
		44	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-

		45	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	127,051,800.00	1,200,000.00	0.94	96.93	125,851,800.00
		46	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-
		47	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-
	19		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	-
		48	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-
		49	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-
		50	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00	-
	20		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**30,672,000.01**	**-**	**0.00**	**100.00**	**30,672,000.01**
		51	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	30,672,000.00	-	0.00	100.00	30,672,000.00
		52	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	0.01	-	0.00	0.00	0.01
10			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**2,038,112,364.00**	**14,975,400.00**	**0.73**	**98.23**	**2,023,136,964.00**
	21		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**2,038,112,364.00**	**14,975,400.00**	**0.73**	**98.23**	**2,023,136,964.00**
		53	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	1,995,235,164.00	14,975,400.00	0.75	98.19	1,980,259,764.00
		54	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	42,812,200.00	-	0.00	100.00	42,812,200.00
		55	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	65,000.00	-	0.00	0.00	65,000.00
JUMLAH TOTAL				**13,832,656,622.13**	**3,101,221,275.00**	**22.42**	**51.26**	**10,731,435,347.13**

II. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah :

1. Isu keselamatan transportasi terkait kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta ketersediaan sarana prasarana transportasi;
2. Inovasi-inovasi dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
3. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan perencanaan dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.

- Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
2. Mengikuti Pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
4. Peningkatan pelayanan dibidang Perhubungan dan lingkungan hidup terhadap seluruh lapisan masyarakat.

- Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
3. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

- Isu Isu Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, kegiatan yang sejalan dengan PUG antara lain pmbangunan Pelabuhan. Desain pelabuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam bentuk desain yang humanis sehingga manfaat nya dapat dirasakan masyarakat baik laki-laki, wanita, anak-anak dan pengguna berkebutuhan khusus (Disabilitas).

- Strategi Kabupaten Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan yang menunjang Program Kabupaten Kota Sehat adalah sebagai berikut:

a. Kawasan bersih permukiman
b. Pengelolaan Sampah
c. Tempat Pemrosesan akhir sampah di TPAS
d. Pengembangan kinerja pengolahan sampah

II. 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Tabel. Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Kecamatan	Usulan Musrenbang	Lokasi	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Siantan	Pembangunan pelabuhan nelayan	Desa Sri Tanjung, Kab. Kepulauan Anambas	
2	Siantan Selatan	• Peningkatan lampu penerangan jalan umum dan sarana umum kecamatan • Pembangunan pelabuhan nelayan • Pembangunan pelabuhan nelayan	• Air Bini • Tiangau • Mengkait	

3	Siantan Tengah	Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) (60m x 100m)	RT. 004/ RW 002 Air nangak, Kab. Kepulauan Anambas	
4	Siantan Timur	• Usulan DED dan pembangunan pelabuhan perintis kecamatan Siantan Timur • Pembangunan pelabuhan nelayan	• Desa Nyamuk • RT 01/ RW 01 desa Nyamuk	
5	Palmatak	Peningkatan dermaga/ pelabuhan desa Matak (P= 60M, L=6M)	Desa Matak	
6	Jemaja	Penerangan jalan umum di kecamatan Jemaja	Rewak-Kusik-Sedanau, Padang Melang-Terdun-Sedanau, Padang Melang Bandara, Genting Dusun Teluk Kaut- Atap- Air Biru, Atap Semuak	
7	Jemaja Barat	Penyambungan pelabuhan beton bertulang (50M X 4M)	Desa Impol	
8	Jemaja Timur	Pengadaan Lampu Jalan 4KM	Desa Bukit Padi	

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Berikut adalah **Isu-isu** dan **Kebijakan Nasional di Bidang Transportasi** yang berlaku dan direncanakan untuk periode 2025–2029, berdasarkan **RPJPN 2025–2045**, **RPJMN 2025–2029**, serta arah pembangunan Kementerian Perhubungan (Kemenhub):

1. **Penguatan Konektivitas Nasional**
   - Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi antarwilayah, khususnya daerah **3TP** (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
   - Mendorong pengembangan **transportasi multimoda** (darat, laut, udara, dan kereta api) yang saling terintegrasi.
   - Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan sistem logistik nasional.
2. **Pembangunan Infrastruktur Transportasi Yang Modern & Merata**
   - Pengembangan **pelabuhan internasional dan domestik**, **bandara strategis**, **jalan nasional**, dan **jaringan rel**.
   - Modernisasi dan standarisasi terminal, stasiun, pelabuhan penyeberangan, dan fasilitas penunjang lainnya.
   - Penataan ulang jaringan transportasi agar sesuai dengan arah pembangunan wilayah.
3. **Pelayanan Transportasi Publik Yang Aman, Terjangkau & Berkualitas**
   - Perluasan angkutan umum massal (BRT, LRT, MRT, KA Perkotaan) untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
   - Peningkatan **kualitas layanan publik** dan keterjangkauan harga (subsidi PSO).
   - Prioritas pada **keselamatan, keamanan, dan kenyamanan** penumpang.
4. **Transportasi Yang Ramah Lingkungan & Berkelanjutan**
   - Mendorong penggunaan **kendaraan listrik (EV)** dan **bahan bakar alternatif (biofuel, hidrogen)**.
   - **Dekarbonisasi sektor pelayaran** dan penerapan green port, green airport.
   - Penurunan emisi dari sektor transportasi untuk mendukung target **net zero emission 2060**.
5. **Digitalisasi & Inovasi Sistem Transportasi**
   - Penerapan **e-ticketing, fleet monitoring system, smart port/airport**, dan **single data transportasi nasional**.
   - Integrasi layanan melalui sistem digital nasional seperti **Inaportnet, NLE (National Logistic Ecosystem), dan OSS**.
   - Penguatan **keamanan siber (cybersecurity)** dan interoperabilitas sistem transportasi.

6. **Pembiayaan Berbasis Kemitraan (KPBU)**
   - Optimalisasi pemanfaatan skema **Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi.
   - Mendorong keterlibatan BUMN, BUMD, dan swasta dalam proyek strategis transportasi.
   - Diversifikasi sumber pembiayaan non-APBN (obligasi, pinjaman internasional, dana publik/swasta).
7. **Reformasi Tata Kelola Dan Penguatan SDM Transportasi**
   - Penyederhanaan regulasi dan birokrasi di sektor transportasi.
   - Peningkatan **kapasitas dan profesionalisme SDM** transportasi, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi nasional/internasional.
   - Peningkatan pengawasan dan transparansi layanan transportasi publik.

III.2 Telaah terhadap kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Berikut adalah **isu-isu strategis** dan **Kebijakan Nasional bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025**, sebagaimana dirumuskan dalam dokumen perencanaan nasional seperti **RPJMN 2025–2029**, **Renstra KLHK 2025–2029**, dan berbagai regulasi pendukung:

Pertama Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup 2025 :

a. Peningkatan Kerusakan Lingkungan dan Degradasi Ekosistem
- Alih fungsi lahan, deforestasi, dan perusakan wilayah pesisir serta ekosistem mangrove masih tinggi.
- Kerusakan DAS dan lahan gambut belum terkendali secara optimal.

b. Pengelolaan Sampah dan Limbah Masih Lemah
- Volume sampah meningkat, khususnya **plastik sekali pakai** dan limbah elektronik.
- Banyak TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang belum memenuhi standar lingkungan.

c. Ancaman Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologis
- Kenaikan suhu global, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi.
- Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum terimplementasi secara menyeluruh.

d. Pencemaran Air, Udara, dan Tanah
- Kualitas udara di kota besar menurun, terutama dari emisi kendaraan dan industri.
- Pencemaran air akibat limbah domestik dan industri mencemari sungai dan laut.

e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Tata Kelola
- Masih banyak pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak tegas.
- Kurangnya integrasi data dan pengawasan lintas sektor dan daerah.

Kedua Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup 2025

a. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (D3TLH)
- Setiap wilayah diwajibkan merumuskan batas ekologis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

b. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- Dokumen jangka panjang (30 tahun) sebagai rujukan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Termasuk pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan risiko lingkungan.

c. Rencana Adaptasi Perubahan Iklim (NAP/NDC Subnasional)
- Integrasi adaptasi iklim ke dalam perencanaan sektoral dan daerah.
- Fokus pada ketahanan wilayah pesisir, pertanian, dan air bersih.

d. Pengurangan Sampah Plastik dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
- Larangan bertahap plastik sekali pakai hingga 2029.
- Penguatan program **3R (Reduce, Reuse, Recycle)** dan pengembangan **teknologi RDF dan WTE**.

e. Perlindungan Ekosistem Kritis
- Penetapan kawasan konservasi baru: mangrove, gambut, dan taman laut.
- Implementasi Peraturan Pemerintah tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM)**.

f. Penilaian Kinerja Lingkungan Daerah (IRLH)
- Pengukuran indikator air, udara, tutupan hutan, biodiversitas, dan pengelolaan limbah oleh pemerintah daerah.

g. Digitalisasi Data Lingkungan dan Pengawasan
- Sistem pemantauan kualitas lingkungan berbasis satelit dan sensor digital.
- Pemanfaatan data spasial untuk perizinan, pengawasan, dan penindakan hukum.

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD 2025 sebagai berikut : **"Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan".**

Sedangkan yang menjadi Rancangan Prioritas Pembangunan adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

III. 3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah". Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh intansi. Untuk mewujudkan visi maka dibuat misi, adapun misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan 4 (empat) yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
2. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
3. Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi;
    a. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan jalan;
    b. Meningkatnya system pelayanan angkutan umum.

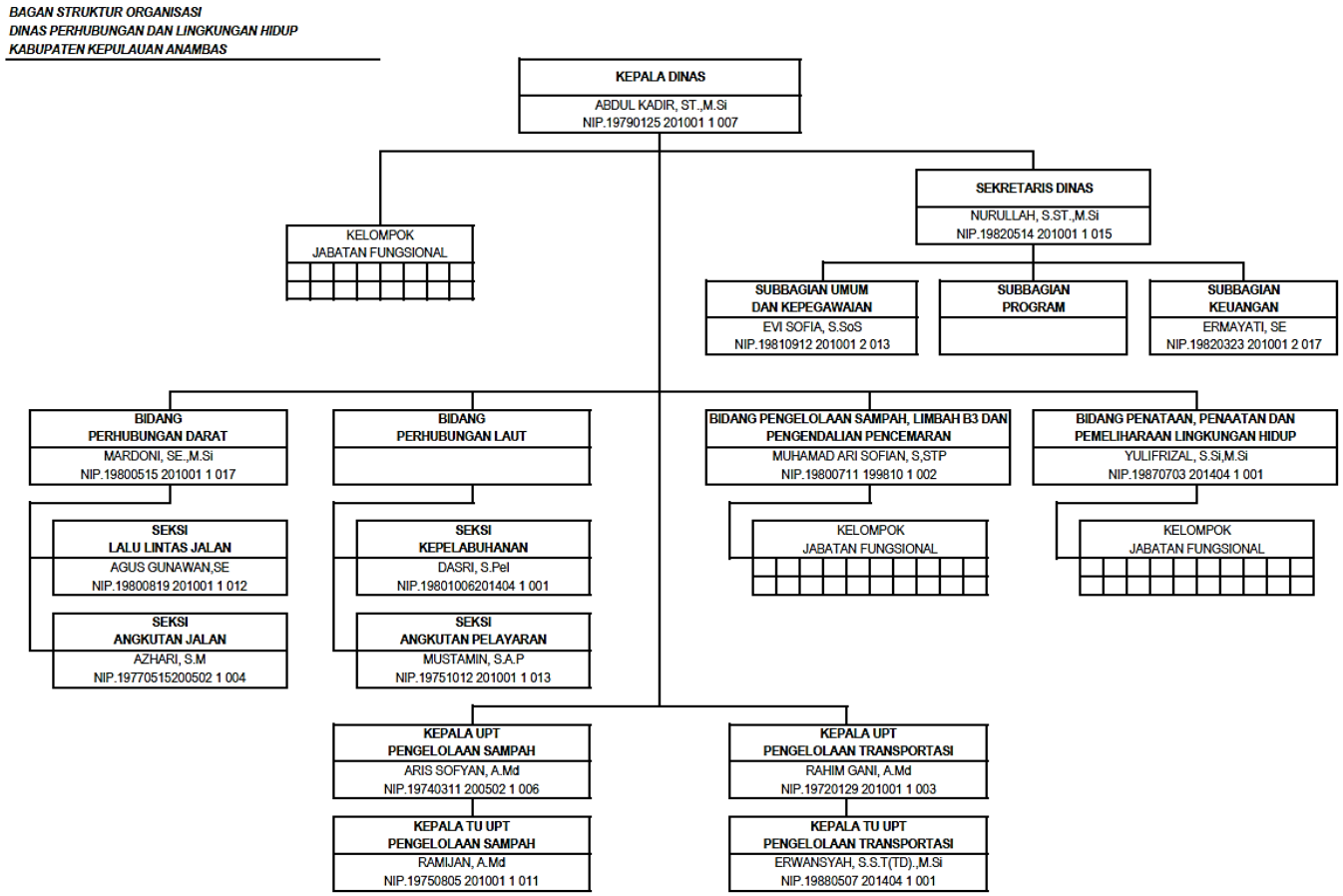
2. Mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup
    a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
    b. Terciptanya lingkungan daerah perkotaan dan pesisir yang bersih.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 sesuai dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,84
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
2	Meningkatkan akuntabelitas kinerja		Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
		Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20	60,20
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,45	0,61	0,74	0,84	1,00	1,00
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,00
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100	100
			Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapras alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86

III. 4 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Kepala Seksi/Kasubbag. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan LIngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



❖ Daftar Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Perhubungan Darat
3. Bidang Perhubungan Laut
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
5. Bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan hidup, DISHUBLH memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Transportasi
2. UPT Pengelolaan Sampah

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, DISHUBLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

❖ Data Aparatur Dinas Perhubungan dan Linkungan Hidup

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 214 orang. Dari ke 214 pegawai tersebut, 35 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 179 orang berstatus PPPK.

Tabel. Data Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan						total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	PNS	5	20	5	5	-	-	35
2	PPPK	-	20	2	131	-	26	179
Jumlah		5	40	7	136	0	26	214

Tabel. Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina TK.I (IV.b)	1
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tk.I (III/d)	13
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	8
5	Penata Muda (III/a)	8
6	Pengatur Tk.I (II/d)	3
Jumlah		35

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang perhubungan guna mengembangkan layanan dan implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan;
3. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas;
4. Belum optimal penanganan akhir sampah karena lahan TPA belum tersedia;
5. Petugas sampah banyak yang sudah berusia lanjut;
6. Belum adanya tempat pembibitan pohon karena tidak ada lahan milik Pemda;
7. Belum terintegrasinya pembinaan pendidikan lingkungan hidup;
8. Belum tersedianya Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana prasarana penunjang seperti ruang tunggu, lampu penerangan, dll.
2. Minimnya rambu-rambu yang ada di wilayah perairan yang digunakan sebagai jalur pelayaran.
3. Selain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyak kendaraan yang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum optimal.
4. Penanganan sampah yang belum optimal, karena terbatasnya sarana prasarana.
5. Tingginya produksi sampah rumah tangga yang belum diimbangi kemampuan pengelolaan sampah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2025 beserta indikatornya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Agar tujuan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tercapai diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RENSTRA /RPJMD.

Pada tahun 2025 program/kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja meliputi 10 Program, 21 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- ***PROGRAM***

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (upt pengelolaan transportasi)
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (upt pengelolaan sampah)
4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

8. Program pengelolaan persampahan
9. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)
10. Program pengelolaan pelayaran

❖ ***KEGIATAN***

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
2. Administrasi keuangan perangkat daerah (Dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
3. Administrasi umum perangkat daerah (Dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (upt pengelolaan transportasi)
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
7. Administrasi umum perangkat daerah (upt pengelolaan transportasi)
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (upt pengelolaan transportasi)
9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (upt pengelolaan transportasi)
10. Administrasi umum perangkat daerah (upt pengelolaan sampah)
11. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (upt pengelolaan sampah)
12. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (upt pengelolaan sampah)
13. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
14. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota
15. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
16. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
17. Pengelolaan sampah
18. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
19. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota

20. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
21. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

❖ ***SUB KEGIATAN***

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (upt pengelolaan sampah)
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (upt pengelolaan sampah)
3. Penyediaan bahan logistik kantor (upt pengelolaan sampah)
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (upt pengelolaan sampah)
5. Penyediaan bahan/material (upt pengelolaan sampah)
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (upt pengelolaan sampah)
7. Penyediaan jasa surat menyurat (upt pengelolaan sampah)
8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (upt pengelolaan sampah)
9. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan upt pengelolaan sampah)
10. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (upt pengelolaan sampah)
11. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
12. Pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)
13. Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
15. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
16. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
17. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
18. Evaluasi kinerja perangkat daerah (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)

19. Penyediaan gaji dan tunjangan asn (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
20. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
21. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (upt pengelolaan transportasi)
22. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
23. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
24. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (upt pengelolaan transportasi)
25. Penyediaan peralatan rumah tangga (upt pengelolaan transportasi)
26. Penyediaan bahan logistik kantor (upt pengelolaan transportasi)
27. Penyediaan bahan logistik kantor (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
28. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (upt pengelolaan transportasi)
29. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
30. Fasilitasi kunjungan tamu (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
31. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (upt pengelolaan transportasi)
32. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
33. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (upt pengelolaan transportasi)
34. Penyediaan jasa surat menyurat (upt pengelolaan transportasi)
35. Penyediaan jasa surat menyurat (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
36. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (upt pengelolaan transportasi)
37. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
38. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
39. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
40. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)

41. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (upt pengelolaan transportasi)
42. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (upt pengelolaan transportasi)
43. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (dinas perhubungan dan lingkungan hidup)
44. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
45. Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
46. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
47. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
48. Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota
49. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas
50. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
51. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota
52. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
53. Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
54. Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal
55. Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan lokal

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 beserta pagu anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut :*(halaman selanjutnya)*

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun Anggaran 2025				Catatan Penting	Perubahan Tahun Anggaran 2025		Bertambah / Berkurang
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
01.00	**DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**				**30,892,292,073.00**				**14,165,436,555.13**	**(16,726,855,517.87)**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**13,986,189,388.00**			**100 Persen**	**10,994,550,801.17**	**(2,991,638,586.83)**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**90 Persen**	**30,000,000.00**			**90 Persen**	**0.02**	**(29,999,999.98)**
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	5 Dokumen	17,792,000.00	APBD		5 Dokumen	0.01	(17,791,999.99)
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	12,208,000.00	APBD		1 Laporan	0.01	(12,207,999.99)
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**90 Persen**	**12,808,615,460.00**			**90 Persen**	**8,936,836,280.00**	**(3,871,779,180.00)**
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas	34 Orang	12,451,711,460.00	APBD		35 Orang	8,698,408,280.00	(3,753,303,180.00)
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	356,904,000.00	APBD		1 Dokumen	238,428,000.00	(118,476,000.00)
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**85 Persen**	**-**			**85 Persen**	**-**	**-**

2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan		APBD		1	Laporan		
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**85**	**Persen**	**509,322,368.00**			**85**	**Persen**	**328,587,319.15**	**(180,735,048.85)**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Paket	5,420,985.00	APBD		2	Paket	7,164,061.00	(1,743,076.00)
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	5	Paket	39,548,291.00	APBD		5	Paket	55,800,000.00	(16,251,709.00)
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3	Paket	82,853,511.00	APBD		3	Paket	99,485,929.21	(16,632,418.21)
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Paket	24,978,000.00	APBD		2	Paket	28,246,828.94	(3,268,828.94)
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	6	Laporan	51,750,000.00	APBD		6	Laporan	27,206,500.00	(24,543,500.00)
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	304,771,581.00	APBD		2	Laporan	110,684,000.00	(194,087,581.00)
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**164,064,030.00**			**80**	**Persen**	**1,359,049,147.00**	**(1,194,985,117.00)**
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	71,935,715.00	APBD		1	Laporan	56,081,683.00	(15,854,032.00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	68,686,000.00	APBD		2	Laporan	50,042,000.00	(18,644,000.00
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	23,442,315.00	APBD		2	Laporan	19,029,464.00	(4,412,851.00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12	Laporan	-	APBD		12	Laporan	1,233,896,000.00	(1,233,896,000.00)

2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**474,187,530.00**			**80**	**Persen**	**370,078,055.00**	**(104,109,475.00)**
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas	8	Unit	447,267,530.00	APBD		8	Unit	325,715,625.00	(121,551,905.00)
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	26,920,000.00	APBD		1	Unit	44,362,430.00	(17,442,430.00)
01.1	**UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI**											
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**Persen**	**608,071,205.00**			**100**	**Persen**	**256,782,004.00**	**(351,289,201.00)**
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**80**	**Persen**	**490,278,925.00**			**80**	**Persen**	**157,401,791.00**	**(332,877,134.00)**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	3,243,479.00	APBD		1	Paket	2,528,799.00	(714,680.00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3	Paket	67,884,206.00	APBD		3	Paket	-	(67,884,206.00
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	3,104,820.00	APBD		1	Paket	3,104,820.00	-
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3	Paket	309,379,940.00	APBD		3	Paket	125,388,172.00	(183,991,768.00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	54,360,480.00	APBD		1	Paket	16,380,000.00	(37,980,480.00
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	-	APBD		1	Laporan	-	-
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	52,306,000.00	APBD		2	Laporan	10,000,000.00	(42,306,000.00

2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**80**	**Persen**	**9,918,000.00**			**80**	**Persen**	**-**	**(9,918,000.00**
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	9,918,000.00	APBD		1	Unit	-	(9,918,000.00
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**60,434,280.00**			**80**	**Persen**	**52,350,280.00**	**(8,084,000.00**
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	12,834,280.00	APBD		1	Paket	12,834,280.00	-
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	47,600,000.00	APBD		2	Laporan	39,516,000.00	(8,084,000.00
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**47,440,000.00**			**80**	**Persen**	**47,029,933.00**	**(410,067.00**
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	3	Unit	9,780,000.00	APBD		2	Unit	4,890,000.00	(4,890,000.00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	37,660,000.00	APBD		1	Unit	42,139,933.00	4,479,933.00
01.2	**UPT PENGELOLAAN SAMPAH**											
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**Persen**	**932,265,477.00**			**100**	**Persen**	**328,977,188.00**	**(603,288,289.00)**
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**80**	**Persen**	**475,862,167.00**			**80**	**Persen**	**11,995,238.00**	**(463,866,929.00)**
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	743,270.00	APBD		1	Paket	-	(743,270.00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Paket	432,432,390.00	APBD		2	Paket	-	(432,432,390.00

2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	7,655,000.00	APBD		1	Paket	10,195,238.00	(2,540,238.00)
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1	Paket	2,281,751.00	APBD		1	Paket	-	(2,281,751.00
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Paket	5,017,756.00	APBD		2	Paket	-	(5,017,756.00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	-	APBD		2	Laporan	-	-
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	27,732,000.00	APBD		2	Laporan	1,800,000.00	(25,932,000.00
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**10,773,110.00**			**80**	**Persen**	**9,730,750.00**	**(1,042,360.00**
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	3,427,360.00	APBD		1	Laporan	2,790,000.00	(637,360.00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2	Laporan	7,345,750.00	APBD		2	Laporan	6,940,750.00	(405,000.00
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**80**	**Persen**	**445,630,200.00**			**80**	**Persen**	**307,251,200.00**	**(138,379,000.00)**
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	6	Unit	403,390,200.00	APBD		6	Unit	291,131,200.00	(112,259,000.00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	42,240,000.00	APBD		1	Unit	16,120,000.00	(26,120,000.00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**100**	**Persen**	**260,000,000.00**			**100**	**Persen**	**275,415,324.01**	**(15,415,324.01)**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**80**	**Persen**	**234,198,000.00**			**80**	**Persen**	**244,743,324.00**	**(10,545,324.00)**

2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kepulauan Anambas	2	Unit		APBD		2	Unit		-
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	2	Unit	80,159,772.00	APBD		2	Unit	127,051,800.00	(46,892,028.00)
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	2	Unit		APBD		2	Unit		-
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	2	Unit	154,038,228.00	APBD		2	Unit	117,691,524.00	(36,346,704.00)
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**80**	**Persen**	**-**			**80**	**Persen**	**-**	**-**
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	-	APBD		1	Laporan	-	-
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Kepulauan Anambas	2	Unit	-	APBD		2	Unit	-	-
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	-	APBD		1	Laporan	-	-
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**80**	**Persen**	**25,802,000.00**			**80**	**Persen**	**30,672,000.01**	**(4,870,000.01)**
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1	Laporan	8,837,000.00	APBD		1	Laporan	0.01	(8,836,999.99

2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	16,965,000.00	APBD		1	Unit	30,672,000.00	(13,707,000.00)
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut**		**100**	**Persen**	**14,103,027,469.00**			**100**	**Persen**	**2,038,112,364.00**	**(12,064,915,105.00)**
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**80**	**Persen**	**14,103,027,469.00**			**80**	**Persen**	**2,038,112,364.00**	**(12,064,915,105.00)**
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab. Kepulauan Anambas	5	Unit	13,163,833,405.00	APBD		5	Unit	1,995,235,164.00	(11,168,598,241.00)
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	110,700,000.00	APBD		1	Unit	42,812,200.00	(67,887,800.00)
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1	Unit	828,494,064.00	APBD		1	Unit	65,000.00	(828,429,064.00)
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**		**100**	**Persen**	**46,412,000.00**			**100**	**Persen**	**14,747,400.00**	**(31,664,600.00)**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**80**	**Persen**	**46,412,000.00**			**80**	**Persen**	**14,747,400.00**	**(31,664,600.00**
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, dara, dan Laut	Kab. Kepulauan Anambas	1	Dokumen	46,412,000.00	APBD		1	Dokumen	14,747,400.00	(31,664,600.00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup**		**100**	**Persen**	**57,151,491.00**			**100**	**Persen**	**15,931,418.95**	**(41,220,072.05)**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**80**	**Persen**	**57,151,491.00**			**80**	**Persen**	**15,931,418.95**	**(41,220,072.05**

		Kabupaten/Kota									
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	3	Ha	57,151,491.00	APBD		3	Ha	15,931,418.95	(41,220,072.05
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**		**100**	**Persen**	**379,967,018.00**			**100**	**Persen**	**18,960,900.00**	**(361,006,118.00**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**85**	**Persen**	**379,967,018.00**			**85**	**Persen**	**18,960,900.00**	**(361,006,118.00**
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Kepulauan Anambas	3	Badan Usaha	379,967,018.00	APBD		5	Badan Usaha	18,960,900.00	(361,006,118.00
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**		**100**	**Persen**	**180,620,025.00**			**100**	**Persen**	**17,325,155.00**	**(163,294,870.00**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**85**	**Persen**	**180,620,025.00**			**85**	**Persen**	**17,325,155.00**	**(163,294,870.00**
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Kepulauan Anambas	3	Dokumen	180,620,025.00	APBD		3	Dokumen	17,325,155.00	(163,294,870.00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan**		**100**	**Persen**	**-**			**100**	**Persen**	**-**	**-**

2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**85**	**Persen**	**-**			**85**	**Persen**	**-**	**-**
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Kepulauan Anambas	10	Entitas	-	APBD		10	Entitas	-	-
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**		**100**	**Persen**	**-**			**100**	**Persen**	**-**	**-**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**85**	**Persen**	**-**			**85**	**Persen**	**-**	**-**
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Kepulauan Anambas	5	Pengaduan	-	APBD		5	Pengaduan	-	-
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan**		**100**	**Persen**	**338,588,000.00**			**100**	**Persen**	**204,634,000.00**	**(133,954,000.00)**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah**		**80**	**Persen**	**338,588,000.00**			**80**	**Persen**	**204,634,000.00**	**(133,954,000.00)**
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Kepulauan Anambas	12.5	Ton	82,051,178.00	APBD		12.5	Ton	4,484,000.00	(77,567,178.00)
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Kepulauan Anambas	5	Unit	256,536,822.00	APBD		5	Unit	200,150,000.00	(56,386,822.00)

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Perhubungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Output Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah program tahunan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 16 Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas,

ABDUL KADIR, ST.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENJA

2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



dinsospppa.anambas

dinsos.pppa.anambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 Telah di susun.

Penyusunan buku Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini memberikan gambaran mengenai rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dalam sehingga tercapainya sistem manajemen Pembangunan/pelayanan umum yang profesional dan transparan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja rencana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu perlu masukan-masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

USMAN, ST.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 8
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **12**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 13
2.2 Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD) 27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang) 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN **39**
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 39
3.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri 45
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 52
3.4 Program dan Kegiatan..... 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **59**

BAB V PENUTUP **75**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pelaksanaan Program /Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 …..…….	12
Tabel	2.2	Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 …….....	14
Tabel	2.3	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan beserta Outputnya Tahun 2021 …….....	15
Tabel	2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025……	20
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……..……	29
Tabel	2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……..…….	34
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……	34
Tabel	2.5	Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah …….....	35
Tabel	2.5	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat/Desa Berdasarkan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 ……	38
Tabel	3.1	Tujuan Strategis Kementrian Sosial 2020 – 2024…….……	40
Tabel	3.2	Rincian Sasaran Strategis 1 Kementrian Sosial……	40
Tabel	3.3	Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementrian Sosial…….	41
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementrian Sosial……	42
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementrian Sosial……	43
Tabel	3.5	Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……..	54
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 1 ….	59
Tabel	4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 2….....	65
Tabel	4.3	Rekapitulasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan klasifikasi Belanja…….	71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Money Follow Program* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas . Sebelumnya ini merupakan gabungan 2 (dua) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pelayanan yang masih belum dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus dengan jangkauan pelayanan yang diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial, Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum. Selain itu, pekerjaan sosial tersebut tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Selain itu, pengarusutamaan gender juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan pembimbingan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan muktahir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan harus sesuai dengan program visi, misi bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh *(Stakeholders)*. Sejalan dengan hal tersebut di terbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Undang-undang dimaksud juga menuntup adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang disesuaikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan Halaman Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penggabungan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

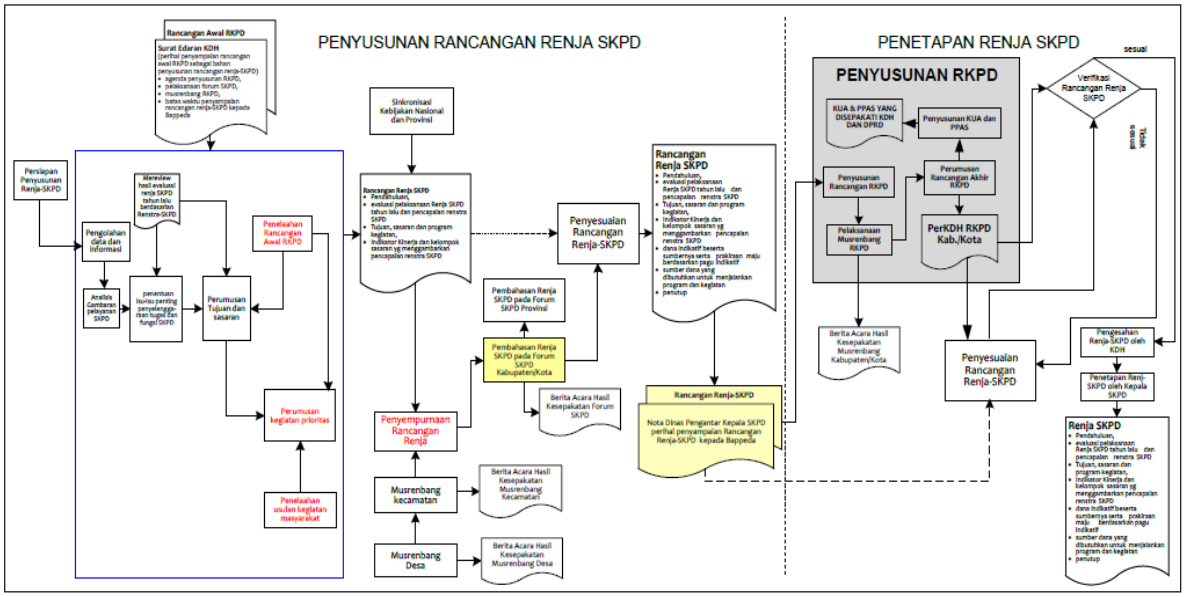
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar 1.2
Bagan Alur Rancangan Renja OPD
Kabupaten Kepulauan Anambas



- ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja
- ✓ Orientasi mengenai Renja
- ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- ✓ Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan

bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

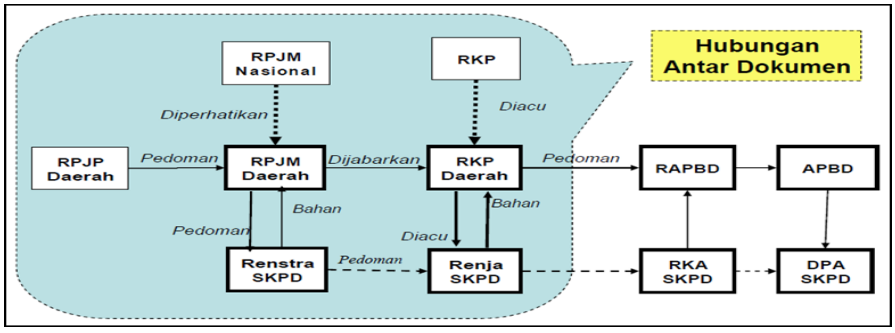
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - ✓ Pengolahan data dan informasi;
   - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD;
   - ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan
   - ✓ Renstra OPD;
   - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
   - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - ✓ Perumusan kegiatan prioritas;
   - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
   - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
   - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
   - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen Lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;
6. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

11. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

12. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32).

15. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahu

kedepan, sehingga sumber daya yang ada dimasyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana PD Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematik sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan Dasar. dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4.	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		7.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
				2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti	1.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
				2.	Pemberian layanan rujukan

4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penanganan Bencana	1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
				2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaaan kampung siaga bencana
6.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
7.	Program Perlindungan Perempuan		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan kabupaten/kota
8.	Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak		Pengumpulan, Pengelola Analisis Dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyedia data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.	Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
				2.	Penguatan jejaringan antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Koordinaso dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		2.	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan		Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan

			perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota		perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

NO	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas hidup anak		Rasio kekerasan terhadap Perempuan	80%	80%
		1.	Rasio kekerasan terhadap anak	80%	80%
		2.	Rasio Lembaga Informasi Layanan Anak	50%	50%
2.	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitas sosial dan jaminan sosial		Presentase fakir miskin dan KAT yang tertangani	50%	50%
3.	Meningkatnya tata Kelola yang efektif dan efesien	1.	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	BB	BB
		2.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	BB	BB

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 5.756.504.879**	**Rp 1.515.214.406**	**26,32**	**22,33**		**26,32**	
1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 71.093.300**	**Rp 43.889.700**	**61,74**	**0,42**		**0,78**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.541.100	40.011.700	74,73	0,38	96,37	0,58	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.552.200	3.878.000	13,18	0,04	87,72	0,19	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 5.121.375.442**	**Rp 1.432.054.425**	**81,90**	**27,96**		**21,10**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.805.442	1.409.574.425	28,60	20,77	100,00	28,60	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.570.000	22.480.000	11,61	0,33	100,00	11,61	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.742.800	10.742.800	100,00	0,10	100,00	0,18	
3	**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16.260.000**	**4.200.000**	**25,83**	**0,06**	**25,83**	**0,06**	
6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	16.260.000	4.200.000	25,83	0,06	25,83	0,06	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 358.066.435**	**Rp 34.099.400**	**97,72**	**3,10**		**3,23**	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.388.800	2.963.700	99,79	0,03	100,00	0,08	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.875.822	6.562.764	99,80	0,06	99,89	0,09	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.990.564	16.813.525	99,81	0,16	99,83	0,17	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.183.000	20.883.190	80,32	0,20	87,90	0,24	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.628.249	277.588.300	99,14	2,65	100,00	2,65	

Tabel 2.3
Realisasi Target Fisik Dan Keuangan Dinsospppa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 486.893.124**	**Rp 460.537.964**	**94,59**	**4,39**		**4,64**	
12	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	486.893.124	460.537.964	94,59	4,39	100,00	4,64	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 862.957.136**	**Rp 690.425.783**	**80,01**	**6,58**		**7,94**	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.553.000	57.964.282	95,72	0,55	100,00	0,59	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.920.000	73.827.500	76,97	0,70	100,00	0,81	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.484.136	558.634.001	79,07	5,33	100,00	6,54	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 38.704.000**	**Rp 16.820.550**	**43,46**	**0,16**		**0,60**	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	19.014.000	11.376.000 -	59,83	0,11	76,53	0,43	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.690.000	5.444.550	27,65	0,05	45,22	0,17	

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Rp 50.115.900**	**Rp 16.317.200**	**32,56**	**0,16**		**0,39**	
8	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 50.115.900**	**Rp 16.317.200**	**32,56**	**0,16**		**0,39**	
18	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.115.900	16.317.200	32,56	0,16	72,48	0,39	
III	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Rp 179.619.500**	**Rp 179.471900**	**99,92**	**1,71**		**1,89**	
9	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp 179.619.500**	**Rp 179.471900**	**99,92**	**1,71**		**1,89**	
19	Pemberian Layanan Rujukan	179.619.500	179.471900	99,92	1,71	100,00	1,89	
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Rp 1.715.761.391**	**Rp 349.977.016**	**20,40**	**3,34**		**6,07**	
10	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.715.761.391**	**349.977.016**	**20,40**	**3,34**		**6,07**	
20	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.908.861	42.494.516	88,70	0,41	97,53	0,49	
21	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.500.000	105.615.000	91,44	1,01	99,28	1,69	
22	FasilitasiBantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.552.352.530	201.867.500	13,00	1,92	46,31	3,89	

			PROGRES/ PERKEMBANGAN

No	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Rp 41.605.100**	**Rp 40.556.100**	**97,48**	**0,39**		**0,78**	
11	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**41.605.100**	**40.556.100**	**97,48**	**0,39**	**100,00**	**0,78**	
23	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.605.100	40.556.100	97,48	0,39	100,00	**0,78**	
VI	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Rp 579.775.943**	**346.884.350**	**53,83**	**3,31**	**85,21**	**4,96**	
12	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**579.775.943**	**346.884.350**	**53,83**	**3,31**	**85,21**	**4,96**	
24	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	579.775.943	346.884.350	53,83	3,31	85,21	4,96	
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**218.048.750**	**211.421.500**	**96,96**	**2,02**	**100,00**	**0,82**	
13	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**56.055.030**	**55.602.500**	**99,19**	**0,53**	**100,00**	**0,82**	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.055.030	55.602.500	99,19	0,53	100,00	0,03	
14	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp 119.283.720**	**Rp 115.206.400**	**96,58**	**1,10**		**1,21**	
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.283.720	**115.206.400**	96,58	**1,10**	100	1,21	

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
15	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**42.710.000**	**40.612.600**	**95,09**	**0,39**	**100**	**0,41**	
27	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.710.000	40.612.600	95,09	0,39	100	0,41	
VIII	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**942.058.850**	**602.224.850**	**64,14**	**5,76**		**10,19**	
16	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**113.000.000**	**27.400.00**	**24,25**	**0,26**	**98,27**	**1,87**	
28	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	113.000.000	27.400.00	24,25	0,26	98,27	1,87	
17	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**829.054.850**	**576.824.850**	**69,58**	**5,50**	**97,33**	**8,32**	
29	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	829.054.850	576.824.850	69,58	5,50	97,33	8,32	
IX	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rp 379.940.761**	**Rp 345.346.00**	**90,89**	**3,29**		**5,56**	
18	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**93.442.746**	**91.920.000**	**98,37**	**0,88**	**100**	**1,69**	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/KotaKabupaten/Kota	93.442.746	91.920.000	98,37	0,88	100	1,69	

19	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**227.550.745**	**199.591.000**	**87,71**	**1,90**	**100**	**2,89**	
No	**URAIAN**	**TARGET (Rp)**	**PROGRES/ PERKEMBANGAN**					
			REALISASI KEUANGAN			**REALISASI FISIK**		
			Rp	**%**	**TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)**	**%**	**TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)**	
1	**2**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot	227.550.745	199.591.000	87,71	1,90	100	2,89	
20	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**58.947.270**	**53.835.000**	**91,33**	**0,51**	**100**	**0,98**	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.947.270	53.835.000	91,33	0,51	100	0,98	
	TOTAL	**10.489.176.649**	**7.394.496.595**		**70,50**		**94,22**	

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 10.489.176.649- atau 70,50 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 7.394.496.595,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tahun 2025, uraian kegiatan beserta outputnya adalah seperti tabel dibawah ini sebagai berikut

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. dibawah ini sebagai berikut

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 12 program dan 29 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
    a. Merupakan Urusan Sosial

       Capaian Indikator Urusan Sosial sebesar 50% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat.
2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
    a. Merupakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        - ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80%pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Indeks Pembangunan Gender.
        - ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80%pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan.
        - ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 100% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 87,5% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Informasi Layanan Anak.

b. Merupakan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 12 Bulan pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Indikator kinerja merupakan target-target capaian per tahun yang diharapkan dan tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara rincian target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas ini mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi:
   - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
   - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan RPJMD 2025-2029*, visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah* "***Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah"***

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan

Berkelanjutan.

3. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Tabel 2.7
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1
Penata Tk. I	Eselon III.a	1
Pembina	Eselon III.b	2
Penata Tk. I	Eselon III.b	1
Penata Tk.I	Eselon IV.a	1
Penata Tk.I	Jabatan Fungsional	6
Penata Muda Tk. I	Jabatan Fungsional	5
Penata Muda	Jabatan Fungsional	5
Pengatur Tk. I	Jabatan Pelaksana	4
PPPK	Staf	1
Jumlah		**27**

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

yang berjumlah 27 orang sedangkan ASN berjumlah 26 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang, jabatan fungsional berjumlah 6 orang, jabatan pelaksana berjumlah 14 orang dan PPPK berjumlah 1 orang.

a. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
1	ASN :	S2	: 1
		S1	: 21
		D4	: 0
		D3	: 0
		SMA/SMK	: 5
Jumlah		**27**	

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	9	18
Jumlah	**9**	**18**

Sebaran sumber daya aparatur yang belum merata di setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Ketidakseimbangan ini terlihat dari kekurangan tenaga ahli di beberapa unit kerja, sementara di unit lain terdapat kelebihan tenaga administrasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menimbulkan beban kerja yang tidak merata di antara aparatur.

Sebagai solusi, kebijakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan sumber daya di bidang-bidang prioritas, termasuk tenaga profesional di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk secara fleksibel merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan spesifik, seperti pekerja sosial, konselor, atau tenaga pendamping. Selain itu, proporsi aparatur perempuan juga menjadi perhatian dalam kebijakan ini, sejalan dengan komitmen untuk mendukung kesetaraan gender. Dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam peran strategis, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sensitivitas gender dalam pelayanan publik yang diberikan.

Terkait dengan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencapaian program nasional dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah seperti Tabel dibawah ini:

Table 2.9

Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Indikator Capaian Program Prioritas K/L	Misi Bupati	Program/Kegiatan PD

1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra) selama 12 bulan (Dokumen)	Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.	Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi
2	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
3	Penanganan anak korban kekerasan yang terpadu	Mengembangkan Kehidupan Masyarakat yang beraklakul Karimah dan berpayungkan Budaya Melayu	Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A Kabupaten Kepulauan Anambas

Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar intervensi (pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial, bantuan dan perlindungan sosial) masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS belum tersedianya tempat pelayanan yang layak untuk kegiatan Jaminan Sosial Bagi PMKS;
3. Minimnya kebutuhan dasar bagi korban pasca;
4. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi pmks yang optimal;
5. Pendayagunaan peran serta masyarakat baik melalui organisasi nirlabadan dunia usaha belum terarah sehingga pencapainya belum optimal;

6. Kurangnya pengetahuan perangkat daerah, *stakeholder*dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender;
7. Belum terbentunya Potensi Sumber Kesejahteraaan Sosial (PSKS) di Kabupaten;
8. Belum terdapatnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
9. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas.

   Peluang yang dapat di identifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

   1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
   2. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
   3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial;
   4. Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
   5. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
   6. Pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;
   7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 meliputi:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS akan dilakukan dengan sistem panti maupun nonpanti serta peningkatan peran kelembagaan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat, mengingat diseseuaikan dengan SOTK baru yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat yaitu pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain.
4. Minimnya pemahaman istilah Gender dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas baik di tingkat aparatur maupun kemasyarakatan sehingga masih banyaknya persepsi yang keliru bahwa Gender diartikan dengan salah satu jenis kelamin tertentu yaitu perempuan.
5. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat Responsif Gender.
6. Focal Point di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dibentuk tetapi belum berjalan dengan baik.
7. Lemahnya permodalan yang dimiliki kelompok usaha mikro sehingga kegiatan usaha sering tidak stabil.
8. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Belum terbetuknya Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Bebasis Masyarakat (PATBM).
10. Masih adanya kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.
11. Belum terbentuknya organisasi wanita yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
12. Peran serta Komisi Pengawasan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perilindungan Anak (PA).

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.198.300.710**
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%	142.444.500
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	-	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	-
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	42.444.500	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	142.444.500
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppp a	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	-	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	-
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah yang disusun	1Dokumen	-	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah yang disusun	1Dokumen	-

1.06.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%	4.985.035.568
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Dinsosppa	Persentase ASN yang dibayarkan gaji Dan tunjangannya	28 Orang/bulan	4.743.886.576	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Dinsosppa	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dantunjangannya	28 Orang/bulan	Rp4.743.886.576
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	150.120.000	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	Rp150.120.000
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Lpaoran Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.028.992	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Bapeda	Jumlah Lpaoran Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp31.028.992
1.06.01.2.03	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**Rp75.200.000**
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lingkup Dinsosppppa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporam	-	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	Rp75.200.000
1.06.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Atribut Perlengkapan Kantor	47 Orang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Atribut Perlengkapan Kantor	47 Orang	-

	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Dinsospp pa	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Paket	-	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yangdiadakan	1 Paket	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100%	**Rp957.601.097**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Paket	19.500.000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Paket	Rp50.500.000
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yang diadakan	50 Paket	148.667.897	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yang diadakan	50 Paket	Rp200.667.897
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Paket	23.500.000	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Paket	Rp50.500.000
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Paket	26.101.005	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Paket	Rp50.000.000
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 Paket	22.325.450	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 Paket	Rp50.000.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-	-	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-	-
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	355.933.200	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp355.933.200
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	**Rp148.893.124**
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Lingkup dinsosppa	Jumlah kendaran perorangan dinas/	4 Unit	-	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Lingkup Dinsosppa	Jumlah kendaran perorangan dinas/	4 Unit	-

		Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas jabatan yang diadakan				Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas jabatan yang diadakan		
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Dinsosppa	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	148.893.124	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Dinsosppa	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp148.893.124
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**Rp774.026.361**
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	94.750.000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Rp110.750.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	74.300.000	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp74.300.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	588.976.361	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp588.976.361
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	Rp115.100.060
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	19.680.060	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	Rp59.680.060

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara dan Bayarkan Pajaknya				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara dan Bayarkan Pajaknya		
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	25.420.000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Rp55.420.000
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**Rp471.790.000**
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan Pembinaan	3 Orang		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan Pembinaan	3 Orang	Rp471.790.000
	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	71.790.000	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Rp471.790.000
	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	-	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	-
	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**					**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**600.000.000**
1.06.04.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86 Orang		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86 Orang	600.000.000
	12 Pemberian Layanan Rujukan	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenagan Kabupaten/Kota	24 Orang	176.045.000	12 Pemberian Layanan Rujukan	Lingkup Bappeda	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenagan Kabupaten/Kota	24 Orang	600.000.000
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**Rp704.000.000**
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	3295 Orang		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	3295 Orang	**Rp704.000.000**
	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1000 Orang	133.135.842	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1000 Orang	Rp400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Keluara yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1141 Keluarga	100.000.000	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Keluara yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1141 Keluarga	Rp304.000.000
	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	4.000.000	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	5.000.000
	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Lingkup Dinsospppa	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	100 Orang	-
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**400.000.000**
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsospppa	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	95%		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsospppa	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	95%	400.000.000
	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi , Sosialsiasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	61.955.000	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi , Sosialsiasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Lingkup Dinsos pppa				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				500.000.000
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten yang Responsif Gender	40%		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten yang Responsif Gender	-	200.000.000
	04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	122.000.000	04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	200.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	-	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	-	-	300.000.000

	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Komuniamsi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen	130.000.000	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Komuniamsi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	-	300.000.000
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		Lingkup Dinsosppa				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabuoaten/Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabuoaten/Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2Layanan	-	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-

2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsospppa	-	-	-
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	58Orang	-	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)**					**PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)**				**600.000.000**
2.08.0.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	-	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	-	-	-
	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	-	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organiasasi	-
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Keterwakilan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas di Jambore Anak Provinsi dan hari Anak Nasional	3	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Keterwakilan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas di Jambore Anak Provinsi dan hari Anak Nasional	3	600.000.000
	01 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	140.000.000	01 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsospppa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	600.000.000
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Lingkup Dinsospppa	-	-	-	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Lingkup Dinsospppa	-	-	**600.000.000**

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota		Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.07.2.02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	600.000.000
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	05 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	100%	215.000.000	05 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	-	600.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yanag memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yanag memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-
Jumlah					**7.694.653.007**					**11.074.090.710**

Jumlah Program : 8

Jumlah Kegiatan : 15

Jumlah Sub Kegiatan : 27

Jumlah Program : 8

Jumlah Kegiatan : 15

Jumlah Sub Kegiatan : 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial adalah sebagai berikut

- VISI Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: : ‘‘***Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”***

Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

- Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosia

- Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3.3**

Tabel 3.3 Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

3. **Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik,** ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikuti:

Tabel 3.4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosia

- Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial
  Sebagai SKPD yang mengurusi bidang Sosial pada tingkat provinsi,

Dinas Sosial provinsi merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau harus bersinergi dengan Tujuan Kementerian Sosial sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut:

- Tujuan Kementerian Sosial
  - Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
- Tujuan Dinas Sosial
  - Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut**:**

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kementrian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan focus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang social, politik dan hukum dengan focus prioritas.
3. Bidang social, focus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
4. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif.
5. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
6. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

7. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
8. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
9. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
10. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
11. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.
12. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2016-2021, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generic yaitu :
    1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempauan (teknis)
    2) Program Perlindungan Anak (teknis)
    3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik).

3.2. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri

3.2.1. Telaah Renstra Dinas Sosial

Visi RPJMD

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera,
Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim."

Dalam visi tersebut terdapat **lima kata kunci** yaitu *bunda tanah Melayu*, *sejahtera*, *berakhlak mulia*, *ramah lingkungan*, *unggul di Bidang Maritim*. Adapun lima kata kunci tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Bunda Tanah Melayu** mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya Melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar;
2. **Sejahtera** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb.). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial);
3. **Berakhlak Mulia** mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat Melayu di mana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama;
    1. **Ramah Lingkungan** mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai;
    2. **Unggul di Bidang Maritim** diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman,

sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepulauan Riau; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan.

Misi, Program Unggulan, dan Program Pembangunan RPJMD

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamais, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;

- Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Misi ini difokuskan pada:

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
b. Peningkatan kualitas SDM kesehatan;
c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular;
d. Percepatan penurunan kemiskinan;
e. Peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan;
f. Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;

g. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Program unggulan pada misi ini meliputi:

a. Program Kesehatan Masyarakat;
b. Program Pelayanan Kesehatan;
c. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Program Pengentasan Kemiskinan;
f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
g. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
j. Program Perlindungan Anak;
k. Program Rehabilitasi Sosial;
l. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
m. Program Penanggulangan Bencana.

Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi:

a. Program Keluarga Berencana;
b. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
e. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
f. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
- Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
- Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;

- Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Peran Dinas Sosial dalam Pencapaian Visi-Misi RPJMD

Berdasarkan misi, program unggulan, dan program pembangunan RPJMD tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan mendukung pencapaian **Misi ke-4 RPJMD** dalam hal *penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*.

Fokus Misi ke-4 RPJMD yang didukung meliputi:

1. Percepatan penurunan kemiskinan;
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.

Program unggulan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Program Pengentasan Kemiskinan;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Sosial.

Program pembangunan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.2.2. Telaah Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari 9 Misi Gubernur, BPPPA Provinsi Kepri mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu :

- Meningkatkan derajat kesehatan, **kesetaraan gender**, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi terhadap pencapaian misi ke 4 " **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**", khususnya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan rensponsif gender dan anak
4. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan perempuan dalam mengembangkan kualitas hidup perempuan
5. Meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga penyedia layanan keberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Mengurangi dan mengendalikan kekerasan terhadap perempuan, dan anak, perdagangan orang, penyebaran penyakit menular dan HIV/Aids serta melindungi anak berkebutuhan khusus, lansia, ditable dalam menjamin ketahanan keluarga
7. Mewujudkan keseimbangan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender antar kabupaten kota dan memperluas akses, partisipasi, dan control masyarakat dalam pembangunan keberdayaan perempuan dan anak
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merata dan terjangkau.

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastrukutur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

   Dengan focus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan peventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

   Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

   Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

   Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiscal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Keberhasilan berbagai sumber merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan RPJMD 2021-2026*, visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah* ***Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah****.* Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis,

dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.

7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
8. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.
9. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata.
10. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif” dan Misi Ke-5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merupakan Perwujudan Visi dan Misi yang ada. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

   Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

   - Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
   - Meningkatnya Kualitas Hidup Anak
2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)

   Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

   - Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin , Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial
3. Meningkatya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

   Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

   - Meningkatnya Tata Kelola Yang Efektif Dan Efesien

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (%)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1.	Meningkatkan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks ketimpangan gender (IKG)	60 %	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	100
			60%	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Rasio kekerasan terhadap anak	100

			85%		rasio informasi layak anak	100
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	70%	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin dan PMKS yang tertangan	100
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	BB (78)	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).	BB (69)

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 3.6

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif	Sumber Dana
1		*2*	*3*
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.586.897.852**	**APBD**
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**-**	**APBD**
	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	**APBD**
	1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	**APBD**
	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	**APBD**
	1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	**APBD**
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**5.107.479.223**	**APBD**
	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.973.309.223,46	**APBD**
	1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.170.000,00	**APBD**

	1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	**APBD**
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**16.260.000,00**	**APBD**
	1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.260.000,00	**APBD**
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**-**	**APBD**
	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	**APBD**
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**227.081.228**	**APBD**
	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.862.000,00	**APBD**
	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	**APBD**
	1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.983.400,00	**APBD**
	1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.215.000,00	**APBD**
	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.200.000,00	**APBD**
	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.020.828,18	**APBD**
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**113.226.330,00**	**APBD**
	1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	**APBD**
	1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.226.330,00	**APBD**
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**122.851.071**	**APBD**
	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.103.490,00	**APBD**
	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	**APBD**
	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.747.581,00	**APBD**
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**-**	**APBD**
	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	**APBD**
	1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	**APBD**

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**3.850.000,00**	**APBD**
1.06.02.2.03 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	**3.850.000,00**	**APBD**
1.06.02.2.03.02 peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	3.850.000,00	**APBD**
1.06.02.2.03.04 peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	-	**APBD**
1.06.02.2.03.05 peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	-	**APBD**
1.06.04 PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	**138.029.658,00**	**APBD**
1.06.04.2.01 Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	**138.029.658,00**	**APBD**
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Pemakanan	-	APBD
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	-	APBD
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	-	APBD
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	APBD
1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	APBD
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	138.029.658,00	APBD
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**1.174.110.685**	**APBD**
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**1.174.110.685**	**APBD**
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.560.000,00	APBD
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	28.950.000,00	APBD
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.054.150.685,00	APBD
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	51.450.000,00	APBD
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**51.000,00**	**APBD**

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		51.000,00	**APBD**
	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	APBD
	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	51.000,00	APBD
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**299.977.681**	**APBD**
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**295.979.381,00**	**APBD**
	2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	295.979.381,00	APBD
2.08.02.2.01 pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah		**3.998.300,00**	**APBD**
	2.08.02.2.04 sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	APBD
	2.08.02.2.08 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	3.998.300,00	APBD
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**333.640.000**	**APBD**
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**130.000.000,00**	**APBD**
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		130.000.000,00	APBD
2.08.03.2.02 Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**115.240.000,00**	**APBD**
	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.240.000,00	APBD
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**88.400.000,00**	APBD
	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.400.000,00	APBD

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**14.868.000,00**	**APBD**
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**-**	APBD
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah , Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	APBD
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		14.868.000,00	**APBD**
	2.08.06.2.02.01 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.868.000,00	APBD
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**202.252.000,00**	**APBD**
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**-**	APBD
	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	APBD
2.08.07.2.02 Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**202.252.000,00**	**APBD**
	2.08.07.203.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	APBD
	2.08.07.2.02.05 penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	202.252.000,00	APBD
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**-**	APBD
	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD
	JUMLAH	**7.753.625.876**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								7.753.625.876					10.789.255.500
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.763.559.680					10.789.255.500
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								5.763.559.680,					9.666.256.333
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.586.897.852					9.666.256.333
1	06	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-					43.653.555
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	100 %	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	-
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	100 %	3 Laporan	100 %	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan layanan penunjang urusan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Persentase dokumen perencanaan, dokumen	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan,	100 %	2 Dokumen	100 %	-	Dana Transfer Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	43.455.026

						pemerintah daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	Terempa					Dana Alokasi Umum		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	100 %	2 Laporan	100%	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	-
5	01	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.107.479.223					5.023.556.569

1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	28 Orang/bulan	100 %	4.973.309.223,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.906.025.366
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	134.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	155.233.000
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	117.531.203
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-					435.042.674
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								227.081.228					605.011.223
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	11.862.000,00,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.400.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Paket	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	150.000.000
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	1.983.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	24.400.000
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	13.215.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	27.023.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	23.322.022

								dukungan SPBE									
	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat,aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Laporan	100 %	130.020.828,18,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	100 Laporan	400.366.255
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								113.226.330,00				152.153.365
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Disediakan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milikdaerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	-	-		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Disediakan	4 Unit	-
1	056	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milikdaerah	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	113.226.330,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.222.256
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.851.071				760.223.365
1	06	01	2.01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran danlangganan lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	82.103.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	97.256.255
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran danlangganan lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran danlangganan lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	40.747.581,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	590.658.367
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-					46.236.026
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Unit	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	20.156.444
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	33 Unit	100 %	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	26.256.222
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								3.850.000,					80.774.365
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								3.850.000,					80.774.365
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentasi PSKS yang berpatisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	3.850.000,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	80.774.365
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentasi PSKS yang berpatisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
						Persentasi PSKS yang berpatisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Sertifikat	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10 Sertifikat	-
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								138.029.658,00					180.236.222
1	06	04	2.01		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								138.029.658,00					180.236.222
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								138.029.658,00					

						Persentasi PMKS yang terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenagan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	24 Orang	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenagan Kabupaten/Kota	24 Orang	146.873.612
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1.174.110.685					240.485.365
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1.174.110.685					240.485.365
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentasi data Fakir Miskin yang tedata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1000 Orang	100 %	39.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	20 Laporan	140.356.255
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentasi data Fakir Miskin yang tedata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1141 Orang	100 %	28.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	1141 Orang	110.000.000
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													

						Persentasi data Fakir Miskin yang tedata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1000 Orang	100 %	1.054.150.685,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	1000 Orang	5.000.000
1	06	06	2.02	0001	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
						Persentasi data Fakir Miskin yang tedata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	100 Orang	100 %	51.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yan di data	100 Orang	-
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								51.000					70.025.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
						Persentasi Penanganan Bencana	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulanga n Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Penanganan Bencana	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	-	100 %	51.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	4 Laporan	95.644.063
2	08	02			PRORAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								299.977.681					270.000.000
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								3.998.300,00					125.000.000
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													

						Persentasi Perangkat Daerah memiliki Focal Point aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pengarusutamaan Gender	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Perangkat Daerah	100 %	3.998.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								295.979.381,00					140.000.000
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													

						Persentasi Perangkat Daerah memiliki Focal Point aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pengarusutamaan Gender	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1 Dokumen	100 %	295.979.381,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	140.000.000
2	08	02			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								333.640.000					-
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kewenangan Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Layanan	100 %	115.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	-
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													

						-	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	58 Orang	100 %	88.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	58 Orang	-
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)									14.868.000,00				150.000.000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									-				-
						Persentasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80%	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		150.000.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	08	06	2.02	0001	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Persentasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80%	-	-	14.868.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									202.252.000,00				220.000.000
2	08	01	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
2	08	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						-	-	-	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
2	08	07	2.02		Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat									215.000.000				220.000.000

					Daerah Kabupaten/Kota													
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota													
						-	-	-	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		-		-	-	-	-
2	08	07	2.02	0005	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	-	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		202.252.000,00		-	-	-	220.000.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yanag memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	-	-	-
2	08	07	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						-	-	-	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		-		-	-	-	-
TOTAL													**7.753.625.876**					**10.789.255.500**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindaklanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada dan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan (Renja) ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

USMAN, ST.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

JL. Imam Bonjol No.50 Kel. Tarempa Kecamatan Siantan,
Kabupaten Kepulauan Anambas

KATA PENGANTAR

Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan berpangkal dari dan untuk penduduk. Adalah tidak mungkin dapat tersusun suatu perencanaan pembangunan yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Program/Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, Alhamdulillah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala dinas
Kependudukan dan pencatatan sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Heryana, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19741130 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.3.1 Maksud 4

1.3.2 Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 16

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 16

3.3 Program Dan Kegiatan 18

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB 5 PENUTUP 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih mengingkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Perubahan Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman kepada Surat Badan Perencananaan Pembangunan Daerah Nomor B/000.7.2.4/125/BAPPEDA/SD/7/2025 tanggal 15 Juli 2025 Hal Permintaan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu urusan wajib daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban kepada Warga Negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Kepmendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaiman telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025;

1.3.2 Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
2. Mengukur kinerja pelayanan bidang Administrasi Kependudukan;
3. Menjaga kesinambungan antara RPJMD , Renstra dan Renja untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja, landasan hukum yang

mendasari penyusunan dan substansi Rancangan Akhir Perubahan Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada dokumen Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan DPPA PD Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan presentase realisasi sebesar 32,31% dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 41,11% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Jumlah Anggaran, Rp. 0
      - Jumlah Realisasi Rp. 0
      - Realisasi Keuangan (%) = 0 %
      - Realisasi Fisik (%) = 0 %

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Jumlah Anggaran, Rp. 7.522.195.023
   - Jumlah Realisasi Rp 2.367.019.601
   - Realisasi (%) = 31,47%
   - Realisasi Fisik (%) = 33,33%

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Jumlah Anggaran, Rp. 207.347.950
   - Jumlah Realisasi Rp. 43.915.159
   - Realisasi Keuangan (%) = 21,18%
   - Realisasi Fisik (%) = 50,00%

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Jumlah Anggaran, Rp. 0
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0%
   - Realisasi Fisik (%) = 0%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Jumlah Anggaran, Rp. 321.084.630
   - Jumlah Realisasi Rp. 214.594.214
   - Realisasi Keuangan (%) = 66,83%
   - Realisasi Fisik (%) =50,00%

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Jumlah Anggaran, Rp. 65.745.878
   - Jumlah Realisasi Rp. 950.000
   - Realisasi Keuangan (%) = 1,44%
   - Realisasi Fisik (%) = 50,00%

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   - Jumlah Anggaran, Rp. 5.660.000
   - Jumlah Realisasi Rp. 0
   - Realisasi Keuangan (%) = 0 %
   - Realisasi Fisik (%) = 50,00%

b. Penataan Pendaftaran Penduduk

- Jumlah Anggaran, Rp. 1.700
- Jumlah Realisasi Rp. 0
- Realisasi Keuangan (%) = 0 %
- Realisasi Fisik (%) = 50,00%

3. Program Pencatatan Sipil
   a. Pelayanan Pencatatan Sipil
      - Jumlah Anggaran, Rp. 24.014.000
      - Jumlah Realisasi Rp. 4.160.400
      - Realisasi Keuangan (%) = 17,32%
      - Realisasi Fisik (%) = 50,00%
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      - Jumlah Anggaran, Rp. 25.201.800
      - Jumlah Realisasi Rp. 8.796.800
      - Realisasi Keuangan (%) = 34,91%
      - Realisasi Fisik (%) = 50,00%
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
   a. Penyusunan Profil Kependudukan
      - Jumlah Anggaran, Rp. 11.975.200
      - Jumlah Realisasi Rp. 4.615.200
      - Realisasi Keuangan (%) = 38,54%
      - Realisasi Fisik (%) = 50,00%

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	88,33	A
		2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	100%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75	BB
		2	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,10	BB

Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat

yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir satu Program dan dan dua Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pada Program Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (dengan output dokumen KIA/Kartu Identitas Anak), dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak terdapat pembedaan bentuk pelayanan, pelayanan dilakukan sama dan setara baik kepada anak berjenis kelamin laki-laki ataupun kepada anak berjenis kelamin perempuan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), demikian juga pada kegiatan pelayanan identitas penduduk tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan baik kepada pemohon laki-laki ataupun kepada pemohon perempuan, semua diperlakukan sama, dan dapat disampaikan bahwa isu gender kiranya lebih terlihat pada pelayanan akte kelahiran dimana pemohon yang secara administrasi tidak dapat melampirkan buku nikah/akte perkawinan sebagai syarat penerbitan akte kelahiran maka dokumen akan tetap diproses dengan pencatatan sebagai anak ibu. Kiranya 2 (dua) kegiatan diatas menjadi pengarusutamaan gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan taget indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada program Nasional sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu tercantum dalam *Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas*

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	Nilai	88,33	85,40	96,70%
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Persen	60,00%	60,00%	100%
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	63,00	-	-
4.	Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	70,36	94,07%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan kepada OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna pencapaian visi misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis. Baik berupa keadaan, kondisi, ataupun peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik pada tahun lalu, namun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada kinerja pelayanan administrasi kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah pemegang Kartu Keluarga Lama.
   Masih banyak sekali penduduk yang tidak melakukan *update* data Kartu Keluarganya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus Kartu Keluarga pada saat ada permasalahan ataupun kepentingan mendesak seperti menikah, sakit dan sebagainya, sebagian masyarakat kurang menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang akurat dan valid, karena selain untuk kepentingan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional.

2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran.

   Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki akte kelahiran yang disebabkan oleh beberapa faktor.

3. Sulitnya akses transportasi menuju Pusat Pemerintahan.

   Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau yang terhubung oleh lautan, dengan pelayanan terpusat di Ibu Kota Pemerintahan yang posisinya jauh dari beberapa kecamatan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya semangat masyarakat untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki. Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

   Dengan cukup tingginya pencapaian kinerja program tersebut, kiranya perlu untuk direncanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

4. Kurangnya kualitas data kependudukan.

   Selama ini fakta yang terjadi di masyarakat adalah :

   - Data penduduk yang digunakan pada saat pemilu atau pilkada masih belum valid padahal sumber datanya dari *Data Base* Kependudukan di Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementarian Dalam Negeri RI;
   - Data penduduk dari Disdukcapil selalu berbeda dengan data penduduk dari BPS.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat, usulan mengenai program dan kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil tidak ditemui. Ini dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana (infra struktur). Hal ini disebabkan karena masih rendah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arti dokumen kependudukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pemerintah dalam hal mewujudkan tertibnya Administrasi Kependudukan secara Nasional diatur melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 mengacu pada program Nasional sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitasnya sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN				Target Kinerja Pada Tahun					
	Tujuan	Sasaran		Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas Serta Pemanfaatan Data Kependudukan yang Akurat dan Bisa dipertanggungjawabkan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33 /A	88,34/A	88,34/A
				Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB
				Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,85/BB	74/BB	74,50/BB	80/A	80,10/A	80,10/A

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 diarahkan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
   1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   2. Pencapaian target nasional kepemilikan KTP-el;
   3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
   4. Pencapaian SPM.

Untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan terakomodir dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud direncanakan tersebar di seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun rincian program dan kegiatan pada Akhir Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan APBD 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.116.373.480**	**APBD**	-		**7.659.918.663,15**
1	**2.12.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan**		**100%**	**-**	**APBD**	-	**100%**	**200.000**
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000

2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000
2	**2.12.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu**		**100%**	**7.522.195.023**	**APBD**	-	**100%**	**6.981.039.022,57**
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	7.452.443.023	APBD	-	100%	6.842.443.022,57
4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000
5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	100%	69.752.000	APBD	-	100%	138.496.000
3	**2.12.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**		**100%**	**-**	**APBD**	-	**100%**	**100.000**
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinasnya	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000

4	**2.12.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dina**		**100%**	**207.347.950**	**APBD**	-	**100%**	**241.749.132,58**
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapil KKA	5 Jenis	12.964.048	APBD	-	12 Bulan	12.964.048
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	Disdukcapil KKA	5 Jenis	24.967.368	APBD	-	12 Bulan	24.967.368
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapil KKA	10 Jenis	12.998.922	APBD	-	10 Jenis	12.998.922
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	3 Jenis	19.801.000	APBD	-	3 Jenis	19.801.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	26.052.783	APBD	-	5 Jenis	40.453.965,58

12	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	5 Kali	3.450.000	APBD	-	5 Kali	3.450.000
13	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapil KKA	100 Kali	107.113.829	APBD	-	100 Kali	127.113.829
5	**2.12.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya**		**100%**	**321.084.630**	**APBD**	-		**371.084.630**
14	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	41.081.000	APBD	-	33 Jenis	41.081.000
15	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	121.046.800	APBD	-	100%	171.046.800
16	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	158.956.830	APBD	-	100%	158.956.830
6	**2.12.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah berkondisi baik**		**100%**	**65.745.878**	**APBD**	-	**100%**	**65.745.878**

17	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	6.187.500	APBD	-	100%	6.187.500
18	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	11.735.778	APBD	-	100%	11.735.778
19	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	47.822.600	APBD	-	100%	47.822.600
II	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**5.661.700**	**APBD**	-		**109.298.064**
7	**2.12.02.2.01**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan**		**100%**	**5.660.000**	**APBD**	-		**109.296.364**
20	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-		100.000
21	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	2.440.000	APBD	-	1000 Dokumen	35.854.073

22	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	3.220.000	APBD	-	3500 Dokumen	73.342.291
8	**2.12.02.2.02**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk**		**100%**	**1.700**	**APBD**	-		**1700**
23	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	1.700	APBD			**1700**
III	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**24.014.000**	**APBD**	-		**24.014.000**
8	**2.12.03.2.01**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil**		**100%**	**24.014.000**	**APBD**	-		**24.014.000**
22	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	24.014.000	APBD	-	1000 Dokumen	24.014.000
IV	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**25.201.800**	**APBD**	-		**25.201.800**

9	**2.12.04.2.03**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**25.201.800**	**APBD**	-		**25.201.800**
23	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	22.411.800	APBD	-	5 OPD	22.411.800
24	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	2.790.000	APBD	-	3 Kecamatan	2.790.000
V	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**11.975.200**	**APBD**			**14.135.200**
10	**2.12.05.2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat**			**11.975.200**	**APBD**	**-**		**14.135.200**
25	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	11.975.200	APBD	-	100 Buku	14.135.200
JUMLAH						**8.183.226.180**				**7.832.567.727,15**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun Rincian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan APBD 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.116.373.480**	**APBD**	-		**7.659.918.663,15**
1	**2.12.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan**		**100%**	**-**	**APBD**	-	**100%**	**200.000**
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000

2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000
2	**2.12.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu**		**100%**	**7.522.195.023**	**APBD**	-	**100%**	**6.981.039.022,57**
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	7.452.443.023	APBD	-	100%	6.842.443.022,57
4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000
5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	100%	69.752.000	APBD	-	100%	138.496.000
3	**2.12.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**		**100%**	**-**	**APBD**	-	**100%**	**100.000**
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinasnya	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-	100%	100.000

4	**2.12.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dina**		**100%**	**207.347.950**	**APBD**	-	**100%**	**241.749.132,58**
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapil KKA	5 Jenis	12.964.048	APBD	-	12 Bulan	12.964.048
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	Disdukcapil KKA	5 Jenis	24.967.368	APBD	-	12 Bulan	24.967.368
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapil KKA	10 Jenis	12.998.922	APBD	-	10 Jenis	12.998.922
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	3 Jenis	19.801.000	APBD	-	3 Jenis	19.801.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	26.052.783	APBD	-	5 Jenis	40.453.965,58

12	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	5 Kali	3.450.000	APBD	-	5 Kali	3.450.000
13	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapil KKA	100 Kali	107.113.829	APBD	-	100 Kali	127.113.829
5	**2.12.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya**		**100%**	**321.084.630**	**APBD**	-		**371.084.630**
14	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	41.081.000	APBD	-	33 Jenis	41.081.000
15	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	121.046.800	APBD	-	100%	171.046.800
16	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	158.956.830	APBD	-	100%	158.956.830
6	**2.12.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah berkondisi baik**		**100%**	**65.745.878**	**APBD**	-	**100%**	**65.745.878**

17	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	6.187.500	APBD	-	100%	6.187.500
18	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	11.735.778	APBD	-	100%	11.735.778
19	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	47.822.600	APBD	-	100%	47.822.600
II	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**5.661.700**	**APBD**	-		**109.298.064**
7	**2.12.02.2.01**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan**		**100%**	**5.660.000**	**APBD**	-		**109.296.364**
20	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil KKA	100%	-	APBD	-		100.000
21	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	2.440.000	APBD	-	1000 Dokumen	35.854.073

22	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	3.220.000	APBD	-	3500 Dokumen	73.342.291
8	**2.12.02.2.02**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk**		**100%**	**1.700**	**APBD**	-		**1700**
23	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	1.700	APBD			**1700**
III	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**24.014.000**	**APBD**	-		**24.014.000**
8	**2.12.03.2.01**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil**		**100%**	**24.014.000**	**APBD**	-		**24.014.000**
22	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	24.014.000	APBD	-	1000 Dokumen	24.014.000
IV	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**25.201.800**	**APBD**	-		**25.201.800**

9	**2.12.04.2.03**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**25.201.800**	**APBD**	-		**25.201.800**
23	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	22.411.800	APBD	-	5 OPD	22.411.800
24	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	2.790.000	APBD	-	3 Kecamatan	2.790.000
V	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**11.975.200**	**APBD**			**14.135.200**
10	**2.12.05.2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat**			**11.975.200**	**APBD**	**-**		**14.135.200**
25	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	11.975.200	APBD	-	100 Buku	14.135.200
JUMLAH						**8.183.226.180**				**7.832.567.727,15**

Adapun pendanaan Program dan Kegiatan diatas direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan kependudukan dapat disejalankan terhadap rumusan RPJMD periode berikutnya (2021-2026), serta dalam Perubahan RKPD 2025. Tentunya apa yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada telah ada baik dalam hal sumber dana ataupun dalam hal sumber daya manusia.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini, Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Renja ini, maka :

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;

3. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini yang kemudian menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2025;

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEPULAUAN ANAMBAS

Heryana, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19741130 200212 2 003



RANCANGAN AKHIR

RENJA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala petunjuk dan ridhanya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelayanan masyarakat dalam hal merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Sebagai acuan penyelenggaraan layanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini berisi tentang prioritas Program dan Indikasi Kegiatan maupun Sub Kegiatan di Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dengan mempedomani sasaran yang telah tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi harus senantiasa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026. Semoga bermanfaat.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JAPRIZAL, S.Kom., M.A
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750120 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II 9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 41
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54
BAB III 55
TUJUAN DAN SASARAN 55
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 55
3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. 55
3.1.2 Badan Pusat Statistik 57
3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 71
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 74
BAB IV 92
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 92
BAB V 102
PENUTUP 102

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat Perjanjian Kinerja (PK) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan tahunan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Pembangunan Infrastuktur Telekomunikasi, Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengintegrasian Data di Seluruh OPD, Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas, Keamanan Informasi, Menyebarluaskan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK, serta Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media sehingga dapat terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Penunjang Layanan Telekomunikasi dan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun rancangan tema Pembangunan dan prioritas Pembangunan tahun 2026, adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.**
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.**
3. **Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.**

4. **Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.**
5. **Memperkuat Reformasi Birokrasi.**

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan e-Government, pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah Menentukan arah kebijakan pembangunan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian di Tahun 2026 dan Mewujudkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;

4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berisi indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ditentukan dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2024.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terakomodir dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 realisasi fisik di setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan rata-rata sudah mencapai 94,75%dengan realisasi keuangan 75,98%.

Capaian keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik dan Keuangan

s.d 31 Desember 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Persentase (%) Realisasi s.d 31 Desember 2024		Realisasi	Efisiensi
		Keuangan	Fisik		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.317.455.512**	**85,32**	**86,19**	**5.390.345.554**	**927.109.958**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**45.956.600**	**56.09**	**98.55**	**25.775.500**	**20.181.100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.237.100	53,42	97,11	23.096.000	20.141.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.719.500	98,53	100	2.679.500	40.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.611.661.617**	**87,84**	**87,50**	**4.050.708.389**	**560.953.228**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.387.597.617	89,33	100	39.919.489.389	468.108.228
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.900.000	58,68	100	110.850.000	78.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000	49,38	50	790.000	810.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.564.000	58,33	100	19.579.000	13.985.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**684.199.881**	**78,81**	**68,49**	**466.296.527**	**217.903.354**
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.111.623	99,12	100	5.066.834	44.789
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.912.368	0	0	0	9.912.368
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.752.152	99,59	100	14.691.767	60.385
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.083.752	75,91	79,45	38.777.500	12.306.252
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.574.986	90,23	100,00	54.656.500	5.918.486
Fasilitas Kunjungan Tamu	20.250.000	0	0	0	20.250.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.515.000	67,58	100	355.103.926	169.411.074
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**29.441.712**	**99,60**	**100**	**30.715.049**	**118.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.218.000	97,20	100	4.100.000	118.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.223.712	100	100	25.223.712	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**870.860.706**	**91,56**	**97,47**	**797.371.926**	**73.488.780**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.262.638	94,82	96,50	60.936.111	3.326.527
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.260.000	88,38	100	36.554.485	4.805.515
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765.238.068	91,46	95,93	699.881.330	65.356.738
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**75.334.996**	**27,70**	**65,14**	**20.869.500**	**54.465.496**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.364.996	25,34	30,28	17.579.500	51.785.496
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	55,11	100	3.290.000	2.680.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**4.097.751.864**	**49,39**	**72.21**	**2.023.952.106**	**2.073.799.758**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**4.097.751.864**	**49,39**	**72.21**	**2.023.952.106**	**2.073.799.758**
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.187.000	44,08	82.35	22.122.300	28.064.700
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	280.013.542	37,59	88.15	105.244.500	174.769.042
Pelayanan Informasi Publik	70.950.000	55,77	81.95	39.566.100	31.383.900
Layanan Hubungan Media	3.648.526.922	50,62	90,64	1.846.755.506	1.801.771.416
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	18.050.000	56,86	90,14	10.263.700	7.786.300
Pemyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.024.400	0	0	0	30.024.400
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**3.377.078.356**	**90,24**	**97,17**	**3.047.368.850**	**329.709.506**
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**3.225.161.127**	**90,98**	**97,58**	**2.934.103.428**	**291.057.699**

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	138.848.000	99,99	99,99	138.833.000	15.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.086.313.127	90,57	95,30	2.795.270.428	291.042.699
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**151.917.229**	**74,56**	**96,76**	**113.265.422**	**38.651.807**
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	26.500.000	65,64	99,25	17.393.786	9.106.214
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	101.697.229	79,10	98,82	80.442.636	21.254.593
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	23.720.000	65,05	92,22	15.429.000	8.291.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**161.000.000**	**73,61**	**94,62**	**118.505.364**	**42.494.636**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**161.000.000**	**73,61**	**94,62**	**118.505.364**	**42.494.636**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	75.000.000	77,73	96,98	58.295.700	16.704.300
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41.000.000	64,10	93,29	26.281.664	14.718.336
Membangun Metadata Statistik Sektoral	45.000.000	75,40	93,59	41.275.000	11.072.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**348.999.339**	**81,96**	**89,37**	**286.050.785**	**62.948.554**
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**244.999.834**	**80,12**	**84,06**	**192.296.500**	**48.703.334**
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	244.999.834	80,12	**84,06**	192.296.500	**48.703.334**
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**103.999.905**	**86,30**	**94,67**	**89.754.285**	**14.245.220**
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.999.905	86,30	**94,67**	89.754.285	**14.245.220**

TOTAL	**14.302.285.071**	**76,10**	**87.91**	**13.439.304.811**	**3.436.062.412**

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan

Adapun faktor – faktor penyebab keberhasilan terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
   a. Adanya komitmen para pengambil kebijakan sampai kepada para pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan dengan waktu yang ditetapkan;
   b. Adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antar pejabat PPID Utama dengan pejabat PPID Pembantu di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
   c. Kerjasama dan tanggung jawab atasan dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan
   d. Kemampuan manajeman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
   e. Koordinasi terkait ide atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dengan metode yang efesien dan efektif;
   f. Adanya tolak ukur sehingga adanya kontrol dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
   g. Melakukan evaluasi kegiatan secara rutin sehingga kendala yang dihadapi dapat terkontrol dengan baik;
   h. Adanya rencana pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melakukan monitoring kemajuan kegiatan;
   i. Melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan; dan
   j. Komitmen semua pihak sehingga keberhasilan kegiatan dapat terpenuhi.

2. Urusan Statistik
    a. Komitmen Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Staistik sektoral pada tahun 2025;
    b. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai walidata dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai pembina data;
    c. Tersedianya portal statistik Kabupaten Kepulauan Anambas;
    d. Tersedianya dokumen data statistik sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    e. Tersusunnya metadata variabel kegiatan statistik sektoral dari perangkat daerah sebagai informasi dari data statistik sektoral.

3. Urusan Persandian
    a. Komitmen Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2025;
    b. Koordinasi yang baik dari seluruh Perangkat Daerah dalam penerapan keamanan informasi persuratan;
    c. Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai; dan
    d. Serta kerjasama yang baik dengan pihak stakeholder Pemerintah Daerah Dan Pusat.

Adapun faktor – faktor penyebab tidak terpenuhinya terkait pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target sasaran kinerja yang sudah ditetapkan, sebagaimana sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
    a. Adanya rasionalisasi anggaran;
    b. Masih banyak PPID Pembantu di Perangkat Daerah yang belum memberikan informasi pada publik; dan
    c. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan website PPID.

2. Urusan Statistik
   a. Kurang respon perangkat Daerah dalam mengumpulkan data statistik sektoral;
   b. Belum tersediannya portal Satu Data Anambas;
   c. Belum terselenggaraannya Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
   d. Kurang mengertinya akan pentingnya keamanan informasi;
   e. Capaian kinerja masih belum sinkron dengan indicator kinerja berdasarkan KEPMENDAGRI 050-5889 tahun 2021; dan
   f. Perlunya perbaikan terhadap capaian kinerja yang sesui dengan program kegiatan.

3. Urusan Persandian
   a. Masih banyak stakeholder yang menyepelekan pentingnya dokumen informasi yang berklarifikasi;
   b. Kurang responnya pemerintah pusat terkait pengaduan kendala penggunakan aplikasi berklasifikasi;
   c. Koordinasi masih dinilai lambat; dan
   d. Masih ada infrastruktur yang belum tersedia.

2.1.2 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Rencana Kerja (RENSTRA) Perangkat Daerah

a. Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian penting dan berimplikasi besar dalam upaya pencapaian target Program Renstra Diskominfotik karena dari semua hal ada keterkaitannya, tentang bagaimana kita menginformasikan kepada publik mengenai kinerja, konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kebijakan terkhusus di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

b. Adapun implikasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terselenggara dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 baik dari keterbatasan anggaran, pengembangan akses telekomunikasi, peningkatan kualitas SDM IT dan perekrutan tenaga IT. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan. yaitu menentukan kegiatan yang menjadi prioritas dan melakukan pelatihan secara daring serta melakukan rekrut SDM IT;
c. Tersediannya data statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai data dan informasi acuan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. tersediannya data statistik sektoral yang dapat menjadi bahan evaluasi/pengukuran pembangunan daerah;
e. meningkatnya data keamanan persandian daerah yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah ditandai dengan mulai diterapkannya tanda tangan elektronik pada surat-menyurat;
f. meningkatnya coverage area Radio Pancar Ulang (RPU) yang dapat digunakan untuk komunikasi antar daerah; dan
g. Terpenuhinya penilaian Indeks Keamanan Informasi (IKAMI).

2.1.3 Kebijakan / Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

a. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar reviu setiap triwulan, terutama membahas serapan anggaran agar sesuai dengan tata kelola program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan stakeholders dan Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga akses telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terpenuhi;
d. Mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM IT dengan anggaran yang terbatas sehingga dilakukan secara daring;
e. Mengikuti seminar daring untuk meningkatkan pemahaman bidang IT;
f. Melakukan rekrutmen tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah;
g. Menyusun regulasi dan perencanaan urusan statistik sektoral dan persandian daerah berupa Peraturan Bupati dan penyusunan master plan kegiatan Statistik sektoral dan persandian Daerah;
h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan urusan persandian di daerah untuk memastikan tercapainya target capaian urusan statistik sektoral dan persandian daerah;
i. Meningkatkan sinergi antar instansi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam pemanfaatan data dan pengamanan informasi;
j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan urusan pemerintahan untuk memastikan tercapainya target program kegiatan; dan
k. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan terlaksananya program kegiatan urusan statistik sektoral dan persandian daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kelemahan/kekurangan tersebut sebagai umpan balik (feed back) dari apa yang telah dan akan dilaksanakan untuk di masa yang akan datang.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik s/d Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas (LKJIP)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2024			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(63.00) B	(69,06)B	109,61%	Sangat Baik	Evaluasi Inspektorat KKA
2	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	-	-	-	-	-
		Persentase Pemenuhan Aspek	62,50%	100%	160%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri

3	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	SPBE					
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(85.00) Menuju Informastif	(92,21) Informatif	108,5%	Sangat Baik	Evaluasi Komisi Informasi
4	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	61,90%	100%	161,5%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(286) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	100%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri
Rata-rata Capaian Strategis					**109,80%**	**Sangat Baik**	

KAYUH SERENTAK LANGKAH SEPIJAK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan. Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerjanya seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Sub Kegiatan	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Diskominfotik				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	

2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

		Dilaksanakan Tepat Waktu											
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	100%	8 Orang	8 Orang	-	-	8 Orang	8 Orang	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	

2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100%	1 Paket	3 Paket		-	1 Paket	3 Paket	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100%	1 Paket	4 Paket		-	1 Paket	4 Paket	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100%	1 Paket	2 Paket		-	1 Paket	2 Paket	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100%	1 Laporan	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100%	77 Kali	1 Laporan		-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	1 Unit	4 Unit	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	100%	9 Unit	4 Unit	-	-	9 Unit	4 Unit	

2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100%	1 Laporan	1 Laporan	0%	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100%	6 Unit	16 Unit	0%	-	6 Unit	16 Unit	
					-				-	-			

2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Keterbukaan Informasi Publik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi yang Terpublikasi**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			50 Laporan	50 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			350 Berita	400 Berita	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			80 Informasi	85 Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			1 Layanan	7200 Berita	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1 Layanan	1 Layanan	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya			-	-	3 Orang		-	-	3 Orang	3 Orang	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung			-	3 unit	2 Unit		-	-	3 Unit	2 Unit	

	Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah**			**85,71%**	**92,86%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**92,86%**	**100%**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**-**	**100%**	**100%**	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			30 Unit	93,33%	30 Unit	30 Unit	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	

2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		**-**	**100%**	**100%**	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			1 Unit	70,00%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1 Dokumen	98,15%	100%	-	1 Dokumen	-	98,15%	100%	

2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**-**	**100%**	**100%**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**			**45,45%**	**63,64%**	**81,82%**	**100%**		**-**	**81,82%**	**100%**	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			6 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	5 Orang	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	60,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah**			**16,13%**	**19,35%**	**22,58%**	**29,03%**		**-**	**19,35%**	**22,58%**	

2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik**			**16,13%**	**19,35%**	**22,58%**	**29,03%**		-	**19,35%**	**22,58%**	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	19,35%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG**			**50,00%**	**53,70%**	**59,26%**	**62,96%**		**-**	**59,26%**	**62,96%**	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			1 OPD	53,70%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 OPD	-	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	

Analisis yang dilakukan oleh terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2025 sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

a. Keterbukaan Informasi Publik bagi semua Badan Publik atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempengaruhi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

b. Beberapa tolak ukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 yaitu adanya peningkatan pembangunan akses telekomunikasi untuk memberikan sinyal kepada daerah-daerah yang masih blankspot di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga untuk melakukan komunikasi seluler masyarakat tidak harus jauh-jauh lagi mencari sinyal;

c. Selain akses telekomunikasi, pelayanan akses internet Perangkat Daerah baik itu Dinas, Kecamatan, Desa, Sekolah, Puskesmas dan Objek Wisata pada tahun 2025 sudah terpenuhi dan dilakukan maintenance jika terjadi gangguan baik dengan penggantian perangkat secara langsung maupun koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Tidak hanya terbatas pada akses telekomunikasi dan akses internet, pelayanan juga dilakukan terhadap penggunaan aplikasi maupun website yang disediakn sehingga untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan melalui website yang telah disediakan;

d. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik Sektoral dari perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (renstra) setiap Perangkat Daerah. Data statistik sektoral tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini karena perangkat Daerah telah memiliki dan menggunakan data yang tertuang dalam renstra perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, sehingga perangkat daerah bisa menggunakan data yang dipublikasikan oleh diskominfotik dalam melaksanakan evaluasi capaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, tersusunnya metadata

variabel kegiatan statistik sektoral memberikan kemudahan dalam menjelaskan informasi tentang konsep dan definisi dari data-data sektoral yang dikumpulkan oleh walidata dari produsen data sektoral, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan data. Selain itu untuk mendukung Kebijakan Satu data Indonesia dalam menghasilkan data yang akurat, Mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. Capaian kinerja pelayanan pada urusan persandian ditandai dengan tercapainya indikator pemenuhan nilai indeks KAMI sesui dengan target kinerja Kepala Dinas. Salah satu pendukung dalam pemenuhan Indeks KAMI yaitu terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan capaian 24 OPD yang telah didaftarkan sertifikat elektroniknya. Manfaat dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diantaranya yaitu dapat menghemat penggunaan kertas, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan penandatangan dokumen dimanapun berada, serta dapat menjamin keorisinilan tanda tangan. Karena dengan menggunakan tanda tangan elektronik, seseorang tidak bisa lagi meniru tanda tangan dan identitas diri pengguna dijaga kerahasian nya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan

adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kebijaksanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian jangka menengah. Maka dapat ditetapkan isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.3.1 Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Hal ini menuntut tersedianya pelayanan publik yang bersifat pasti dalam persyaratan, waktu serta akuntabel

benar-benar dibutuhkan sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;

2. Daya kritis masyarakat bertambah dan akses terhadap media semakin luas dengan berbagai pilihan dan kemudahan. Hal ini dibutuhkan tersedianya media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan dan dan meningkatkan kualitas isi pesan yang diproduksi;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam penguasaan teknologi informasi, profesionalisme dan kepribadian Sumber Daya Manusia;
4. Salah satu isu strategis yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah akses telekomunikasi dan pengembangan IT. Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, Dinas terus melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di daeerah, penyelenggara telekomunikasi dan melakukan pengembangan-pengembangan bidang IT;

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, terkhusus pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Teknis

   PPID sebagai pengelola informasi adakalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta, hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu yang cepat atau tidak

lengkap, hal ini menyebabkan waktu menjawab menjadi lebih lama bahkan melebihi ketentuan.

2. Substansi

Informasi yang diminta adakalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab sertamerta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Undang-undang tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi, dikhawatirkan bila jawaban informasi yang disampaikan tidak sesuai karena menyalahi aturan lain akibat ketidakpahaman petugas informasi.

3. Eksternal

Permohonan informasi tidak dapat langsung diproses, hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon informasi dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadangkalanya mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga diharuskan kembali mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan, hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan informasi secara jelas dan rinci.

a. Pola pikir sebagian badan publik yang masih menganggap Keterbukaan Informasi Publik bukan hal yang penting;
b. Komitmen sebagian badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
c. Masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal;
d. Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik; dan

e. Masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik untuk peningkatan kapasitas PPID.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, tekhusus pada Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial pemerintah seringkali masih bersifat satu arah tanpa banyak memperhatikan dialog interaktif dan diskusi;
2. Fenomena hoaks di media sosial juga dapat menimbulkan beragam masalah, efek dari penyebaran pesan hoaks tersebut dapat diperparah dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang cenderung percaya begitu saja dengan berita yang beredar;
3. Ketersediaan jumlah pegawai yang belum memadai dan kompetensi pegawai yang sebagian besar kurang sesuai dengan bidang kerjanya; dan
4. Pengembangan pelayanan yang berbasis elektronik secara online belum maksimal oleh perangkat daerah dalam mengelola website maupun media sosial.

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika tentunya tidaklah mudah, hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi hanya terbatas mengusulkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemerataan jaringan telekomunikasi di daerahnya;
2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang notabenenya adalah kepulauan dan berbukit sehingga untuk pengembangan akses telekomunikasi sangatlah mahal dan mobilitas perangkat yang sangat sulit tergantung dengan kondisi cuaca dan kontur wilayah;
3. Selain penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan IT. Hal ini dikarenakan SDM IT yang dimiliki

masih terbatas sehingga beberapa pekerjaan harus diprioritaskan untuk dilakukan pengembangan setiap tahunnya;

4. Peran Statistik Sektoral belum optimal dalam Pemetaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Belum Mengacu Kepada Satu Data Indonesia (SDI), Permasalah tersebut disebabkan oleh :
   a. Belum diterbitnya Peraturan Bupati terkait penyelenggaran Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
   b. Data statistik sektoral yang bersipat dinamis; dan
   c. Kurangnya Kesadaran Produsen Data Untuk Mencatat dan Melaporkan Data Statistik Sektoral.
5. Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
   a. Belum Optimalnya Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
   b. Belum optimal nya pemanfaatan portal statistik sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Peran Persandian yang belum Optimal Pengamanan Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Belum Optimal dikarenakan tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment, hal tersebut disebabkan oleh :
   a. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
   b. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
   c. Perlu perningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Keamanan Informasi, Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi. hal tersebut disebabkan oleh Tren perkembangan digital semakin memegang peranan penting dalam proses interaksi antar organisasi maupun individu sehingga

mendorong semakin tingginya resiko kejahatan siber dan harus ada kesiapan dari organisasi.

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti NSPK, SPM Dan Sdgs (Suistanable Development Goals)

1. Nilai persentase Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh akan berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ataupun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik . Dengan adanya keterbukaan informasi maka diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Sejalan dengan tujuan good governance dengan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Komunikasi dan koordinasi yang intens antara PPID Utama dengan PPID Pembantu sangat dibutuhkan untuk senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki disetiap Perangkat Daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki;
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu adanya keterlambatan pengembangan akses telekomunikasi hal ini ditandai dengan adanya perbedaan kualitas sinyal di tiap-tiap daerah, selain itu adanya keterlambatan dalam pengembangan aplikasi yang dikarenakan keterbatasan SDM IT. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menjadi faktor penghambat yang signifikan hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika sudah mencapai sesuai target.

2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai berikut :

a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut;
b. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat;
c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah;
d. Dalam memberikan pelayanan akses telekomunikasi secara maksimal tentunya kualitas sinyal yang ada di Kecamatan diharapkan sama dengan di Kabupaten dan bisa menyamai Perkotaan; dan
e. Pengembangan aplikasi membutuhkan SDM IT yang handal akan tetapi keterbatasan SDM IT menjadi faktor penghambat dalam pengembangan aplikasi dan harus dilakukan prioritas sesuai kebutuhan.

Adapun peluang yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

a. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
c. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin cukup baik antar Perangkat Daerah maupun stakeholders; dan
d. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi sehingga terus dilakukan peningkatan akses telekomunikasi dan terus melakukan pelatihan dan rekrutmen SDM IT sehingga kuantitas SDM IT menjadi lebih banyak serta diimbangi dengan kualitas yang sangat baik.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Penerapan open government untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website PPID;
b. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
c. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses oleh publik;
d. Dengan letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbukit, maka pada tahun berikutnya akses telekomunikasi sudah dapat dirasakan oleh semua masyarakat sampai ke Dusun yang ada;
e. Kualitas sinyal sama antara daerah yang berada di Kecamatan dan Kabupaten serta menyamai Perkotaan;
f. Adanya prioritas terhadap aplikasi yang sudah dikembangkan untuk terus digunakan baik Dinas sendiri maupun Dinas lain; dan
g. Adanya peningkatan SDM IT.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identiikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkorelasi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana dan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas..

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik program prioritas yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dalam Misi ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

Misi ke 2 (Dua) yaitu :

“ Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan”

Misi ke 3 (Tiga) yaitu :

” Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”

Gambaran identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Kep. Anambas**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 5.954.123.063,15**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Kep. Anambas**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 6.518.162.508**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan**	**100%**	**Rp 41.700.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan**	**100%**	**Rp 42.900.000**	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 40.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 40.200.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep.	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Dokumen	Rp 2.700.000	

			Perangkat Daerah				Anambas	Kinerja Perangkat Daerah			
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 5.375.658.775,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 5.609.231.759**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp 5.170.993.775,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp 5.404.566.759	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 203.040.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 203.040.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.625.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.625.000	
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	Rp 33.564.000,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 33.564.000**	

2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 33.564.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 33.564.000	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu**	**100%**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu**	**100%**	**0**	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas**	**100%**	**Rp 265.826.735,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas**	**100%**	**Rp 540.556.980**	

2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.451.221,50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.934.962	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.513.285,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.684.380	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 7.064.114,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 14.752.152	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 28.338.974,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 51.118.632	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.326.640,50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 37.768.854	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 9.007.500,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 22.020.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 193.125.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 400.278.000	

2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 60.223.712,15**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 103.367.847**	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 54.654.000	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 25.223.712,15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 25.223.712	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 5.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 23.490.135,24	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya**	**100%**	**Rp 140.649.841,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya**	**100%**	**Rp 140.649.841,00**	

2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 62.948.295,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 62.948.295,00	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 57.701.546,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 57.701.546,00	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**Rp 36.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**Rp 67.892.081**	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 30.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 57.782.081	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	Rp 6.500.000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	Rp 10.110.000	
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Keterbukaan Informasi Publik**	**100%**	**Rp 2.404.967.548,62**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Keterbukaan Informasi Publik**	**100%**	**Rp 4.044.836.939**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Informasi yang Terpublikasi**	**100%**	Rp 2.404.967.548,62	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Informasi yang Terpublikasi**	**100%**	**Rp 4.044.836.939**	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 53.908.081	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 201.249.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Rp 76.384.308	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Rp 2.359.343.978,00	Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	**Rp 3.647.299.627,20**	

2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	3 Orang	Rp 11.405.892,65	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	3 Orang	Rp 65.995.922,44	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah**	**85,71 %**	**Rp 2.974.873.699,96**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah**	**85,71%**	**Rp 4.070.010.837**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas**	**100%**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas**	**100%**		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77	

2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	Rp 2.881.099.181,49	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	**Rp 3.773.670.516,92**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah**	**100%**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah**	**100%**		
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 11.405.892,65	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 42.482.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp 59.556.840,51	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp 78.734.800	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral**	**100%**	**Rp 34.217.677,96**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral**	**100%**	**Rp 188.132.000**	

2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**45,45 %**	**Rp 34.217.677,96**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**45,45%**	Rp 188.132.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 54.905.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	Rp 11.405.892,65	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	Rp 57.495.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 11.405.892,65	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 75.732.000	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah**	**16,13 %**	**Rp 22.811.785,31**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah**	**16,13%**	**Rp 196.431.896**	

2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik**	**16,13 %**	**Rp 11.405.892,65**	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik**	**16,13%**	**Rp 114.340.000**	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	**Rp 11.405.892,65**	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 114.340.000	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG**	**50,00 %**	**Rp 11.405.892,65**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kep. Anambas**	**Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG**	**50,00%**	**Rp 82.091.896**	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	**Rp 11.405.892,65**	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896	
TOTAL PAGU ANGGARAN					**Rp 11.390.993.775,00**	**TOTAL PAGU ANGGARAN**				**Rp 15.017.574.180**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menerima adanya usulan yang di sampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2022 yaitu :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.1.2 Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastuktur di Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data agar dapat tersedia lenih cepat, dan dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu fibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada

pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpatisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari ssumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Peningkatan kebutuhan daya yang diperlukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktifitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional.

Tuntunan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat, upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas daya yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan

proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.1.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Melalui pelaksanaan arah Organisasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

VISI BSSN

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020–2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Landasan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 9 (sembilan) misi atau dikenal sebagai nawacita kedua yaitu :

1. peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam janji Presiden, dimana dalam bidang pertahanan dan keamanan, BSSN mengampu janji penguatan dan pengembangan sumber daya manusia terutama dalam penguasaan teknologi keamanan siber yang sangat diperlukan dalam pertahanan negara dan mengembangkan sistem keamanan siber dalam kerangka menunjang sistem pertahanan nasional secara keseluruhan. Guna mempertajam visi pembangunan nasional di bidang keamanan siber dan persandian serta untuk menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis, maka BSSN menetapkan arah organisasi berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai suatu institusi yang menjamin kedaulatan siber di Indonesia.

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: "Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

MISI BSSN

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber

daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

TUJUAN BSSN

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasardasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai

dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024. Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, massive computing, nano satelite, next gen-fiber optic, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan

publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN" ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 ((tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia.

2. terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran Bersama secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan nasional, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Keamanan Siber Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut:

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber.
2. pembangunan dan penguatan computer emergency response team.
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber. Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional. Selain itu, dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 BSSN juga terlibat dalam manajemen keamanan informasi SPBE.

Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pada RPJMN Tahun 2020-2024, BSSN menjadi leading sector proyek prioritas strategis bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yaitu penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, pembentukan proyek prioritas strategis ini dilatarbelakangi oleh isu isu di bidang keamanan siber sebagai berikut:

1. fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet.
2. serangan siber terbanyak sepanjang tahun 2019 berupa percobaan pembocoran data yang disusul dengan serangan trojan.
3. sistem monitoring keamanan siber mata garuda belum mampu mencakup seluruh titik rentan di indonesia.
4. Indonesia belum memiliki pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. belum ada mekanisme integrasi dan berbagi data informasi serangan siber antar pemangku kepentingan terkait.

Melalui penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. menurunnya insiden serangan siber.
2. meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber.
3. meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat.
4. meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Sesuai matriks pembangunan jangka menengah RPJMN Tahun 2020-2024, Kegiatan prioritas nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber dijabarkan ke dalam proyek-proyek prioritas nasional, dimana BSSN mengampu 4 (empat) proyek prioritas nasional dengan rincian proyek sebagai berikut:

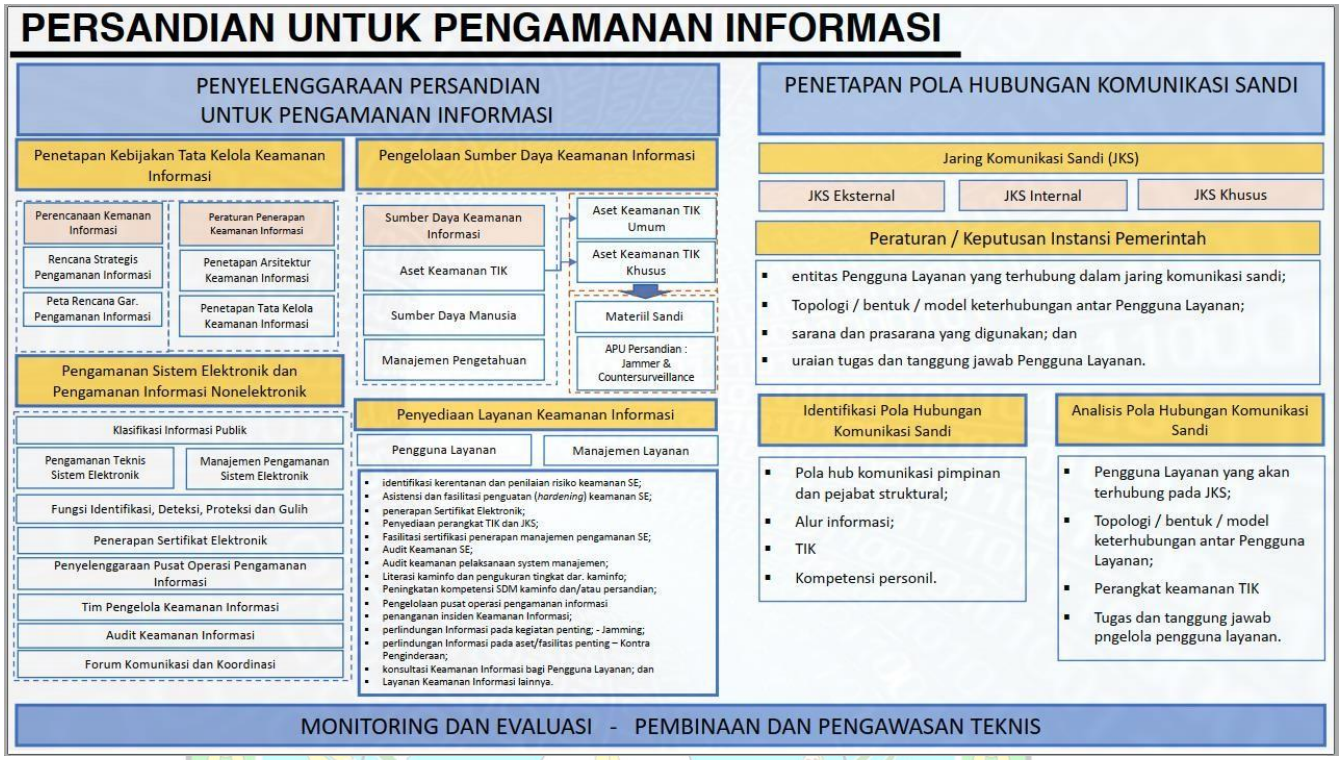
1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber
   a. perluasan cakupan area national cybersecurity operation center.
   b. pembangunan kapasitas national computer security incident response team.
   c. pembangunan sistem monitoring pengendalian informasi.
   d. penguatan national data center.
   e. pembangunan infrastruktur voluntary vulnerability disclosure program.
   f. pembangunan information sharing and analysis center.
2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team
   a. pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah.
   b. pembentukan tim respon ancaman intelijen siber.
3. Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber, kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
   a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keamanan SPBE pada K/L/D.
   b. pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
   c. penyelenggaraan program born to defence untuk sumber daya manusia pengelola keamanan siber sektor IIKN.
   d. national cyber exercise drill test jumlah peserta yang mengikuti national cyber excercise drill test.
   e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang digital forensic.

Proyek prioritas strategis dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan

melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif Presiden. Hal ini bertujuan agar proyek prioritas strategis dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dengan ditetapkannya BSSN sebagai *leading sector* proyek prioritas strategis di atas, BSSN dituntut untuk dapat menjalin kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam membangun sistem dan tata kelola pelaksanaan penguatan keamanan siber yang terintegrasi. Fungsi BSSN yaitu menjadi pusat yang mengoordinasikan dan memberdayakan seluruh instansi yang berhubungan dengan ranah siber agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan sistem keamanan siber dan sandi nasional merupakan salah satu bentuk inisiatif BSSN dalam membagi kewenangan antar instansi dan untuk mewujudkan tujuan dengan langkah nyata berupa membangun platform *information sharing and analysis center* pada sektor pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital. Tujuan pembangunan tersebut untuk menyediakan platform koordinasi terhadap ancaman dan serangan terkini yang terjadi pada ruang siber. *Information sharing and analysis center* berperan untuk membangun dan meningkatkan *shared situational awareness* terhadap kerawanan, kejadian, insiden, dan ancaman yang terjadi dan menjadi media kolaborasi menuju ketahanan siber nasional di Indonesia.

Selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan dimaksud memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian yang secara ringkas diilustrasikan dalam Gambar.



Gambar Persandian untuk Pengamanan Informasi Pada Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Rancangan Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, sebagai berikut :

Rancangan Tema Pembangunan :

"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif"

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melakukan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai; dan
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) juga mengacu kepada sasaran yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik; dan
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Tahun Anggaran 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	(67.00) B
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	(65.00) B
2	Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai		Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	-
		Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Persentase Desa Yang Masih Blank Spot Terselesaikan	-
3	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(2,63) B
		Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	87,50%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(88.00) Menuju Informatif
		Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia (SDI)	71,43%
		Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	(320) Cukup Baik

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 – 2026

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
   c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
   d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

C. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
   c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027, maka dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 6.518.162.508**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 6.518.162.508**

2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 42.900.000**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 42.900.000**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	4 Dokumen	Rp 40.200.000	APBD KKA	-	4 Dokumen	Rp 40.200.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	2 Dokumen	Rp 2.700.000	APBD KKA	-	2 Dokumen	Rp 2.700.000
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 5.609.231.759**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 5.609.231.759**

2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	32 Orang	Rp 5.404.566.759	APBD KKA	-	37 Orang	Rp 5.404.566.759
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 203.040.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 203.040.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 1.625.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 1.625.000
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 33.564.000**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 33.564.000**
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 33.564.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 33.564.000

2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**0**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**0**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kep. Anambas	2 Paket	0	APBD KKA	-	3 Paket	0
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kep. Anambas	8 Orang	0	APBD KKA	-	8 Orang	0
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 540.556.980**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 540.556.980**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 9.934.962	APBD KKA	-	1 Paket	Rp 9.934.962

	an Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 14.752.152	APBD KKA	-	2 Paket	Rp 14.752.152
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 51.118.632	APBD KKA	-	3 Paket	Rp 51.118.632
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 37.768.854	APBD KKA	-	4 Paket	Rp 37.768.854
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Paket	Rp 22.020.000	APBD KKA	-	2 Paket	Rp 22.020.000
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 400.278.000	APBD KKA		1 Laporan	Rp 400.278.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 14.752.152	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 14.752.152

2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 103.367.847**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 103.367.847**
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp -	APBD KKA	-	4 Unit	Rp -
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	9 Unit	Rp 54.654.000	APBD KKA	-	4 Unit	Rp 54.654.000
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 25.223.712	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 25.223.712
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 23.490.135,24	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 23.490.135,24

2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 140.649.841**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 140.649.841**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 62.948.295	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 62.948.295
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 57.701.546	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 57.701.546
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 20.000.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 20.000.000
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 67.892.081**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 67.892.081**

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Anambas	6 Unit	Rp 57.782.081	APBD KKA	-	16 Unit	Rp 57.782.081
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	Kab.Kep. Anamabas	100%	Rp 10.110.000	APBD KKA	-	100%	Rp 10.110.000
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Keterbukaan Informasi Publik**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 4.044.836.939**	**APBD KKA**	-	**100%**	**Rp 4.044.836.939**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi yang Terpublikasi**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 4.044.836.939**	**APBD KKA**	-	**100%**	**Rp 4.044.836.939**
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 53.908.081	APBD KKA		1 Dokumen	Rp 53.908.081

2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 201.249.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 201.249.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 76.384.308	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 76.384.308
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kep. Anambas	1 Layanan	**Rp 3.647.299.627,20**	APBD KKA	-	1 Layanan	**Rp 3.647.299.627,20**
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kep. Anambas	3 Orang	Rp 65.995.922,44	APBD KKA	-	3 Orang	Rp 65.995.922,44
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**85,71%**	**Rp 4.070.010.837**	**APBD KKA**	-	**92,86%**	**Rp 4.070.010.837**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub**	**Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**		**APBD KKA**	-	**100%**	

	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 129.028.367,77
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	30 Unit	**Rp 3.773.670.516,92**	APBD KKA	-	30 Unit	**Rp 3.773.670.516,92**
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**67.791.620**	**APBD KKA**	-	**100%**	Rp 74.570.782

2.16.03.2.02.02	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 46.095.152,66
2.16.03.2.02.03	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 42.482.000	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 42.482.000
2.16.03.2.02.07	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Kep. Anambas	1 Unit	Rp 78.734.800	APBD KKA	-	1 Unit	Rp 78.734.800
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral**	**Kab. Kep. Anambas**	**100%**	**Rp 188.132.000**	**APBD KKA**	**-**	**100%**	**Rp 188.132.000**

2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**45,45%**	Rp 188.132.000	**APBD KKA**	-	**63,64%**	Rp 188.132.000
2.20.02.2.01.01	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 54.905.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 54.905.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kep. Anambas	1 Orang	Rp 57.495.000	APBD KKA	-	1 Orang	Rp 57.495.000
2.20.02.2.01.03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Kep. Anambas	1 Dokumen	Rp 75.732.000	APBD KKA	-	1 Dokumen	Rp 75.732.000

KERJA SERENTAK LANGKAH SEPISAK

2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah**	**Kab. Kep. Anambas**	**16,13%**	**Rp 196.431.896**	**APBD KKA**	**-**	**19,35%**	**Rp 196.431.896**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik**	**Kab. Kep. Anambas**	**16,13%**	**Rp 114.340.000**	**APBD KKA**	**-**	**19,35%**	**Rp 114.340.000**
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kep. Anambas	1 Laporan	Rp 114.340.000	APBD KKA	-	1 Laporan	Rp 114.340.000
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG**	**Kab. Kep. Anambas**	**50,00%**	**Rp 82.091.896**	**APBD KKA**	**-**	**53,70%**	**Rp 82.091.896**

2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Kep. Anambas	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896	APBD KKA	-	1 Perangkat Daerah	Rp 82.091.896
	TOTAL				**Rp 15.017.574.180**				**Rp 15.017.574.180**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan hasil dari keputusan Bersama saat dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah terdapat beberapa rencana kerja yang disepakati untuk menjadi fokus dan arah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada Tahun 2026 yaitu :

URUSAN KOMUNIKASI

a. Sub Kegiatan Nama Domain : Penyelenggaran domain yang di Kelola oleh Diskominfotik, dengan melakukan sewa terkait Web Hosting, Web Mail, Lisensi Certifikat, dan IP Publik untuk masyarakat. Rencana akan dilakukan penambahan kapasitan penyimpanan web Hosting;

b. Sub Kegiatan Jaringan Intra : Jaringan masih tetap melakukan hal yang sama seperti di tahun sebelumnya, dan akan menyediakan rencana pembangunan jaringan Intranet untuk kantor baru Perangkat Daerah di Pasir Peti. Serta mencoba untuk melakukan perluasan/membagi kapasitas bandwidth ke Kecamatan siantan timur khususnya untuk di kantor camat. Akan coba melakukan sewa fiber optik atau radio untuk di pulau jemaja dan palmatak. Hal ini membutuhkan biaya terkait merdeka sinyal;

c. Sub Kegiatan SPBE : Melakukan penerapan sesuai amanat PerPres 95 tahun 2018, dan pengembangan dari dokumen arsitektur untuk membuat dokumen manajemen SPBE (Manajemen Resiko/Data);

d. Sub Kegiatan Pusat Data : Melakukan Pengelolaan server dan rencana untuk melakukan layanan data persuratan dalam hal tersebut mengingat sudah terbangunnya kantor/Gedung NOC Diskominfotik agar dapat dipergunakan dan bisa berjalan dengan maksimal harus melakukan relokasi perangkat dari gedung lama ke gedung baru dan membutuhkan penambahan kebutuhan dasar untuk Gedung guna menunjang pekerjaan;

e. Sub Kegiatan Aplikasi : Mengembangkan aplikasi khususnya Aplikasi Satu Data Anambas yang di tahun 2024 masih tahap pengembangan dan pemetaan untuk OPD;

URUSAN INFORMATIKA

a. Monitoring Opini Dan Apirasi Publik : Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harusnya menjadi motivasi bagi setiap kementerian dan lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik. Mengingat Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berkembang sehingga pelayanan publik yang dilaksanakan juga harus semakin meningkat. Serta melakukan pengendalian dan kontrol akan isu-isu yang muncul dalam rangka keterbukaan informasi;

b. Sub Kegiatan Konten Dan Perencanaan : Melakukan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sehingga semua agenda pemerintah daerah bisa terpublikasi dengan baik dan dikemas dala konten yang akan menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah. Guna menunjang hal tersebut maka dibutuhkan penambahan Perangkat Multimedia Produksi dan Pengelolaan Konten Informasi;

c. Sub Kegiatan Layanan Informasi Publik : Melakukan Forum Koordinasi PPID dalam rangka Penguatan dan Peningkatan Layanan PPID sehingga terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik dimana di tahun 2022 masih kegiatan tersebut belum terlaksana dikarenakan pandemi covid -19. Lebih meningkatkan rapat koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi apa yang menjadi tanggungjawab dalam melakukan upload data yang menjadi bagian dari keterbukaan informasi dimana dalam hal ini masih kurangnya perhatian untuk memenuhi hal tersebut.

Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media : Melakukan Pembinaan Pengelolaan dan Kerjasama antara media dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meningkatkan pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan meningkatkan penyebaran melalui layanan media sosial;

e. Penambahan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada Program Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya tidak tertuang di dalam Dokumen Rancangan Awal RENJA 2026 yang mana sub kegiatan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting guna meningkatkan pengetahuan dan peningkatan terkait mutu dari Sumber Daya Manusia (pegawai) yang membidangi peliputan secara luas dari sisi menciptakan konten-konten yang menarik;

f. Penambahan Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi ataupun menjadi prioritas bidang ke arah peliputan untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat salah satu nya kami sudah menyediakan ruang studio dan membutuhkan alat-alat guna menunjang ruangan tersebut sehingga informasi bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

URUSAN STATISTIK

a. Sub Kegiatan Data Statistik Sektoral : Fokus Kegiatan 2023 akan di arahkan sesuai dengan yang menjadi target dari BUPATI kepada Bidang Statistik, rencana bidang statistic akan melakukan pengumpulan terkait data-data pembangunan yang menjadi prioritas terkait indikator kinerja RENSTRA di Setiap OPD (21 OPD). Fokus terkait data hanya sampai mengumpulkan, rencana akan melakukan kajian evaluasi terkait data yg dibutuhkan (urgent).

Di tahun 2022 sedang mencoba untuk melakukan kajian terkait infrastruktur yang di bangun terhadap perekonomian (khususnya di Kec. Siantan).

Melakukan kajian hanya dengan tim statistik sendiri dengan BPS, bisa juga melibatkan OPD terkait dari apa yang akan di lakukan kajian paling tidak minimal 1 atau 2 kajian setiap tahunnya terkait pembangunan;

Penambahan terkait Honorarium untuk petugas kordinator data di setiap OPD;

b. Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Statistik : Peningkatan SDM untuk 4 orang agar di tambahkan, karena akan melakukan peningkatan ataupun pelatihan ke Kordinator data statistik di setiap OPD Bersama BPS;

c. Sub Kegiatan Metadata Statistik : Seandainya di tahun 2022 ada melakukan kajian, bisa di tindaklanjuti untuk melakukan Metadata Kegiatan (penjelasan alur/proses awal sampai dengan publikasi). Yang di hasilkan hanya sekedar informasi/gambaran terkait kajian itu sendiri;

URUSAN PERSANDIAN

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik : Percepatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik guna sebagai pengamanan digital;

b. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Memprioritaskan pengadaan Alat Penginderaan Jammer sebagaimana alat tersebut menjadi pelaporan baik capaian Kinerja Kepala Dinas yang menjadi sasaran dalam Perjanjian Kinerja dan menjadi Penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) setiap tahunnya dalam hal urusan Persandian.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2026		
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian
1	2	3	4	5	6
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 6.518.162.508**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perudang-undangan**	**Rp 42.900.000**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 40.200.000	APBD KKA	4 Dokumen
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.700.000	APBD KKA	2 Dokumen
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 5.609.231.759**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.404.566.759	APBD KKA	32 Orang
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 203.040.000	APBD KKA	1 Dokumen

2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.625.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Rp 33.564.000**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 33.564.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu**	**-**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	APBD KKA	2 Paket
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	APBD KKA	8 Orang
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas**	**Rp 540.556.980**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 9.934.962	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 4.684.380	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 14.752.152	APBD KKA	1 Paket

2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 51.118.632	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 37.768.854	APBD KKA	1 Paket
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 22.020.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 400.278.000	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Rp 103.367.847**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp -	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 54.654.000	APBD KKA	9 Unit
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 25.223.712	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 23.490.135,24	APBD KKA	1 Unit
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya**	**Rp 140.649.841**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 62.948.295	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 57.701.546	APBD KKA	1 Laporan
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp 20.000.000	APBD KKA	1 Laporan

		Kantor yang Disediakan			
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**Rp 67.892.081**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 57.782.081	APBD KKA	6 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	Rp 10.110.000	APBD KKA	100%
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Keterbukaan Informasi Publik**	**Rp 4.044.836.939**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi yang Terpublikasi**	**Rp 4.044.836.939**	**APBD KKA**	**100%**
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 53.908.081	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 201.249.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Rp 76.384.308	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	**Rp 3.647.299.627,20**	APBD KKA	1 Layanan
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Rp 65.995.922,44	APBD KKA	3 Orang
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah**	**Rp 4.070.010.837**	**APBD KKA**	**85,71%**

2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kep. Anambas**		**APBD KKA**	**100%**
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 129.028.368**	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	**Rp 3.773.670.516,92**	APBD KKA	30 Unit
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia disetiap Perangkat Daerah**	125.150.000	**APBD KKA**	**100%**
2.16.03.2.02.02	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 46.095.152,66	APBD KKA	1 Dokumen
2.16.03.2.02.03	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rp 42.482.000	APBD KKA	1 Unit
2.16.03.2.02.07	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Rp 78.734.800	APBD KKA	1 Unit
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral**	**Rp 188.132.000**	**APBD KKA**	**100%**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah**	Rp 188.132.000	**APBD KKA**	**45,45%**

2.20.02.2.01.01	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 54.905.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 57.495.000	APBD KKA	1 Orang
2.20.02.2.01.03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp 75.732.000	APBD KKA	1 Dokumen
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah**	**Rp 196.431.896**	**APBD KKA**	**16,13%**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik**	**Rp 114.340.000**	**APBD KKA**	**16,13%**
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 114.340.000	APBD KKA	1 Laporan
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG**	**Rp 82.091.896**	**APBD KKA**	**50,00%**
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rp 82.091.896	APBD KKA	1 Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2021 – 2026).

Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat menunjukan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas harus segera melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Karena Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk - produk teknologi informasi terbaru dan terbarukan dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi

kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personil Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas serta didukung segenap *stakeholders* yang ada.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan bisa dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat memacu kinerja aparatur sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JAPRIZAL, S.Kom., M.A
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750120 200312 1 008



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* dipanjatkan atas kehadirat Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersusun berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan. Rancangan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 ini sekiranya dapat dipakai sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dengan harapan agar pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih terarah dan terukur.

Rencana kerja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan juga draft Rencana Strategis 2025-2029. Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan pada berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tentu saja dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 ini memiliki kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 ini dikemudian hari. Dengan adanya dokumen Rancangan Perubahan Renja pada Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 9 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dr. MASYKUR, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN s/d TRIWULAN II TH 2024 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II Tahun 2024 8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .. 12
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 12
3.2 Program dan Kegiatan 16
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 18

BAB V PENUTUP..... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan II Tahun 2024 8
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian 15
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian..... 16
Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan PD 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang

waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstuktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan

anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029.

Dokumen Rancangan Perubahan RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 akan dijadikan sebagai dasar pertama dalam penyusunan Draft Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2025-2029. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025 serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifiksi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja ini adalah memberikan gambaran awal mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan II Tahun 2025

Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 senilai **Rp7.862.503.815,72**,-. Sub kegiatan yang dimiliki DKUMPP sebanyak 23 Sub Kegiatan yang tersebar di Dinas dan UPT dan memiliki realisasi fisik dan keuangan. Adapun realisasi belanja DKUMPP sampai dengan triwulan II tahun 2025 (data diambil dari LRFK per tanggal 30, bulan April 2025) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN		
		JUMLAH DANA	KEUANGAN	FISIK
		MENURUT DPA	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN
		(RP)	Rp	%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (DKUMPP)		**714.870.000,00**		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**714.870.000,00**		
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	714.870.000,00	132.230.000,00	33,33
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA (DKUMPP)		**6.523.493.509,53**		
Administrasi Keuangan Perangkat		**6.034.074.776,44**		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN		
		JUMLAH DANA	KEUANGAN	FISIK
		MENURUT DPA	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN
		(RP)	Rp	%
Daerah				
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	149.993.600	0	33,33
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.081.176,44	1.247.158.968,00	33,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**309.072.929,29**		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.357.745	1.788.000,00	33,33
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.744.600	350.000,00	33,33
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.593.240	0	33,33
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.656.395	1.399.500,00	33,33
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.670.045,29	29.670.285,00	33,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**166.506.507,80**		
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.157.440,00	18.534.610,00	33,33
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.242.712,00	95.242.712,00	33,33
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.106.355,80	600.000,00	33,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**17.890.200,00**		
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.000,00	0	33,33
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	10.620.200,00	0	33,33
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (DKUMPP)		**6.450.000,00**		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**6.450.000,00**		
14	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	6.450.000,00	6.700.000,00	33,33
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (DKUMPP)		**83.642.574,00**		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		**83.642.574,00**		
15	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	83.642.574,00	8.800.000,00	33,33
URUSAN PEMERINTAH BIDANG				

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN		
		JUMLAH DANA	KEUANGAN	FISIK
		MENURUT DPA	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN
		(RP)	Rp	%
PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (DKUMPP)		**784.215,00**		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		**784.215,00**		
16	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	**784.215,00**	0	33,33
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (DKUMPP)		**3.800.000,00**		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota		**3.800.000,00**		
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat	3.800.000,00	3.800.000,00	33,33
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (DKUMPP)		**63.744.935,80**		
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**63.744.935,80**		
18	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	63.744.935,80	1.950.000,00	33,33
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (DKUMPP)		**427.185.853,39**		
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		**427.185.853,39**		
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	427.185.853,39	14.700.918,00	33,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR)		**20.041.824,00**		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**20.041.824,00**		
20	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	20.041.824,00	6.450.000,00	33,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		**1.931.400**		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRES/PERKEMBANGAN		
		JUMLAH DANA	KEUANGAN	FISIK
		MENURUT DPA	REALISASI S/D BLN LAPORAN	REALISASI S/D BLN LAPORAN
		(RP)	Rp	%
PEMERINTAHAN DAERAH (UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR)				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.931.400		
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.931.400	0	33,33
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**14.440.000,00**		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		**14.440.000,00**		
22	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	14.440.000,00	14.240.000,00	33,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPT METROLOGI LEGAL)		**2.119.504,00**		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**2.119.504,00**		
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.119.504,00	0	33,33
TOTAL		**7.862.503.815,72**	**1.583.614.993**	

Pada Triwulan II (data per 30 April 2025) capaian realisasi keuangan sebesar Rp1.583.614.993,- atau sebesar 20,14% dan realisasi fisik sebesar 33,33%. Perlambatan realisasi keuangan diakibatkan tidak pastinya kondisi keuangan daerah, dan banyak dilakukan pergeseran APBD 2025 dengan melakukan efisiensi pagu perangkat daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) . Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Adapun Rancangan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada RKPD 2025 yaitu **"Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan"** yang terdiri dari rencana prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu "**Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah**". Dan visi misi yang terdapat dalam draft Rancangan awal RPJMD 2025-2029. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan tujuh misi. Dari ketujuh misi tersebut, ada enam poin yang menjadi sasaran pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah	Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir		Persentase UMKM Naik Kelas	%	33	38	39	40	43	46
		Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	%	10	25	43,33	63,33	83,33	100
2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Sektor Perindustrian terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36
			Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	5	10	15	20	25	30
			Tingkat stabilitas harga barang	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
3 Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah		CC/ 56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah		B/69	B/69, 5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Perangkat Daerah		A/94,78	A/94,7 9	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada pengendalian harga serta ketercukupan stok bahan pokok dan barang lainnya, mengingat daerah ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan dalam hal transportasi. Sehingga pada musim-musim tertentu persoalan kelangkaan stok dan harga yang tinggi masih menjadi isu utama. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan DKUMPP Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Belanja Langsung DKUMPP pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai **Rp7.862.503.815,72**,- dan dalam perubahan renja ini ada usulan untuk Renja Perubahan 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Pada rancangan renja ini dikabarkan DKUMPP akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Dekranasda dan pagu indikatif belum masuk pada matriks ini, dikarenakan sedang diverifikasi oleh pyb dan akan ditampilkan pada matriks perubahan rancangan akhir renja 2025.

Tabel 3.3 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan PD 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**13.051.702.128,00**	**12.632.379.782,81**	**7.862.503.815,72**	**-5.189.198.312,28**							**16.524.000.166,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.078.239.061,00**	**11.541.105.345,04**	**7.350.429.307,53**	**-4.727.809.753,47**							**15.411.036.462,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1.778.550.000,00**	**1.411.100.420,37**	**714.870.000,00**	**-1.063.680.000,00**							**2.330.438.172,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Presentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersusunnya rencana tenaga kerja Makro*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Perusahaan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun**				**20 %**	**87 %**	**1.400.000,00**	**66.070.000,00**	**0,00**	**48.600.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi*				50 Orang	77 %	1.400.000,00	66.070.000,00	0,00	-1.400.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pencari Kerja		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	48 Orang	1.400.000,00	66.070.000,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja**				**4 Bursa Kerja**	**95 %**	**11.700.000,00**	**6.730.000,00**	**0,00**	**298.738.172,00**							**310.438.172,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik*				250 orang	75 %	10.000.000,00	6.730.000,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja		310.438.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	6.730.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			310.438.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola*				1 laporan	1 laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1 Orang	1 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase besaran kasus yang diselesaikan**				**9 kasus**	**81,19 %**	**1.764.350.000,00**	**1.338.300.420,37**	**714.870.000,00**	**205.650.000,00**							**1.970.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya regulasi yang tersusun*				1 dokumen	67,16 %	1.102.000.000,00	944.618.000,00	714.870.000,00	-387.130.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000,00	944.618.000,00	714.870.000,00	-385.130.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha*				1 laporan	47,50 %	662.350.000,00	393.682.420,37	0,00	-662.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat		670.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	50 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	50 Perkara	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	650.000.000,00	393.682.420,37	0,00	-650.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			670.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.299.689.061,00**	**10.130.004.924,67**	**6.635.559.307,53**	**-3.664.129.753,47**							**13.080.598.290,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.732.639.061,00**	**9.291.221.481,67**	**6.527.544.413,53**	**2.308.877.368,00**							**12.041.516.429,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik*				100 %	100 %	17.550.000,00	29.506.000,00	0,00	-17.550.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dokumen Perencanaan		7.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	520.000,00	29.506.000,00	0,00	-520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			7.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	7.644.919.400,00	8.187.397.436,00	6.034.074.776,44	-1.610.844.623,56			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur		8.214.095.436,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	7.418.719.400,00	7.954.595.436,00	5.884.081.176,44	-1.534.638.223,56	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			7.954.595.436,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00	230.150.000,00	149.993.600,00	-75.006.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	2.652.000,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum kantor*				100 %	100 %	298.415.446,00	840.696.368,67	309.072.929,29	10.657.483,29			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		1.511.164.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	10.000.000,00	8.401.380,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			169.456.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	49.000.000,00	80.441.705,00	54.593.240,00	5.593.240,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			169.298.257,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	21.520.408,00	25.084.713,00	11.656.395,00	-9.864.013,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			171.520.408,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.093.940,00	43.996.915,00	24.357.745,00	-12.736.195,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			177.093.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.531.098,00	33.020.540,00	17.744.600,00	-21.786.498,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			179.525.355,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	37 Laporan	133.270.000,00	641.763.000,00	196.670.045,29	63.400.045,29	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			633.270.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan BMD*				100 %	100 %	64.700.000,00	70.452.082,00	0,00	-64.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		52.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	1.200.000,00	70.452.082,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			52.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.665.230.170,00	91.531.810,00	166.506.507,80	-1.498.723.662,20			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		1.970.022.948,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.500.000,00	18.170.010,00	9.106.355,80	-13.393.644,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			294.177.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.245.000,00	73.361.800,00	62.157.440,00	2.912.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			115.110.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.583.485.170,00	0,00	95.242.712,00	-1.488.242.458,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			1.560.735.948,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan BMD*				100 %	100 %	31.824.045,00	61.637.785,00	17.890.200,00	-13.933.845,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		241.824.045,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	8 Unit	9.573.045,00	49.697.785,00	10.620.200,00	1.047.155,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			159.573.045,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	16 Unit	12.251.000,00	11.940.000,00	7.270.000,00	-4.981.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			82.251.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi aktif yang memiliki izin usaha simpan pinjam**				**20 usaha**	**20 usaha**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-850.000,00**							**0,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Akumulasi Koperasi Yang mendapatkan Fasilitasi Perizinan dari Koperasi Aktif*				20 usaha	20 usaha	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif**				**10 persen**	**85,71 %**	**46.200.000,00**	**39.307.500,00**	**6.450.000,00**	**274.750.747,00**							**320.950.747,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP*				12 usaha	6 koperasi	46.200.000,00	39.307.500,00	6.450.000,00	-39.750.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		320.950.747,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				12 Unit Usaha	6 Unit Usaha	45.000.000,00	39.307.500,00	6.450.000,00	-38.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			320.950.747,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan**				**2 koperasi**	**85,71 %**	**10.000.000,00**	**49.781.000,00**	**0,00**	**138.131.114,00**							**148.131.114,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan*				18 usaha	18 orang	10.000.000,00	49.781.000,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	koperasi		148.131.114,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				12 Orang	18 Orang	10.000.000,00	49.781.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			148.131.114,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan**				**210 penerima DB**	**210 penerima DB**	**99.000.000,00**	**226.061.968,00**	**20.041.824,00**	**51.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan*				250 usaha	250 usaha	99.000.000,00	226.061.968,00	20.041.824,00	-78.958.176,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20 Orang	20 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil**				**10 persen**	**95,16 %**	**415.000.000,00**	**527.632.975,00**	**83.642.574,00**	**10.000.000,00**							**425.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi*				59 usaha	59 usaha	415.000.000,00	527.632.975,00	83.642.574,00	-331.357.426,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	usaha		425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				59 Unit Usaha	59 Unit Usaha	415.000.000,00	527.632.975,00	83.642.574,00	-331.357.426,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UMK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**973.463.067,00**	**1.091.274.437,77**	**512.074.508,19**	**-461.388.558,81**							**1.112.963.704,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**361.463.067,00**	**562.498.845,00**	**84.888.654,80**	**-276.574.412,20**							**605.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan**				**-**	**73 %**	**115.000.000,00**	**16.326.860,00**	**784.215,00**	**20.000.000,00**							**135.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*				-	101 perizinan	115.000.000,00	16.326.860,00	784.215,00	-114.215.785,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku usaha		135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				135 Dokumen	101 Dokumen	115.000.000,00	16.326.860,00	784.215,00	-114.215.785,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik**				**-**	**80 %**	**20.000.000,00**	**359.731.418,00**	**63.744.935,80**	**180.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				-	14 unit	20.000.000,00	359.731.418,00	63.744.935,80	43.744.935,80			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Sarana distribusi perdagangan		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				14 Unit	14 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				25 Unit	14 Unit	10.000.000,00	359.731.418,00	63.744.935,80	53.744.935,80	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kestabilan harga barang**				**0,71 %**	**0,71 %**	**156.100.000,00**	**87.077.500,00**	**3.800.000,00**	**-36.100.000,00**							**120.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)*				15 Hari	15 Hari	116.100.000,00	87.077.500,00	3.800.000,00	-112.300.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang Barang Kebutuhan Pokok		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				24 Laporan	24 Laporan	95.000.000,00	87.077.500,00	3.800.000,00	-91.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				24 Laporan	24 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepualauan Anambas*				0,71 %	0,71 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Komoditi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				16 Laporan	16 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal**				**0 %**	**0 %**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang*				55 Pedagang	55 Pedagang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				55 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**599.000.000,00**	**528.775.592,77**	**427.185.853,39**	**-171.814.146,61**							**507.963.704,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri**				**13 orang**	**88 %**	**579.000.000,00**	**466.648.092,77**	**427.185.853,39**	**-129.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM*				88 0rang	88 %	579.000.000,00	466.648.092,77	427.185.853,39	-151.814.146,61			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku usaha industri		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	559.000.000,00	466.648.092,77	427.185.853,39	-131.814.146,61	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan**				**0 %**	**0 %**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri*				224 usaha	224 usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				25 Dokumen	25 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri**				**0 %**	**80 %**	**10.000.000,00**	**62.127.500,00**	**0,00**	**47.963.704,00**							**57.963.704,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Data Industri di dalam SINNAS*				1 %	1 Informasi	10.000.000,00	62.127.500,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		57.963.704,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				14 Dokumen	14 Dokumen	10.000.000,00	62.127.500,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			57.963.704,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibina**				**0 %**	**0 %**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000.000,00**							**0,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya PersentaseKawasantransmigrasi yang dibina*				0 %	0 %	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	transmigran		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR							**13.051.702.128,00**	**12.632.379.782,81**	**7.862.503.815,72**	**-5.189.198.312,28**							**16.524.000.166,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.078.239.061,00**	**11.541.105.345,04**	**7.350.429.307,53**	**-4.727.809.753,47**							**15.411.036.462,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.299.689.061,00**	**10.130.004.924,67**	**6.635.559.307,53**	**-3.664.129.753,47**							**13.080.598.290,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**-**	**100 %**	**9.732.639.061,00**	**9.291.221.481,67**	**6.527.544.413,53**	**2.308.877.368,00**							**12.041.516.429,00**	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum kantor*				-	100 %	298.415.446,00	840.696.368,67	309.072.929,29	10.657.483,29			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPT Pengelolaan Dana Bergulir		1.511.164.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	3.988.115,67	1.931.400,00	-2.068.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase tingkat pelayanan BLUD*				-	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPT Pengelolaan Dana Bergulir		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan**				**-**	**83,33 %**	**99.000.000,00**	**226.061.968,00**	**20.041.824,00**	**51.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan*				-	250 usaha	99.000.000,00	226.061.968,00	20.041.824,00	-78.958.176,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pelaku usaha mikro		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	90.000.000,00	226.061.968,00	20.041.824,00	-69.958.176,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UPT METROLOGI LEGAL							**13.051.702.128,00**	**12.632.379.782,81**	**7.862.503.815,72**	**-5.189.198.312,28**							**16.524.000.166,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**973.463.067,00**	**1.091.274.437,77**	**512.074.508,19**	**-461.388.558,81**							**1.112.963.704,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**361.463.067,00**	**562.498.845,00**	**84.888.654,80**	**-276.574.412,20**							**605.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**-**	**100 %**	**9.732.639.061,00**	**9.291.221.481,67**	**6.527.544.413,53**	**2.308.877.368,00**							**12.041.516.429,00**	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum kantor*				-	100 %	298.415.446,00	840.696.368,67	309.072.929,29	10.657.483,29			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPT Metrologi Legal		1.511.164.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	4.000.000,00	4.000.000,00	2.119.504,00	-1.880.496,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Peralatan yang terstandardisasi**				**-**	**96 %**	**56.363.067,00**	**95.363.067,00**	**14.440.000,00**	**88.636.933,00**							**145.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP Terkaliberasi*				-	120 Unit	56.363.067,00	95.363.067,00	14.440.000,00	-41.923.067,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	unit usaha		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				120 Unit	120 Unit	46.363.067,00	95.363.067,00	14.440.000,00	-31.923.067,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H								**13.051.702.128,00**	**12.632.379.782,81**	**7.862.503.815,72**	**-417.225.815.569,00**							**16.524.000.166,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan 2025, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah setelah dilakukan efisiensi di Tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2021-2026 dan draft Renstra 2025-2029. selanjutnya memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang akan menjadi tambahan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian melakukan Sinkronisasi dan Pergeseran anggaran menjadi perhatian khusus pada Perubahan Renja DKUMPP Tahun Anggaran 2025 ,hal ini dilakukan karena pemerintah daerah sedang melakukan upaya dalam pemulihan ekonomi. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang mengurus sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan kebutuhan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga RENJA Perubahan OPD Tahun 2025 dapat dijadikan acuan bagi seluruh

pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang sekaligus merupakan dari pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026 dan Draft RPJMD 2025-2029. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 9 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dr. MASYKUR, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS







RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Imam Bonjol Lt.3 No.03 TAREMPA 29791
Website : www.anambas.id – Email : Disparbud@anambaskab.go.id

Tarempa, 16 Juli 2025

Yth. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-
Tarempa

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/900.1.2.4/197.A/DISPARBUD/VII/2025

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Pengiriman Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.	1 Berkas	Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

Diterima tanggal

Penerima

Nomor telepon

Pengirim,
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

EFFI SJUHAIRI, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TW I **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai TWI Tahun 2025 6

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **10**

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 10

3.2. Program Dan kegiatan 16

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 19

BAB IV PENUTUP **26**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	LRFK Disparbud Sampai Dengan Triwulan I	8
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran OPD	10
Tabel 3.2	Program Dan Kegiatan Disparbud Tahun 2025	12
Tabel 3.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-OPD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing OPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruh oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral OPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral,

Renja-OPD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Perubahan Renja-OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Perubahan renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia;
   Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 baik yang mengalami perubahan atau pergeseran dalam hal nama kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, maupun kelompok sasaran.

BAB IV Penutup.

Memuat uraian penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah, pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyatakan hasil sebagai berikut:

Terdapat realisasi **5 program / 10 kegiatan** yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**

   Kegiatan :

   1.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. **Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**

   Kegiatan :

   2.1. Penetapan cagar budaya Peringkat Kabupaten/kota

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan:

   3.1. Perencanaan, Pengganggaaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   3.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   3.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   3.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

   Kegiatan :

   4.1 Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/kota

5. **Program Pemasaran Pariwisata**

   Kegiatan :

   5.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Lebih lanjut Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diamati pada tabel di halaman selanjutnya:

TABEL 2.1
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TW I
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO		SUB KEGIATAN	PAGU DPA (RP)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRESS/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
					KEUANGAN			FISIK				
					REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
					RP	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	366.450.000	4,90	-	-	-	22,88	1,12		366.450.000,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												
	2	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	68.686.000	0,92	-	-	-	18,45	0,17		68.686.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH												
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.900.000	0,44	-	-	-	14,02	0,06		32.900.000,00	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.839.403.468	64,68	709.797.328,00	14,67	9,49	25,00	16,17		4.129.606.140,00	
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	224.440.000	3,00	15.410.000,00	6,87	0,21	25,00	0,75		209.030.000,00	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.912.556	0,23	6.239.000	36,89	0,08	25,00	0,06		10.673.556,00	
	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.919.209	0,28	3.900.000	18,64	0,05	25,00	0,07		17.019.209,00	
	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.134.000	0,48	5.130.000	14,20	0,07	25,00	0,12		31.004.000,00	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	0,03	-	-	-	25,00	0,01		2.400.000,00	
	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.544.915	2,28	-	-	-	25,00	0,57		170.544.915,00	
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.443.637,17	3,91	82.914.973	28,35	1,11	25,00	0,98		209.528.664,17	

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.650.000	0,20	-	-	-	25,00	0,05		14.650.000,00	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.551.040	0,50	5.946.000	15,83	0,08	25,00	0,13		31.605.040,00	
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.049.265	0,94	3.020.000	4,31	0,04	25,00	0,23		67.029.265,00	
	15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.988.632	0,12	1.080.000	12,02	0,01	25,00	0,03		7.908.632,00	
	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.051.744	0,92	68.782.824	99,61	0,92	25,00	0,23		268.920,00	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.242.530	0,07	-	-	-	25,00	0,02		5.242.530,00	
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.460.000	0,26	-	-	-	25,00	0,07		19.460.000,00	
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.797.383,62	4,60	-	-	-	25,00	1,15		343.797.383,62	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA												
	20	Perencanaan dan Perancangan Daya tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	9.390.000	0,13	-	-	-	7,83	0,01		9.390.000,00	
	21	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	347.987.753	4,65	-	-	-	22,18	1,03		347.987.753,00	
	22	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	158.831.546	2,12	-	-	-	21,60	0,46		158.831.546,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA												
	23	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	325.404.406	4,35	-	-	-	22,28	0,97		325.404.406,00	
		JUMLAH	7.481.638.085	100	902.220.125,00	10,93	12,06	23,01	24,44		6.579.417.959,79	

2.2 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 meliputi:

1. Kemitraan antar pemerintah, swasta yang belum optimal;
2. Masih terbatasnya pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata selain daya tarik wisata utama yang menyebabkan rendahnya kunjungan dan pendeknya lama tinggal serta rendahnya pembelanjaan wisatawan;
3. Belum adanya penataan usaha pariwisata dan pendukung pariwisata di kawasan terkait;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal oleh industri pariwisata;
5. Masih minimnya pemanfaatan kawasan pariwisata melalui pengembangan usaha dan industri pendukung pariwisata;
6. Belum optimalnya pemanfaatan, perlindungan , pengembangan dan pembinaan kebudayaan;
7. Pengarusutamaan Gender;
8. Kabupaten/Kota Sehat;
9. Blue Ekonomi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahannya kurangnya Aparatur Sipil Negara Khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menguasai Perundang-undangan, Regulasi dan Peraturan yang mengatur tentang segala teknis Pariwisata secara global maupun secara spesifik. Hambatan kurangnya ada pelatihan maupun diklat untuk Aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional supaya tercipta sinergisitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran khususnya dalam hal pariwisata.

:

BAB III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai.

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
			Persentase peningkatan length of stay wisatawan
			Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Tata kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan pelayanan yang berkualitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selain itu, rumusan program dan Kegiatan mempertimbangkan juga beberapa faktor diantaranya:

1. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
2. Pengembangan Potensi Wisata Unggulan Daerah;
3. Peningkatan SDM yang berkualitas di bidang Seni dan Budaya Daerah;
4. Pengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari;
5. Pengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul Karimah dan berpayungkan budaya Melay;.
6. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
7. Kabupaten/Kota Sehat;
8. Pengarusutamaan Gender;
9. Blue Ekonomi.

Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui sejumlah program, yakni:

1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata Ekonomi dan Kreatif;
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/ kota
4. Program pengembangan Kebudayaan;
5. Program pengembangan Kesenian Tradisional;
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting sebagaimana tercantum dalam sub bab 3.2

Untuk lebih jelasnya Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditunjukkan pada tabel berikut di halaman selanjutnya:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TH 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**26**	**01**				**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan Pemerintahan**	**KKA**	**100%**	**5.961.705.858**				6.126.720.000
3	26	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	100%	200.000.000				
3	26	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	KKA	5 Dokumen	200.000.000	DAU +DBH	Prioritas	-	210.000.000
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	3.912.374.574				3.940.920.000
3	26	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	KKA	20 orang/bulan	3.721.454.574	DAU +DBH	Prioritas	100%	3.750.000.000
3	26	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dikumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KKA	1 dokumen	Rp 190.920.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 190.920.000

3	26	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	300.000.000				315.000.000
3	26	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Staf Disparbud	KKA	1 Paket	Rp -	DAU +DBH	Prioritas	1 Paket	Rp -
3	26	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan	KKA	40 orang	Rp 50.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 50.000.000
3	26	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti BIMTEK implementasi peraturan perundangan-undangan	KKA	20 orang	Rp 250.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 250.000.000
3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp 63.063.022				Rp 80.500.000
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	KKA	1 paket	Rp 20.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 25.000.000
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah lapoan fasilitas kunjungan tamu	KKA	1 laporan	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 15.000.000
3	26	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah oaket bahan logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 15.000.000
3	26	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	KKA	1 paket	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 6.000.000
3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporanpenyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	KKA	1 laporan	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 11.000.000

3	26	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaaan dan peraturan perundangan-undangan yang di sediakan	KKA	1 dokumen	Rp 8.063.022	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 8.500.000
3	26	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp10.000.000				Rp 11.000.000
3	26	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Kantor	KKA	1unit	Rp -	DAU +DBH	Prioritas	2 unit	Rp 1.000.000
3	26	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	KKA	3 unit	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas	3 unit	Rp 11.000.000
3	26	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantort	KKA	1 unit	Rp -	DAU +DBH	Prioritas	1 unit	Rp 1.000.000
3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa peninjang didinas pariwisata dan kebudayaan	KKA	100%	Rp. 1.111.025.732				Rp 1.203.000.000
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	KKA	1 laporan	Rp 75.517.734	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 76.000.000
3	26	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	KKA	1 laporan	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 6.000.000

3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	1 laporan	100%	Rp 20.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 21.000.000
3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	KKA	1 laporan	Rp 1.010.507,998	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 1.100.000.000
3	26	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp.365.242.530				Rp 366.300.000
3	26	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	KKA	5 unit	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 11.000.000
3	26	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operational atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	KKA	3 unit	Rp 5.242.530	DAU +DBH	Prioritas	100%	Rp 5.300.000
3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	KKA	3 unit	Rp 350.000.000	DAU +DBH	Prioritas	-	Rp 350.000.000
3	**26**	**02**				**Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**-**	**KKA**	**-**	**Rp 450.000.000**				**Rp 320.000.000**
3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	KKA	-	Rp 300.000.000				Rp 160.000.000
3	26	02	2	01	03	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	KKA	3 dokumen	300.000.000	DAU +DBH	Prioritas	2 Destinasi	Rp 160.000.000

3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	80%	150.000.000				Rp 160.000.000
3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	KKA	5 Unit	150.000.000	DAU +DBH	Prioritas	-	Rp 160.000.000
3	**26**	**03**				**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan**	**KKA**	**83%**	**1.150.000.000**				**Rp 1.420.000.000**
3	26	03	02	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	83%	**1.150.000.000**				**1.420.000.000**
3	26	03	02	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	3 promosi	1.000.000.000	DAU +DBH	Prioritas	2 Media pemasaran	Rp 1.200.000.000
3	26	03	02	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	1 Event/Kegiatan	100.000.000	DAU +DBH	Prioritas	2 Event/Kegiatan	Rp 160.000.000

3	26	03	02	01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	KKA	1 Dokumen	50.000.000	DAU +DBH	Prioritas	1 Kegiatan	Rp 60.000.000
3	**26**	**05**				**Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif**	**Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi**	**KKA**	**75%**	**25.000.000**				**30.000.000**
3	26	05	2	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	KKA	50 Peserta	**25.000.000**				**30.000.000**
3	26	05	2	01	01	Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	KKA	50 peserta	25.000.000	DAU +DBH	Prioritas	50 peserta	**30.000.000**
2	**22**	**02**				**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya**	**KKA**	**88%**	**400.000.000**				**500.000.000**
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk pengembangan kebudayaan	KKA	1 Kegiatan	100.000.000				150.000.000

2	2 2	0 2	2	0 2	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	KKA	1 Laporan	100.000.000	DAU +DBH	Prioritas	52 Sanggar	Rp 150.000.000
2	2 2	0 2	2	0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	KKA	1 Kegiatan	300.000.000				350.000.000
2	2 2	0 2	2	0 1	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	KKA	2 objek	300.000.000	DAU +DBH	Prioritas	1 Kegiatan	Rp 350.000.000
2	**2 2**	**0 3**				**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase pertunjukan kesenian tradisonal di kecamatan**	**KKA**	**90%**	1.095.000.000				**30.000.000**
2	2 2	0 3	2	0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	KKA	1 Kegiatan	1.095.000.000				**30.000.000**
2	2 2	0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KKA	1 Lembaga	1.095.000.000	DAU +DBH	Prioritas	5 paket	**30.000.000**
2	**2 2**	**0 5**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**KKA**	**75%**	**Rp 100.000.000**				**150.000.000**
2	2 2	0 5	2	0 1		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	KKA	2 Cagar Budaya	**Rp 100.000.000**				**150.000.000**

2	22	05	2	01	01	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	KKA	2 Objek	Rp 100.000.000	DAU +DBH	Prioritas	2 Cagar Budaya	**150.000.000**

3.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat daerah.

Alokasi anggaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan pada Rancangan Perubahan RKPD adalah sebesar Rp. 5.534.974.687,- sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	APBD TA 2025				CATATAN PENTING	PERUBAHAN RKPD 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**26**	**01**				**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan Pemerintahan**	**KKA**	**100%**	**5.984.786.726**			**100%**	**5.071.596.377**
3	26	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	100%	30.000.000			100%	12.900.000

3	26	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	5 Dokumen	30.000.000	DAU +DBH	Prioritas	5 Dokumen	12.900.000
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	4.735.143.516			100%	4.316.749.692
3	26	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	22 orang	4.542.183.516	DAU +DBH	Prioritas	22 orang	4.166.749.692
3	26	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dokumen	Rp 192.960.000	DAU +DBH	Prioritas	1 Dokumen	Rp 150.000.000
3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp 719.904.359			100%	Rp 216.143.642
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KKA	1 Paket	Rp 36.134.000	DAU +DBH	Prioritas	1 Paket	Rp 28.014.000
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	1 Laporan	Rp 300.008.400	DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 6.086.515
3	26	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KKA	1 Paket	Rp 20.919.209	DAU +DBH	Prioritas	1 Paket	Rp 16.280.615
3	26	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KKA	1 Paket	Rp 16.912.556	DAU +DBH	Prioritas	1 Paket	Rp 10.362.318

3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	Rp 343.530.194,38	DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 153.000.194,38
3	26	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KKA	1 Dokumen	Rp 2.400.000	DAU +DBH	Prioritas	1 Dokumen	Rp 2.400.000
3	26	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp 14.650.000			100%	Rp 500.000
3	26	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	3 unit	Rp 14.650.000	DAU +DBH	Prioritas	3 unit	Rp 500.000
3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp 116.588.937			100%	Rp 166.843.129
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	Rp 70.049.265	DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 60.049.265
3	26	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	Rp 8.988.632	DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 2.974.000
3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	Rp 37.551.040	DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 35.037.040

3	2 6	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				DAU +DBH	Prioritas	1 Laporan	Rp 68.782.824
3	2 6	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKA	100%	Rp 368.499.914			100%	Rp 358.459.914
3	2 6	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KKA	5 unit	Rp 19.460.000	DAU +DBH	Prioritas	5 unit	Rp 9.420.000
3	2 6	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KKA	3 unit	Rp 5.242.530	DAU +DBH	Prioritas	3 unit	Rp 5.242.530
3	2 6	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KKA	3 unit	Rp 343.797.383,62	DAU +DBH	Prioritas	3 unit	Rp 343.797.384
3	**2 6**	**0 2**				**Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan**	**KKA**	**80%**	**Rp 396.257.254**			**80%**	**Rp 350.387.753**
3	2 6	0 2	2	0 1		Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	KKA	80%	Rp 99.205.800			80%	Rp 1.000.000
3	2 6	0 2	2	0 1	0 3	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	KKA	3 Dokumen	99.205.800	DAU +DBH	Prioritas	3 Dokumen	Rp 1.000.000

3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	80%	297.051.454			80%	349.387.753
3	26	02	2	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			-	DAU +DBH	Prioritas	3 Destinasi	347.987.753
		02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	KKA	5 Unit	297.051.454	DAU +DBH	Prioritas	3Lokasi	1.400.000
3	**26**	**03**				**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan**	**KKA**	**83%**	**637.574.822**			**83%**	**Rp 56.140.557**
3	26	03	02	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	83%	637.574.822			83%	Rp 56.140.557

3	2 6	0 3	0 2	0 1	0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri kab/kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	1 Kegiatan	637.574.822	DAU +DBH	Prioritas	1 Kegiatan	Rp 56.140.557
2	**2 2**	**0 2**				**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya**	**KKA**	**88%**	**Rp 512.450.000**			**88%**	**Rp 55.850.000**
2	2 2	0 2	2	0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	KKA	1 Kegiatan	Rp 512.450.000			1 Kegiatan	Rp 55.850.000
2	2 2	0 2	2	0 1	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	KKA	2 Objek	512.450.000	DAU +DBH	Prioritas	2 Objek	Rp 55.850.000
2	**2 2**	**0 3**				**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase pertunjukan kesenian**	**KKA**	**70%**	**Rp 253.266.680**			**70%**	
2	2 2	0 3	2	0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	KKA	1 Kegiatan	Rp 253.266.680			1 Kegiatan	
2	2 2	0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KKA	1 lembaga	Rp 253.266.680	DAU +DBH	Prioritas	1 lembaga	Rp -

2	**2 2**	**0 5**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**KKA**	**75%**	**Rp 100.000.000**			**75%**	**Rp 1.000.000**
2	2 2	0 5	2	0 1		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	KKA	2 Cagar Budaya	Rp 100.000.000			2 Cagar Budaya	Rp 1.000.000
2	2 2	0 5	2	0 1	0 1	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	KKA	2 objek	Rp 100.000.000	DAU +DBH	Prioritas	2 objek	Rp 1.000.000
JUMLAH										**7.587.284.028**				**5.534.974.687**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Isi dari Rancangan Perubahan Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Rancangan Perubahan Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan- kegiatan pembangunan dan pengembangan di sektor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pelaksanaannya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program / kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemeritah

Kabupaten / Kota, Masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dan budaya sangat diharapkan untuk menyukseskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan dan pengembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemajuan pariwisata dan budaya melayu yang mengangkat harkat, memperkuat identitas melayu, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Pariwisata dan kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

EFFI SJUHAIRI, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2025



RANHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

dpmd

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Ibrahim Sattah-Air Padang, Tarempa Timur 29791

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dengan baik.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program/kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini juga dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

TETTARNITA, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 LATAR BELAKANG.....
1.2 LANDASAN HUKUM.....
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....
2.1 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH .....
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD .....
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS .....
BAB IV PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang– undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat secara berjenjang pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan.

Perubahan Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatanPembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu perencanaan yang baik.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada :

a. Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Perubahan Program dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) tahun 2025
b. Sebagai alat kendali dan evaluasi untuk efisiensi dan efektifitas.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sanpai Dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sesuai Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan :

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi**. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi keysuccess factors-nya.
- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi**. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data**. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidahkaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- **Pengolahan dan analisis data**. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

Analisis

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	82	3.450.144.201,00	31,30	880.956.810	31,30	495.979.787,00	38,17	41,46
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.711.325.477,00	15,92	880.956.810	15,92	431.764.359,00	100,00	32,49
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	2.523.527.477,00	24	859.298.810	24	410.106.359,00	100,00	34,68
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doc	12	187.798.000,00	6	21.658.000	6	21.658.000,00	100,00	16,67
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	412.100.494,00	15,58	35.094.900	15,575933	35.094.900	15,58	8,52
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.946.494,00	0	-	0	0	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	86.290.000,00	1	-	1	0	100,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	98.966.000,00	0	842.500,00	0	0	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	17.088.000,00	0,05	1.040.000,00	0,05	850.000	1,66	4,97
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	205.810.000,00	3	34.244.900,00	3	34.244.900	15,00	16,64
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	200.000.000,00	100	0	100	0	100,00	0,00
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000,00	1	0	1	0	100,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	119.408.230,00	50	29.120.528,00	100	119.408.230,00	50,00	33,59
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	84.469.602,00	6	11.490.675,00	12	84.469.602,00	50,00	26,81
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Lap	12	8.040.000,00	6	6.282.750,00	12	8.040.000,00	50,00	29,05

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
		Air dan Listrik yang Disediakan									
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	1	26.898.628,00	1	26.898.628	1	26.898.628	100,00	100,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	7.310.000,00	20,00	800.000	100	7.310.000	20,00	10,00
2.13.01.2.09.01	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Unit	10	7.310.000,00	2	800.000	10	7.310.000	20,00	10,94
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Perentase Penataan Desa	%	33,33	292.321.733,00	0	0	33,33	292.321.733,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di lakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa	Desa	12	292.321.733,00	0	0	12	292.321.733,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	12	292.321.733,00	0	0	12	292.321.733,00	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa, Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkat Kapasitasnya	%	39,15	1.164.636.400	26,1	239.269.676	26,1	239.269.676	66,67	20,54
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Aparatur Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa	%	39,15	1.164.636.400	26,1	239.269.676	26,1	239.269.676	66,67	20,54
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dok	1	1.022.498.400,00	0,5	472.345.808	1	1.022.498.400,00	50,00	48,55
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dok	1	78.378.000,00	0,1	1.950.000	1	78.378.000,00	0,00	2,09
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dok	1	12.680.000,00	0	0	1	12.680.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	52	26.050.000,00	0	0	52	26.050.000,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	12	19.980.000,00	0	0	12	19.980.000,00	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dok	1	5.050.000,00	0	0	1	5.050.000,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	9,62	234.374.985,00	3,85	14.960.000,00	3,85	14.960.000	40,40	6,38
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Persentase PKK Aktif	%	9,375	234.374.985,00	3,85	14.960.000,00	3,85	14.960.000	41,07	6,38

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub kegiatan (Output)	Sat	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	27.270.700,00	0,11	2.900.000	0,11	2.900.000	10,63	10,63
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	207.104.285,00	0,13	26.502.774	0,13	26502774	12,80	12,80

Dari tabel 2.1 dapat kita ketahui bahwa Rata – rata Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala terkait realisasi anggaran.

Penjelasan capaian target Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun 2025 Indikator sasaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 5 indikator program, 8 kegiatan dengan 9 indikator dan 22 Sub Kegiatan dengan 22 indikator.

b) 5 indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target periode Renstra.

c) Dari 9 indikator kinerja kegiatan dan 22 Indikator kinerja subkegiatan masih dalam proses pelaksanaan dimana semua tergantung dari kondisi keuangan pemerintah daerah dan upaya semua lapisan pemda dan masyarakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan sampai triwulan II yakni Anggaran tahun 2025 dengan usulan sebesar **Rp. 5.155.061.319,-** terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan. Pada tahun berjalan di Triwulan II Realisasi sebesar Rp. 1.466.254.845,00 (**28,62%**).

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

a. Sedang dalam tahap optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang memungkinkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
b. Belum dipahaminya secara utuh dan menyeluruh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di desa secara optimal
b. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan di desa
c. Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

Tabel 2.2
Reviu Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Renstra dan RPJMD 2021 – 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Urusan	Nomenklatur Program	Indikator	Target	Realisasi s/d TW II
Urusan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	82	45,44
	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	33,33	0
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	9,62	3,85
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	50
		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkat Kapasitasnya	39,15	26,1

Tabel 2.3
Keterlibatan Gender di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Data : 2025

No	2024			2025		
	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1.	13	12	25	6	6	12

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 12 Aparatur Sipil Negara (ASN), Dimana Laki-Laki ada 6 Orang dan Perempuan ada 6 Orang. Rata-rata Anggota Perempuan 50% sama dibandingkan Anggota laki-laki 50% yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator	SPM/ Stan Nas	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
Persentase pengentasan desa tertinggal		√	0	0	0	0	100	100	0	0	
Persentase peningkatan status desa mandiri		√	3,8	5,8	7,7	13,5	21,15	21,15	25	27	

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 52 Desa se- Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Indeks Desa Membangun (**IDM**) tahun 2024 dengan nilai **72,94%** sedangkan target RPJMD tahun 2024 sebesar **73,85%** yang dapat di kategorikan sebagai desa Maju. Nilai IDM Keb. Kepulauan Anambas telah berada di atas Rata-Rata **IDM Nasional** Sebesar **70,34%**.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan -permasalahan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.

2. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
5. Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
6. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budayamasyarakat
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
8. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif.
9. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
10. Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkankembangkan perekonomian desa.
11. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
12. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
14. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
15. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
17. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
18. Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
19. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Dampak

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembanguna.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas

Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan pelayanan antara lain:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Kualitas SDM belum optimal.
4. Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
5. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa.
8. Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas,

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebaga Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (Controllable) adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa

   Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 Perubahan, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran.

Dalam melaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupatan Kepulauan Anambas baik disekretariat maupun bidang-bidang.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi yang bersifat internal organisasi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Perubahan dan penyesuaian rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan. Berikut ini Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta sasarannya :

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah
1	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
4	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah
6	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Perentase Penataan Desa
7	*Penyelenggaraan Penataan Desa*	Jumlah Desa yang di lakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
3	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa, Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkat Kapasitasnya
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Aparatur Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Persentase PKK Aktif
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.164.914.840,00	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70							10.549.591.810,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.914.840,00	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70							10.549.591.810,00	
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.164.914.840,00	5.670.382.123,00	5.144.521.811,70							10.549.591.810,00	
1	2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	82 %	4.014.914.840,00	3.509.106.205,00	3.307.680.893,70							4.899.591.810,00	
	2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	-			-	100 %	2.655.839.400,00	2.607.844.368,00	2.607.844.368,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN dan PTT		3.042.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.510.399.400,00	2.477.896.368,00	2.495.672.439,70	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi			2.897.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	145.440.000,00	129.948.000,00	149.798.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi			145.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	619.990.600,00	622.591.291,00	622.591.291,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.070.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.990.600,00	3.946.494,00	935.812,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	249.268.797,00	86.290.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	82.000.000,00	58.816.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.588.000,00	17.088.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	277.788.000,00	166.297.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)		Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	479.084.840,00	64.478.602,00	64.478.602,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		547.151.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	24.999.400,00	42.854.602,00	74.956.102,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			88.066.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	21.624.000,00	21.624.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	429.085.440,00	0,00	28.893.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			429.085.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	60.000.000,00	14.191.944,00	14.191.944,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	6.881.944,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa				0 7,7 80,77 % % %	33,33 %	700.000.000,00	363.168.733,00	292.321.733,00							850.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	-			-	33,33 %	700.000.000,00	363.168.733,00	363.168.733,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Desa		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				18 Desa	18 Desa	200.000.000,00	363.168.733,00	292.321.733,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				52 Desa	52 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				18 Desa	18 Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				18 Unit	18 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama				25 %	25 %	250.000.000,00	0,00	0,00							400.000.000,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	-	250.000.000,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Desa		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa				73 %	100 %	2.100.000.000,00	1.255.534.400,00	1.100.076.400,00							2.800.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan	-			-	100 %	2.100.000.000,00	1.255.534.400,00	1.255.534.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Desa		2.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	1.029.498.400,00	1.029.948.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	93.428.000,00	60.378.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	25.080.000,00	2.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	57.428.000,00	1.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				18 Desa	18 Desa	100.000.000,00	40.100.000,00	1.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)				42 %	9,62 %	1.100.000.000,00	542.572.785,00	444.442.785,00							1.600.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-			-	9,38 %	1.100.000.000,00	542.572.785,00	542.572.785,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi	Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	103.960.000,00	5.830.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	438.612.785,00	438.612.785,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
												J U M L A H	**8.164.914.840,00**	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**							**10.549.591.810,00**	

REKAPITULASI PENDANAAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Kode Rekeninig	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	APBD 2025 (Rp)	RKPD-P 2025 (Rp)
1	2	3	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.509.106.205,00**	**3.307.680.893,70**
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.607.844.368,00	2.645.470.439,70
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.591.291,00	329.427.212,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.478.602,00	125.473.242,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.191.944,00	7.310.000,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**363.168.733,00**	**292.321.733,00**
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	363.168.733,00	292.321.733,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.255.534.400,00**	**1.100.076.400,00**
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.255.534.400,00	1.100.076.400,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**542.572.785,00**	**444.442.785,00**
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	542.572.785,00	444.442.785,00
	TOTAL	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**
	Selisih	**(525.860.311,30)**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yang mengalami perubahan akibat defisit anggaran serta bertambahnya jumlah PPPK yang masuk dan harus diakomodir gaji dan tunjangannya, sehingga mempengaruhi target perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksanaan Rencana Kerja perlu dimonitoring dan dievaluasi agar hasilnya dapat dijadikan dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya.

Tarempa, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009



LAMPIRAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**8.164.914.840,00**	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**	**-3.020.393.028,30**							**10.549.591.810,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.164.914.840,00**	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**	**-3.020.393.028,30**							**10.549.591.810,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.164.914.840,00**	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**	**-3.020.393.028,30**							**10.549.591.810,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**82 %**	**4.014.914.840,00**	**3.509.106.205,00**	**3.307.680.893,70**	**884.676.970,00**							**4.899.591.810,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas* *Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD*				-	100 %	2.655.839.400,00	2.607.844.368,00	2.645.470.439,70	-10.368.960,30			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN dan PTT		3.042.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.510.399.400,00	2.477.896.368,00	2.495.672.439,70	-14.726.960,30	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			2.897.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	145.440.000,00	129.948.000,00	149.798.000,00	4.358.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			145.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	619.990.600,00	622.591.291,00	329.427.212,00	-290.563.388,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.070.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.990.600,00	3.946.494,00	935.812,00	-3.054.788,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	249.268.797,00	86.290.000,00	-163.710.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	82.000.000,00	58.816.000,00	52.816.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.588.000,00	17.088.000,00	7.088.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	277.788.000,00	166.297.400,00	-183.702.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	479.084.840,00	64.478.602,00	125.473.242,00	-353.611.598,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		547.151.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	24.999.400,00	42.854.602,00	74.956.102,00	49.956.702,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			88.066.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	21.624.000,00	21.624.000,00	-3.376.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	429.085.440,00	0,00	28.893.140,00	-400.192.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			429.085.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.000.000,00	14.191.944,00	7.310.000,00	-52.690.000,00			-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	6.881.944,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	-22.690.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**				**0 7,7 80,77 % % %**	**33,33 %**	**700.000.000,00**	**363.168.733,00**	**292.321.733,00**	**150.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik*				-	33,33 %	700.000.000,00	363.168.733,00	292.321.733,00	-407.678.267,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Desa		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				18 Desa	18 Desa	200.000.000,00	363.168.733,00	292.321.733,00	92.321.733,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				52 Desa	52 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				18 Desa	18 Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				18 Unit	18 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**				**25 %**	**25 %**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Desa		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**				**73 %**	**100 %**	**2.100.000.000,00**	**1.255.534.400,00**	**1.100.076.400,00**	**700.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang mendapat pembinaan*				-	100 %	2.100.000.000,00	1.255.534.400,00	1.100.076.400,00	-999.923.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Desa		2.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	1.029.498.400,00	1.029.948.400,00	-120.051.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	93.428.000,00	60.378.000,00	-139.622.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	25.080.000,00	2.600.000,00	-147.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	57.428.000,00	1.050.000,00	-198.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				18 Desa	18 Desa	100.000.000,00	40.100.000,00	1.050.000,00	-98.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	-194.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				**42 %**	**9,62 %**	**1.100.000.000,00**	**542.572.785,00**	**444.442.785,00**	**500.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*				-	9,38 %	1.100.000.000,00	542.572.785,00	444.442.785,00	-655.557.215,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	103.960.000,00	5.830.000,00	-144.170.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	438.612.785,00	438.612.785,00	-61.387.215,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**8.164.914.840,00**	**5.670.382.123,00**	**5.144.521.811,70**	**-3.020.393.028,30**							**10.549.591.810,00**	

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diselesaikan. Penyelesaian Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara signifikan dan melihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

WAN MAKHDAR, S. Pd. SD
Pembina /IV.a
NIP. 19691101 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... 1
BAB I. PENDAHULUAN
I. Latar Belakang..... 2
II. Landasan Hukum 3
III.Maksud dan Tujuan 6
IV.Sistematika Penulisan 7
BAB II.EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 11
I. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... 11
II. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 15
III. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 27
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 35
BAB IV. PENUTUP..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD).

Rancangan Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2026.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) awal dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra OPD dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun berjalan, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 smpai dengan triwulan II tahun berjalan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD,permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2025 TRIWULAN II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pagu pada pergeseran V sebelumnya sebesar Rp 7.541.370.790.73,00. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.269.557.314,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 30,09%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2025 "***Cukup Baik***" dimana pencapaian realisasi keuangan dari 2 (dua) Program dan 7 (delapan) Kegiatan serta 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan (30,09%).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagian dapat dilaksanakan dengan baik dimana sebagaian capaian Indikator diatas target yang telah ditetapkan tercapai namun perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan yang lebih baik.

Review pelaksanakan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel:

Tabel 2.1

Reviu Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu DPA	Realisasi	%	Selisih (Rp)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**7.541.370.790,73**	**2.269.557.314,00**	**30,09**	**5.271.813.476,73**

2	13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MSYARAKAT**	**7.541.370.790,73**	**2.269.557.314,00**	**30,09**	**5.271.813.476,73**
2	13	02			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.165.443.279,73**	**2.269.557.314,00**	**31,67**	**4.895.885.965,73**
2	13	02	2.01		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.295.184.228,17**	**952.078.720**	**32,67**	**4.238.681.794,17**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.197.664.228,17	2.036.552.434,00	32,86	4.161.111.794,17
2	13	02	2.01	06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.520.000	19.950.000,00	20,46	77.570.000,00
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**14.384.000,00**	**2.697.000,00**	**18,75**	**11.687.000,00**
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.384.000,00	2.697.000,00	18,75	11.687.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**273.850.201,47**	**43.950.179,00**	**16,05**	
					Pnyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.605.648	1.674.000,00	14,42	9.931.648,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.101.779,39	0	0,00	5.101.779,39
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pnggandaan	29.288.800	1.760.000,00	6,01	27.528.800,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.786.434	19.446.179,00	23,49	63.340.255,08
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.067.540,00	21.070.000,00	14,52	123.997.540,00
					Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**226.607.827,09**	**0**	**0,00**	**226.607.827,09**

					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	4.810,56	0	0,00	4.810,56
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.942,46	0	0,00	5.942,46
					Pengadaan Mebel	49.511.569,07	0	0,00	49.511.569,07
					Pengadaan gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	177.085.505,00	0	0,00	177.085.505,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**299.009.843,00**	**166.407.701,00**	**55,65**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.418.129,00	3.464.000,00	3,75	88.954.129
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.004.914,00	158.004.914,00	100,00	0
					Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	48.586.800,00	4.938.787,00	10,16	43.648.013
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**56.407.180,00**	**0**	**0,00**	**66.557.180**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, dan Pajak Kendaraan Prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.560.000,00	0	0,00	34.560.000
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	21.847.180,00	0	0,00	31.997.180
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**375.927.511,00**	**0**	**0,00**	**375.927.511,00**
					Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota.	**375.927.511,00**	**0**	**0,00**	**375.927.511,00**

					Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	879,79	0	0,00	879,79
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung Diri	375.926.631,21	0	0,00	375.926.631,21

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 karena kurangnya pendapatan daerah dan penerimaan keuangan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan. Sehingga realisasi kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

II.2. *Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi*

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 38 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
d. Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;

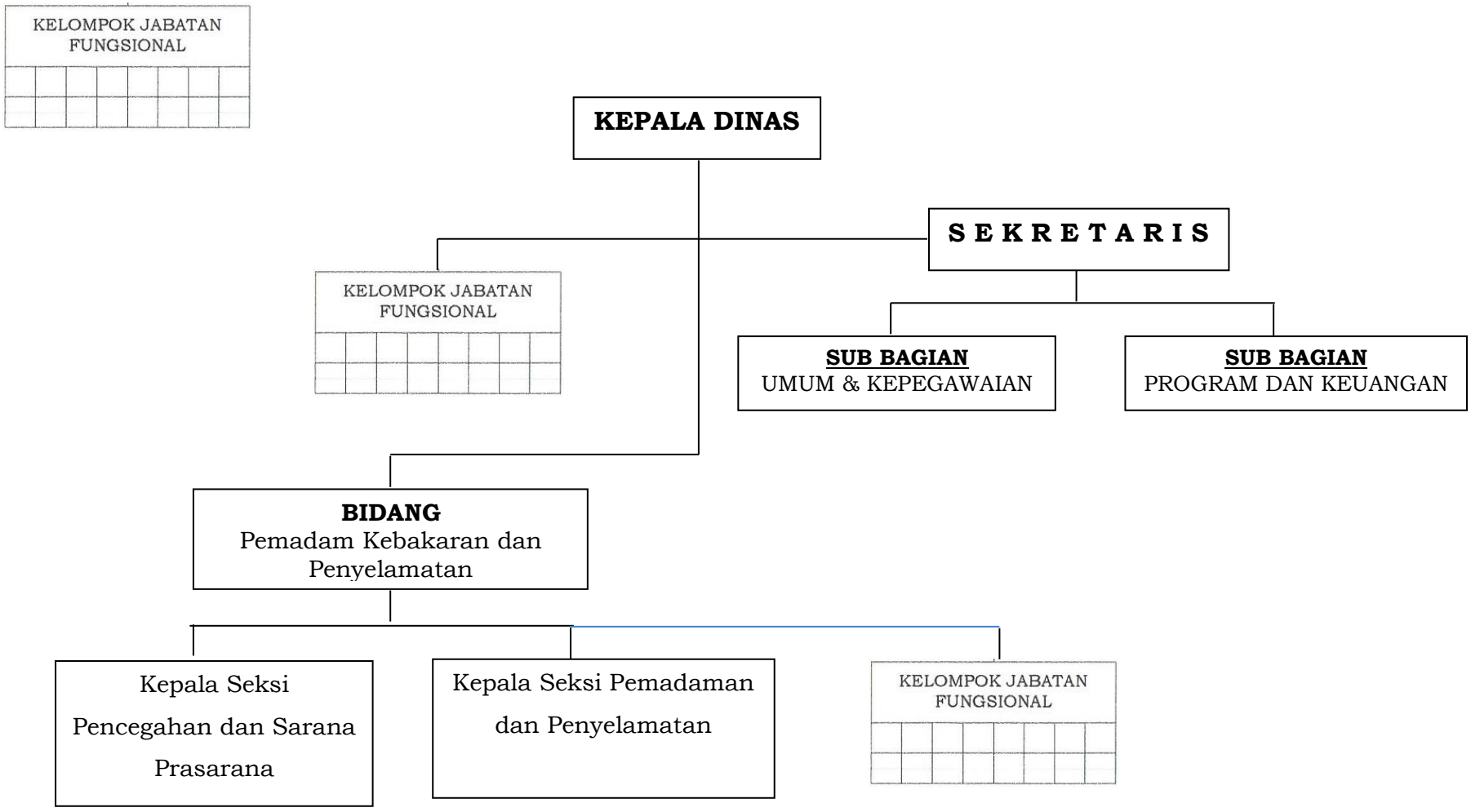
e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
h. Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
i. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
m. Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
   2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian
   2.2. Subbag Program dan Keuangan

3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
   3.1. Kepala Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana
   3.2. Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran;
d. Penyelamatan pada kejadian kebakaran, dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan evakuasi;
e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar;
f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
h. Penyelidikan penyebab kebakaran, dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
i. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung pemerintah/swasta/masyarakat;
l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
m. Penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas & fungsi Kepala Dinas Pendapatan membawahi:

I. Sekretariat dengan 2 sub bagian yaitu:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Program dan Keuangan; dan

II. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan 2 seksi yaitu:
   a. Seksi Pencegahan dan Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PKDP, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fingsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
b. koordinasi kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Damkar dan Penyelamatan;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbaggian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal Dinas Damkar dan Penyelamatan;
b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;

c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
e. Melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan ruangan kerja dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Subbaggian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan;
e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Dinas Damkar dan Penyelamatan dan Damkar;

f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
g. menyusun laporan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
h. menyusun indikator kinerja utama Dinas Damkar dan Penyelamatan;
i. mengkoodinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lengkap Dinas Damkar dan Penyelamatan;
j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas Damkar dan Penyelamatan;
k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamataan;
n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersipkan kelengkapannya; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
a. merumuskan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
b. melakukan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
c. melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. menyiapkan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
e. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center*;
f. menyelenggarakan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta

pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;

g. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;

h. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;

i. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaarn dan terdampak kebakaran;

j. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran;

k. menyiapkan perencanaan, identifikasi standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

l. menyiapkan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara integrasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah serta pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

n. melaksankaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;

p. melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelematan; dan

q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan sarana prasarana;
b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
c. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
e. melakukan pengumpulan data analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakran dan dokumen rencana induk system proteksi kebakaran;
f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
g. melakukan perencanaan kebijakan analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
i. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran Gedung;
j. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
k. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi standardisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
l. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri

petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

m. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dn penyelamaan, alat pelindung diri petugas dan sarana parsarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
n. menyelenggarakan analis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bgi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
o. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
p. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
q. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah;
r. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
s. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
t. melaksankan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan instansi terkait sesuai dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pencegahan dan sarana prasarana;
v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pencegahan dan sarana prasarana; dan
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan;
b. merencanakan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan

rencana operasi pemadaman;

c. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran;
d. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
e. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
f. menyelenggarakan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
g. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
h. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
i. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
j. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
k. merencanakan dan Menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
l. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
m. menyelenggarakan *command center*, koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalm penyelenggaraan operasi para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi operasi darurat non kebakaran lainnya;
n. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
o. menyelenggarakan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
p. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
q. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi

membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

r. menyelenggarakan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
s. melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pemadaman dan penyelamatan;
v. menyiapkan administrasi pemerintah seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah penting dalam proses perencanaan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, isu-isu strategis ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap tugas, fungsi, dan berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi. Penentuan ini mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

1. Peningkatan Pelayanan Publik

   Salah satu isu utama adalah meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan penanganan bencana lainnya. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, keterjangkauan wilayah terpencil, serta respon waktu yang belum optimal. Hal ini memerlukan strategi untuk memperluas akses layanan, modernisasi sarana prasarana, dan optimalisasi sumber daya manusia. Dalam peningkatan Pelayanan Publik menggunakan metode Seriousness.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

   Dinas menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Isu ini

berfokus pada penguatan tata kelola organisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Upaya reformasi diperlukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola menggunakan metode Urgency.

3. Mitigasi dan Pencegahan Risiko Bencana

   Tingginya potensi kebakaran dan bencana lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan mitigasi dan pencegahan sebagai isu penting. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Strategi komunikasi risiko dan edukasi publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam Mitigasi dan Pencegahan Risiko Bencana menggunakan metode Growth.

4. Pengelolaan Aset Daerah

   Pengelolaan barang milik daerah menjadi isu yang krusial karena penting untuk mendukung kelancaran operasional dinas. Tantangan berupa belum optimalnya inventarisasi dan pemeliharaan aset memerlukan solusi berupa implementasi sistem manajemen aset yang modern dan terintegrasi. Dalam Penguatan Kolaborasi dan Sinergi menggunakan metode Urgency.

5. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi

   Koordinasi lintas instansi dan sinergi dengan pihak terkait menjadi tantangan lain yang harus ditangani. Dengan memperkuat kolaborasi, dinas dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan bencana yang memerlukan kerja sama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam Penguatan Kolaborasi dan Sinergi menggunakan metode Urgency.

Penentuan isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam menyusun rencana strategis dan program prioritas yang akan diimplementasikan selama periode 2025-2029. Dengan mengidentifikasi isu-isu utama secara komprehensif, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat memastikan langkah-langkah pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,

menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Permasalahan tersebut dapat dirinci berdasarkan masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan di Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

   Masih terdapat kendala dalam pengumpulan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang optimal dalam menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

   Koordinasi antar unit kerja dan dengan instansi terkait lainnya sering terkendala oleh perbedaan prioritas, mekanisme kerja, dan keterbatasan komunikasi yang efektif.

3. Pembinaan dan Dukungan Administrasi Internal

   Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi internal menyebabkan kurangnya efisiensi dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas administratif. Selain itu, belum semua unit organisasi memiliki kemampuan yang memadai untuk mengadopsi sistem manajemen modern.

4. Supervisi dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

   Mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk fungsi pengawasan.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dinas belum dilakukan secara optimal, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data dan potensi kerusakan aset yang tidak terdeteksi secara dini.

6. Pengawasan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dinas

   Belum adanya mekanisme evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan indikator pencapaian tugas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa

seluruh unit kerja telah berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan dinas.

Identifikasi permasalahan ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah perbaikan yang lebih terarah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas,

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tantangan sekaligus peluang yang dapat menjadi pijakan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas ke depan. Tantangan dan peluang ini perlu dipetakan secara komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur

   Jumlah personel yang belum memadai dan keterampilan teknis yang masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi kebutuhan layanan yang semakin kompleks.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

   Beberapa peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan masih menggunakan teknologi lama dan terbatas, sehingga memengaruhi efektivitas operasional di lapangan.

3. Keterbatasan anggaran

   Alokasi dana yang terbatas menjadi kendala dalam pengadaan peralatan baru, pelatihan SDM, dan pengembangan program strategis lainnya.

4. Sistem manajemen data yang belum terintegrasi

   Belum adanya sistem informasi terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat.

Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menghadapi beberapa tantangan yang yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Geografis wilayah kepulauan

   Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau yang menyulitkan aksesibilitas dan distribusi layanan secara merata.

2. Peningkatan risiko kebakaran dan bencana lainnya

   Pertumbuhan permukiman dan perubahan iklim meningkatkan potensi risiko kebakaran dan bencana alam, sehingga menuntut respons yang lebih cepat dan tepat.

3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

   Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran dan mitigasi risiko bencana menjadi tantangan dalam mengurangi potensi insiden.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah

   Adanya prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang mendukung penguatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2. Kemajuan teknologi

   Perkembangan teknologi memungkinkan pengadaan alat pemadam kebakaran modern, sistem informasi berbasis digital, dan aplikasi pelaporan masyarakat yang mempercepat respons layanan.

3. Kolaborasi dengan pihak eksternal

   Peluang kerja sama dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan donor internasional dalam penyediaan sarana dan peningkatan kapasitas SDM.

4. Kesadaran masyarakat yang mulai meningkat

   Kampanye publik dan sosialisasi yang intensif mulai membuahkan hasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan mitigasi risiko bencana.

5. Potensi peningkatan anggaran

   Jika dinas dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi target capaian, peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat semakin besar.

6. Penguatan jaringan komunikasi dan transportasi

   Investasi infrastruktur di wilayah kepulauan membuka peluang untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas layanan dinas.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, dapat diformulasikan isu- isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Kabupaten Layak Anak;
2. Kabupaten/Kota Sehat;
3. Stunting;
4. Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
5. Inovasi Daerah;
6. Pengarusutamaan Gender.

Tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemedam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 masih mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dituntut untuk meningkatkan derajat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanah pembangunan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2025-2030 yaitu ***"Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Yang Maju dan Sejahtera.*** Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui lima misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Periode 2025-2029.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Capaian Rancangan Renja Tahun 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi		B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah KKA	63	70	75	80	85
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya pelayanan akibat bencana kebakaran dan penyelamatan	Rata-rata waktu tanggap layanan (response time)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	≤10	≤10	≤9	≤9	≤8
			Persentase cakupan layanan kebakaran	Jumlah cakupan Layanan kebakaran dalam waktu tanggap DIBAGI DENGAN jumlah kejadian kebakaran DIKALI 100%	70%	75%	80%	85%	90%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran.

Dalam melaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal rencana kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupatan Kepulauan Anambas baik disekretariat maupun bidang-bidang.

Dengan adanya pergeseran kelima adanya efisiensi anggaran maka pagu Dinas Pemadam Kebakaran mengalami penurunan sebesar Rp 3.693.363.758,27 baik dari beberapa kegiatan, sehingga pagu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pengentrian terakhir APBD-P saat ini sebesar Rp 7.490.408.978 terlampir Rekapan RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi yang bersifat internal organisasi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya.

Tabel 3.1.

REKAPITULASI SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BERDASARKAN KLASIFIKASI BELANJA

Kode Rekeninig	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)
1	2	3	4	5
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.115.919.178**	**49.524.101**	-
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.295.184.228**	**0**	
1.05.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.197.664.228	0	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.520.000	0	
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.384.000**	**0**	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.384.000	0	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273.848.422**	**1.779**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.605.648	0	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	1.779	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.786.434	0	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.288.800	0	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.067.540	0	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**177.085.505**	**49.522.322**	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	0	4.811	

1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5.942	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	49.511,569	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.085.505	0	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**299.009.843**	**0**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.418.129	0	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.586.800	0	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.004.914	0	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.407.180**	**0**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.560.000	0	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.847.180	0	
1.05.02	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**90.656.600**	**285.270.911**	
1.05.02.2.01	**Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota**	**90.656.600**	**285.270.911**	
1.05.02.2.01.02	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	0	880	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	90.656.600	285.270.031	
TOTAL		**7.206.575.778**	**334.795.012**	

Tabel 3.2.

REKAPITULASI SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BERDASARKAN KLASIFIKASI BELANJA

Kode Rekeninig	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)
1	2	3	4	5
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.064.957.365**	**49.524.101**	-
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.152.247.090**	**0**	
1.05.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.068.727.090	0	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.520.000	0	
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.384.000**	**0**	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.384.000	0	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**331.425.327**	**1.779**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.482.553	0	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	1.779	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.786.434	0	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.288.800	0	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.767.540	0	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**211.483.925**	**49.522.322**	

1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	0	4.811	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	5.942	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	49.511,569	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.483.925	0	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**299.009.843**	**0**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.418.129	0	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.586.800	0	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.004.914	0	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.407.180**	**0**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.560.000	0	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.847.180	0	
1.05.02	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**90.656.600**	**285.270.911**	
1.05.02.2.01	**Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota**	**90.656.600**	**285.270.911**	
1.05.02.2.01.02	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	0	880	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	90.656.600	285.270.031	
TOTAL		**7.155.613.965**	**334.795.012**	

BAB IV
P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanganan bahaya kebakaran dan pencegahan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengutamakan pelayanan masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) dalam meningkatkan keefektifan pelayanan. Tanpa Adanya Sarana dan Prasarana yang belum memadai maka pelayanan yang diberikan bisa berdampak negatif bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rancangan Akhir Rancangan Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

WAN MAKHDAR, S. Pd. SD
Pembina /IV.a
NIP. 19691101 199301 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 8.268.950.742	Rp. 953.160.798			Rp. 9.222.111.540	Rp. 7.155.613.965	Rp. 334.795.012			Rp. 7.490.408.978	Rp. 25.737.011.756,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp. 8.268.950.742	Rp. 953.160.798			Rp. 9.222.111.540	Rp. 7.155.613.965	Rp. 334.795.012			Rp. 7.490.408.978	Rp. 25.737.011.756,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.215.550.742	Rp. 226.137.007			Rp. 8.441.687.749	Rp. 7.064.957.365	Rp. 49.524.101			Rp. 7.114.481.467	Rp. 23.672.431.556,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 7.474.859.246				Rp. 7.474.859.246	Rp. 6.152.247.090				Rp. 6.152.247.090	Rp. 10.891.127.183,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.395.059.246				Rp. 7.395.059.246	Rp. 6.068.727.090				Rp. 6.068.727.090	Rp. 10.772.567.183,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 79.800.000				Rp. 79.800.000	Rp. 83.520.000				Rp. 83.520.000	Rp. 118.560.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 10.788.000				Rp. 10.788.000	Rp. 14.384.000				Rp. 14.384.000	Rp. 10.788.000,00
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 10.788.000				Rp. 10.788.000	Rp. 14.384.000				Rp. 14.384.000	Rp. 10.788.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 369.525.882	Rp. 86.384.165			Rp. 455.910.047	Rp. 331.425.327	Rp. 1.779			Rp. 331.427.106	Rp. 1.039.638.454,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.475.648				Rp. 9.475.648	Rp. 62.482.553				Rp. 62.482.553	Rp. 2.261.354,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.050.000	Rp. 86.384.165			Rp. 97.434.165	Rp. 5.100.000	Rp. 1.779			Rp. 5.101.779	Rp. 389.818.400,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.981.434				Rp. 64.981.434	Rp. 82.786.434				Rp. 82.786.434	Rp. 51.799.200,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 15.238.800				Rp. 15.238.800	Rp. 29.288.800				Rp. 29.288.800	Rp. 19.669.500,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 268.780.000				Rp. 268.780.000	Rp. 151.767.540				Rp. 151.767.540	Rp. 576.090.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 177.085.505	Rp. 139.752.842			Rp. 316.838.347	Rp. 211.483.925	Rp. 49.522.322			Rp. 261.006.247	Rp. 8.926.130.885,00
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			Rp. 48.105.593			Rp. 48.105.593		Rp. 4.811			Rp. 4.811	Rp. 545.876.910,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Rp. 59.424.564			Rp. 59.424.564		Rp. 5.942			Rp. 5.942	Rp. 8.044.233.075,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa			Rp. 32.222.685			Rp. 32.222.685		Rp. 49.511.569			Rp. 49.511.569	Rp. 185.982.200,00
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 177.085.505				Rp. 177.085.505	Rp. 211.483.925				Rp. 211.483.925	Rp. 150.038.700,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 124.654.929				Rp. 124.654.929	Rp. 299.009.843				Rp. 299.009.843	Rp. 2.709.448.646,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 76.068.129				Rp. 76.068.129	Rp. 92.418.129				Rp. 92.418.129	Rp. 36.533.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 48.586.800				Rp. 48.586.800	Rp. 48.586.800				Rp. 48.586.800	Rp. 35.243.350,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 158.004.914				Rp. 158.004.914	Rp. 2.637.672.296,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 58.637.180				Rp. 58.637.180	Rp. 56.407.180				Rp. 56.407.180	Rp. 95.298.388,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 26.640.000				Rp. 26.640.000	Rp. 34.560.000				Rp. 34.560.000	Rp. 9.540.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.997.180				Rp. 31.997.180	Rp. 21.847.180				Rp. 21.847.180	Rp. 85.758.388,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp. 53.400.000	Rp. 727.023.791			Rp. 780.423.791	Rp. 90.656.600	Rp. 285.270.911			Rp. 375.927.511	Rp. 2.064.580.200,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 53.400.000	Rp. 727.023.791			Rp. 780.423.791	Rp. 90.656.600	Rp. 285.270.911			Rp. 375.927.511	Rp. 2.064.580.200,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 26.393.820			Rp. 26.393.820		Rp. 880			Rp. 880	Rp. 96.608.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa		Rp. 53.400.000	Rp. 700.629.971			Rp. 754.029.971	Rp. 90.656.600	Rp. 285.270.031			Rp. 375.926.631	Rp. 1.967.972.200,00
Jumlah									**Rp. 8.268.950.742**	**Rp. 953.160.798**			**Rp. 9.222.111.540**	**Rp. 7.155.613.965**	**Rp. 334.795.012**			**Rp. 7.490.408.978**	**Rp. 25.737.011.756,00**

Kab. Kepulauan Anambas, ...
Kepala DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

WAN MAKHDAR, S.Pd.SD
NIP. 196911011993101001

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**11.234.734.549,00**	**9.222.111.540,00**	**7.541.370.790,73**	**-3.693.363.758,27**							**25.737.011.756,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.234.734.549,00**	**9.222.111.540,00**	**7.541.370.790,73**	**-3.693.363.758,27**							**25.737.011.756,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.234.734.549,00**	**9.222.111.540,00**	**7.541.370.790,73**	**-3.693.363.758,27**							**25.737.011.756,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.401.851.645,00**	**8.441.687.749,00**	**7.165.443.279,73**	**13.270.579.911,00**							**23.672.431.556,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	6.329.745.841,00	7.474.859.246,00	6.295.184.228,17	-34.561.612,83			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Damkar		10.891.127.183,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.223.425.841,00	7.395.059.246,00	6.197.664.228,17	-25.761.612,83	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			10.772.567.183,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	106.320.000,00	79.800.000,00	97.520.000,00	-8.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			118.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	10.788.000,00	10.788.000,00	14.384.000,00	3.596.000,00			-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Damkar		10.788.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.788.000,00	10.788.000,00	14.384.000,00	3.596.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			10.788.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	435.551.174,00	455.910.047,08	273.850.201,47	-161.700.972,53			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.039.638.454,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.138.838,00	9.475.648,00	11.605.648,00	9.466.810,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			2.261.354,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.037.773,00	97.434.165,00	5.101.779,39	-63.935.993,61	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			389.818.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	53.623.170,00	64.981.434,08	82.786.434,08	29.163.264,08	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			51.799.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.091.393,00	15.238.800,00	29.288.800,00	-11.802.593,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			19.669.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	269.660.000,00	268.780.000,00	145.067.540,00	-124.592.460,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			576.090.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	873.889.103,00	316.838.346,92	226.607.827,09	-647.281.275,91			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Damkar		8.926.130.885,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	73.427.388,00	48.105.592,92	4.810,56	-73.422.577,44	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			545.876.910,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	646.469.343,00	59.424.564,00	5.942,46	-646.463.400,54	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			8.044.233.075,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	3.953.672,00	32.222.685,00	49.511.569,07	45.557.897,07	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			185.982.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.038.700,00	177.085.505,00	177.085.505,00	27.046.805,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			150.038.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	2.710.688.471,00	124.654.929,00	299.009.843,00	-2.411.678.628,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD Damkar		2.709.448.646,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	48.904.175,00	76.068.129,00	92.418.129,00	43.513.954,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			36.533.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.112.000,00	48.586.800,00	48.586.800,00	24.474.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			35.243.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.637.672.296,00	0,00	158.004.914,00	-2.479.667.382,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			2.637.672.296,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	41.189.056,00	58.637.180,00	56.407.180,00	15.218.124,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Masyarakan Kabupaten Kepulauan Anambas		95.298.388,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	11.915.400,00	26.640.000,00	34.560.000,00	22.644.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			9.540.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	29.273.656,00	31.997.180,00	21.847.180,00	-7.426.476,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			85.758.388,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**832.882.904,00**	**780.423.791,00**	**375.927.511,00**	**1.231.697.296,00**							**2.064.580.200,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran*				100 %	100 %	832.882.904,00	780.423.791,00	375.927.511,00	-456.955.393,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas		2.064.580.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	8.878.000,00	26.393.820,00	879,79	-8.877.120,21	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			96.608.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				249 Unit	249 Unit	824.004.904,00	754.029.971,00	375.926.631,21	-448.078.272,79	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			1.967.972.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	J U M L A H								**11.234.734.549,00**	**9.222.111.540,00**	**7.541.370.790,73**	**-3.693.363.758,27**							**25.737.011.756,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DISPUSIPDA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

TAHUN 2025



Dispusipda Anambas dispusipda_anambas

Kata Pengantar

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan rangkaian penyempurnaan pembiayaan belanja guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah dalam memberikan pelayanan pada Tahun Anggaran 2025.

Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja-PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini kami jadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025
Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,

Rusmanda Azmurani, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu kepada Renja Kementerian/Lembaga terkait dan RKPD Provinsi.

dan mempedomani kepada Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa rencana strategis perangkat daerah sehingga Rancangan Akhir Perubahan Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam renstra PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan penganggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD tahun 2025;
3. Rancangan Akhir Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya

disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu

"Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan dan Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Kharimah"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
e) Pengelolaan barang milik Daerah;
f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpusatakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriutnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomro 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antaraRenja PD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

I.2. Landasan Hukum, Menjelaskan Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

I.3. Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD.

I.4. Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 baik yang mengalami perubahan atau pergeseran dalam hal nama kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, maupun kelompok sasaran

BAB IV PENUTUP

Memuat uraian penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGAKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ada di dalam rencana strategis perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pagu Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebesar Rp. 3.985.368.301,79,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sampai bulan Juni tahun 2025 yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.118.701.766,00,- (Satu Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setara dengan 27,33% (Dua Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tiga persen) yang digunakan untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.666.553.632,79,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 1.019.659.666,- (Satu Miliar Sembilan belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Anggaran tersebut merupakan realisasi dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan

Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN yang telah direalisasikan sebesar RP. 835.670.919,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sebesar Rp 13.302 000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah); Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 22.807.170,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah); sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang telah direalisasikan sebesar Rp. 30.800.170 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) ; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp 11.432.470,- (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) setara dengan; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Sebesar Rp. 7.492.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang telah di realisasikan sebesar Rp. 52.068.517 (Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima ratus Tujuh Belas Rupiah); Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Iistrik, yang telah direalisasikan Rp. 16.551.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan pagu anggaran Rp. 236.744.173,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 88.007.300,- (Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengembangan

Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang telah direalisasikan sebesar Rp. 47.958.800- (Empat puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang telah direalisasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Sebesar Rp. 12.128.000,- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah); Dan Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sebesar Rp. 23.920.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

3. Program Pengelolaan Arsip dengan pagu anggaran Rp. 82.070.496,- (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 11.034,800,- (Sebelas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Anggaran tersebut merupakan realisasi dari kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis sebesar Rp. 7.254.800,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota Sebesar Rp. 3.780.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari faktor pendorong maupun faktor penghambatnya, antara lain:

1. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja program dan

kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun bersangkutan sehingga target kinerja dapat tercapai, serta adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai bentuk penyeimbangan pelaksanaan program dan kegiatan serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta kerja sama seluruh jajaran Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan antara lain fasilitas yang disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang Dievaluasi	
										I		II		III		IV			
1				2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12		13	14
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2	**23**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	4.505.337.000	100%	3.666.553.632,79	13,96%	511.730.063	27,81%	1.019.659.666		-	-		27,81%	1.019.659.666
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	11.511.294	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2	23	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Adiministrasi Keuangan Yang terselesaikan	100%	2.962.802.000	100%	3.008.322.158,79	13.07%	393.308.456	28,22%	848.972.919		-	-		28,22%	848.972.919

2	23	01	2.06	Kegiatan administrasi umum perangkat Daeah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terselesaikan	100%	705.585.000	100%	270.677.036	30,62%	82.868.687	46,03%	124.600.827		-	-		46,03%	124.600.827
2	23	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	202.857.000	100%	300.026.364	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2	23	01	2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	670.093.000	100%	76.016.780	46,77%	35.552.920	60,63%	46.085.920	-	-	-		60,63%	46.085.920
2	23	02		**Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.**	**Persentase Cakupan layanan keperpustakaan**	100%	2.706.152.079	83%	236.744.173	12,20%	28.884.450	37,17%	88.007.300	-	-	-	-	37,17%	88.007.300
2	23	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Perpustkaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.948.916.588	100%	144.265.838	16,53%	23.844.500	36.02%	51.958.800	-	-	-	-	36.02%	51.958.800

				/Kota														
2	23	02	2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Gemar Membaca di Daerah	100%	757.235.491	100%	92.478.335	5,41%	5.000.000	38,98%	36.048.500	-	-	-	-	38,98%	36.048.500
2	**24**	**02**		**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar**	55%	158,876,630	48%	82.070.496	8,84%%	7.254.800	13,45%	11.034.800		-	-	-	13,45%	11.034.800
2	24	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	55%	158,876,630	48%	82.070.496	8,84%%	7.254.800	13,45%	11.034.800		-	-	-	13,45%	11.034.800

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada Tahun 2025 Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini terdapat 3 Program, 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Yang Mana Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program

Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ada sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Pembinaan Perpustakaan
c. Program Pengelolaan Arsip;

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;*

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

f. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

g. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat;
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.

h. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota;

Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							**3.980.316.003,00**	**4.789.954.070,00**	**3.985.368.301,79**	**5.052.298,79**							**3.354.002.831,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.980.316.003,00**	**4.789.954.070,00**	**3.985.368.301,79**	**5.052.298,79**							**3.354.002.831,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.820.148.729,00**	**4.628.326.909,00**	**3.904.417.305,79**	**84.268.576,79**							**3.193.836.567,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	**100 %**	**3.032.724.669,00**	**3.823.766.828,00**	**3.694.811.233,79**	**-381.179.702,00**							**2.651.844.967,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				-	100 %	0,00	55.510.094,00	8.179.696,00	8.179.696,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	55.510.094,00	8.179.696,00	8.179.696,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	1.894.512.584,00	2.591.914.637,00	3.057.588.557,79	1.163.075.973,79			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	ASN di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas		1.894.512.584,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	12 bulan Orang/bulan	1.800.180.584,00	2.512.102.637,00	2.951.172.557,79	1.150.991.973,79	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			1.800.180.584,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	94.332.000,00	79.812.000,00	106.416.000,00	12.084.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			94.332.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*				100 %	100 %	288.251.810,00	473.204.669,00	252.999.836,00	-35.251.974,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		268.251.810,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	36.629.080,00	67.000.684,00	36.155.869,00	473.211,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			36.629.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.874.084,00	52.097.905,00	39.217.437,00	8.343.353,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			30.874.084,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan / agsitk Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	23.403.890,00	24.182.380,00	19.624.380,00	-3.779.510,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			23.403.890,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.535.000,00	37.100.900,00	25.057.150,00	1.522.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			23.535.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	173.809.756,00	292.842.800,00	132.945.000,00	-40.864.756,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			153.809.756,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	399.660.573,00	353.869.127,00	300.026.364,00	-99.634.209,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		379.650.573,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	48.978.089,00	53.842.763,00	0,00	-48.978.089,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			48.978.089,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	300.026.364,00	300.026.364,00	300.026.364,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			330.672.464,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2	**NON URUSAN**							**3.980.316.003,00**	**4.789.954.070,00**	**3.985.368.301,79**	**5.052.298,79**							**3.354.002.831,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.820.148.729,00**	**4.629.326.909,00**	**3.904.417.305,79**	**84.268.576,79**							**3.193.835.657,00**	
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.980.316.003,00**	**4.789.954.070,00**	**3.985.368.301,79**	**5.052.298,79**							**3.354.002.831,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.820.148.729,00**	**4.629.326.909,00**	**3.904.417.305,79**	**84.268.576,79**							**3.193.835.657,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	480.309.702,00	49.268.301,00	78.018.780,00	-374.292.922,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pendasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		49.130.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	49.130.000,00	49.268.301,00	40.481.860,00	2.648.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			49.130.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	401.179.702,00	0,00	29.534.920,00	-371.644.782,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Cakupan Layanan Keperpustakaan**				**83 %**	**83 %**	**787.424.060,00**	**1.104.560.081,00**	**209.606.072,00**	**-245.133.470,00**							**542.290.590,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Perpustakaan*				100 %	100 %	515.720.850,00	689.944.539,00	131.013.737,00	-384.707.113,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		495.720.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	207.700.000,00	314.440.769,00	109.409.257,00	+118.290.783,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			207.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan kapasitasnya dan memiliki sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	205.445.850,00	289.737.770,00	17.048.000,00	-188.397.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pendasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			205.445.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Meningkatkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	82.575.000,00	85.766.000,00	4.558.500,00	78.016.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			62.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Gemar Membaca di daerah*				100 %	100 %	371.703.210,00	414.615.542,00	78.599.335,00	193.110.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		46.569.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				200 Orang	200 Orang	46.569.740,00	115.768.300,00	10.644.975,00	-5.921.765,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			46.569.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	225.133.470,00	298.847.242,00	37.947.360,00	-187.186.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**160.167.274,00**	**161.627.161,00**	**80.950.996,00**	**-79.216.278,00**							**160.167.274,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Terusunnya Arsip Yang Sesuai Standar**				**48 %**	**48 %**	**160.167.274,00**	**161.627.161,00**	**80.950.996,00**	**0,00**							**160.167.274,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar*				48 %	48 %	160.167.274,00	161.627.161,00	80.950.996,00	-79.216.278,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi	Seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Anambas		160.167.274,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				12 Berkas	12 Berkas	84.193.677,00	104.672.661,00	51.864.096,00	32.329.581,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			84.193.677,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	75.973.597,00	56.954.500,00	29.086.900,00	-46.886.697,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi reformasi birokrasi Optimalisasi reformasi birokrasi			75.973.597,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		J U M L A H							**3.980.316.003,00**	**4.789.954.070,00**	**3.985.368.301,79**	**6.052.298,79**							**3.364.002.831,00**	

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi mutlak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi dokumen ini. Semoga Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tarempa, 16 Juli 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,

Rusmanda Azmurani, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN
Jalan Soekarno Hatta, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riaun 29791,
Pos-el kecamatansiantan@anambas.go.id

Tarempa, 16 Juli 2025

Yth.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/000.7.2.4/111/Prog.KCS/07.2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Akhir Perubahan Tahun 2025	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan atas perhatian di ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal :
Penerima,

.....

CAMAT SIANTAN,

KAHARUZZAMAN, S.Sos
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19701116 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA KERJA

KECAMATAN SIANTAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Awal Recana Kerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Siantan dan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Siantan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026..

Tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan Siantan sebagai perangkat daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Siantan.

Terempa, 16 Juli 2025

CAMAT SIANTAN,

KAHARUZZAMAN, S.Sos
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19701116 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …….. ii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang ……... 1

1.2 Landasan Hukum ……... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ……... 3

1.4 Sistematika Penulisan …… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ……..…….. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Siantan 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan …… 8

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan …… 10

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …… 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……. 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……. 22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....…. 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Siantan …….…… 23

3.3 Program dan Kegiatan ……. 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……. 26

BAB V PENUTUP ……..…… 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Kecamatan Siantan.

Bagi Kecamatan Siantan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Provinsi Kepri, RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas, RPJMD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas, dan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.
20. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

23. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini bagi Kecamatan Siantan tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Siantan
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Siantan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Acuan dalam Penyusunan RKA-PD Tahun 2025.
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam progam dan kegiatan tahun 2024
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024
4. Menjadi pedoman dalam pelaksaan program dan penganggaran dengan memperhatika kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Siantan yang telah ditetapkan pagu indikatifnya

5. Memberikan Batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

1.4 Sitematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Perumusan Tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Siantan

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan DPPA-PD Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 18 kegiatan dengan presentase realisasi pencairan sebesar 85,07% dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 99,63%. Sedangkan berdasarkan DPA-PD Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 Program dan 16 Kegiatan, dimana capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 3.699.751.747,11
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.200.397.830,30
- Belanja Modal : Rp. 33.100.000,00

Terdapat perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2025, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa hal :

1. Rasionalisasi Anggaran, dimana anggaran pada dokumen renja dibuat pada awal tahun 2024, sedangkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat pada akhir tahun 2024, sehingga dimungkinkan adanya perubahan
2. Koreksi atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024
3. Penyesuaian anggaran

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN SIANTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN SIANTAN

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) /KEGIATAN (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	
07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	Laporan	-	
07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100%	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100,00	
07	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	
07	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00	
07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00	

07	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**80,56**	
07	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
07	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				2 Orang	0,833333333 Orang	41,67	
07	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**93,75**	
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0,5 Paket	50,00	
07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100,00	
07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00	
07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00	

07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100,00	
07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100,00	
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100,00	
07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00	
07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	Unit	#DIV/0!	
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
07	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	06	2.01	11	Fasilitas Penyelengara Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
07	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
07	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100,00	

Unit Organisasi : **7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN SIANTAN**
Sub Unit Organisasi : **7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TAREMPA**

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) /KEGIATAN (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**01**	**2.05**	**01**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00	
07	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100,00	
07	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00	
07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100,00	
07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				1 Unit	Unit		
07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	Unit		

07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**42,23**	
07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau .	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	- Unit	-	
07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	7,67 Unit	76,70	
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	1 Unit	50,00	
07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembar Kemasyarakat	2 Lembar Kemasyarakat	2 Lembar Kemasyarakat	2 Lembar Kemasyarakat	100%	2 Lembar Kemasyarakat	2 Lembar Kemasyarakat	100,00	
07	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00	
07	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100%	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100,00	
07	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	
07	01	03	2.05	01	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan taget indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kecamatan Siantan merupakan Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Siantan, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti luas. Sebagai pelayanan publik, maka Kecamatan Siantan harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, profesional dan akuntabel.

Kinerja pelayanan Kecamatan Siantan dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Siantan memiliki 2 (dua) sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

Sasaran tersebut merupakan agenda utama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diamati pada matrik berikut ini:

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	-	-	-	-			-	-	-	-		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	90	90	93,16	78,8			111%	110%	112%	92%		
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%			-	-	100%	100%		
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan kepada OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Kecamatan Siantan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Siantan sesuai dengan peraturan tersebut, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, sedangkan fungsinya :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
   Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah masih kurang sarana dan prasana dalam pelayanan, seperti prasarana perkantoran yang tersedia kurang lengkap dan memadi untuk melakukan pelayanan secara maksimal.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD
   Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Siantan antara lain :
   - Jumlah personil di Kecamatan Siantan pada tahun 2025, sebanyak 17 orang PNS.

- Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
- Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas untuk optimalisasi visi dan misi Kecamatan Siantan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah hampir terpenuhi sesuai dengan harapan.

4. Tantangan dan Peluang

   Tantangan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Siantan diantaranya :

   a. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
   b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
   c. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
   d. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

   Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Siantan antara lain :

   a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;

b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Siantan dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi ;

c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan ;

5. Formulasi Isu-isu Penting

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, maka isu-isu strategis Kecamatan Siantan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan danpeningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang PelayananPublik.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga engacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam

perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

6. Beberapa Isu-isu Yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, maka isu-isu strategis Yang Perlu Mendapatkan Perhatian sebagai berikut:

1. Perlunya upaya peningkatan pemenuhan hak anak dan masih minim pemahaman dan belum optimalnya peran serta dari masyarakat, dunia usaha, media, dan instansi pemerintah dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
2. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan

proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif.

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 adalah "**Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia dan infrastruktur berkelanjutan**" sehingga RKPD Tahun 2025 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Siantan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *good government* dan *open governance*.

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan Tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

TABEL 2.2
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.475.195.693**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.142.346.207**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**19.507.944,00**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.274.500,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	16.239.344,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.900,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.268.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.268.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.129.669.478,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.920.612.747,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Siantan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.937.467.078,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Siantan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.699.751.747,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	189.156.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.836.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.046.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100%**	**4.637.131,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100%**	**1.348.000,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.067.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.570.131,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.323.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**44.399.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**1.347.500**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Siantan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Siantan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.721.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.347.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Siantan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.678.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Siantan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**153.290.399**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**38.260.310**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.938.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.950,30	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.652.480,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.551.399,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.191.480,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.217.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.961.100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.320.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.423.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	860.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	85.160.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	12.215.300,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**6.773.001**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**33.100.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Siantan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Siantan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.673.001,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	33.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**79.218.740**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**140.854.650**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.065.420,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	28.613.803,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.153.320,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.233.320,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.007.527,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**37.700.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.548.500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Siantan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	13.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Siantan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.184.100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.940.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.340.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	24.400,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**1.402.715.389**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**66.239.100**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**1.402.715.389**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**66.239.100**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.402.715.389,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	66.239.100,00	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**55.614.088**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**13.827.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**55.614.088**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**13.827.000**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	55.614.088	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.827.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**90.524.065**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**34.355.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**90.524.065**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**34.355.000**	
	Fasilitasi Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	33.677.900	Fasilitasi Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.800.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.749.892	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	25.000,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Siantan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	46.096.273	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Siantan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	27.530.000,00	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN SIANTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TAREMPA

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**203.041.852,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**60.967.647,00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**103.168.906,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**16.448.236,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.481.273,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.230.116,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.845.458,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.546.480,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.922.175,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.659.740,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	255.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.220.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.900,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	24.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	750.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**19.987.152,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.987.152,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**65.425.794,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**31.989.411,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.850.858,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.269.916,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.574.936,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.719.495,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**14.460.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**12.530.000,00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.360.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.530.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Siantan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**2.030.487.944,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**658.514.623,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**2.030.487.944,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**658.514.623,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembar Kemasyarakatan	10.482.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembar Kemasyarakatan	5.103.824,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.365.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.365.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	1.985.640.444,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Siantan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	619.045.799,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan tugas desentralisasi otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Siantan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

3. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yangkokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah : ”**Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya**”.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 dapat dijelasakan sebagai berikut:

a. Makmur

   Makmur menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera.

b. Berdaya Saing

   Berdaya saing menunjukkan kondisi terwujudnya masyarakat, birokrasi dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

c. Berbudaya

Berbudaya menunjukkan kondisi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Adapun tema Pembangunan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025 adalah ”**Optimalisasi potensi Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut;

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan inftrastruktur wilayah.
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Siantan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Siantan terkait dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu : “**Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)**”

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Siantan dapat dinyatakan pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Siantan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A (88,00)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	%	100

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

dimana untuk Tahun 2024 sudah Mengacu Pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Siantan serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

Total rencana belanja Kecamatan Siantan pada 2025 diusulkan Rp. 5.012.249.577,41**U**ntuk lebih jelasnya, rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Siantan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
KECAMATAN SIANTAN																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 6.017.376.234	Rp. 6.673.001			Rp. 6.024.049.235	Rp. 4.223.667.307	Rp. 33.100.000			Rp. 4.256.767.307	Rp. 5.894.670.359,80
7	01				KECAMATAN				Rp. 6.017.376.234	Rp. 6.673.001			Rp. 6.024.049.235	Rp. 4.223.667.307	Rp. 33.100.000			Rp. 4.256.767.307	Rp. 5.894.670.359,80
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.468.522.692	Rp. 6.673.001			Rp. 4.475.195.693	Rp. 4.109.246.207	Rp. 33.100.000			Rp. 4.142.346.207	Rp. 5.341.704.532,80
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 19.507.944				Rp. 19.507.944	Rp. 3.274.500				Rp. 3.274.500	Rp. 20.970.841,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.239.344				Rp. 16.239.344	Rp. 5.900				Rp. 5.900	Rp. 12.392.143,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.268.600				Rp. 3.268.600	Rp. 3.268.600				Rp. 3.268.600	Rp. 8.578.698,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.129.669.478				Rp. 4.129.669.478	Rp. 3.920.612.747				Rp. 3.920.612.747	Rp. 3.406.324.373,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.937.467.078				Rp. 3.937.467.078	Rp. 3.699.751.747				Rp. 3.699.751.747	Rp. 3.182.375.381,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 189.156.000				Rp. 189.156.000	Rp. 220.836.000				Rp. 220.836.000	Rp. 215.160.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.046.400				Rp. 3.046.400	Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 8.788.992,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 4.637.131				Rp. 4.637.131	Rp. 1.348.000				Rp. 1.348.000	Rp. 40.360.845,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.067.000				Rp. 3.067.000	Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 6.979.365,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.570.131				Rp. 1.570.131	Rp. 1.323.000				Rp. 1.323.000	Rp. 33.381.480,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 44.399.000				Rp. 44.399.000	Rp. 1.433.500				Rp. 1.433.500	Rp. 66.756.231,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 43.000				Rp. 43.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.721.000				Rp. 3.721.000	Rp. 1.347.500				Rp. 1.347.500	Rp. 7.474.231,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.678.000				Rp. 10.678.000	Rp. 43.000				Rp. 43.000	Rp. 29.282.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 153.290.399				Rp. 153.290.399	Rp. 38.131.310				Rp. 38.131.310	Rp. 337.786.902,80
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.938.600				Rp. 4.938.600	Rp. 34.950				Rp. 34.950	Rp. 7.981.688,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 2.652.480				Rp. 2.652.480	Rp. 76.691.022,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.551.399				Rp. 10.551.399	Rp. 2.191.480				Rp. 2.191.480	Rp. 13.384.216,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.217.400				Rp. 18.217.400	Rp. 18.961.100				Rp. 18.961.100	Rp. 43.597.969,80
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 1.320.000				Rp. 1.320.000	Rp. 21.961.500,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.423.000				Rp. 2.423.000	Rp. 731.000				Rp. 731.000	Rp. 7.027.680,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.000.000				Rp. 9.000.000	Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 31.185.330,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.160.000				Rp. 85.160.000	Rp. 12.215.300				Rp. 12.215.300	Rp. 135.957.497,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 100.000	Rp. 6.673.001			Rp. 6.773.001	Rp. 43.000	Rp. 33.100.000			Rp. 33.143.000	Rp. 52.726.047,60
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000				Rp. 100.000	Rp. 43.000				Rp. 43.000	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Rp. 6.673.001			Rp. 6.673.001		Rp. 33.100.000			Rp. 33.100.000	Rp. 52.726.047,60
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 79.218.740				Rp. 79.218.740	Rp. 140.854.650				Rp. 140.854.650	Rp. 1.341.143.833,60
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.065.420				Rp. 33.065.420	Rp. 28.613.803				Rp. 28.613.803	Rp. 10.980.750,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.153.320				Rp. 46.153.320	Rp. 57.233.320				Rp. 57.233.320	Rp. 49.620.735,60
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 55.007.527				Rp. 55.007.527	Rp. 1.280.542.348,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 37.700.000				Rp. 37.700.000	Rp. 3.548.500				Rp. 3.548.500	Rp. 75.635.458,80
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.560.000				Rp. 13.560.000	Rp. 2.184.100				Rp. 2.184.100	Rp. 14.951.442,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.940.000				Rp. 11.940.000	Rp. 1.340.000				Rp. 1.340.000	Rp. 17.903.014,80
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.200.000				Rp. 12.200.000	Rp. 24.400				Rp. 24.400	Rp. 42.781.002,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 1.402.715.389				Rp. 1.402.715.389	Rp. 66.239.100				Rp. 66.239.100	Rp. 452.518.172,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 1.402.715.389				Rp. 1.402.715.389	Rp. 66.239.100				Rp. 66.239.100	Rp. 452.518.172,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.402.715.389				Rp. 1.402.715.389	Rp. 66.239.100				Rp. 66.239.100	Rp. 452.518.172,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 55.614.088				Rp. 55.614.088	Rp. 13.827.000				Rp. 13.827.000	Rp. 18.603.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 55.614.088				Rp. 55.614.088	Rp. 13.827.000				Rp. 13.827.000	Rp. 18.603.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.614.088				Rp. 55.614.088	Rp. 13.827.000				Rp. 13.827.000	Rp. 18.603.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 90.524.065				Rp. 90.524.065	Rp. 34.355.000				Rp. 34.355.000	Rp. 81.844.655,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 90.524.065				Rp. 90.524.065	Rp. 34.355.000				Rp. 34.355.000	Rp. 81.844.655,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.677.900				Rp. 33.677.900	Rp. 6.800.000				Rp. 6.800.000	Rp. 14.274.975,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.749.892				Rp. 10.749.892	Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 31.911.524,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.096.273				Rp. 46.096.273	Rp. 27.530.000				Rp. 27.530.000	Rp. 35.658.156,00
KELURAHAN TAREMPA																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.213.542.644	Rp. 19.987.152			Rp. 2.233.529.796	Rp. 726.457.270	Rp. 25.000		Rp. 29.000.000	Rp. 755.482.270	Rp. 1.455.171.787,80
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.213.542.644	Rp. 19.987.152			Rp. 2.233.529.796	Rp. 726.457.270	Rp. 25.000		Rp. 29.000.000	Rp. 755.482.270	Rp. 1.455.171.787,80
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 183.054.700	Rp. 19.987.152			Rp. 203.041.852	Rp. 60.942.647	Rp. 25.000			Rp. 60.967.647	Rp. 285.386.500,80
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 103.168.906				Rp. 103.168.906	Rp. 16.423.236				Rp. 16.423.236	Rp. 169.378.801,20
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.481.273				Rp. 3.481.273	Rp. 1.230.116				Rp. 1.230.116	Rp. 5.321.125,20
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.845.458				Rp. 19.845.458	Rp. 4.546.480				Rp. 4.546.480	Rp. 8.922.811,20
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.922.175				Rp. 16.922.175	Rp. 9.659.740				Rp. 9.659.740	Rp. 29.065.313,20
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 255.000				Rp. 255.000	Rp. 14.641.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.220.000				Rp. 33.220.000	Rp. 6.900				Rp. 6.900	Rp. 20.790.220,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.700.000				Rp. 24.700.000	Rp. 725.000				Rp. 725.000	Rp. 90.638.331,60
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 19.987.152			Rp. 19.987.152		Rp. 25.000			Rp. 25.000	Rp. 35.150.698,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa			Rp. 19.987.152			Rp. 19.987.152		Rp. 25.000			Rp. 25.000	Rp. 35.150.698,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 65.425.794				Rp. 65.425.794	Rp. 31.989.411				Rp. 31.989.411	Rp. 40.400.990,40
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.850.858				Rp. 47.850.858	Rp. 12.269.916				Rp. 12.269.916	Rp. 7.320.500,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.574.936				Rp. 17.574.936	Rp. 19.719.495				Rp. 19.719.495	Rp. 33.080.490,40
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 14.460.000				Rp. 14.460.000	Rp. 12.530.000				Rp. 12.530.000	Rp. 40.456.011,20
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.360.000				Rp. 5.360.000	Rp. 3.530.000				Rp. 3.530.000	Rp. 11.935.343,20
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.100.000				Rp. 9.100.000	Rp. 9.000.000				Rp. 9.000.000	Rp. 28.520.668,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 2.030.487.944				Rp. 2.030.487.944	Rp. 665.514.623			Rp. 29.000.000	Rp. 694.514.623	Rp. 1.169.785.287,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 2.030.487.944				Rp. 2.030.487.944	Rp. 665.514.623			Rp. 29.000.000	Rp. 694.514.623	Rp. 1.169.785.287,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.482.500				Rp. 10.482.500	Rp. 5.103.824				Rp. 5.103.824	Rp. 11.525.262,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.365.000				Rp. 34.365.000	Rp. 34.365.000				Rp. 34.365.000	Rp. 138.679.818,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	- Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.985.640.444				Rp. 1.985.640.444	Rp. 626.045.799			Rp. 29.000.000	Rp. 655.045.799	Rp. 1.019.580.207,00
Jumlah									**Rp. 8.230.918.878**	**Rp. 26.660.153**			**Rp. 8.257.579.031**	**Rp. 4.950.124.577**	**Rp. 33.125.000**		**Rp. 29.000.000**	**Rp. 5.012.249.577**	**Rp. 7.349.842.147,60**

Kab. Kepulauan Anambas, ...
Camat SIANTAN

KAHARUZAMAN, S.Sos
NIP. 197011161991011001

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 ini ini merupakan bagian dalam upaya pemerintah daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan Rancangan Tema Pembangunan Daerah yaitu Penguatan Sistem Kesehatan, Pemulihan Ekonomi, Pembangunan SDM dan Birokrasi yang Efektif, serta Konektivitas Wilayah.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 maka Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada SKPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Dalam Pelaksanaannya nanti rencana kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku

Terempa, 16 Juli 2025

CAMAT SIANTAN

KAHARUZZAMAN, S. Sos
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19701116 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR
Jl. H.Abdullah Kode Pos : 29791
N Y A M U K

Nyamuk, 16 Juli 2025
Kepada
Yth: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor :B/400.6.1/ 164 /CMT-KST/07.2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Bersama ini di sampaikan : Rancangan Akhir (Rangkir) Perubahan Renja PD Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025	1 (satu) berkas	Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih

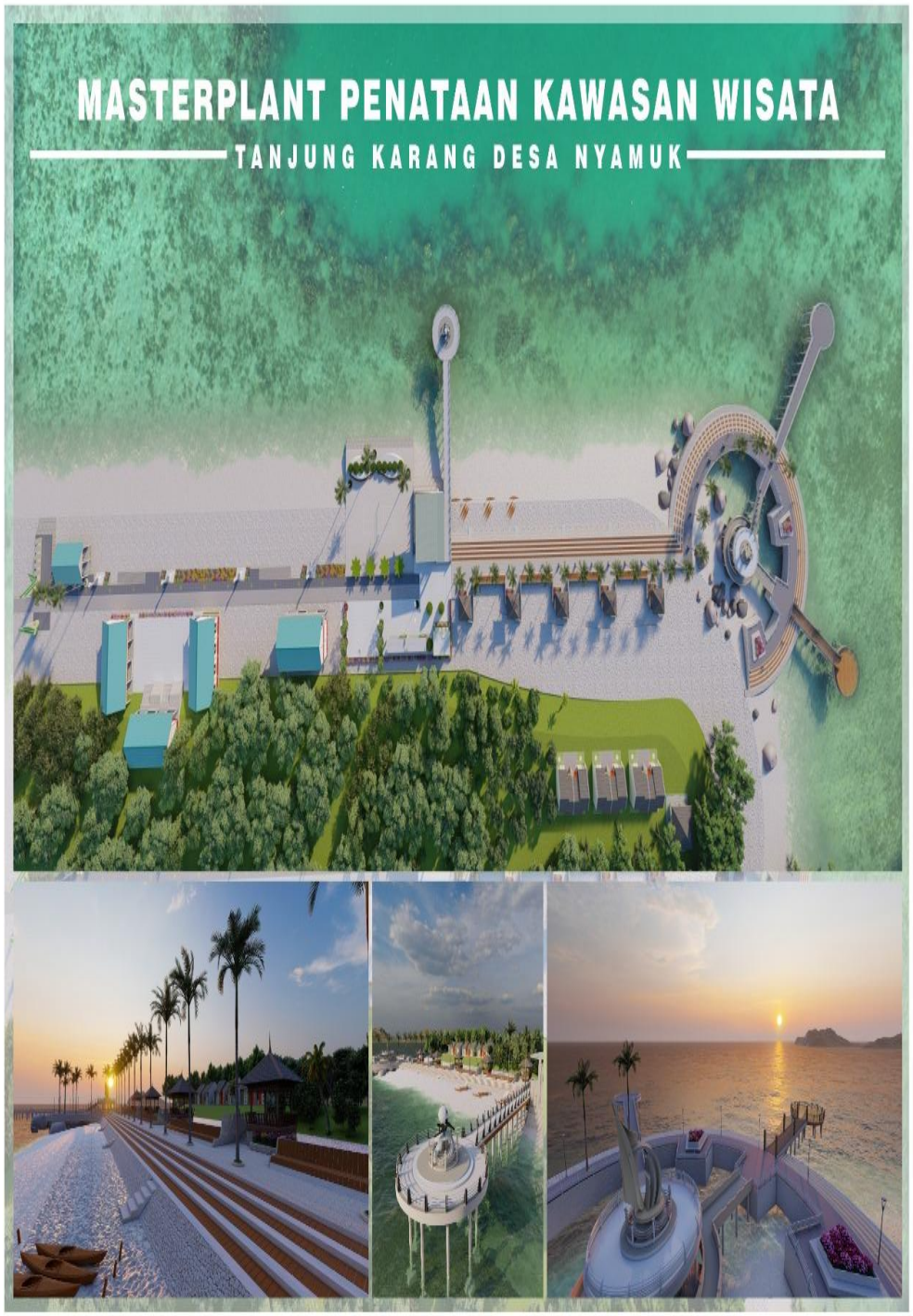
Plt. CAMAT SIANTAN TIMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TIMUR

ARPANDI, S.Sos.I
NIP. 19810310 201001 1 024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA

KECAMATAN SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU **9**

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD 9

2.2. Analisis kerja pelayanan PD 14

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 15

2.4. Review terhadap rencana Kerja RKPD 17

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **27**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 27

3.2. Tujuan dan sasaran renja PD 27

3.3. Program dan kegiatan 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **32**

4.1. Rancangan Akhir Peubahan Rencana Kerja 32

4.2. Pendanaan 32

BAB V PENUTUP **37**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha kuasa oleh karna berkat rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-PD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa akan datang.

Nyamuk, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT SIANTAN TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR

ARPANDI, S.Sos.I

NIP. 19810310 201001 1 024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatssan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Siantan Timur selanjutnya disebut Rankhir Perubahan Renja PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 mengacu pada

Rancangan awal Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan Renstra PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karna itu, secara substansial tujuan,sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen renja PD Kecamatan Siantan Timur. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah,terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja PD Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);.
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 27);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana kerja PD Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 di susun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi PD Kecamatan Siantan Timur pada tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah dalam mengoperasionalkan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025.
3. Sebagai pedoman bagi PD Kecamatan Siantan Timur dalam menentukan proritas program dan kegiatan tahun 2025.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur PD Kecamatan Siantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan pungsi.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur PD Kecamatan Siantan Timur untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RANKHIR RENJA)

Bab II – **Evaluasi Pelaksanaan Renja,** menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, menganalisis kerja pelayanan perangkat daerah, menjabarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mereview rancangan awal RKPD.

Bab III – **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, menguraikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, Tujuan dan sasaran renja Perangkat daerah, Serta Program dan kegiatan.

Bab IV– **Rencana Kerja dan Pendanaan**, menguraikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, dan Pendanaan.

Bab V – **Penutup**, menguraikan tinjauan secara umum yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, serta Rancangan Akhir Perubahan rencana kerja dalam upaya menjawab isu-isu strategis di tahun 2025.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Kantor Camat Siantan Timur, menyatakan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Renja Tahun 2024 terdapat 4 program dan 10 Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:

I. Program-program Tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

II. Kegiatan Tahun 2024 terdiri dari :

1. Perencanaan,pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

10. Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Lebih lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Kantor Camat Siantan Timur, dapat diamati pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 2. 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Siantan Timur s/d Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PD : ***Kecamatan Siantan Timur***

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan 2024	
								Target Renja PD tahun (n-2)	Realisasi Renja PD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(4/6)	9	10=(5+7+9)	11=(4/10)
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	6 Dokumen							
7	01	01	2.01	Perencanaan,pengganggaran dan Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	60	60	100%	10	10	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12	60	60	100%	12	12	100%
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Se-Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas	12 Bln	12	60	60	100%	12	12	100%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12	80	80	100%	12	12	100%

Nama PD : ***Kecamatan Siantan Timur*** Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan 2024	
								Target Renja PD tahun (n-2)	Realisasi Renja PD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(4/6)	9	10=(5+7+9)	11=(4/10)
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusann Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12	100	100	100%	12	12	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12	100	100	100%	12	12	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianyya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bln	12	80	80	100%	12	12	100%
7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Tersedianya Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Keluraan	1 Ls	1	90	90	100%	1	1	100%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Ls	1	100	100	100%	12	12	100%
7	**01**	**05**		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	1 Ls	1	80	80	100%	1	1	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	1 Ls	1	90	90	100%	12	12	100%

Nama PD : ***Kecamatan Siantan Timur*** Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan 2024	
								Target Renja PD tahun (n-2)	Realisasi Renja PD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(4/6)	9	10=(5+7+9)	11=(4/10)
					Daerah								
7	**01**	**06**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Ls	1	100	100	100%	1	1	100%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasii, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Ls	1	100	100	100%	12	12	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Anambas. Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Tmur terdiri dari :

- Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.
- Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan smempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

- Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

- Sub Bagian Program melaksanakan tugas Melakukan Pelaksanaan/ Pembinaan perumusan, perencanaan dan penyusunan program pada Kecamatan.

- Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam kurun Waktu Satu Tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kantor Camat Siantan Timur di Harapkan *Responsif, Kreatif dan inovatif* agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan *partisipatif* diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat Desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan dari permasalahan diatas ada isu-isu strategis yang perlu di jawab dengan menyesuaikan porsi anggaran yang di alokasikan, isu strategis tersebut adalah :

1. Penguatan di sektor-sektor unggulan
2. Penguatan kapasitas pengelolaan ASN

3. Pengembangan kawasan industri dan pengembangan wilayah tematik
4. Sinergi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah
5. Integrasi infrastruktur perdagangan dan logistik
6. Peningkatan kewirausahaan lokal
7. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup
8. Peingkatan akses dan kualitas air bersih
9. Mitigasi dan penanggulangan bencana
10. Sinergi perencanaan

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindak lanjuti yang sangat prioritas pada tahun 2024. Mengingat porsi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kurang memadai sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi anggaran, maka rumus program dan kegiatan prioritas tahun 2024 selain belanja pegawai (belanja tidak langsung) meliputi :

1. Program Tahun 2024

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan Tahun 2024 terdiri dari :

a. Perencanaan,pengganggaran dan Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
j. Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD

Review terhadap rencana kerja RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD Kecamatan Siantan Timur.

Tabel. 2. 2.
Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2025

Nama PD : Kecamatan Siantan Timur — Lembar 1.dari 1

No	Rencana Kerja RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
1.1	Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	STT	Tersedianya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	9.208.300	Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KST	Tersedianya Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bln	0	
1.2	Administrasi Keuangan	STT	Tersedianya Jasa	12 Bln	1.749.023.335	Administrasi Keuangan	KST	Tersedianya Jasa Administrasi	12 Bl	1.829.361.748	

	Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan			Perangkat Daerah		Keuangan	n		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	STT	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Se-Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas	12 Bln	18.600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	KST	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Se-Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas	12 Bln	8.712.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	STT	Tersedianya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	501.496.900	Tersedianya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	KST	Tersedianya Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	80.721.420	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusann Pemerintah Daerah	STT	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	0	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	KST	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	STT	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	656.975.946	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KST	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	90.812.806	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	STT	Tersedianyya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bln	180.865.011	Tersedianyya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	KST	Tersedianyya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bln	0	
2.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	STT	Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Ls	180.866.011	Pembinaan dan Peningkatan Patisipasi dalam pembangunan Masyarakat/ Desa	KST	Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Ls	45.251.520	
3.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	STT	Tersedianya Penyelenggaraan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bln	335.606.594	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KST	Tersedianya Penyelenggaraan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bln	. 73.073.473	
4.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
4.1	Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi	STT	Tersedianya Fasilittasi, Rekomendasi	12 Bln	180.866.011	Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi	KST	Tersedianya Fasilittasi, Rekomendasi dan	12 Bln	35.339.120	

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
PAGU TOTAL					**3.451.777.086**	**PAGU TOTAL**				**2.163.272.087**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan setiap desa dan kecamatan yang dihadiri oleh Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat LSM, Pemuda dan Tokoh perempuan dan Partai politik dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari semua usulan yang diperoleh, terdapat 5 Lima) Usulan Prioritas setiap masing-masing desa. Usulan program dan kegiatan prioritas dengan PD Penanggung jawab terkait Kesesuaian tersebut terletak pada aspek prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Selanjutnya lebih jelas hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. 2. 4.

Daftar Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Hasil Musrenbang
KECAMATAN SIANTAN TIMUR TAHUN 2025

Nama PD : Kecamatan Siantan Timur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial,keamanan dan ketertiban di masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Pengadaan Ambulance Jenazah Desa Nyamuk	1 Paket	400.000.000	Bagian Kesra
2	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED Pembangunan gedung TK N 1 Siantan Timur Desa Nyamuk	1 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
3	Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Perencanaan Revitalisaasi Dermaga pelabuhan Desa Nyamuk	60m x 4m	1.500.000.000	Dinas Perhubungan

4	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED Pembangunan Jalan Semenisasi menuju ke pemakaman umum Desa Nyamuk	700m x 3m	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
5	Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED Pembangunan taman terbuka / alun-alun Desa Nyamuk	1 Paket	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
6	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Batu Belah		5.000.000.000	Dinas PU
7	Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Perencanaan Lanjutan Pemecah Ombak Desa Batu Belah		2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
8	Pemantapan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Perencanaan Penambahan Batu Miring Labor SMP N 2 Batu Belah			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

9	Pemantapan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Desa Batu Bleah		800.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
10	Pemantapan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Pembangunan Gedung BPD Desa Batu Belah			Dinas Pekerjaan Umum
11	Pemantapan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Pelebaran Lapangan Serba Guna Desa Munjan	100m x 25m	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
12	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Pemasangan Jaringan PLN Dusun III Nokok dan Pemutus Desa Munjan	1 Paket	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
13	Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Semenisasi Jalan Gunug Siambang Desa Munjan	1.500m x 3m	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

14	Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Lanjutan Jalan ke Tanjung Bolok Desa Munjan	500m x 4m	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
15	Pemantapan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Rehap Kubah Masjid Darul Islam Desa Munjan	1 Paket	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
16	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED + Pembangunan lapangan serbaguna Olahraga Desa Temburun	1 Paket	800.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
17	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED + Pembangunan Revitalisasi Pembangunan Ruang Kelas Bertingkat SDN 005 Temburun	3 Lokal	1.500.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
18	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Lanjutan Dermaga Baruk Desa Temburun	1 Paket	1.500.000.000	Dinas Perhubungan

19	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Desa Temburun	1 Paket	195.000.000	Dinas Kesehatan
20	Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED Pembebasan lahan dan pemasangan pagar keliling air terjun	1 Paket	600.000.000	Dinas Pariwisata
21	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Rehabilitas Postu Air Putih	1 Unit	350.000.000	Dinas Kesehatan
22	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Lanjutan pemasangan batu miring tanjung Air Putih RT 001 / RW 01 Dusun 01	200 x 2 M	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
23	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Pembangunan Sekretariat BPD Desa Air Putih RT 001 / RW 01 Dusun 01	15 x 10 M	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

24	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Pengadaan alat bantu kerja petugas Postu (Oksigen dan Antrocometri set)	1 SET	30.000.000	Dinas Kesehatan
25	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Lanjutan pembangunan tambatan perahu mentalip Mentalip RT.004/ RW.02 Dusun 02 Desa Air Putih	200 x 2 M	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
26	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED-Pembangunan rumah dinas guru SDN 004 Serat (1 Kopel 2 Pintu) Desa Serat	1 Paket	450.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
27	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	DED Penyediaan ALKES+ MOBILER POSTU Dusun 1 Serat	1 Ls	200.000.000	Dinas Kesehatan
28	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	DED Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Serat Dusun 1 Serat	100m x 4m x 6m	1.300.000.000	Dinas Perhubungan

29	Peningkatan tata kelola pemerintah, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DED Pembangunan Balai Pertemuan Dusun 1 Serat	30m x 20m	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
30	Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	Revitalisasi Dermaga Pelabuhan Dusun Tinggil Dusun 2 Tinggil Serat	1 Paket	600.000.000	Dinas Perhubungan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pada tahun 2025 Kecamatan Siantan Timur tidak menjalankan kebijakan nasional dan provinsi. Semua program dan kegiatan diusul melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 dapat dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3. 1

Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Kecamatan Siantan Timur
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TUJUAN	SASARAN	
1	Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan, dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur meliputi sarana fisik jalan dan jembatan, penerangan, air bersih, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pemerintahan	1.1	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan birokrasi yang melayani dan inovatif.
		1.2	Infrastruktur Masyarakat
		1.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta kesejahteraan aparatur pemerintah dengan mengedepankan prinsip pengabdian	2.1	Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dengan memiliki pendidikan yang berkualitas.
		2.2	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
		3.	Meningkatkan

3	Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan dengan mengedepankan azaz pemberdayaan dan kemandirian	1	Musyawarah Rencana Pembangunan
		3.2	Peningkatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatn

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Kecamatan Siantan Timur lebih menitik beratkan pada hal Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya peningkatan SDM dan kesejahteraan Aparatur.

Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang telah menjadi program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan azas pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan Pencapaian SDGs,

- Pengentasan Kemiskinan,
- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
- Pengembangan Daerah Terisolir
- Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung kabupaten layak anak (kla)
- Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender (pug),
- Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Pencegahan stunting
- Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- Rencana Induk Kelitbangan

Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Penataan Daerah Otonomi baru
- Program penataan hubungan pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan/kecamatan
- Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting dan ketersediaan dana. Pada tahun 2025 terdapat 4 (Empat) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan yang dapat rencanakan.

Sebaran lokasi dari program dan kegiatan yang direncanakan pada Kantor Kecamatan Siantan Timur untuk pelaksanaan pelayanan masyarakat dan rutinitas perkantoran serta kesejahteraan aparatur dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari rumusan program dan kegiatan yang akan di rencana pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Siantan Timur tahun 2025 dengan pagu indikatif Hasil efisiensi Anggaran Berjumlah Rp. 2.238.785.639 .- yang terdiri dari 4 (Empat) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan PD pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025 dan perkiran maju tahun 2026 tabel berikut di bawah ini:

Tabel. 3. 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama PD : Kecamatan Siantan Timur

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	**01**	**01**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantora**					-		
7	**01**	**01**	**2.01**				Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penggangarandan evaluasi perangkat daerah	KST	10 Dokumen	0	APBD	-	10 Dokumen	15.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	KST	12 Bulan	1.988.744.931	APBD	-	12 Bulan	1.751.428.320
7	**01**	**01**	**2.03**				Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah sekecamatan siantan timur kabupaten kepulauan anambas	KST	12 Bulan	3.010.000	APBD	-	12 Bulan	17.424.000
7	**01**	**01**	**2.06**				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	KST	12 Bulan	61.964420	APBD	-	12 Bulan	242.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusann Pemerintah Daerah	Tersedianya penggadaan barang milik daerah	KST	Unit	0	APBD	-	Unit	0
7	**01**	**01**	**2.08**				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KST	12 Bulan	90.812.806	APBD	-	12 Bulan	624.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	KST	12 Bulan	0	APBD	-	12 Bulan	17.000.000
7	**01**	**03**					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	**01**	**03**	**2.01**				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	KST	1 Ls	22.823.520	APBD	-	1 Ls	150.000.000
7	**01**	**05**					**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**								
7	**01**	**05**	**2.01**				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	KST	12 Bulan	36.090.842	APBD	-	12 Bulan	181.333.828.
7	**01**	**06**					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa**							
7	**01**	**06**	**2.01**				Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah	KST	12 Bulan	35.339.120	APBD	-	12 Bulan	80.000.000
TOTAL									**-**	**-**	**2.238.785.639**	-	***-S***	-	***3.149.186.148***

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Sistematika Penulisan Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisannya sekurang kurangnya memuat : Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Renja PD Tahun Lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisa Kinerja Pelayanan PD, Isu Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Kerja RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan. Bab IV. Yaitu : Rencana Kerja dan Pendanaan PD dan yang terkahir Bab V Penutup.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bahan telaahan dalam proses penyusunan rancangan akhir RKPD,memperhatikan hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu dan tahun berjalan serta isu isu strategis terkait urusan atau tugas pokok dan fungsi perangka daerah.

4.2 Pendanaan

Pendanaan dan Penganggaran Program, kegiatan dan sub Kegiatan yang sesuai dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Kecamatan Siantan Timur di bebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SIANTAN TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		CAPAIAN KINERJA	DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantora**							
7.01.01.2.01	Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penggangarandan evaluasi perangkat daerah	KST	10 Dokumen	0	APBD		10 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	KST	12 Bulan	1.829.361.748	APBD		12 Bulan	1.751.428.320
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah sekecamatan siantan timur kabupaten kepulauan anambas	KST	12 Bulan	8.712.000	APBD		12 Bulan	17.424.000

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	KST	12 Bulan	80.721.420	APBD		12 Bulan	242.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusann Pemerintah Daerah	Tersedianya penggadaan barang milik daerah	KST	Unit	0	APBD		Unit	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	KST	12 Bulan	90.812.806	APBD		12 Bulan	624.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	KST	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	17.000.000
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	KST	1 Ls	45.251.520	APBD		1 Ls	252.000.000
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	KST	12 Bulan	73.073.473	APBD		12 Bulan	185.333.828
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa**							
7.01.06.2.01	Fasilittasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah	KST	12 Bulan	35.339.120	APBD	-	12 Bulan	82.000.000
		TOTAL	-	-		-	-	-	

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SIANTAN TIMUR

BAB V. PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi terkait isu-isu strategis yang antara lain: masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat, masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparatur, masih kurang personil pendukung terutama personil PNS dan PNS yang menduduki jabatan struktural, belum masksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Rekomendasi untuk menjawab isu strategis tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain: Mengupayakan Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat, mengupayakan Peningkatan kesejahteraan Aparatur untuk menunjang kinerja aparatur, melakukan Koordinasi kepada pihak terkait untuk penambahan personil di Kecamatan Siantan Timur, mengupayakan musyawarah dan dialog kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Kecamatan Siantan Timur ke depan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Timur pada tahun 2025, dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Nyamuk, 16 Juli 2025

Plt.CAMAT SIANTAN TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TIMUR

ARPANDI, S.Sos.I

NIP. 19810310 201001 1 024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN UTARA
Jl. Tajo RT.001/RW.001 Pian Pasir Desa Mubur. Email : sinta.anambaskab03@gamil.com
P I A N P A S I R
Kode Pos 29997

Pian Pasir, 16 Juli 2025

Kepada Yth :
Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800.1.11.1/011/KSU-Prog/07/2025

No	Naskah Dinas/Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.	1(Satu) Berkas	Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :
Penerima,

.....
NIP.

CAMAT SIANTAN UTARA

IING SUMINDAR, S.IP.
NIP. 198212132010011013



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

KECAMATAN SIANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadhirat Allah SWT, karena atas izin dan perlindungan-Nya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan-peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Kecamatan Siantan Utara menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp2.337.489.852.05,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Rupiah) dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan bagi seluruh jajaran dalam lingkup Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025.

Dokumen ini dapat menjadi bahan masukkan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pian Pasir, 16 Juli 2025
CAMAT SIANTAN UTARA,



IING SUMINDAR, S.IP.
Penata Tk. I
NIP. 198212132010011013

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Siantan Utara s/d TA 2025

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara

Tabel 2.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Siantan Utara Tahun 2024

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah maupun Tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RPJMD maupun RKPD, Kecamatan Siantan Utara berpedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih seperti yang tercantum dalam RKPD dimaksud yaitu **“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”**.

Yang didukung dengan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelayanan yang prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja PD Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Siantan Utara selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara pada Tahun Anggaran 2025. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Utara dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari Kunjungan Kerja Bupati, Reses DPRD dengan memperhatikan skala Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Di Kecamatan Siantan Utara terdapat 7 prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. Dimana akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2026.

1.1 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Taun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Presiden Nomor 2 Thun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Taun 2009 Nomor 2);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);

13 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);

14 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792).

15 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kecamatan Siantan Utara selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2025 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Siantan Utara.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 meliputi :

1. Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
3. Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
4. Kelompok Sasaran Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Secara umum tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Visi, Misi yang diaplikasikan melalui Program Kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Siantan Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan.

   Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, Serta Sistematika Penulisan Dokumen Renja.

2) Bab II

   Berisi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu. Rancangan Renja Kecamatan Siantan Utara, Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.

3) Bab III

   Berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

4) Bab IV

   Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Kerja, Program Dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan untuk tahun 2025.

5) Bab V

   Berisi Penutup Memuat Ringkasan Singkat Dari Maksud Dan Tujuan Penyusunan Dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030, Kecamatan Siantan Utara memiliki Visi : ***"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera"*** yang didukung dengan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelayanan yang prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp2.337.489.852,05,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Koma Lima Rupiah).

Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	PAGU DPA (Renja Kec. Siantan Utara)	PAGU Rancangan Perubahan Renja	PAGU Rancangan Akhir Perubahan Renja
UNSUR KEWILAYAHAN	**2.723.527.209**	**2.723.527.209**	**2.723.527.209**
KECAMATAN	**2.723.527.209**	**2.723.527.209**	**2.723.527.209**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.375.543.854**	**2.375.543.854**	**2.375.543.854**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.000.000**	**0**	**0**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.590.816.858**	**1.800.793.356**	**1.800.793.356**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.816.858	1.707.793.356	1.707.793.356
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	87.000.000	93.000.000	93.000.000
Koordinasi dan Penyusuan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**10.788.000**	**10.788.000**	**10.788.000**
Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	10.788.000	10.788.000	10.788.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	0	0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**165.085.363**	**124.093.467**	**124.093.467**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.673.425	2.050.537	2.050.537
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.545.938	53.149.930	53.149.930
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.264.000	1.509.000	1.509.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.800.000	9.400.000	9.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.802.000	57.984.000	57.984.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**50.772.885**	**50.772.885**	**50.772.885**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.772.885	50.772.885	50.772.885
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**553.712.378**	**446.304.976**	**446.304.976**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.259.940	14.294.440	14.294.440
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.688.000	2.544.000	2.544.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.037.398	0	0

Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	525.727.040	429.466.536	429.466.536
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.368.370**	**3.368.370**	**3.368.370**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.368.370	3.368.370	3.368.370
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**3.110.000**	**0**	**0**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Pdi Kecamatan	**3.110.000**	**0**	**0**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.110.000	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**153.249.500**	**153.249.500**	**153.249.500**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**153.249.500**	**153.249.500**	**153.249.500**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153.249.500	153.249.500	153.249.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**104.114.855**	**93.900.655**	**93.900.655**
Penyelenggaraan /urusan Pemerintahan Umum sesuain Penugasan Kepala Daerah	**104.114.855**	**93.900.655**	**93.900.655**
Pembinaan Persatuan dan Kesaatuan Bangsa	93.650.655	93.900.655	93.900.655
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	10.464.200	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**87.509.000**	**40.256.000**	**40.256.000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**87.509.000**	**40.256.000**	**40.256.000**
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.203.000	0	0
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	66.056.000	22.053.000	22.053.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.250.000	18.203.000	18.203.000

Sumber : DPA Kecamatan Siantan Utara 2024

Dari Tabel Diatas Terlihat Bahwa Terjadi Perubahan Nilai Pagu Anggaran Renja Kecamatan Siantan Utara Pada Tahun 2024 Terhadap Pagu Rancangan Akhir Perubahan Renja Untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Di Kecamatan Siantan Utara Pada Tahun Berikutnya.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Siantan Utara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Siantan Utara s/d Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu {n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perankat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	**KECAMATAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**9 Dokumen**				**100**			
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100**	**0 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	0 Dokumen	6 Dokumen	66,66
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya Koordinasi dan penysunan dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	3 Dokumen	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 Bulan				**100**			**55,48**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersedian Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	52,21
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusuan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	0 Bulan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	15 Dokumen	15 Dokumen	100
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12 Laporan**				**100**			
7.01.01.2.O3 .06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**12 Laporan**	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	24 Bulan	49,56
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0 Pekerjaan**				**73,33**			**100**
7.01.01.2.O5 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**0 Pekerjaan**	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	100
7.01.01.2.O5 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**0 Pekerjaan**	52 Buah	0 Buah	0 Buah	71,10	52 Buah	52 Buah	100

7.01.01.2.O 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Paket**				**100**			**100**
7.01.01.2.O6 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%	0 Pekerjaan	3 Pekerjaan	100
7.01.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Pekerjaan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	0	12 Bulan	100
7.01.01.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik kantor	12 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Paket**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Laporan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penyediaan Jasa	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Surat Menyurat								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan PErlengkapan Kantor	5 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Unit**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 02	**ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak**	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 05 2.01	Pelaksanaan	Meningkatnya	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

08	Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
7 01 06 2.01	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 Pekerjaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara

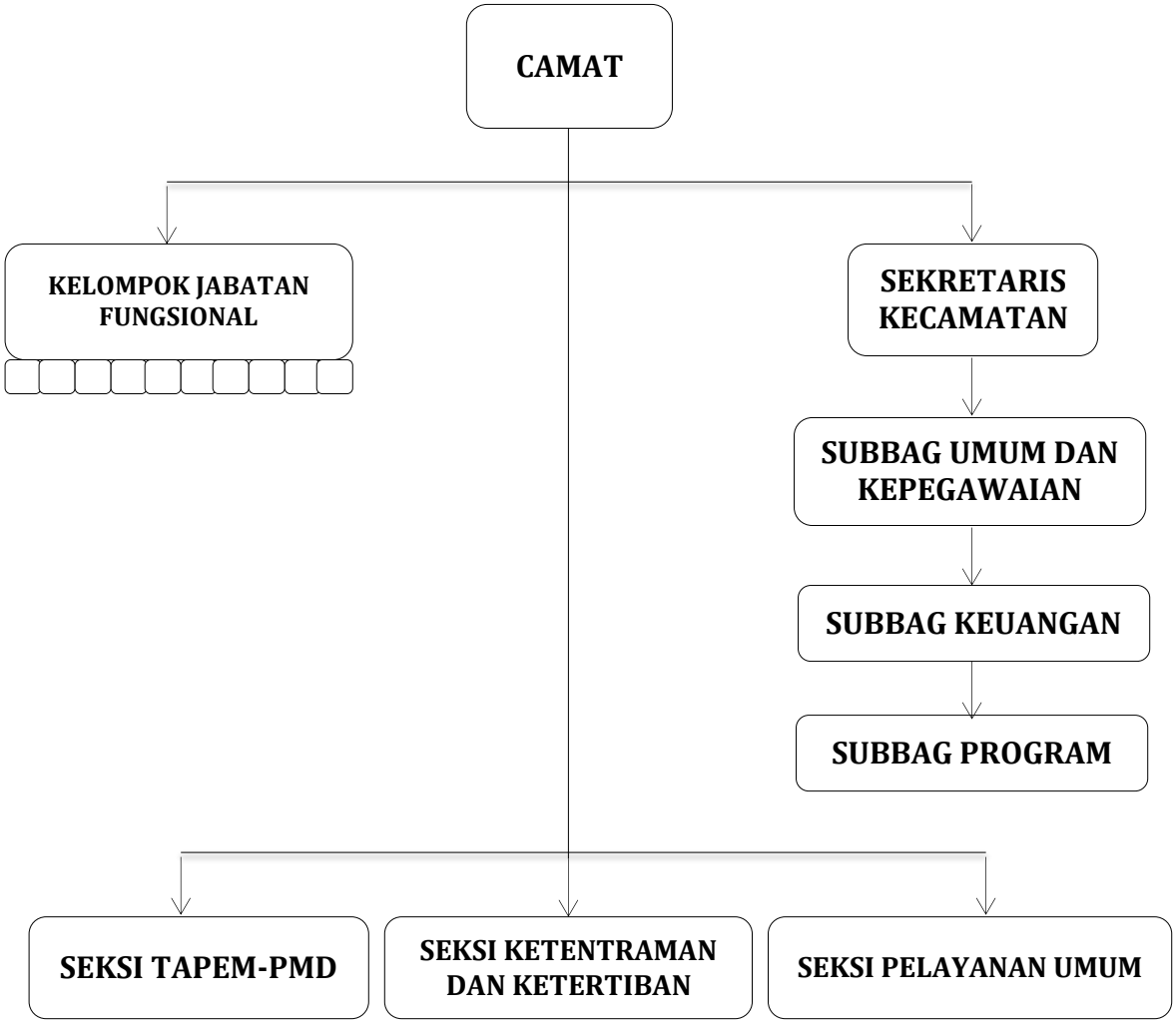
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2) Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah; dan

10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Susunan Organisasi diatas adalah sebagai berikut :

CAMAT

a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaran pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan Desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS KECAMATAN

a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas-tugas pada setiap seksi.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

    1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan;
    2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan;

3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup Kecamatan;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pada masing-masing unit Kecamatan.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaran kerumahtanggan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengeloaan administrasi lingkup program dan keuangan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.

Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan program dan rencana Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
    4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan-Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
    4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Pelayanan Umum

a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
    2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
    3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
    4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Wilayah Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 Desa serta kondisi demografis penduduk yang sebagian besar bersuku melayu sangat dimungkinkan perkembangan di Kecamatan Siantan Utara lebih cepat dibanding Kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak Kecamatan untuk untuk bisa bergerak luas mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Siantan Utara berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Siantan Utara secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja (IKK) Kecamatan Siantan Utara yaitu :

1) Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Siantan Utara.
2) Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional.
3) Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan

Peraturan Daerah (PerDa) di wilayah Kecamatan Siantan Utara.

4) Mewujudkan Pengarustamaan Gender di Kecamatan Siantan Utara.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Siantan Utara antara lain :

1) Meningkatkan Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Siantan Utara.
2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Utara.
3) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Siantan Utara.
4) Meningkatkan Partisipasi Gender di Kecamatan Siantan Utara.

Siantan Utara untuk dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah Indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Utara yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Kecamatan	Hasil Kepuasan Masyarakat	CC	CC	B	B	B	B	B	B	Peningkatan Pencapaian target dipengaruhi sarana dan prasarana yang ada
2	Indeks Kepuaasan Layanan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (81,29)	B (82,00)	B (84)	B (81,29)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase pendataan dan pelaporan kecamatan	20%	20%	30%	30%	30%	30%	40%	60%	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatanyang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Siantan Utara adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/booklet/formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Siantan Utara Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	82,02 %

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara/prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan/produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji/maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
11. Ketersediaan fasilitas/sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan
13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan

14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82% dan teralisasi juga 82.02%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke kounter pelayanan kecamatan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Utara adalah sebagai berikut :

a) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

b) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi.

c) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di Kecamatan maupun Desa seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah Desa.

d) Masih kurangnya koordinasi internal maupun eksternal (instansi lain).

e) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang dan harus ditingkatkan sehingga pembangunan akan semakin berkembang. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Siantan Utara harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompentensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat di input ke SIPD-RI Tahun 2025 yang diajukan melalui Kecamatan Siantan Utara. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Siantan Utara berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Siantan Utara sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Siantan Utara adalah usulan untuk Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional adalah "Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur". Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) Misi, yaitu :

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut :

1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-5 (2025-2030), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengusung Visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Visi itu akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut **“Asta Cita”** yaitu :

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2) Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7) Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Siantan Utara

Berdasarkan Visi Dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Siantan Utara adalah :

a) Meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif, sehat tangguh berbudaya serta berakhlakul karimah. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga sasaran untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan disiplin aparatur di OPD Kecamatan Siantan Utara dapat tercapai;
b) Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan periwisata dengan tujuan mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah Kecamatan siantan utara;
c) Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi dengan membuat perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk

perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program yang telah ditentukan.

Maka Kecamatan Siantan Utara mempunyai Tujuan :

Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Siantan Utara secara optimal yang secara rinci seperti dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Misi Kecamatan Siantan Utara :

a) Tujuan
   - Mewujudkan perikehidupan yang agamis yang berdasarkan budaya melayu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ditengah lingkungan masyarakat;
   - Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun perekonomian di Kecamatan Siantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan parameter pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
   - Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun perekonomian di Kecamatan Siantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan parameter pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
   - Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa;
   - Mewukudkan rasa kebersamaan dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Siantan Utara.

b) Sasaran

- Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan yang akan berdampak positif kepada tatanan kehidupan beragama dimasyarakat;
- Dapat membentuk masyarakat Kecamatan Siantan Utara yang agamis sehingga terciptanya suasana kehidupan yang kondusif;
- Terciptanya sentra-sentra perekonomian baru di masyarakat;
- Tercapainya pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat diwilayah Kecamatan Siantan Utara;
- Tercapainya kualitas SDM dengan indikator Misi sebanyak 5 (lima) orang tenaga terdidik dalam kependudukan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi pelaksana kebijakan Kepala Daerah, memiliki kemampuan Inovatif, pendeteksian dini dan ansitipatif, memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik;
- Memberikan pelayanan yang baik tentang masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana fasiltitas umum;
- Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar, uraian Program/Kegiatan ditunjukkan pada tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

OPD : Kecamatan Siantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
UNSUR KEWILAYAHAN					**2.337.489.852,05**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.273.527.209**	
KECAMATAN					**2.337.489.852,05**	**KECAMATAN**				**3.273.527.209**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Siantan Utara**	**PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Siantan Utara**	**PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**1.000.000**	**-**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**1.000.000**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-OPD yang terpenuhi	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-OPD yang terpenuhi	100%	0	-
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjan dan	100%	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjan dan	100%	0	-

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi			SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terpenuhi			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**2.137.460.090,78**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1.590.816.858**	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	100%	2.050.280.088,78	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	100%	1.503.816.858	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD yang terpenuhi	100%	87.180.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD yang terpenuhi	100%	87.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terlaksana	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terlaksana	100%	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**12.586.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**10.788.000**	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	100%	12.586.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana	100%	10.788.000	-
	Pengadaan Mebeleur	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Mebeleur yang terlaksana	100%	0	Pengadaan Mebeleur	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Mebeleur yang terlaksana	100%	0	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana	100%	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana	100%	0	-

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**0**	-
	Pengadaan Baju PDH	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Baju PDH yang terlaksana	100%	0	Pengadaan Baju PDH	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Baju PDH yang terlaksana	100%	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**28.634.836,27**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**165.085.363**	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana	100%	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana	100%	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana	100%	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana	100%	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terlaksana	100%	7.242.888,12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terlaksana	100%	1.673.425	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terlaksana	100%	21.391.948,15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terlaksana	100%	44.545.938	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terlaksana	100%	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terlaksana	100%	4.264.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaskana	100%	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaskana	100%	23.800.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	100%	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	100%	90.802.000	-

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**50.224.495**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**50.772.885**	-
	Pengadaan Mebel	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Mebel yang terlaksana	100%	0	Pengadaan Mebel	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Mebel yang terlaksana	100%	0	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	100%	50.224.495	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Siantan Utara	Presentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	100%	50.772.885	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**51.624.962**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**553.712.378**	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	16.172.910	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	15.259.940	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	2.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	2.688.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100%	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100%	10.037.398	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100%	32.652.052	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100%	525.727.040	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.368.370**	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terlaksana	100%	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terlaksana	100%	3.368.370	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**3.110.000**	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**100%**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**100%**	**3.110.000**	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan yang terlaksana	100%	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan yang terlaksana	100%	3.110.000	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**26.750.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**153.249.500**	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**26.750.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**153.249.500**	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang	100%	26.750.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang	100%	153.249.500	-

			terlaksana					terlaksana			
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**30.209.470**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**153.249.500**	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	**30.209.470**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%	**104.114.855**	-
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Siantan Utara	Presentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana	100%	30.209.470	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Siantan Utara	Presentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana	100%	93.650.655	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	100%	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Siantan Utara	Presentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	100%	10.464.200	-
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Siantan Utara**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**87.509.000**	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana**	**100%**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Siantan Utara**	**Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terlaksana**	**100%**	**87.509.000**	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	100%	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terpenuhi	100%	3.250.000	-

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang terlaksana	100%	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Siantan Utara	Presentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang terlaksana	100%	18.203.000	-
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang terlaksana	100%	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Siantan Utara	Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang terlaksana	100%	66.056.000	-

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Siantan Utara dimana implikasinya Kecamatan Siantan Utara akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Siantan Utara akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Siantan Utara dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Siantan Utara ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Siantan Utara tahun 2026 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Siantan Utara.

Pian Pasir, 16 Juli 2025
CAMAT SIANTAN UTARA,

IING SUMINDAR, S.IP.
Penata Tk. I
NIP. 198212132010011013

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN SELATAN
Jalan Ibrahim Nomor 20, Air Bini, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos-el siantanselatan@anambaskab.go.id

Air Bini, 16 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.5.3.1/083/SINSEL/SPNG/07/2025

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2025	1 (Satu) Berkas	

Diterima tanggal, Juli 2025

Penerima,

_____

No Telp.

Pengirim,
Camat Siantan Selatan

Awaluddin Makrifatullah, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP. 19700213 200701 1 021

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN SELATAN

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Perancanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah rancangan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantan Selatan merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ruang lingkup Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2025 ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025.

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencana yang baik. Maka perlu adanya serangkaian Rencana Kerja (Renja) tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Air Bini, 16 Juli 2025

Camat Siantan Selatan

Awaluddin Makrifatullah, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP. 19700213 200701 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja..... 5
1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja.. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025…….. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025..... 6
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 18
2.3 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah……. 19
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 19
2.5 Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025……... 20
BAB III RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 23
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 23
3.2 Program dan Kegiatan..... 24
BAB IV PENUTUP..... 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rancangan Perubahan Akhir Rencana Keja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan RKPD Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana KerjaRencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan, merupakan rencana pembangunan tahunan dengan tema:

“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Transparan”.

Dengan Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. ***Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.***
2. ***Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah.***
3. ***Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah.***
4. ***Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas social, keamanan dan ketertiban di masyarakat.***

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah . Sebagai rencana operasional, RKPD Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Siantan Selatan dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu lebih ditekankan sesuai penugasan Kepala Daerah kepada Camat. Berkenaan dengan ini maka perlu dukungan dari Pemerintah Daerah agar Program/Kegiatan Kecamatan bisa berjalan dengan maksimal atau sesuai dengan capaian pelaksanaan Program/Kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Triwulan I sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

TABEL 2.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN			FISIK				
						REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
			VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KECAMATAN SIANTAN SELATAN		**2.501.307.217,00**	**12.097**	**Tahun**	**100,00**	**826.913.925,00**	**33,06**	**33,06**	**3.019**	**43,24**	**43,24**		**1.674.393.292,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.441.572.277,00**			**97,61**	**795.053.925,00**	**32,56**	**31,79**		**29,10**	**28,40**		**1.646.518.352,00**
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.151.422.150,00**			**86,01**	**727.392.325,00**	**33,81**	**29,08**		**52,98**	**45,57**	**-**	**1.424.029.825,00**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.034.782.150,00			81,35	704.142.325,00	34,61	28,15		64,29	32,17		1.330.639.825,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	521.024.500	14	O/B	20,83	297.206.800	57,04	11,88	6,00	42,86	8,93		223.817.700,00
	Belanja Gaji Pokok P3K	269.602.300	14	O/B	10,78	-	-	-	6,00	42,86	4,62		269.602.300,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	59.600.698	14	O/B	2,38	33.919.592	56,91	1,36	6,00	42,86	1,02		25.681.106,00
	Belanja Tunjangan Keluarga P3K	18.371.194	14	O/B	0,73	-	-	-	6,00	42,86	0,31		18.371.194,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.460.000,00	14	O/B	2,74	39.120.000	57,14	1,56	6,00	42,86	1,17		29.340.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.040.000,00	14	O/B	0,20	2.880.000	57,14	0,12	6,00	42,86	0,09		2.160.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum P3K	18.490.000	14	O/B	0,74	-	-	-	6,00	42,86	0,32		18.490.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	34.671.920	14	O/B	1,39	19.698.240	56,81	0,79	6,00	42,86	0,59		14.973.680,00
	Belanja Tunjangan Beras P3K	18.522.260	14	O/B	0,74	-	-	-	6,00	42,86	0,32		18.522.260,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	828.975	14	O/B	0,03	377.790	45,57	0,02	6,00	42,86	0,01		451.185,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.948	14	O/B	0,00	3.306	47,58	0,00	6,00	42,86	0,00		3.642,00
	Belanja Pembulatan Gaji P3K	10.000	14	O/B	0,00	-	-	-	6,00	42,86	0,00		10.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.910.808	14	O/B	2,48	21.653.347	34,98	0,87	6,00	42,86	1,06		40.257.461,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K	13.398.547	14	O/B	0,54	-	-	-	6,00	42,86	0,23		13.398.547,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	474.844.000	14	O/B	18,98	133.233.250	28,06	5,33	5,00	35,71	6,78		341.610.750,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.000.000,00	14	O/B	0,08	2.000.000	100,00	0,08	5,00	35,71	0,03		-
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	468.000.000	14	O/B	18,71	154.050.000	32,92	6,16	5,00	35,71	6,68		313.950.000,00
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.640.000,00			4,66	23.250.000,00	19,93	0,93		41,67	1,94		93.390.000,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	116.640.000	12	O/B	4,66	23.250.000	19,93	0,93	5,00	41,67	1,94		93.390.000,00
	2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**29.800.000,00**			**1,19**	**5.700.000,00**	**19,13**	**0,23**		**41,67**	**0,50**	**-**	**24.100.000,00**
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.800.000,00			1,19	5.700.000,00	19,13	0,23		41,67	0,50		24.100.000,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.800.000,00	12	O/B	1,19	5.700.000	19,13	0,23	5,00	41,67	0,50		24.100.000,00
	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			-	-	-	-		-	-		-
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	stel	-	-	-	-	-	-	-		-
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**112.152.973,00**			**4,48**	**18.932.600,00**	16,88	0,76		**14,88**	**0,83**	**-**	**93.220.373,00**
		5	Penyediaan Komponen Instalasi	17.103.870,00			0,68	927.000,00	5,42	0,04		41,67	0,28		16.176.870,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.103.870	98	Pcs	0,68	927.000,00	5,42	0,04	40,83	41,67	0,28		16.176.870,00
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.252.251,00			1,45	6.757.000,00	18,64	0,27		8,33	0,11		29.495.251,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.132.784	1.519	Pcs	0,60	3.535.000,00	23,36	0,14	126,58	8,33	0,05		11.597.784,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.627.273	135	Pcs	0,42	1.092.000,00	10,28	0,04	11,25	8,33	0,04		9.535.273,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.119.500	400	Pcs	0,08	650.000,00	30,67	0,03	33,33	8,33	0,01		1.469.500,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.661.000	34	Pcs	0,23	1.480.000,00	26,14	0,06	2,83	8,33	0,02		4.181.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.711.694	34	Pcs	0,11		-	-	2,83	8,33	0,01		2.711.694,00
		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.780.743,00			0,51	854.000,00	6,68	0,03	-	8,33	0,04		11.926.743,00
			Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.206.492,00	108	Pcs	0,21	314.000,00	6,03	0,01	9,00	8,33	0,02		4.892.492,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.574.251	80	Pcs	0,30	540.000,00	7,13	0,02	6,67	8,33	0,03		7.034.251,00
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.710.109,00			0,39	859.000,00	8,85	0,03	-	8,33	0,12		8.851.109,00
			Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.710.109	360	Pcs	0,39	859.000,00	8,85	0,03	30,00	8,33	0,12		8.851.109,00
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-			-	-	-	-	-	-	-		-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.150.000,00			0,33	4.200.000,00	51,53	0,17	-	8,33	0,03		3.950.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	300	Kotak	-	-	-	-	25,00	8,33	-		-
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.150.000	386	Kotak	0,33	4.200.000,00	51,53	0,17	32,17	8,33	0,03		3.950.000,00
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.156.000,00			1,13	5.335.600,00	18,95	0,21		29,17	0,25		22.820.400,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.406.000	8	O/K	0,38	5.035.600,00	53,54	0,20	4,00	50,00	0,19		4.370.400,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.750.000	125	O/K	0,75	300.000,00	1,60	0,01	10,42	8,33	0,06		18.450.000,00
	5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**63.200.000,00**			**2,53**	**-**	**-**	**-**		**8,33**	**0,17**	**-**	**63.200.000,00**
		12	Pengadaan Mebel	11.400.000,00			0,46	-	-	-		8,33	0,22		11.400.000,00
			Belanja Modal Mebel	11.400.000,00	40	Unit	0,46	-	-	-	3,33	8,33	0,04		11.400.000,00
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.800.000,00			2,07	-	-	-		8,33	0,17		51.800.000,00
			Belanja Modal Alat Pendingin	2.600.000	8	Unit	0,10	-	-	-	0,67	8,33	0,01		2.600.000,00
			Belanja Modal Personal Computer	40.800.000	2	Unit	1,63	-	-	-	0,17	8,33	0,14		40.800.000,00
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.400.000	2	Unit	0,34	-	-	-	0,17	8,33	0,03		8.400.000,00
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**31.260.450,00**			1,25	**25.354.000,00**	81,11	1,01		**77,50**	**0,60**	**-**	**5.906.450,00**
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.042.000,00			0,28	1.712.000,00	24,31	0,07		91,67	0,26		5.330.000,00
			Belanja Tagihan Listrik	7.042.000	11	Kali	0,28	1.712.000,00	24,31	0,07	10,08	91,67	0,26		5.330.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	11	Kali	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	8,33	-		-
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.218.450,00			0,97	23.642.000,00	97,62	0,95		63,33	0,95		576.450,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.725.760	12	Bulan	0,75	18.725.760,00	100,00	0,75	12,00	100,00	0,75		-
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.075.152	12	Bulan	0,12	3.075.152,00	100,00	0,12	12,00	100,00	0,12		-
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.841.088	12	Bulan	0,07	1.841.088,00	100,00	0,07	12,00	100,00	0,07		-
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	256.199	12	Bulan	0,01		-	-	1,00	8,33	0,00		256.199,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	320.251	12	Bulan	0,01		-	-	1,00	8,33	0,00		320.251,00
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**53.736.704,00**			**2,15**	**17.675.000,00**	**32,89**	**0,71**		**8,33**	**0,83**	**-**	**36.061.704,00**
		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	45.546.704,00			1,82	12.675.000,00	27,83	0,51		8,33	0,45		32.871.704,00
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.926.144	2.060	Liter	0,68	4.680.000,00	27,65	0,19	171,67	8,33	0,39		12.246.144,00
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.277.560	7	Unit	0,13		-	-	0,58	8,33	0,01		3.277.560,00
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.223.000	5	Unit	0,61	4.195.000,00	27,56	0,17	0,42	8,33	0,05		11.028.000,00
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat	10.120.000	1	Unit	0,40	3.800.000,00	37,55	0,15	0,08	8,33	0,03		6.320.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Angkutan Apung Bermotor Lainnya												
		17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		8,33	0,19		-
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	4	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,33	8,33	-		-
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	4	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,33	8,33	-		-
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	5	Unit	-		#DIV/0!	#DIV/0!	4,58	91,67	-		-
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.190.000,00			0,33	5.000.000,00	-	-		58,33	0,19		3.190.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	8.190.000	90	M2	0,33	5.000.000,00		-	52,50	58,33	0,19		3.190.000,00
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**31.391.900,00**			**1,26**	**28.100.000,00**	**89,51**	**1,12**		**41,03**	**0,51**		**3.291.900,00**
	8		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**31.391.900,00**			1,26	**28.100.000,00**	89,51	1,12		**41,03**	**1,14**	**-**	**3.291.900,00**
		19	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.391.900,00			1,26	28.100.000,00	89,51	1,12		41,03	1,14		3.291.900,00
			Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	21	Pcs	-		#DIV/0!	#DIV/0!	1,75	8,33	-		-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN			FISIK				
						REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
			VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	82	Pcs	-		#DIV/0!	#DIV/0!	6,83	8,33	-		-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.900	90	M2	0,01	210.000,00	59,68	0,01	82,50	91,67	0,01		141.900,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	19	Pcs	-		#DIV/0!	#DIV/0!	1,58	8,33	-		-
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat	-	570	Kotak	-		#DIV/0!	#DIV/0!	47,50	8,33	-		-
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	570	Kotak	-		#DIV/0!	#DIV/0!	47,50	8,33	-		-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.540.000	1.220	Kotak	0,70	14.390.000,00	82,04	0,58	1.016,67	83,33	0,58		3.150.000,00
	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	20	Stel	-		#DIV/0!	#DIV/0!	16,67	83,33	-		-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000	20	O/K	0,24	6.000.000,00	100,00	0,24	20,00	100,00	0,24		-
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	4	O/K	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,33	8,33	-		-
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	8	Kali	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	8	Kali	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	Unit	-		-	-	-	-	-		-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	112	O/H	0,30	7.500.000,00	100,00	0,30	112,00	100,00	0,30		-
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	32	O/K	-		#DIV/0!	#DIV/0!	2,67	8,33	-		-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
								KEUANGAN			FISIK				
								REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
					VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**19.881.900,00**			**0,79**	-	-	-		**14,29**	**0,11**		**19.881.900,00**
	9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**19.881.900,00**			**0,79**	-	-	-		**14,29**	**0,06**		**19.881.900,00**
		20	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	16.231.900,00			0,65	-	-	-		14,29	0,06		16.231.900,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.900	50	M2	0,01		-	-	20,83	41,67	0,01		351.900,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	8	Pcs	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	12	Stel	-		#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	8,33	-		-
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	49	Stel	-		#DIV/0!	#DIV/0!	4,08	8,33	-		-
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.750.000,00	900	Kotak	0,15		-	-	75,00	8,33	0,01		3.750.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.030.000,00	900	Kotak	0,36		-	-	75,00	8,33	0,03		9.030.000,00
			Belanja Pakaian Paskibraka	-	8	Stel	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	11	O/K	0,12		-	-	0,92	8,33	0,01		3.100.000,00
			Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	8	Stel	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	11	O/K	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,92	8,33	-		-
		21	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	3.650.000,00			0,15	-	-	-		27,68	0,39		3.650.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN			FISIK				
						REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
			VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Pimpinan di Kecamatan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000,00	50	M2	0,15		-	-	4,17	8,33	0,01		3.650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	8	Pcs	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,67	8,33	-		-
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.461.140,00**			**0,34**	**3.760.000,00**	**44,44**	**0,15**		**88,54**	**0,30**		**4.701.140,00**
	10 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**8.461.140,00**			**0,34**	**3.760.000,00**	**44,44**	**0,15**		**88,54**	**0,08**		**4.701.140,00**
	22 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	211.140,00			0,01	210.000,00	99,46	0,01		154,17	0,01		1.140,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	211.140	6	M2	0,01	210.000,00	99,46	0,01	5,50	91,67	0,01		1.140,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	360	Paket	-		#DIV/0!	#DIV/0!	390,00	108,33	-		-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	12	O/H	-		-	-	13,00	108,33	-		-
	22 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.250.000,00			0,33	3.550.000,00	43,03	0,14		22,92	0,16		4.700.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	21	M2	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-		-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00	600	Paket	0,28	3.100.000,00	44,93	0,12	300,00	50,00	0,14		3.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	24	O/H	-		-	-	-	-	-		-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	4	O/H	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,33	8,33	-		-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	120	O/H	0,05	450.000,00	33,33	0,02	40,00	33,33	0,02		900.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPPA Rp	RINCIAN PERHITUNGAN		BOBOT SKPD ANGGARAN KEGIATAN (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN			FISIK				
						REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA
			VOLUME	SATUAN		Rp	(%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
								-					
JUMLAH TOTAL		2.501.307.217,00	12.097	1 Tahun	100,00	826.913.925,00	33,06	33,06	3.019	43,24	43,24		1.674.393.292,00

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Selatan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepulauan Anambas kepada Camat Siantan Selatan di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026;

3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan e.konomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4) Pelayanan Prima. Kecamatan Siantan Selatan selain sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, professional dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
6) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan juga percepatan pembangunan aksesibilitas baik dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
7) Koordinator Program Kabupaten Kota Sehat, Kabupaten Layak Anak
8) Pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG)
9) Pencegahan Stunting dan Inovasi Daerah
10) Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

2.3. Review Terhadap Rancangan Renja 2025

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2025 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan Selatan, berkenaan dengan Tahun 2025 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan melakukan pengurangan Program/Kegiatan dengan memperhatikaan bebagai kondisi daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Selatan pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan tugas desentralisasi otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Siantan Selatan.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

2.5. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Volume	Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Sarana Umum Kecamatan	Kecamatan Siantan Selatan			Peningkatan Pembangunan Sarana Kecamatan
2	Pembukaan Badan Jalan Desan Ke Teluk Rambut	Kecamatan Siantan Selatan			Peningkatan Pembangunan Sarana Kecamatan
3	Penimbunan Halaman Masjid Besar Kecamatan	Kecamatan Siantan Selatan			Peningkatan Pembangunan Sarana Kecamatan
4	Pengadaan Lampu Suar 32 MN	Kecamatan Siantan Selatan			Peningkatan Pembangunan Sarana Perhubungan
5	Pengadaan Morrin Bouy	Kecamatan Siantan Selatan			Peningkatan Pembangunan Sarana Perhubungan
6	Pelebaran dan Peningkatan Pelabuhan Dusun II (Genting)	Desa Air Bini	Jl. Palabuhan RT. 001./ RW.003	P155MxL5M	Pembangunan Infrastruktur Desa
7	Lanjutan Jalan Nasional Desan	Desa Air Bini	JL Sanusi Arif RT. 001/ RW.001	P 250 x L 5M	Pembangunein Infrastruktur Desa
8	Tambatan Perahu Nelayan Desa Air Bini	Desa Air Bini	Air Bini RT.002 RW.002 Dusun 02	P 115M L5M T 3M	Pembangunein Infrastruktur Desa
9	Peningkatan Lapangan Sepak Bola Dusun II (Genting)	Desa Air Bini	Jl. Ibrahim RT. 001/ RW.003	1 Paket	Pembangunein Infrastruktur Desa
10	Penimbunan Halaman PAUD "Raudha.tul Khadijah' Desa Air Bini	Desa Air Bini	Jl. Ibrahim RT. 001/ RW.003	1 Paket	Pembangunein Infrastruktur Desa

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Volume	Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Dusun 02 Genting		
11	Pemasangan Batu Miring Tepi Pantai Berangin	Desa Tiangau	Desa Tiangau	250 M	Pembangunan Infrastruktur Desa
12	Pembangunan Lampu PLTS di sepanjang Jalan M.H. Thamrin dan Pemukiman Penduduk	Desa Tiangau	Jl. M.H Thamrin dan Pemukiman Desa Tiangau	150 Unit	Pembangunan Infrastruktur Desa
13	Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Katin Wisata	Desa Tiangau	Jl. Pantni Berangin	1 Lusin	Pembangunan Infrastruktur Desa
14	Semenisasi Jalan Gang M. Amin	Desa Tiangau	Jl. Gang M Amin RT.O01 RW.002 Dusun 01	150 x 2,5 M	Pembangunan Infrastruktur Desa
15	Peningkatan Parit/ Drainase Jalan Raya	Desa Tiangau	Karang Tikar	150 M	Pembangunan Infrastruktur Desa
16	Pembangunan/Pengadaan Perumahan Guru Agama Kristen dan Pengadaan Mubiler	Desa Mengkaiat		8x7 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
17	Pengadaan/Penyediaan Kapal Barang atau Kapal Penumpang (Feri)	Desa Mengkaiat		-	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
18	Renovasi Pustu dan Penambahan Tenaga Medis	Desa Mengkaiat		-	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
19	Lanjutan Penimbunan Talud Desa Mengkait	Desa Mengkaiat		100 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
20	Pengadaan alat-alat Perikanan Tangkap, Radar Satelit	Desa Mengkaiat		300 Unit	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
21	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SDN.003 Mengkait	Desa Mengkaiat		-	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
22	Talu t Pemecah Ombak / Baru Minng Abrasi Pantai	Desa Lingai	Lingai Lengke Dusun I I<T 003	P 75M, T 1,5M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
23	Rehap Atap Masjid Baitu) Sholihin Dusun 02 Pasir Panjang	Desa Lingai	Lingai Lengke Dusun 2		Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
24	Rehabilitasi Jalan RT.004 Dusun 2	Desa Lingai	RT.004 Dusun 2 Lingai Pasir Panjang	P 100 M X 2,5M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
25	Rehap Pelabuhan Utama Dusun Lingai Iengke RT.003 RW. 001	Desa Lingai	RT.003 RW .001	P20M L3M Panjang T 17M Lebar T 9M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
26	Jalan Sememsasi Pemungkiman	Desa Lingai	Dusun 11 RT.004 Pasir Panjang	P 70M, L 2,50M X T 80s	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
27	Surau Baiturrahmcin	Desa Kiabu	Jl. Kampung Tanjung RT. 008 / RW.004	6 16M x 14 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Volume	Program
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
28	Pembangunan peru mahan guru SMP	Desa Kiabu	Jl. Kampu ng Tanjung RT. 008 / RW.004	16M x 14 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
29	Pembangunan Gedung SMA	Desa Kiabu	Jl. Kampung Tanjung RT. 008 / RW.004	100M x 100M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
30	Semenisasi jalan RT.008 / R W. 004	Desa Kiabu	Jl. Kampung Tanjung RT. 008 / RW.004	50M x3 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
31	Semenisasi jalan lintang Rt.001 / RW.001	Desa Kiabu	Jl. Kampung Bakau RT.001/ RW. 001	P = 102M, L= 3M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
32	Pembangunan pemecahan Ombak	Desa Telaga	Rt.02 Dusun 1 Pasir Panjang Desa Telaga	100 M x 3 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
33	Rehap atau pelebaran Masjid AT-Tacpwa	Desa Telaga	Dusun II Teluk Kelimpan	I2Mx 12M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
34	Semenisasi dan Pengaspalan Jin. Penghubung Antar Dusun (Dusun 1 -Dusun 2) Desa Telaga	Desa Telaga	Desa Telaga	2500M x 3M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
35	Pembangunan Pelabuhan Pusat Desa	Desa Telaga	Pusat Desa	60M x 3 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
36	Rehabilisasi dan Pelebaran Pelabuhan	Desa Telaga	Dusun II Teluk Kelimpan	85M x 3M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
37	Pembangunan Sekolah SMP Telaga Kecil	Desa Telaga Kecil			Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
38	Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih	Desa Telaga Kecil		P7xL5xT4	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
39	Pembangunan Jalan Menuju Makam (Keramat)	Desa Telaga Kecil		P 150 x L 3 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
40	Pembangunan Lapemgan Bola Kaki	Desa Telaga Kecil		P 120 x L 100 M	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa
41	Penerangan Jalan Desa/PJU	Desa Telaga Kecil		1 Paket	Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa

BAB III
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Desa.
3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan public pada Kecamatan Siantan Selatan maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Siantan Selatan dipandang perlu menyusun Program/Kegiatan demi menunjang peningkatan indikator Kecamatan, pada table dibawah ini dapat dilihat Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan serta pendanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN							**3.397.684.073,00**	**3.147.684.073,00**	**2.501.307.217,91**	**-896.376.855,09**							**3.948.960.910,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.397.684.073,00**	**3.147.684.073,00**	**2.501.307.217,91**	**-896.376.855,09**							**3.948.960.910,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.397.684.073,00**	**3.147.684.073,00**	**2.501.307.217,91**	**-896.376.855,09**							**3.948.960.910,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**2.592.684.073,00**	**2.474.258.801,00**	**2.441.572.277,91**	**731.276.837,00**							**3.323.960.910,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN*				100 %	100 %	1.617.484.073,00	1.925.484.073,00	2.151.422.150,91	533.938.077,91			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		1.973.263.910,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.518.484.073,00	1.832.484.073,00	2.034.782.150,91	516.298.077,91	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			1.874.263.910,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	93.000.000,00	93.000.000,00	116.640.000,00	23.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			93.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			3.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			3.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.200.000,00	22.800.000,00	29.800.000,00	4.600.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		25.200.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.200.000,00	22.800.000,00	29.800.000,00	4.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			25.200.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.000.000,00	25.439.140,00	0,00	-20.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		124.700.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	15.000.000,00	25.439.140,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			74.700.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum*				100 %	100 %	320.000.000,00	244.562.323,00	112.152.973,00	-207.847.027,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		281.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	18.000.000,00	11.990.260,00	17.103.870,00	-896.130,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	57.244.373,00	36.252.251,00	-43.747.749,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			80.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	18.000.000,00	11.956.743,00	12.780.743,00	-5.219.257,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	18.000.000,00	11.799.547,00	9.710.109,00	-8.289.891,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	2.111.400,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.700.000,00	8.150.000,00	-1.850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	161.000.000,00	128.760.000,00	28.156.000,00	-132.844.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			120.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	205.000.000,00	114.005.830,00	63.200.000,00	-141.800.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		205.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	80.000.000,00	68.572.016,00	11.400.000,00	-68.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			120.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	125.000.000,00	45.433.814,00	51.800.000,00	-73.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			85.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	330.000.000,00	17.518.800,00	31.260.450,00	-298.739.550,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		574.072.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	17.518.800,00	7.042.000,00	-8.958.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			16.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	314.000.000,00	0,00	24.218.450,00	-289.781.550,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			558.072.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	65.000.000,00	124.448.635,00	53.736.704,00	-11.263.296,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		125.725.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	84.938.635,00	45.546.704,00	5.546.704,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			80.725.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.390.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	29.120.000,00	8.190.000,00	-6.810.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			30.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**370.000.000,00**	**386.655.896,00**	**31.391.900,00**	**-70.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		80.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			80.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	270.000.000,00	286.655.896,00	31.391.900,00	-238.608.100,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		220.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	270.000.000,00	286.655.896,00	31.391.900,00	-238.608.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			220.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**195.000.000,00**	**180.230.256,00**	**19.881.900,00**	**25.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				100 %	100 %	195.000.000,00	180.230.256,00	19.881.900,00	-175.118.100,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		220.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	145.000.000,00	160.880.256,00	16.231.900,00	-128.768.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			180.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	19.350.000,00	3.650.000,00	-46.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**240.000.000,00**	**106.539.120,00**	**8.461.140,00**	**-135.000.000,00**							**105.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	240.000.000,00	106.539.120,00	8.461.140,00	-231.538.860,00			-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Siantan Selatan		105.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.722.280,00	211.140,00	-49.788.860,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	190.000.000,00	90.816.840,00	8.250.000,00	-181.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas			90.000.000,00	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	J U M L A H								**3.397.684.073,00**	**3.147.684.073,00**	**2.501.307.217,91**	**-548.753.730.731,26**							**3.948.960.910,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Siantan Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas. Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Siantan Selatan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Siantan Selatan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

Air Bini, 16 Juli 2025

Camat Siantan Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Awaluddin Makrifatullah, S.Sos
Pembina/IV.a
NIP. 19700213 200701 1 021

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TENGAH
Jalan Haji Ali, Air Asuk, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos-el kecamatansiantantengah7@gmail.com

Air Asuk, 16 Juli 2025

Kepada
Yth : Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di -
Tarempa

SURAT PENGANTAR
Nomor : 113.a /CMT-ST/07.2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Dokumen Penyusunan Rancangan Akhir Perubaham Rencana Kerja Perangkat Kecamatan Siantan Tahun 2025	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SIANTAN TENGAH

AFRIZAL, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19680217 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KEPUAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN TENGAH

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAM RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SIANTAN TENGAH TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR
RKPD 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Perubaham Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Anggaran 2025 Kabupaten Kepuluanan Anambas .

Penyusunan Rancangan Akhir Perubaham Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Anggaran 2025 ini memberikan gambaran mengenai rencana kerja Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan arah kebijakan, sehingga tercapainya sistem manajemen Pembangunan / pelayanan umum yang profesional dan akuntabel yang transparan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dalam penyusunan rencana kegiatan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu perlu masukan – masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Air Asuk, 16 Juli 2025

CAMAT SIANTAN TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TENGAH

ADRIZAL, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19680217 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SIANTAN TENGAH 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 16
2.3 SUMBER DAYAA APARATUR 20
2.4 KINERJA PELAYANAN 20
2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD 23
2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 31
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 31
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN TENGAH 36
BAB V PENUTUP 44

TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	20
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	21
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025	27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Siantan Tengah	40
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025	42
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025/2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-PD tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Siantan Tengah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Santan Tengah merupakan suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Diharapkan dari perencanaan tersebut, pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2).

Renja-PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Seluruh kegiatan pada Kecamatan Siantan Tengah, selalu mengutamakan dan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai landasan hukum pada penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kuangan Daerahl
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
19. eraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025;
2. Untuk meningkatkan pelakasanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tengah Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dalam pengaturan pembinaan aparatur;

2. Tercapainya sistem menajemen pembangunan / pelayanan umum dengan prinsip profesionallitas dan akutabilitas yang transparan dan tepat pada sasaran (*Good Government*);
3. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2026;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025;
5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Siantan Tengah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan hasil Evaluasi Renja-PD tahun berjalan, Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Telaahan terhadap kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran Renja-PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilan serta penjelasan Program/kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIANTAN TENGAH

Pada tahun 2024 Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 5 (Lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (empat puluh) sub kegiatan. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah Rp. 3,390,391,735, namun Kecamatan Siantan Tengah mengalami Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Rp. 3,390,391,735 dengan realisasi sebesar Rp3,199,141,637 atau 90.00 %.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lainnya Rp. Rp6,010,000,
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp7,530,000,-

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan Rp118,268,000,-

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp29,852,000,-

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
  - Sub Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa Rp 48,252,000,-

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp10,350,000,-

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp. 3,480,000,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 0 %.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu Anggaran. Rp 1,814,436,805,- Realisasi Keuangan 99.03% dan Realiasi Fisik 100%.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pagu Anggaran Rp112,056,000,- Realisasi Keuangan 100% dan Realiasi Fisik 100%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran Rp. 6,286,703,- Realisasi Keuangan 0% dan Realisasi Fisik 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor Pagu Anggaran Rp. 66,790,401,- Realisasi Keuangan 99.05% dan Realisasi Fisik 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagu Anggaran Rp 7,618,4019,- Realisasi Keuangan 91.81% dan Realiasi Fisik 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu Anggaran Rp. 7,667,970,- Realisasi Keuangan 99.05% dan Realisasi Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Anggaran Rp. 5,983,800,- Realisasi Keuangan 66,30% dan Realisasi Fisik 100%
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Pagu Anggaran Rp. 21,750,000,- Realisasi Keuangan 20,88% dan Realisasi Fisik 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu Anggaran Rp.78,580,500,- Realisasi Keuangan 71,88% dan Realisasi Fisik 100%.

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Anggaran Rp. 37,420,450,- Realisasi Keuangan 58,51% dan Realiasi Fisik 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu Anggaran Rp. 942,684,604,- Realisasi Keuangan 93,36% dan Realisasi Fisik 100%.

➢ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu Anggaran Rp. 7,140,000,- Realisasi Keuangan 84,82% dan Realisasi Fisik 100%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu Anggaran Rp. 9,180,000 Realisasi Keuangan 82.03% dan Realiasi Fisik 100%.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

➢ Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pagu Anggaran Rp. 118,611,176,- Realisasi Keuangan 91,18% dan Realisasi Fisik 99,54%.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

➢ Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat Pagu Anggaran Rp. 32,032,400,- Realisasi Keuangan 93.00% dan Realisasi Fisik 100%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

➢ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa Pagu Anggaran Rp 49,440,000,- Realisasi Keuangan 99.09% dan Realisasi Fisik 100%.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➢ Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan PartisipatifPagu Anggaran Rp 10,350,000,- Realisasi Keuangan 100% dan Realisasi Fisik 100%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Implementasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra Kecamatan Jemaja berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sianta Tengah, sehingga dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Perlu adanya konsinyering Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA;
3. Untuk kegiatan yang dilimpahkan dari Perangkat Daerah atau Instansi lain perlu adanya koordinasi terkait permasalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Kecamatan Jemaja, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. (a-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (a-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun a-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah *s/d* tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (a-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (a-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan *s/d* tahun berjalan (a-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksanaanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03	**ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
.01.03.2.03.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**PersentaseKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.01.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentaseKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**PersentaseKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01.0003	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentaseKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan Organisasi Perangat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Siantan Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Siantan Tengah meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

a. Lingkungan Eksternal

<u>Peluang</u>

- Keberadaan UU No.17/ 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 25/ 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

- Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
- Penciptaan kebijakan yang pro pasar
- Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan perdagangan, perikanan, pertanian dan sektor informal lainnya.
- Adanya sumber-sumber pendanaan lainnya (diluar APBD dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan.

Ancaman

- Sanksi pidana kepada kepala daerah dan perangkat daerah lainnya yang melakukan penyimpangan terhadap APBD.
- Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.
- In efesiensi dalam system transparansi kota dan kebijakan yang dihasilkan bisa kepentingan pada kelompok tertentu.
- Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL (pedagang kaki lima) degradasi terhadap eksistensi lingkungan, kekumuhan serta instabilitas keamanan.
- In konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran.
- Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

b. Lingkungan Internal

Kekuatan

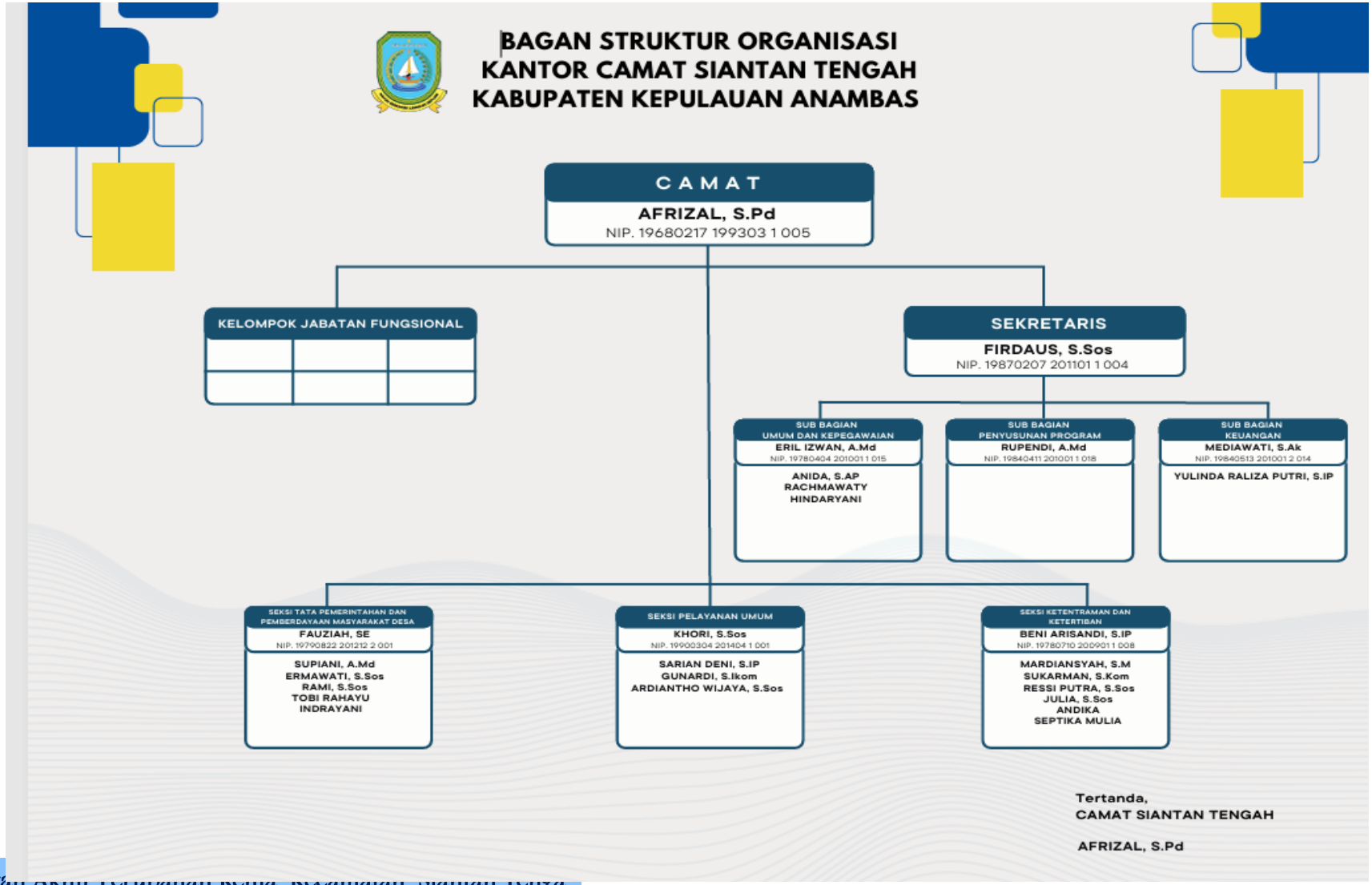
- Memiliki kekuatan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan masyarakat;
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah;
- Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
- Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain di luar tupoksi utama organisasi,

Kelemahan

- Masih kentalnya budaya Pegawai yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Kurang memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.
- Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami katerlambatan.
- Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lembaga teknis daerah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut ;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KEBUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



2.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Siantan Tengah Per Januari 2025 berjumlah 48 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil dan 36 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina	Eselon III.a	0 Orang
Penata	Eselon III.b	0 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	5 Orang
Penata	Eselon IV.a	3 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	1 Orang
Penata Muda	Eselon IV.b	2 Orang
Penata Muda	Staf	0 Orang
Pengatur Tingkat I	Staf	0 Orang
Pengatur	Staf	0 Orang
ASN PPPK	Staf	37 Orang
Jumlah		**48 Orang**

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Siantan Tengah tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
1	ASN : 11 Orang	S2	: 0 Orang
		S1	: 9 Orang
		D3	: 2 Orang
		D2	: 0 Orang
		SMA/SMK	: 0 Orang
		SMP/SLTP	: 2 Orang
2	ASN PPPK : 37 Orang	S1	: 12 Orang
		SMA/SMK	: 24 Orang
		SD	: 1 Orang
Jumlah		**48 Orang**	

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Siantan Tengah didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan ASN PPPK, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan ASN PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 4
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	7	4
ASN PPPK	19	18
Jumlah	**26**	**22**

Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kecamatan memegang peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Sebagai ujung tombak birokrasi, ASN di kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirumuskan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan administratif, hingga pengawasan atas program-program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Di tingkat kecamatan, ASN juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka berfungsi sebagai mediator yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan makro pemerintah daerah ke dalam aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi, karena keberhasilan pembangunan di tingkat kecamatan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, ASN berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, sehingga menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih dari itu, ASN di kecamatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. Pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga. Dengan peran ini, ASN tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi di tingkat lokal. Dengan demikian, peran ASN di kecamatan tidak hanya penting bagi keberhasilan pembangunan di wilayahnya, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2.4 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan di tingkat kecamatan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecamatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan administratif, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan fasilitasi program pembangunan, harus dilakukan secara profesional dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja pelayanan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan standar prosedur, tetapi juga pada kemampuan ASN untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara proaktif.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, kecamatan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan. Digitalisasi proses pelayanan, seperti penerapan sistem antrian online dan penyediaan layanan berbasis aplikasi, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sekaligus mempercepat proses administrasi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas untuk memastikan

pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan kinerja pelayanan yang optimal, kecamatan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	17%	33%	50%	67%	83%	100%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	17%	33%	50%	67%	83%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025/2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada **Tabel 2.3**.

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KECAMATAN SIANTAN TENGAH TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**KECAMATAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**2,743,177,410**				**3,506,332,100**
7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan**			**0**				**44,097,780**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	6,690,000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	7,135,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	4 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	4,280,000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,663,960
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,663,960
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	4 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,664,860

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,555,464,262**				**1,877,048,549**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	37 Orang/ Bulan	2,427,132,262	DAU		54 Orang/ Bulan	1,754,992,549
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Veifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Dokumen	128,332,000	DAU		100%	112,056,000
7.01.01.2.02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Laporan	0	DAU		100%	10,000,000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**			**0**				**24,286,874**
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	0	DAU		2 Paket	24,286,874
7.01.012.06.01	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**0**				**61,698,000**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	0	DAU		2 Paket	10,000,000
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	0	DAU		3 Paket	6,500,000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	0	DAU		2 Paket	45,198,000
7.01.012.06.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**88,297,642**				**135,971,873**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	7,046,967	DAU		2 Paket	6,265,702
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	37,530,740	DAU		3 Paket	20,000,000
7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	7,965,580	DAU		2 Paket	7,618,401
7.01.012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	4,988,355	DAU		3 Paket	7,667,970
7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Paket	0	DAU		1 Paket	5,983,800
7.01.012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12Laporan	0	DAU		4 Laporan	21,750,000
7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	30,766,000	DAU		12 Laporan	66,686,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0**				**120,000,000**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Unit	0	DAU		2 Unit	100,000,000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Unit	0	DAU		2 Unit	20,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**99,415,506**				**982,579,024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	26,452,200	DAU		100%	33,024,000
7.01.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	72,963,306	DAU		100%	949,555,024
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**				**40,700,000**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Unit	0	DAU		1 Unit	14,330,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	32 Unit	0	DAU		10 Unit	11,370,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Unit	0	DAU		10 Unit	15,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**			**0**				**219,950,000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**			**0**				**219,950,000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	3 Laporan	0	DAU		3 Laporan	219,950,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**			**106,152,525**				**350,000,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**106,152,525**				**350,000,000**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	J Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	5 Laporan	106,152,525	DAU		4 Laporan	245,000,000
7.01.03.2.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediaka	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 unit	0	DAU		4 Laporan	105,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**			**0**				**35,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**0**				**35,000,000**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Laporan	0	DAU		1 Kegiatan	35,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**0**				**160,000,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**0**				**160,000,000**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Orang	0	DAU		17 Orang	130,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Orang	0	DAU		17 Orang	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisa Kebutuhan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0**				**66,526,500**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0**				**66,526,500**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	16,526,500
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Laporan	0	DAU		2 Laporan	50,000,000

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantaan Tengah pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan tugas desentralisasi otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Jemaja.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, yaitu:

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, serta rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026. Adapun rancangan tema pembangunan Prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi

Lokal serta Pengembangan Sumber daya Manusia yang Inovatif", dengan Rancangan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
5. Memperkuat reformasi birokrasi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Siantan Tengah menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan

dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,390,391,735 (Tiga milyar Tiga ratus Sembilan Puluh juta Tiga Ratus Sembilan Puluh satu ribu tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah) yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN SIANTAN TENGAH TAHUN 2025

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Veifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Pengadaan PakaianDinas beserta Atribut Kelengkapannya
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				14	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	22	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	24	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**11**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	25	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	26	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				27	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN TENGAH TAHUN 2025

Rumusan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada **Table 4.1** berikut

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01	**KECAMATAN**				**2,849,329,935**				**4,117,858,600**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**2,743,177,410**				**3,506,332,100**
7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan**			**0**				**44,097,780**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	6,690,000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	7,135,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	4 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	4,280,000

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,663,960
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,663,960
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	4 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	8,664,860
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,555,464,262**				**1,877,048,549**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	37 Orang/ Bulan	2,427,132,262	DAU		54 Orang/ Bulan	1,754,992,549
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Veifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Dokumen	128,332,000	DAU		100%	112,056,000
7.01.01.2.02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Laporan	0	DAU		100%	10,000,000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**			**0**				**24,286,874**
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	0	DAU		2 Paket	24,286,874

7.01.012.06.01	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**0**				**61,698,000**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	0	DAU		2 Paket	10,000,000
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	0	DAU		3 Paket	6,500,000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	0	DAU		2 Paket	45,198,000
7.01.012.06.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**88,297,642**				**135,971,873**
7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Paket	7,046,967	DAU		2 Paket	6,265,702
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	37,530,740	DAU		3 Paket	20,000,000
7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	7,965,580	DAU		2 Paket	7,618,401
7.01.012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Paket	4,988,355	DAU		3 Paket	7,667,970
7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Paket	0	DAU		1 Paket	5,983,800

7.01.012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12Laporan	0	DAU		4 Laporan	21,750,000
7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	30,766,000	DAU		12 Laporan	66,686,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0**				**120,000,000**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Unit	0	DAU		2 Unit	100,000,000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Unit	0	DAU		2 Unit	20,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**99,415,506**				**982,579,024**
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	26,452,200	DAU		100%	33,024,000
7.01.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	12 Laporan	72,963,306	DAU		100%	949,555,024
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**				**40,700,000**

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Unit	0	DAU		1 Unit	14,330,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	32 Unit	0	DAU		10 Unit	11,370,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Unit	0	DAU		10 Unit	15,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**			**0**				**219,950,000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			**0**				**219,950,000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	3 Laporan	0	DAU		3 Laporan	219,950,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**			**106,152,525**				**350,000,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**106,152,525**				**350,000,000**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	J Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	5 Laporan	106,152,525	DAU		4 Laporan	245,000,000

7.01.03.2.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediaka	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 unit	0	DAU		4 Laporan	105,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**			**0**				**35,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**0**				**35,000,000**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Laporan	0	DAU		1 Kegiatan	35,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**0**				**160,000,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**0**				**160,000,000**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Orang	0	DAU		17 Orang	130,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	10 Orang	0	DAU		17 Orang	30,000,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0**				**66,526,500**

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0**				**66,526,500**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	16,526,500
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah	2 Laporan	0	DAU		2 Laporan	50,000,000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Perubaham Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Anggaran 2025 Kabupaten Kepuluanan Anambas merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program pembangunan di tingkat kecamatan.

Dengan visi yang jelas dan tujuan yang terarah, rencana ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi, memaksimalkan potensi yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam menjalankan rencana ini sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat kecamatan, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Oleh karena itu, implementasi yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang diharapkan.Dengan demikian, melalui perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Siantan Tengah diharapkan dapat terus berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengarahkan kebijakan dan program-program yang membawa perubahan positif bagi masyarakat

Air Asuk, 16 Juli 2025
CAMAT SIANTAAN TENGAH,

AFRIZAL, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19680217 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA
Jl. Merdeka Kel. Letung, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29792
Pos-el : kecjemajaanambas@gmail.com

Letung, 16 Juli 2025

Nomor : 000.7.2.4/090/KEC.JMJ/SD/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tarempa

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/BAPPEDA/SD/7/2025 tentang Permintaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan ini disampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Camat Jemaja,

Edison Z, S.Pd.SD
Penata Tk.I (III/d))
NIP. 197006161993041001

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

KECAMATAN JEMAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Jln. Merdeka, Letung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah selesai disusun.

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Renja-PD 2025 dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Perubahan RKPD. Perubahan Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP).

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Letung, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT JEMAJA,

EDISON Z, S.Pd.SD
Penata Tk.I
NIP. 197006161993041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 14
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN 15
3.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18
BAB IV PENUTUP 33

TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Jemaja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	6
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas	15
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Tahun 2025	16
Tabel 3.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam perencanaan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada perubahan anggaran, renja perubahan juga sebagai terjemahan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, renja perubahan merupakan sebuah media dalam melakukan evaluasi dan capaian program dan kegiatan perangkat daerah pada triwulan pertama dan kedua.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dikarenakan terjadinya pergeseran, penambahan, dan pengurangan pagu pada beberapa kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025;
2. Untuk menjaga konsistensi dan komitmen bersama terhadap program dan kegiatan proritas yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Jemaja Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dalam pengaturan pembinaan aparatur;
2. Tercapainya sistem menajemen pembangunan / pelayanan umum dengan prinsip profesionallitas dan akutabilitas yang transparan dan tepat pada sasaran (*Good Government*);
3. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Jemaja Tahun 2025;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Jemaja Tahun 2025;
5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Jemaja Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja perubahan, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja perubahan, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perubahan, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memberikan penjelasan pelaksanaan capaian program/kegiatan, realisasi keuangan dan fisik Kecamatan Jemaja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jemaja, program/kegiatan Kecamatan Jemaja, dan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jemaja yang berisikan program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

BAB IV. PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Jemaja berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 7.075.298.844,-. APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Jemaja memiliki 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Berdasarkan Hasil review APIP terhadap Pengakuan Hutang Daerah Tahun 2025 dan Instruksi Bupati Kepulauan Anambas Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, maka APBD Pergeseran Kecamatan Jemaja menjadi sebesar Rp. 5.750.494.836,-. Adapun realisasi belanja langsung Kecamatan Jemaja sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Jemaja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	URAIAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA PERGESERAN APBD Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
			KEUANGAN		FISIK
			REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
			Rp	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
UNIT	***KECAMATAN JEMAJA***	***5.750.494.836***	***1.796.953.380***		
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.974.443.437**	**1.567.743.380**		
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.470.000**	**1.220.000**	**16,40**	**33,33**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0	0,00	0,00

No	URAIAN		JUMLAH DANA MENURUT DPA PERGESERAN APBD Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
				KEUANGAN		FISIK
				REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
				Rp	%	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	0	0,00	0,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00	0,00
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.220.000	1.220.000	100,00	100,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	0	0,00	0,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0,00	0,00
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00	0,00
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.548.610.240**	**1.392.736.917**	**28,31**	**63,49**
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.135.240	1.378.903.917	29,14	55,71
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211.970.000	11.850.000	6,64	64,71
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.983.000	1.983.000	100,00	100,00
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	522.000	0	0,00	33,52
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**5.240.000**	**1.040.000**	**19,85**	**25**
	12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKDP	5.240.000	1.040.000	19,85	25
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0,00	0,00

No	URAIAN		JUMLAH DANA MENURUT DPA PERGESERAN APBD Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
				KEUANGAN		FISIK
				REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
				Rp	%	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000	0	0,00	0,00
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**190.810.323**	**76.505.500**	**40,10**	**43,72**
	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.898.890	1.994.500	20,15	47,01
	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00	0,00
	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.023.773	2.646.000	22,01	62,44
	18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.985.080	8.300.000	20,34	23,83
	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.803.580	3.980.000	21,59	22,66
	20	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.650.000	0	0,00	0,00
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.449.000	59.585.000	28,14	62,70
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**143.822.874**	**92.863.963**	**50,24**	**59,90**
	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.172.483	5.992.000	18,63	13,39
	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.682.928	10.281.500	57,56	45,05
	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.967.463	79.967.463	100,00	100,00
VII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**61.650.000**	**0**	**0,00**	**100,00**
	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin	61.650.000	0	0,00	100,00
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**20.740.000**	**0**	**0,00**	**50,00**

No	URAIAN		JUMLAH DANA MENURUT DPA PERGESERAN APBD Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
				KEUANGAN		FISIK
				REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
				Rp	%	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.770.000	0	4,17	50,00
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.970.000	0	0,00	50,00
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**2.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
IX	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**		**2.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	29	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya	2.000.000	0	0,00	0,00
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**742.858.999**	**229.210.000**		
X	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**49.805.000**	**0**	**47,71**	**50**
	30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.805.000	23.760.000	47,71	50
XI	**Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kemasyarakatan**		**23.999**	**0**	**0,00**	**0,00**
	31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23.999	0	0,00	0,00
XII	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**693.030.000**	**205.450.000**	**29,65**	**86,03**
	32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	88.000	0	0,00	100,00
	33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	0,00	100,00

No	URAIAN		JUMLAH DANA MENURUT DPA PERGESERAN APBD Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN		
				KEUANGAN		FISIK
				REALISASI S/D TRIWULAN II		REALISASI S/D TRIWULAN II
				Rp	%	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	492.942.000	205.450.000	41,68	58,51
D	**PROGRAAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
XIII	**Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	35	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0,00	0,00
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**60.562.400**	**0**	**0,00**	0,00
XIV	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**31.092.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
	36	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	31.092.400	0	0,00	0,00
	37	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0,00	0,00
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**6.322.400**	**0**		
XV	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100.000**	**0**	**0,00**	**33,33**
	38	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000	0	0,00	0
	39	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	0	0,00	100,00
	40	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0,00	0,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jemaja sampai dengan triwulan I tahun 2025 senilai Rp. 1.796.953.380,- atau 31,25% dari

total alokasi anggaran senilai Rp. 5.750.494.836,- dan realisasi fisik senilai 55,31%. Adapun uraian capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 3.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.220.000,- atau 16,40% dengan output tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kantor Camat Jemaja dengan realisasi fisik senilai 33,33%.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 4.548.610.240,- terealisasi sebesar Rp. 1.392.736.917,- atau 28,31% dengan output tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Jemaja dengan realisasi fisik senilai 63,49%.
    3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 5.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.040.000,- atau 19,85% dengan output terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Jemaja dengan realisasi fisik senilai 25%.
    4. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 100.000,- belum terelisasi dengan output terlaksananya Administrasi Kepegawain pada Kecamatan Jemaja dengan realisasi fisik senilai 0%.
    5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari total anggaran Rp. 190.810.323,- terealisasi sebesar Rp. 76.505.500,- atau 40,10% dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Jemaja dengan realisiasi fisik senilai 43,72%.
    6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total anggaran Rp. 143.822.874,- terealisasi sebesar Rp. 96.240.963,- atau 50,24% dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Jemaja dengan realisiasi fisik senilai 59,09 %.

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dari total anggaran Rp. 61.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 00,- atau 0,00 % dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Jemaja dengan realisiasi fisik senilai 100 %.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dari total anggaran Rp. 20.740.000,- belum terealisasi dengan output tersedianya administrasi umum Kantor Camat Jemaja dengan realisiasi fisik senilai 50 %.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dari total anggaran Rp. 2.000.000,- belum terealisasi baik keuangan maupun fisik.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari total anggaran Rp. 49.805.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.760.000,- atau 47,71% dengan output Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jemaja sejumlah 3 Agenda dengan realisasi fisik senilai 50%.
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dari total anggaran Rp. 693.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 205.450.000,- atau 29,65 % dengan output Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Letung dengan realisasi fisik senilai 86,03%.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum ditiadakan karena efisiensi anggaran.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah total anggaran Rp. 31.092.400,- belum terealisasi, dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan Paskibraka dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. 31.092.400,-

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari total anggaran Rp. 100.000,- belum terealisasi karena efisiensi anggaran dengan output Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi fisik senilai 33,33%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, yaitu:

1) Tujuan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang professional.
   b. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan.
   c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2) Sasaran Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.
   b. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.
   c. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran.
   d. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
   e. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan.
   f. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan.
   g. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.

h. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku.
i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
j. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.
k. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan disusun untuk masa satu tahun. Didalam perjalanan waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, pendanaan tersebut mengalami ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan, pergeseran pagu pada beberapa kegiatan, penambahan kegiatan, serta penambahan dan pengurangan target kinerja pada beberapa kegiatan. Namun ketidaksesuaian tersebut dapat dilakukan perubahan guna mencapai target yang lebih baik dan program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi berkualitas. Jumlah keseluruhan program pada

perubahan renja Kecamatan Jemaja pada tahun 2025 berjumlah 6 (Program) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Tahun 2025

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Veifikasi Keuangan SKPD
				10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkata Daerah	12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				20	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	29	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		11.	Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kemasyarakatan	31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan
		12.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan
				33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.	Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum	35	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				37	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				39	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				40	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Jemaja terdiri atas 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan penyebaran lokasi program/kegiatan di Kecamatan Jemaja dan Kelurahan Letung.

3.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran Kecamatan Jemaja pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 7.075.298.844,-, pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 5.750.494.836,-dan untuk usulan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 5.750.494.836,- sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Jemaja Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	KECAMATAN				***6.193.846.416***			***4.964.909.148***			***4.964.909.148***
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.374.655.244**			**4.881.887.749**			**4.881.887.749**
7.01.01.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kantor Kecamatan Jemaja**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**11.777.000**	**DAU**	**100%**	**3.470.000**		**100%**	**3.470.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	2 Dokumen	2.500.000	DAU	2 Dokumen	1.500.000		3 Dokumen	1.500.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	2.500.000	DAU	1 Dokumen	250.000		1 Dokumen	250.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	2.500.000	DAU	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kab. Kep. Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	1.220.000	DAU	1 Dokumen	1.220.000		1 Dokumen	1.220.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disiusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	1.220.000	DAU	1 Dokumen	500.000		1 Dokumen	500.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kab. Kep. Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	293.500	DAU	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disiusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Laporan	1.543.500	DAU	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**4.919.012.865**	**DAU**	**100%**	**4.988.502.865**		**100%**	**4.548.610.240**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	25 Orang/Bulan	4.731.887.865	DAU	25 Orang/Bulan	4.731.887.865		65 Orang/Bulan	4.334.135.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pembayaran Honorium PPKD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	178.440.000	DAU	12 Bulan	251.790.000		12 Bulan	211.970.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	5.843.000	DAU	1 Dokumen	1.983.000		1 Dokumen	1.983.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	2.842.000	DAU	1 Dokumen	2.842.000		1 Dokumen	522.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkata Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**10.480.000**	**DAU**	**100%**	**5.240.000**		**100%**	**5.240.000**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	3 Laporan	10.480.000	DAU	3 Laporan	5.240.000		3 Laporan	5.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**43.854.000**	**DAU**	**100%**	**21.052.000**		**100%**	**100.000**
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Laporan	6.750.000	DAU	1 Laporan	0		1 Laporan	0
7.01.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	2 Orang	37.104.000	DAU	1 Orang	21.052.000		1 Orang	100.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**272.744.522**	**DAU**	**100%**	**130.141.463**		**100%**	**130.141.463**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	5.000.890	DAU	1 Paket	5.000.890		1 Paket	5.000.890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	3 Paket	10.709.895	DAU	3 Paket	0		3 Paket	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	8.023.773	DAU	1 Paket	8.023.773		1 Paket	8.023.773
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	3 Paket	35.502.840	DAU	3 Paket	25.385.400		3 Paket	25.385.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	12.503.124	DAU	1 Paket	9.532.400		1 Paket	9.532.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	6 Laporan	25.500.000	DAU	6 Laporan	8.750.000		6 Laporan	8.750.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	175.504.000	DAU	12 Laporan	73.449.000		12 Laporan	73.449.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**41.301.706**	**DAU**	**100%**	**61.650.000**		**100%**	**61.650.000**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	41.301.706	DAU	1 Paket	61.650.000		1 Paket	61.650.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**59.635.151**	**DAU**	**100%**	**121.816.046**		**100%**	**121.816.046**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	47.892.763	DAU	12 Laporan	32.164.583		12 Laporan	32.164.583
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumnlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	11.742.388	DAU	12 Laporan	9.684.000		12 Laporan	9.684.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Laporan	0	DAU	12 Laporan	79.967.463		12 Laporan	79.967.463

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**15.850.000**	**DAU**	**100%**	**10.860.000**		**100%**	**10.860.000**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Dinas yang dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Unit	4.890.000	DAU	1 Unit	4.890.000		1 Unit	4.890.000
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	8 Unit	10.960.000	DAU	8 Unit	5.970.000		8 Unit	5.970.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**52.000.000**			**2.000.000**			**2.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100,00%**	**52.000.000**	**DAU**	**100,00%**	**2.000.000**		**100,00%**	**2.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	52.000.000	DAU	12 Laporan	2.000.000		12 Laporan	2.000.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**633.858.772**			**49.828.999**			**49.828.999**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa tiap Kecamatan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**595.215.360**	**DAU**	**100%**	**49.805.000**		**100%**	**49.805.000**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	4 Laporan	595.215.360	DAU	4 Laporan	49.805.000		4 Laporan	49.805.000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**38.643.412**	**DAU**	**100%**	**23.999**		**100%**	**23.999**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	2 Lembaga	38.643.412	DAU	2 Lembaga	23.999		2 Lembaga	23.999
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**1.250.000**			**0**			**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**80,00%**	**1.250.000**	**DAU**	**80,00%**	**0**		**80,00%**	**0**
7.01.04.2.01.03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Laporan	1.250.000	DAU	1 Laporan	0		1 Laporan	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**61.812.400**			**31.092.400**			**31.092.400**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**61.812.400**	**DAU**	**100%**	**31.092.400**		**100%**	**31.092.400**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	17 Orang	60.562.400	DAU	10 Orang	31.092.400		10 Orang	31.092.400
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	3 Dokumen	1.250.000	DAU	3 Dokumen	0		3 Dokumen	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**70.270.000**			**100.000**			**100.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**70.270.000**	**DAU**	**100%**	**100.000**		**100%**	**100.000**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	2 Dokumen	10.000.000	DAU	2 Dokumen	100.000		1 Dokumen	100.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Dokumen	12.270.000	DAU	1 Dokumen	0		1 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	2 Laporan	48.000.000	DAU	2 Laporan	0		2 Laporan	0
	KELURAHAN				**881.452.428**			**785.585.688**			**785.585.688**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**148.817.728**			**92.555.686**			**92.555.686**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**102.118.000**	**DAU**	**100%**	**60.668.860**		**100%**	**60.668.860**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	4.898.000	DAU	1 Paket	4.898.000		1 Paket	4.898.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	4.000.000	DAU	1 Paket	4.000.000		1 Paket	4.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	3 Paket	14.020.000	DAU	3 Paket	9.599.680		3 Paket	9.599.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Paket	7.000.000	DAU	1 Paket	5.271.180		1 Paket	5.271.180
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	6 Laporan	12.200.000	DAU	6 Laporan	6.900.000		6 Laporan	6.900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	60.000.000	DAU	12 Laporan	30.000.000		12 Laporan	30.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**26.998.928**	**DAU**	**100%**	**22.006.828**		**100%**	**22.006.828**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	20.000.000	DAU	12 Laporan	15.007.900		12 Laporan	15.007.900
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumnlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	12 Laporan	6.998.928	DAU	12 Laporan	6.998.928		12 Laporan	6.998.928

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**100%**	**19.700.800**	**DAU**	**100%**	**9.880.000**		**100%**	**9.880.000**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Dinas yang dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Unit	5.880.000	DAU	1 Unit	5.880.000		1 Unit	5.880.000
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	8 Unit	4.000.000	DAU	8 Unit	4.000.000		8 Unit	4.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Unit	9.820.800	DAU	8 Unit	0		8 Unit	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**732.634.700**			**487.580.00**			**487.580.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Penetapan APBD T.A 2025				Pergeseran APBD T.A 2025		Catatan Penting	Perubahan RKPD Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja**	**60%**	**732.634.700**	**DAU**	**60%**	**487.580.000**		**60%**	**487.580.000**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	5 Lembaga	5.184.700	DAU	5 Lembaga	88.000		5 Lembaga	88.000
7.01.03.2.02..03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	1 Unit	200.000.000	DAU	1 Unit	200.000.000		1 Unit	200.000.000
7.01.03.2.05.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja	5 Pokmas	527.450.000	DAU	5 Pokmas	492.942.000		5 Pokmas	492.942.000
				TOTAL	**7.075.298.844**			**5.750.494.836**			**5.750.494.836**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jemaja Tahun 2025 disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas secara efektif dan efisien seiring dan sejalan dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 selain merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga merupakan indikator rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam mengakhiri tahun 2025 ini. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan mendukung pembangunan di lingkungan Kecamatan Jemaja serta mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Letung, 16 Juli 2025
Plt. CAMAT JEMAJA,

EDISON Z, S.Pd.SD
Penata Tk.I
NIP. 197006161993041001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Jalan.Dapit,Jemaja Timur, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29792

Pos-el kecamatanjemajatimur E-mail : timurjemaja@gmail.com

Dapit, 16 Juli 2025

Yth: Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di -

Tarempa

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.3.10/ 060/JEMTIM.PROG/SPNG/07/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 Kantor Camat Jemaja Timur	1 (Satu) Berkas	Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt.Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE
Penata Tk.1
NIP. 19810828 201001 2 022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN JEMAJA TIMUR

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) periode tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur tahun 2025-2029 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025. Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang Program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan pada tahun 2025.

Harapan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Jemaja Timur tahun 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Jemaja Timur dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kabupaten kepulauan anambas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan RPJMD Kabupaten kepulauan Anambas tahun 2025-2029.

Dapit : 16 Juli 2025
Plt. Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE
Penata Tk.1
NIP. 19810828 201001 2 022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU APBD BERJALAN..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan..... 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 20

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD..... 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 32

3.3. Program dan Kegiatan..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ... 38

BAB V PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu.

Tabel 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3 : Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tebel 2.4 : Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

Tebel 3.3 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tebel 4.1 : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada RKPD Perangkat Daerah masing-masing. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen publik yang merupakan pedoman penyusunan rancangan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan stakeholder sebagai bagian dari perencanaan partisipatif. Dengan pertimbangan tersebut, rancangan

RPJMD akan menghasilkan kajian akademis berupa evaluasi capaian pembangunan, rumusan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penetapan isu strategis pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Di dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikanisu kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jemaja Timur berpedoman pada:

1.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kerja Kecamatan Jemaja Timur bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana kerja dengan Renstra Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.1.2 Hasil evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Jemaja Timur.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kecamatan Jemaja Timur. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 juga dirumus untuk menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2025 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir Unsur Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
14. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
15. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur adalah untuk menjamin kesesuaian dokumen rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jemaja Timur diharapkan memudahkan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga bisa melakukan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan dan melakukan perubahan terhadap program/kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Rencana Kerja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jemaja Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilan serta penjelasan Program/kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jemaja Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Jemaja Timur adalah Kecamatan yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Timur mengacu pada tahun anggaran 2025 yang telah disahkan dan terhadap capaian Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan 2024 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota
      - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu Anggaran 159.560.000 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%).

   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
        - Sub Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Pagu Anggaran 251.112.500 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)
   c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
        - Hormonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pagu Anggaran 50.000.000 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)
   d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
      - Kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
        - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pagu Anggaran 25.233.700 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pagu Anggaran 8.580.000 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)

- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Pagu Anggaran 38.010.600 (Realisasi Keuangan 0,00%) (Realisasi Fisik 0,00%)

2. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu Anggaran 3.246.000 (Realisasi Keuangan 97,67%) (Realisasi Fisik 100,00%).
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD Pagu Anggaran 3.459.400 (Realisasi Keuangan 88,10%) (Realisasi Fisik 100,00%).
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Pagu Anggaran 2.855.000 (Realisasi Keuangan 48.48%) (Realisasi Fisik 100,00%)
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pagu Anggaran 3.459.400 (Realisasi Keuangan 70,80%) (Realisasi Fisik 100,00%).
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pagu Anggaran 2.855.000 (Realisasi Keuangan 45,23%) (Realisasi Fisik 100,00%).
        - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran 2.840.000 (Realisasi Keuangan 95,69%) (Realisasi Fisik 100,00%)

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu Anggaran 2.055.862.176 (Realisasi Keuangan 94,73%) (Realisasi Fisik 100,00%).
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pagu Anggaran 99.840.000 (Realisasi Keuangan 85,12%) (Realisasi Fisik 100,00%).
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pagu Anggaran 4.489.400 (Realisasi Keuangan 36,58%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pagu Anggaran 19.800.000 (Realisasi Keuangan 100,00%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran 4.420.000 (Realisasi Keuangan 99,91%) (Realisasi Fisik 100,00%)
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagu Anggaran 10.132.600 (Realisasi Keuangan 70,08%) (Realisasi Fisik 100,00%).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pagu Anggaran 38.128.500 (Realisasi Keuangan 99,12%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Anggaran 5.000.000 (Realisasi Keuangan 67,98%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pagu Anggaran 50.050.000 (Realisasi Keuangan 86,35%) (Realisasi Fisik 100,00%).
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu Anggaran 143.878.000 (Realisasi Keuangan 74,80%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu Anggaran 121.811.000 (Realisasi Keuangan 100,00%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Anggaran 39.850.000 (Realisasi Keuangan 72,82%) (Realisasi Fisik 100,00%).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Anggaran 9.968.430 (Realisasi Keuangan 40,13%) (Realisasi Fisik 100,00%).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu Anggaran 599.598.752 (Realisasi Keuangan 98,42%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pagu Anggaran 15.851.600 (Realisasi Keuangan 43,48%) (Realisasi Fisik 100,00%).

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pagu Anggaran 9.540.000 (Realisasi Keuangan 56,50%) (Realisasi Fisik 100,00%).

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
     - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pagu Anggaran 159.505.000 (Realisasi Keuangan 80,55%) (Realisasi Fisik 100,00%).

3. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   - Tidak ada Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;
   1. Efisiensi Anggaran Tahun 2024

      3. Terjadi tunda bayar oleh Pemerintah Pusat terhadap Dana Bagi Hasil yang menjadi Hak Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menyebabkan tidak tercapainya Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sehingga mengakibatkan tertunda pembayaran pada tahun berjalan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, terjadi Ketidak susaian antara Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur pada tahun anggaran 2023.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Kepualaun Anambas dalam **Tabel 2.1** berikut:

TABEL. 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD (n-2) Tahun (2021)	Realisasi Renja PD (n-2) Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01.	**KECAMATAN**						**99,73**			**71,82**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**100,00**			**72,62**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**100,00**			**72,62**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	100,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100,00	12 Orang	12 Orang	100,00

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	3 Bulan	66,67
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	0 Paket	6 Paket	66,67
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	15 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	0 Paket	10 Paket	66,67
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	0 Paket	10 Paket	66,67
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	0 Laporan	24 Laporan	66,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	75,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**								
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	2 Laporan	66,67

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100,00	0 Laporan	0 Laporan	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bualan	12 Bulan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bualan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bualan	12 Bulan	100,00	0	0	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**								
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Agenda	3 Agenda	3 Agenda	3 Agenda	100,00	3 Agenda	3 Agenda	100,00
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	0	0	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	0	0	0
7.01.04.2.01.02										
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**								
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	100,00	0	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								

Dapit : 16 Juli 2025

Plt.Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE

Penata Tk.1

NIP. 19810828 201001 2 022

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	100,00	0	0	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	1 Agenda	100,00	0	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Jemaja Timur berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Jemaja Timur secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jemaja Timur yaitu :

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pulik di Kecamatan Jemaja Timur.
2. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesioanal
3. Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda di wilayah Kecamatan Jemaja Timur.
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Jemaja Timur.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Jemaja Timur antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Jemaja Timur.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Jemaja Timur.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jemaja Timur.
4. Meningkatnya partisipasi gender di Kecamatan Jemaja Timur

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jemaja Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA TIMUR

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	CC (51,76)	CC (51,76)	B (60,10)	B (60,10)	CC (51,76)	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	Peningkatan pencapaian target dipengaruhi sarana dan prasarana yang ada
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	B (81,29)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	B (81,29)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	20%	20%	40%	60%	20%	20%	40%	60%	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ditentukan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dapit : 16 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE
Penata Tk.1
NIP. 19810828 201001 2 022

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
   a. Pelayanan informasi, pelayanan kartu keluarga, pelayanan KTP, pendampingan Dana Desa.
   b. Memfasilitasi Musrenbang tingkat desa dan kecamatan serta pelayanan rekomendasi perijinan.
   c. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
   d. Pelayanan pendistribusian Beras Sejahtera (rastra), memfasilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosian (PMKS), Forum Anak, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) penyelenggaraan MTQ/STQ, penanganan bencana alam, pembinaan peranan wanita dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan karang taruna dan generasi muda.

2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi :
   a. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap persyaratan administrasi kependudukan, tidak tersedianya Tenaga pendampingan Dana Desa.
   b. Usulan musrenbang kecamatan dan desa kurang diakomodir oleh instansi terkait dan musrembang kabupaten.

3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan
   Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan pelayanan kurang optimal, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis prioritas yang direncanakan:
   a. Pelayanan Publik
   b. Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga

c. Lomba Desa
d. Pelaksanaan MTQ / STQ
e. Pelaksanaan Musrenbang
f. Peningkatan SDM
g. Penyaluran Rastra
h. Koordinasi instansi terkait dan vertical
i. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
j. Pembinaan karang taruna
k. Pemilihan kepala desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahaan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam rangka Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Memperhatikan paraturan yang ada betapa besar kompleksnya Tugas dan Fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan Tugas Fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana dan

prasarana sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Secces Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Karang Bintang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Memamfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok, fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memamfaatkan / menerapkan kemajuan tekhnologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memamfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memamfaatkan peran swasta untuk melengkapi saran dan prasarana serta menggali potensi sumber daya alam yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memamfaatkan tekhnologi yang canggih.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam Tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3

ISU-ISU DAN PERMASALAHAN PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN JEMAJA TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
1	Kesekretariatan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur	1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai Anjab 3. Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1. UU ASN 2. Adanya moratorium pegawai 3. Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3. Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	1. Distribusi dan Penerimaaan ASN sesuai dengan Hasil Analisa Anjab Perangkat Daerah 2. Program Tugas Belajar dan Diklat dan Bimtek 3. Terealisasinya Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun Anggaran 2021
2	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1. Adanya pelanggaran perda perijinan 2. Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1. Kurang sosialisasi Perda perijinan 2. Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat	1. Sosialisasi perda perijinan kepada masyarakat 2. Penempatan Tugas Satpol PP	1. Perda pelimpahan kewenangan perijinan, perda retribusi 2. Penambahan Personil Satpol PP
3	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1. Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1. Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2. Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas	1. Tersedianya Anggaran Pengadaan sarpras pelayanan Publik belum 2. Pelayanan informasi public kepada masyarakat berbasi TIK	1. Terlaksanaanya Pengadaan sarpras pelayanan Publik pada tahun 2021 2. Pelatihan Pengelolaan website pelayanan
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1. Praktek outsourching	1. Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan Jemaja Timur	1. Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha 2. Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1. Mebuka Usaha Mandiri berbasis UMKM 2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Bidang Rigger,Scabolding dan Operator Alat Berat
5	Pemberdayaan Masyarakat	1. Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	1. Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 2. Lemahnya penerapan Swadaya yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa	1. Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat 2. Perlu Sosialiasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Terealisasinya Anggaran Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat 2. Peningkatan Monotoring dan Evaluasi oleh Perangkat Daerah DP4MD
6	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1. Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan Jemaja Timur 2. Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	1. Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa se-kecamatan Jemaja Timur 2. Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis	1. Terealisasinya pembangunan Pasar Rakyat Tipe D di Desa Kecamatan Jemaja Timur

Kecamatan Jemaja Timur – Kabupaten Kepulauan Anambas

7	Pendidikan	1. Bidang Kejuruan (SMK) 2. Kurangnya minat para siswa lulusan SMP untuk menimba ilmu di sekolah kejuruan (SMK)	1. Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja 2. Kurangnya kegiatan ekscool yang menjadi daya Tarik bagi siswa	1. Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata 2. Pengadaan sarana prasarana di SMKN 3 Anambas	1. Terealisasinya Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata Tahun 2021 2. Terealisasinya sarana olahraga, kesenian, dll di SMKN 3 Anambas
8	Kesehatan	1. Tingkat Palayanan kesehatan masih rendah	1. Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2. Kurangnya Sapras Kesehatan	1. Mendistribusian Tegana medis sesuai kebutuhan 2. Pengadaan Sapras Kesehatan	1. Tersedianya Kebutuhan Tenaga Medis sesuai dengan kebutuhan
9	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan 2. Lemahnya Pengawasan DKP 3. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	1. Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage 2. Adanya ganguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing 3. Belum optimalnya Desa Swasembada Pangan	1. Pembagunan Pabrik Es 2. Pembangunan Pasar Ikan Bersih 3. Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4. Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Bukit Padi dan Ulu Maras	1. Terealisasinya Pembagunan Pabrik Es 2. Pembangunan Sarana Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKM) Pengelolaan Hasil Laut 3. Terealisasinya Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4. Terealisasinya Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Desa Bukit Padi dan Ulu maras
10	Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1. Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah	1. Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang	1. Terlaksananya hasil keputusan musrenbang yang menjadi skala prioritas pembangunan
11	Pembangunan	1. Pemeliharaan Ruas Jalan masih rendah 2. ketersedian Air Minum	1. Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi ruas jalan di Jemaja Timur 2. Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1. Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah 2. Peningkatan Pembangunan SPAM	1. Terlaksananya pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala di ruas jalan kec.Jemaja Timur 2. Terlaksananya Peningkatan Pembangunan SPAM (Konektifity jaringan distribusi + SR)
12	Lingkungan	1. Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan 2. Persampahan	1. Pembangunan Infrastruktur dikawasan mangrove	1. perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja Timur	1. Perlu adanya tidakan tegas terhadap pembangunan yang dilakukan dikawasan konservasi 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja Timur

Dapit : 16 Juli 2025
Plt. Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE
Penata Tk.1
NIP. 19810828 201001 2 022

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada, dengan mensinkronisasikan antara Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan RKPD Tahun 2023 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA TIMUR

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN				**3.581.199.169**				**4.136.962.072**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3.208.262.369**		**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3.208.262.369**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**17.598.700**		**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**17.598.700**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.003.700	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.003.700	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.967.800	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.967.800	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.590.500	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.590.500	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.036.700	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.036.700	

Kecamatan Jemaja Timur – Kabupaten Kepulauan Anambas

B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.157.379.621**		**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.157.379.621**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	2.055.812.421	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	2.055.861.421	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.080.000	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.080.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.438.200	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.438.200	
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**245.505.580**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**245.505.580**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	41.048.000	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	41.048.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	10.131.880	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	10.131.880	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.125.700	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.125.700	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.500.000	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.500.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.700.000	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.700.000	
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**102.313.500**		**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**102.313.500**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	102.313.500	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	102.313.500	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**681.011.768**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**681.011.768**	
1	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.006.800	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.006.800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.004.968	Kab. Kepulauan Anambas,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.004.968	

F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**4.453.200**		**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**4.453.200**	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.453.200	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.453.200	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**25.112.500**		**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**25.112.500**	
A	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**25.112.500**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**25.112.500**	
1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	25.112.500	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	25.112.500	
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**0**		**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**50.000.000**	
A	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**		**0**		**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**		**50.000.000**	
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	4 Laporan	0	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	4 Laporan	50.000.000	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**0**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**25.233.700**	
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**0**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**25.233.700**	
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	0	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	25.233.700	
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**46.590.600**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**46.590.600**	
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**46.590.600**		**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**46.590.600**	
1	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	8.580.00			1 Dokumen	8.580.000	
2	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	4 Laporan	38.010.600			4 Laporan	38.010.600	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Timur dilakukan dengan penelaahan kebijakan nasional yang disesuaikan dari visi-misi presiden dan wakil presiden, dimana visi misi sesuai dengan RPJPN 2021-2026, adalah;

Visi:

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong".

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Kebijakan Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Gubenur dan Wakil Gubenur terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026.

Adapun tema Pembangunan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2024 adalah **"Peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dan menjunjung nilai-nilai budaya melayu dan nasional"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut;

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan inftrastruktur wilayah.
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor -faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, serta rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026. Adapun rancangan tema pembangunan Prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2024 adalah "Pemulihan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur", dengan Rancangan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi yang berbasis sektor unggulan.

2. Peningkatan kesejahteraan sosial dan SDM unggul yang berakhlakul karimah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas.
4. Birokraksi yang melayani dan inovatif, serta otonomi desa yang berdaya saing.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Timur tahun 2026 dan prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Table 3.3 berikut :

Tabel 3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS
TAHUN 2025 & PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01.	**KECAMATAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**2.752.855.036,71**				**3.768.197.306,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.671.261.828,00**				**3.183.466.506,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			23.555.155,00				24.076.523,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Dokumen	0,00	DAU		3 Dokumen	4.832.823,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Dokumen	0,00	DAU		3 Dokumen	3.761.500,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	3.855.000,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	3.932.200,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	3.855.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	3.840.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.688.174.553,00				2.117.262.010,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	13 Orang	2.341.581.146,00	DAU		13 Orang	1.976.283.210,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Dokumen	147.050.000,00	DAU		12 Dokumen	130.000.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	4.489.400,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	0,00	DAU		12 Laporan	6.489.400,00

7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**			**10.105.100,00**				**17.565.110,00**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	17.565.110,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR**			**89.228.115**				**150.000.000,00**
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	34 Paket	0,00	DAU		34 Paket	150.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			384.598.214				253.150.935
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	15.383.300,00	DAU		5 Paket	31.219.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	8 Paket	16.576.060,00	DAU		8 Paket	16.617.235,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	9.598.160,00	DAU		5 Paket	26.074.700,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	4.539.000,00	DAU		5 Paket	9.740.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	16.941.500,00	DAU		12 Laporan	34.500.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	120 Laporan	67.376.000,00	DAU		120 Laporan	135.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			12.072.000,00				614.856.224,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	12.072.000,00	DAU		12 Laporan	12.072.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	40.144.662,00	DAU		12 Laporan	602.784.224,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			6.423.380,00				6.555.704,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	2 Unit	0,00	DAU		2 Unit	4.987.704,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Unit	0,00	DAU		3 Unit	1.568.000,00

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**0,00**				**300.000.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Kegiatan	50.000.000,00	**DAU**		5 Kegiatan	300.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	4 Laporan	0,00	**DAU**		4 Laporan	300.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**0,00**				**37.600.000,00**
7.01.05.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			37.600.000,00	**DAU**			37.600.000,00
7.01.03.1.04.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Laporan	0,00	DAU		3 Laporan	37.600.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**59.775.000,00**				**51.500.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			142.147.550,00				51.500.000,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	250 Orang	59.775.000,00	DAU		250 Orang	51.500.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0,00**				**30.115.400,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			16.115.400,00				**30.115.400,00**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	9.515.400,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00			1 Laporan	20.600.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**			**21.818.208**				**165.515.400,00**
7.01.03,2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur**		226.877.837				165.515.400,00
7.01.03,2.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur		21.818.208				165.515.400,00
TOTAL					**2.752.855.036,71**				**3.768.197.306,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR TAHUN 2025

Rumusan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01.	**KECAMATAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**2.752.855.036,71**				**2.752.855.036,71**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.671.261.828,00**				**2.671.261.828,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			23.555.155,00				23.555.155,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Dokumen	0,00	DAU		3 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Dokumen	0,00	DAU		3 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	0,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.488.631.146,00				2.488.631.146,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	13 Orang	2.341.581.146,00	DAU		13 Orang	2.341.581.146,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Dokumen	147.050.000,00	DAU		12 Dokumen	147.050.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	0,00	DAU		12 Laporan	0,00

7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**			**0,00**				**10.105.100,00**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00	DAU		1 Laporan	0,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR**			**0,00**				**89.228.115**
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	34 Paket	0,00	DAU		34 Paket	0,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			130.414.020,00				384.598.214
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	15.383.300,00	DAU		5 Paket	15.383.300,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	8 Paket	16.576.060,00	DAU		8 Paket	16.576.060,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	9.598.160,00	DAU		5 Paket	9.598.160,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Paket	4.539.000,00	DAU		5 Paket	4.539.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	16.941.500,00	DAU		12 Laporan	16.941.500,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	120 Laporan	67.376.000,00	DAU		120 Laporan	67.376.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			52.216.662,00				12.072.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	12.072.000,00	DAU		12 Laporan	12.072.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	12 Laporan	40.144.662,00	DAU		12 Laporan	40.144.662,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0,00				6.423.380,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	2 Unit	0,00	DAU		2 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Unit	0,00	DAU		3 Unit	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**0,00**				**0,00**

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	5 Kegiatan	0,00	**DAU**		5 Kegiatan	50.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	4 Laporan	0,00	**DAU**		4 Laporan	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**0,00**				**0,00**
7.01.05.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			0,00	**DAU**			37.600.000,00
7.01.03.1.04.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	3 Laporan	0,00	DAU		3 Laporan	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**59.775.000,00**				**59.775.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			59.775.000,00				142.147.550,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	250 Orang	59.775.000,00	DAU		250 Orang	59.775.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0,00**				**0,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			0,00				16.115.400,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Dokumen	0,00	DAU		1 Dokumen	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur	1 Laporan	0,00			1 Laporan	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**			**21.818.208**				**21.818.208**
7.01.03,2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur**		226.877.837				226.877.837
7.01.03,2.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur		21.818.208				21.818.208
TOTAL					**2.752.855.036,71**				**2.752.855.036,71**

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Timur adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jemaja Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
4. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan feedback yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Jemaja Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga rencana kerja RKPD tahun anggaran 2025 dapat tersusun. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu ***Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia,Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.***

Di Tetapkan : Dapit
Pada Tanggal : 16 Juli 2025
Plt. Camat Jemaja Timur,

Tetti Amalia, SE
Penata Tk.1
NIP. 19810828 201001 2 022

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA BARAT
Jl. Usman Matwan Desa Impol Kode Pos 29792
E_Mail : kecjemajabarat@gmail.com

Impol, 17Juli 2025

Kepada Yth,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-
Tarempa

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/000.7.2.4/084/KJB/SD/07/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Dokumen	Bersama ini disampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kantor Camat Jemaja Barat Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Diterima
tanggal.....

Penerima

.....
NIP.

Plt. Camat Jemaja Barat

MUHAMMAD ARIAS, S.Pi
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198111192010011007

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA 2025
KECAMATAN JEMAJA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



OPTIMALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI,
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jemaja Barat 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat 9

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jemaja Barat 10

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat 20

3.3 Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

BAB IIV PENUTUP 31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat sehat yang diberikan kami bisa menyelesaikan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RANKHIR RENJA-P). Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dimana dokumen ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 berisikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan detail pagu anggaran yang diperlukan demi terlaksananya kegiatan yang direncanakan.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelakasanaan kegiatan ditahun selanjutnya sehingga perangkat daerah khususnya Kecamatan Jemaja Barat sudah memiliki langkah-langkah yang akan diambil serta sasaran kegiatan ditahun berikutnya dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 dengan tema pembangunan **"Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan".**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Jemaja Barat.

Impol, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT JEMAJA BARAT

MUHAMMAD ARIAS,S.Pi

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 1981111920011007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Kecamatan Jemaja Barat.

Bagi Kecamatan Jemaja Barat, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Provinsi Kepri, RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas, RPJMD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas, dan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena rancangan akhir Perubahan rencana kerja menterjemahkan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat bertemakan **" Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan"** dengan rancangan prioritas pembangunan :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen

perencanaan yang memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan di tahun yang akan datang. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini memuat penjabaraan dari kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pronvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini bagi Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Jemaja Barat
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jemaja Barat dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jemaja Barat tahun 2025 adalah sebagai :

1. Kerangka Acuan dalam Penyusunan RKA-PD Tahun 2025.
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam progam dan kegiatan tahun 2025.
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Jemaja Barat yang telah ditetapkan pagu indikatifnya.
5. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran.

1.4 Sitematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Perumusan Tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jemaja Barat

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat pelaksanaan program, keberhasilan dan serta kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan dalam menuju proses pencapaian renstra yang telah disusun. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan DPPA-PD Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 4 program dan 11 kegiatan dengan presentase realisasi pencairan sebesar 98,36% dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 99%. Sedangkan berdasarkan DPA-PD Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 Program dan 11 Kegiatan dengan prakiraan capaian kinerjanya 98,36%, dimana capaian kinerja tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. -
- Belanja Langsung Pegawai : Rp. 1.646.322.197,63
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 445.998.593
- Belanja Modal : Rp 4.200.000

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu lebih ditekankan sesuai penugasan Kepala Daerah kepada Camat. Berkenaan dengan ini maka perlu dukungan dari Pemerintah Daerah agar Program/Kegiatan Kecamatan bisa berjalan dengan maksimal atau sesuai dengan capaian pelaksanaan Program/Kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (RenjaSKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target RenjaSKPD Tahun 2020	Realisasi RenjaSKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4.01.4.01.13. 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
4.01.4.01.13.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100%	
4.01.4.01.13.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga PPPK	7 bulan	7 bulan	7 bulan	7 bulan	100%	7 bulan	7 bulan	100%	
4.01.4.01.13.01..20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Barang/Jasa untuk Kebutuhan Rutinitas Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100%	
4.01.4.01.13.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
4.01.4.01.13.17.09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya Peningkatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	4 Agenda	4 Agenda	4 Agenda	4 Agenda	70%	4 Agenda	32 Agenda	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Barat

A. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kantor Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas.

Susunan Organisasi Kantor Camat Jemaja Barat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu, Camat
2. Pembantu Pimpinan yaitu, Sekretaris Camat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Program
3. Unsur Pelaksana yaitu :
   a. Kasi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   b. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
   c. Kasi Pelayanan Umum

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat Jemaja Barat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan dan Kepala Kantor (Camat) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Camat Jemaja Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah, yaitu :

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jemaja Barat

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan kepada OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Kecamatan Jemaja Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan Jemaja Barat sesuai dengan peraturan tersebut, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, sedangkan fungsinya :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

   Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah masih kurang sarana dan prasana dalam pelayanan, seperti

prasarana perkantoran yang tersedia kurang lengkap dan tidak memadai untuk melakukan pelayanan secara maksimal.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Jemaja Barat antara lain :

- Kurangnya Jumlah personil di Kecamatan Jemaja Barat pada tahun 2024, sebanyak 21 Orang terdiri dari 7 PNS dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
- Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Jemaja Barat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas untuk optimalisasi visi dan misi Kecamatan Jemaja Barat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah hampir terpenuhi sesuai dengan harapan.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jemaja Barat diantaranya :

a. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran perangkat daerah, kewenangan kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait;
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu;
c. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan kecamatan Jemaja Barat antara lain :

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Jemaja Barat dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Perangkat Desa, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

5. Formulasi Isu-isu Penting

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kecamatan Jemaja Barat mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu

menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif.

Prioritas dan tema pembangunan RKPD Tahun 2025 mengambil tema "Optmalisasi pembangunan dan ekonomi, sumberdaya manusia dan infrastruktur berkelanjutan", sehingga RKPD Tahun 2025 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jemaja Barat untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *good government* dan *open governance*.

Review terhadap rancangan akhir RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3.236.048.862**					**2.096.520.790**	
	KECAMATAN JEMAJA BARAT				**3.236.048.862**					**2.096.520.790**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH**	**100%**	**2.848.237.931**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH**	**100%**	**2.004.598.294**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**38.014.414**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**8.336.309**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Dokumen	1.740.909	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	1 Dokumen	5.001.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	1 Dokumen	1.855.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Disusun	1 Dokumen	5.090.414	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Disusun	1 Dokumen	2.870.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	1 Dokumen	5.113.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	1 Dokumen	1.870.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Disusun	1 Dokumen	4.965.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Disusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Jemaja Barat	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec. Jemaja Barat	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	6.945.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan**		**2.295.846.862**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Jemaja Barat	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan**	80 %	**1.777.307.197**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.196.521.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.646.322.197	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Dokumen	95.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12 Dokumen	128.440.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2.545.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2.545.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	1 Dokumen	1.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	1 Dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Barang Milik Daerah**		**3.450.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. Jemaja Barat	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Barang Milik Daerah**		**0**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1.380.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.070.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Kepegawaian**		**49.076.700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Kepegawaian**		**0**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya untuk ASN	1 Paket	49.076.700	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya untuk ASN	0 Paket	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Umum Perkantoran**		**324.642.428**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Umum Perkantoran**		**145.826.862**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	2 Paket	2.002.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	2 Paket	2.002.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	15 Paket	28.461.538	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	15 Paket	2.123.376	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jemaja Barat	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	40.468.480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jemaja Barat	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	16.259.076	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	5.274.410	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jemaja Barat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	5.274.410	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.050.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordianasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 Laporan	220.436.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordianasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 Laporan	110.118.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		**Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**86.221.223**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**4.200.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	34.229.476	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang di Adakan	1 Paket	51.991.747	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang di Adakan	1 Unit	4.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Perkantoran**		**24.371.088**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Perkantoran**		**40.931.574**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	12 Laporan	24.371.088	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	12 Laporan	14.538.434	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	13 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jemaja Barat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	13 Laporan	26.393.140	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Pemeliharaan Barang Milik**		**26.615.216**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Pemeliharaan Barang Milik**		**27.996.352**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Unit	10.058.864	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Unit	11.440.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Presentase Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	16.556.352	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jemaja Barat	Presentase Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	16.556.352	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PRESENTASE KEGIATAN MASYARAKAT/LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TERFASILITASI**		**237.817.751**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PRESENTASE KEGIATAN MASYARAKAT/LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TERFASILITASI**	**91 %**	**56.318.496**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**	**3 Desa**	**237.817.751**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**	**3 Desa**	**56.318.496**	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Agenda Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Agenda	237.817.751	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	Jumlah Agenda Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Agenda	56.318.496	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**PRESENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**		**114.630.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**PRESENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	**80 %**	**31.404.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**		**114.630.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**		**31.404.000**	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Jemaja Barat	Terlakananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 bulan	103.455.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Jemaja Barat	Terlakananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 bulan	31.404.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 bulan	11.175.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 bulan	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**PRESENTASE APARATUR DESA YANG BERKUALITAS**		**35.363.180**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PRESENTASE APARATUR DESA YANG BERKUALITAS**	**80 %**	**4.200.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**3 Desa**	**35.363.180**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**3 Desa**	**4.200.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Agenda	6.662.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Agenda	0	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Agenda	28.741.180	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Jemaja Barat	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Agenda	4.200.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jemaja Barat pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan tugas desentralisasi otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Jemaja Barat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi kecamatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Jemaja Barat sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kecamatan juga mendukung progam pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Barat terkait dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2030 yaitu : "Kabupaten Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing,Inovatif,Agamis,Unggul di Bidang Maritim Dibidang Masyarakat Yang Maju dan sejahtera

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2026-2030, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jemaja Barat dapat dinyatakan pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	Tercapainya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
2	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Kesejahteraan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, maka Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jemaja Barat adalah "Terwujudnya pelayanan cepat, tepat, transparan dan bertanggung jawab di Kecamatan Jemaja Barat" dengan cara :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kecamatan Jemaja Barat
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas *Good Government* dan *Clean Government* di Kecamatan Jemaja Barat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai adalah " Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Jemaja Barat"." dengan cara Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dan Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Tercapainya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Persentase Administrasi Pelayanan Yang Ditangani	%	100
2	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Kesejahteraan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat	%	100

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Barat melaksanakan 4 Program dan 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dimana untuk Tahun 2025 sudah Mengacu Pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian terlampir dalam tabel 4.1 :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

Total rencana belanja kecamatan Jemaja Barat pada tahun 2025 diusulkan **Rp.2.096.520.790** untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jemaja Barat Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini :

RUMUSAN RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AWAL				CATATAN PENTING	RENCANA AKHIR	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
07					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.236.048.862**				**2.096.520.790**
07	**01**				**KECAMATAN JEMAJA BARAT**				**3.236.048.862**				**2.096.520.790**
07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH**		**100 %**	**2.848.237.931**			**100 %**	**2.004.598.294**
07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**		**100 %**	**38.014.414**			**100 %**	**8.336.309**
07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	5 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	1.740.909
07	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	5.001.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.855.000
07	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	5.090.414	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.870.000

07	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	5.113.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.870.400
07	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	4.965.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	5.900.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	6.945.000	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0
07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan**			**2.295.846.862**			**80 %**	**1.777.307.197**
07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	2.196.521.862	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.646.322.197
07	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jemaja Barat	12 Dokumen	95.400.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	128.440.000
07	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	2.545.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.545.000
07	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	1.380.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
07	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Barang Milik Daerah**			**3.450.000**				**0**
07	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Kec. Jemaja Barat	2 Dokumen	1.380.000	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0

07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	2.070.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
07	**01**	**01**	**2.05**	**01**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Kepegawaian**			**49.076.700**				**0**
07	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jemaja Barat	1 Paket	49.076.700	Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
07	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Umum Perkantoran**			**324.642.428**				**145.826.862**
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	Kec. Jemaja Barat	2 Paket	2.002.000	Dana Alokasi Umum		2 Paket	2.002.000
07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Kec. Jemaja Barat	15 Paket	28.461.538	Dana Alokasi Umum		15 Paket	2.123.376
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jemaja Barat	12 bulan	40.468.480	Dana Alokasi Umum		12 bulan	16.259.076
07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Jemaja Barat	4 Jenis	5.274.410	Dana Alokasi Umum		2 Jenis	5.274.410
07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	28.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10.050.000
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordianasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	220.436.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	110.118.000
07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**			**86.221.223**				**4.200.000**

07	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Jemaja Barat	1 Paket	34.229.476	Dana Alokasi Umum		0 Unit	0
07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang di Adakan	Kec. Jemaja Barat	1 Paket	51.991.747	Dana Alokasi Umum		1 Unit	4.200.000
07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Perkantoran**			**24.371.088**				**40.931.574**
07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	24.371.088	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	14.538.434
07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Kec. Jemaja Barat	13 Laporan	0	Dana Alokasi Umum		13 Laporan	26.393.140
07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**26.615.216**				**27.996.352**
07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec. Jemaja Barat	6 Unit	10.058.864	Dana Alokasi Umum		6 Unit	11.440.000
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. Jemaja Barat	1 Unit	16.556.352	Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.556.352
07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PRESENTASE KEGIATAN MASYARAKAT/LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TERFASILITASI**			**237.817.751**			**91 %**	**56.318.496**
07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**		**3 Desa**	**237.817.751**			**3 Desa**	**56.318.496**

07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Agenda Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	4 Agenda	237.817.751	Dana Alokasi Umum		4 Agenda	56.318.496
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PRESENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**			**114.630.000**			**80 %**	**31.404.000**
07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**			**114.630.000**				**31.404.000**
07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Jemaja Barat	12 bulan	103.455.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	31.404.000
07	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Kec Jeamaja Barat	12 Bulan	11.175.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	0
07	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE APARATUR DESA YANG BERKUALITAS**			**35.363.180**			**80 %**	**4.200.000**
07	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		**3 Desa**	**35.363.180**			**3 Desa**	**4.200.000**
07	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	1 Agenda	6.662.000	Dana Alokasi Umum		1 Agenda	0
07	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Jemaja Barat	4 Agenda	28.741.180	Dana Alokasi Umum		4 Agenda	4.200.000

MATRIK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
07					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.096.520.790**				**3.015.430.754**
07	**01**				**KECAMATAN JEMAJA BARAT**				**2.096.520.790**				**3.015.430.754**
07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH**			**2.004.598.294**				**2.423.943.437**
07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**			**8.336.309**				**3.200.000**
07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	5 Dokumen	1.740.909	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	600.000
07	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	1.855.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	500.000
07	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	2.870.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	500.000
07	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	1.870.400	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	500.000
07	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000
07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	500.000
07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	0	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	300.000
07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan**			**1.777.307.197**				**2.367.856.126**
07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	1.646.322.197	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.268.531.126
07	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jemaja Barat	12 Dokumen	128.440.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	95.400.000
07	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	2.545.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.545.000
07	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.380.000
07	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Barang Milik Daerah**			**0**				**6.900.000**
07	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	2 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.450.000
07	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kec. Jemaja Barat	1 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.380.000
07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kec. Jemaja Barat	12 Bulan	0	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.070.000

07	**01**	**01**	**2.05**	**01**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Kepegawaian**			**0**				-
07	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jemaja Barat	0 Paket	0	Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
07	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Umum Perkantoran**			**145.826.862**				**7.430.959**
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	Kec. Jemaja Barat	2 Paket	2.002.000	Dana Alokasi Umum		2 Paket	2.002.000
07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Kec. Jemaja Barat	15 Paket	2.123.376	Dana Alokasi Umum		15 Paket	1.278.959
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jemaja Barat	12 Paket	16.259.076	Dana Alokasi Umum		12 Paket	1.100.000
07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Jemaja Barat	4 Paket	5.274.410	Dana Alokasi Umum		4 Paket	1.100.000
07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	10.050.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.950.000
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordianasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	110.118.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	116,396.041
07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**			**4.200.000**				**500.000**
07	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan	Kec. Jemaja Barat	0 Unit	0	Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Yang di Adakan	Kec. Jemaja Barat	1 Unit	4.200.000	Dana Alokasi Umum		5 Unit	500.000
07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Perkantoran**			**40.931.574**				**21.000.000**
07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	Kec. Jemaja Barat	12 Laporan	14.538.434	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.000.000
07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jemaja Barat	0 Laporan	0	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000
07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Kec. Jemaja Barat	13 Laporan	26.393.140	Dana Alokasi Umum		13 Laporan	0
07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**27.996.352**				**17.056.352**

07	01	01	2.09	01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kec. Jemaja Barat	0 Unit	0	Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec. Jemaja Barat	6 Unit	11.440.000	Dana Alokasi Umum		6 Unit	500.000
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. Jemaja Barat	1 Unit	16.556.352	Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.556.352
07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PRESENTASE KEGIATAN MASYARAKAT/LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TERFASILITASI**			**56.318.496**				**273.223.000**
07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**			**56.318.496**				**273.223.000**
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Agenda Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	4 Agenda	56.318.496	Dana Alokasi Umum		4 Agenda	273.223.000
07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PRESENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN**			**0**				**-**
07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**			**0**				**-**
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Jemaja Barat	4 Agenda	0	Dana Alokasi Umum		4 Agenda	0
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**			**31.404.000**				**160.455.000**
07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**			**31.404.000**				**160.455.000**
07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Jemaja Barat	12 bulan	31.404.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	105.455.000
07	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	12 bulan	0	Dana Alokasi Umum		12 bulan	55.000.000
07	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE APARATUR DESA YANG BERKUALITAS**			**4.200.000**				**67.322.000**
07	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Kec. Jemaja Barat		**4.200.000**				**67.322.000**
07	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Jemaja Barat	1 Agenda	0	Dana Alokasi Umum		1 Agenda	6.622.000
07	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Jemaja Barat	4 Agenda	4.200.000	Dana Alokasi Umum		4 Agenda	60.700.000

Impol, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT JEMAJA BARAT,

MUHAMMAD ARIAS, S.Pi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198111920100111007

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan bagian dalam upaya pemerintah daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan Rancangan Tema Pembangunan Daerah yaitu Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Barat Tahun Anggaran 2025 maka Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada SKPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya nanti rencana kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku

Impol, 16 Juli 2025
Plt. CAMAT JEMAJA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA BARAT

MUHAMMAD ARIAS, S.Pi
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198111192010011007

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN PALMATAK

JL. Abdullah No. 01 Tebang Ladan Kode Pos 29997B1

Tebangladan, 16 Juli 2025

Kepada :
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-
Pasir Peti

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.6/211/KEC.PLMTK/SP/07/2025

NO	JENIS YANG DI KIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini Kami Sampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palmatak T.A 2025 di Lingkungan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.	1 (satu) Dokumen	Demikian disampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterima Tanggal:
PENERIMA:

.....

Ditetapkan di : Tebangladan
Pada tanggal : 16 Juli 2025

Plt.CAMAT PALMATAK,

AIMAIN, S.Pd.SD
Pembina Tk.I/III.d
NIP. 196905131991081001

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS





RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALMATAK TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) periode tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Palmatak tahun 2021-2025 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang Program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan pada tahun 2025.

Harapan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak tahun 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan Palmatak dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kabupaten kepulauan anambas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapatberjalan sesuaidengan RPJMD Kabupatenkepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Ditetapkan di : Tebangladan
Pada tanggal : 16 Juli 2025

Plt.CAMAT PALMATAK,

AIMAIN, SPD.SD
Pembina Tk.I/III.d
NIP. 196905131991081001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palmatak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD..... 23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 26

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Awal Kecamatan Palmatak..... 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 34

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 34

4.2. Program dan Kegiatan..... 34

BAB V. PENUTUP..... 42

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan PencapaianRenstra Perangkat Daerah S.D Tahun Anggaran 2024..... 7

TABEL 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

TABEL 2.3.1. Isu-Isu dan Permasalahan Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palmatak - Kabupaten KepulauanAnambas..... 19

TABEL 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 KecamataPalmatak Kabupaten Kepulauan Anambas..... 23

TABEL 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari ParaPemangku KepentinganTahun 2023 Kecamatan Palmatak - Kabupaten Kepulauan Anambas..... 27

TABEL 4.2.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2025 berfungsi sebagai dokumen publik yang merupakan pedoman penyusunan Rancangan Akhir Perubahan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan stakeholder sebagai bagian dari perencanaan partisipatif. Dengan pertimbangan tersebut, Rancangan Akhir Perubahan RPJMD menghasilkan kajian akademis berupa evaluasi capaian pembangunan, rumusan

keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penetapan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Di dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikanisu kebijakan dan program strategis Nasional danProvinsi.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Tahun 2025 berpedoman pada:

1.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kerja Kecamatan Palmatak bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja dengan Renstra Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.1.2 Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Renstra Kecamatan Palmatak.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kecamatan Palmatak. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga dirumus untuk menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2025 dengan program dan kegiatan yangmengakomodir Unsur Kecamatandan Non Urusan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam PembangunanNasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2022.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Palmatak, dengan Undang – undang No 33 Tahun 2008 Kecamatan Palmatak Menjadi Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
14. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022-2025;
15. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palmatak Tahun 2022-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak adalah untuk menjamin kesesuaian dokumen rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022- 2025.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga bisa melakukan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan dan melakukan perubahan terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palmatak tahun lalu (tahun n-2) dan capaian tahun (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tahun-tahun sebelumnya.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Menggambarkan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi serta menjelaskan program, kegiatan dan pendanaan di Kecamatan Palmatak.

Bab V. Penutup

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palmatak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Palmatak adalah Kecamatan yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Palmatak, dengan Undang – undang No 33 Tahun 2008 Kecamatan Palmatak Menjadi Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Palmatak mengacu pada tahun anggaran 2022 yang telah disahkan dan terhadap capaian Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2022-2025.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Palmatak Tahun 2024
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;

- Target Kinerja Program/Kegiatan tercapai, lambatnya pencapaian disebabkan oleh efisisiensi anggaran dan tidak adanya pengesahan APBD Perubahan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)

  Kabupaten Kepualaun Anambas dalam **Tabel 2.1.1** berikut :

TABEL 2.1.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PALMATAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 202	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.01.06	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	100,00	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	100,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Laporan	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5 Paket	Paket	100,00	2 Paket	2 Paket	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	-	-	100,00
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	10 Paket	10 Paket	100,00
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	4 Paket	100,00
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	13 Laporan	13 Laporan	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100,00	100 Laporan	100 Dokumen	100,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00	10 Laporan	10 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	2 Unit	100,00	4 Unit	4 Unit	100,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	4 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**100,00**			**100,00**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	200,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	2 Orang	2 Orang	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Masy.	7 Lembaga Masy.	5 Lembaga Masy.	100,00	7 Lembaga Masy	7 Lembaga Masy	100,00
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	0,00	7 Unit	7 Unit	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	250 Orang	1 Orang	100,00	250 Orang	250 Orang	100,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	12 Dokumen	12 Laporan	100,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00	7 Laporan	7 Laporan	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Palmatak berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Palmatak secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Palmatak yaitu:

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pulik di Kecamatan Palmatak.
2. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesioanal.
3. Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda di wilayah Kecamatan Palmatak.
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Palmatak.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Palmatak antara lain:

1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Palmatak.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KecamatanPalmatak.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Palmatak.
4. Meningkatnya partisipasi gender di KecamatanPalmatak.

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palmatak dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1** berikut:

TABEL. 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PALMATAK

NO	Indikator	SPM / Standar	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	12	13	14	15	16
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	Indeks Komposit (RB)	B (60,00) Cukup	B (63,00) Baik	B (67,00) Baik	B(69,00) Baik	B(67,00) Baik	B(67,00) Baik	B (67,00) Baik	B (71,00) Baik	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	AKIP / SAKIP	B (82,00) Baik	A (84,00) Sangat baik	B (86,00) Baik	B(88,00) Baik	B(86,00) Baik	B(86,00) Baik	B (88,00) Baik	B (89,00) Baik	
3	Persentase Kepuasan layanan Masyarakat	-	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	57 %	71 %	100 %	100 %	57 %	71 %	100 %	100 %	
4	Persentase Desa Membangun (Desa Sangat Tertinggalmenuju DesaMaju))	-	Indeks Komposit (IDM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
   a. Pelayanan informasi, pelayanan kartu keluarga, pelayanan KTP, pendampingan Dana Desa.
   b. Memfasilitasi Musrenbang tingkat desa dan kecamatan serta pelayanan rekomendasi perijinan.
   c. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
   d. Pelayanan pendistribusian Beras Sejahtera (rastra), memfasilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosian (PMKS), Forum Anak, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) penyelenggaraan MTQ/STQ, penanganan bencana alam, pembinaan peranan wanita dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan karang taruna dan generasi muda.
2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi
   a. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap persyaratan administrasi kependudukan, tidak tersedianya Tenaga pendampingan Dana Desa.
   b. Usulan musrenbang kecamatan dan desa kurang diakomodir oleh instansi terkait dan musrembang kabupaten.
3. Dampak yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
   a. Terhambatnya administrasi pelayanan publik untuk masyarakat.
   b. Terhambatnya pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat umum.
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan

   Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan pelayanan kurang optimal, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis prioritas yang direncanakan:
   a. Pelayanan Publik
   b. Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga

c. Lomba Desa
d. Pelaksanaan MTQ / STQ
e. Pelaksanaan Musrenbang
f. Peningkatan SDM
g. Penyaluran Rastra
h. Koordinasi instansi terkait dan vertical
i. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
j. Pembinaan karang taruna
k. Pemilihan kepala desa
l. Kabupaten layak anak
m. Kabupaten/Kota sehat
n. Stunting
o. Grand desain pembangunan kependudukan
p. Inovasi daerah
q. Pengarusutamaan Gender

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahaan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Memperhatikan paraturan yang ada betapa besar kompleksnya Tugas dan Fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan Tugas Fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana dan prasarana sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola,

sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Secces Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Karang Bintang. Hal ini disebabkan faktor- faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Memamfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok, fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memamfaatkan / menerapkan kemajuantekhnologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memamfaatkan uraian tugas/ kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memamfaatkan peran swasta untuk melengkapi saran dan prasarana serta menggali potensi sumber daya alam yangada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memamfaatkan tekhnologi yang canggih.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam **Tabel 2.3.1** berikut :

TABEL. 2.3.1

ISU-ISU DAN PERMASALAHAN PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALMATAK - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
1	Kesekretariatan Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 UU ASN	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 Distribusi dan Penerimaaan ASN sesuai dengan Hasil Analisa Anjab Perangkat Daerah
		2 Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai Anjab	1 Adanya moratorium pegawai	1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 Program Tugas Belajar dan Diklat dan Bimtek
		3 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	1 Terealisasinya Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan	1 Sosialisasi perda perijinan kepada masyarakat	1 Perda pelimpahan kewenangan perijinan, perda retribusi
		2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat	1 Penempatan Tugas Satpol PP	1 Penambahan Personil Satpol PP
3	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Standarsarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2 Kurangnya Mediainformasikepada masyarakat terbatas	1 Tersedianya Anggaran Pengadaan sarpras pelayanan Publik belum 1 Pelayanan informasi public kepada masyarakat berbasi TIK	1 Terealisasinya Peralatan Penunjang Perkantoran Kecamatan Palmatak 1 Terlaksanaanya Pengadaan sarpras pelayanan Publik 1 Pelatihan Pengelolaan website pelayanan
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1 Praktek outsourching	1 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan Palmatak	1 Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha 2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1 Mebuka Usaha Mandiriberbasis UMKM 2 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Bidang Rigger,Scabolding dan Operator Alat Berat
5	Pemberdayaan Masyarakat	1 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	1 Keterbatasan kewenangandan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 2 Lemahnya penerapan Swadaya yang diterapkan oleh PemerintahanDesa	1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat 1 Perlu Sosialiasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Terealisasinya Anggaran Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat 1 Peningkatan Monotoring dan Evaluasi oleh Perangkat Daerah DP4MD

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
6	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1 Minimnya ketersediaya pasar tradisional di wilayah kecamatan Palmatak 2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunandanpemeliharaanpasar	1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan Palmatak 1 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis	1 Terealisasinya pembangunan Pasar Rakyat di Kecamatan Palmatak
7	Pendidikan	1 Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bidang Kejuruan (STM)	1 Meningkatnyan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa 1 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja	1 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata	1 Terealisasinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Palmatak
8	Kesehatan	1 Tingkat Palayanan kesehatan masih rendah	1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2 Kurangnya Sapras Kesehatan	1 Mendistribusian Teganamedissesuai kebutuhan 1 Pengadaan Sapras Kesehatan	1 Tersedianya Kebutuhan Tenaga Medis sesuai dengan kebutuhan
9	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	1 Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage 2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan	1 Pembagunan Pabrik Es 1 Pembangunan Pasar Ikan Bersih	1 Terealisasinya Pembagunan Pabrik Es 1 Pembangunan Sarana Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKM) Pengelolaan Hasil Laut
		2 Lemahnya Pengawasan SDKP	1 Adanya ganguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing	1 Pengadaan Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan Perikanan	1 Terealisasinya Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan
		3 Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	1 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan	1 Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Teluk Bayur dan Matak	1 Terealisasinya Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Kec. Palmatak
10	Perencanaan Pembangunan	1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1 Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah	1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang	1 Terlaksananya hasil keputusan musrenbang yang menjadi skala prioritas pembangunan

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
11	Pembangunan	1 Pemeliharaan Ruas Jalan masih rendah 2 ketersedian Air Minum	1 Minimnya pelasanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau Kec. Palmatak 1 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis 1 Peningkatan Pembangunan SPAM 1 Penambahan Perumahan Pembangunan Dinas Kecamatan Palmatak	1 Terlaksananya pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala di ruas jalan kec.Palmatak Terlaksananya Peningkatan Pembangunan SPAM (Konektifity jaringan distribusi + SR) 1 Terealisasinya Penambahan Pembangunan Perumahan Dinas Kecamatan Palmatak
12	Lingkungan	1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan 2 Persampahan	1 Pembangunan Infrastruktur dikawasan mangrove 1 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir	1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove 1 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Palmatak	1 Perlu adanya tidakan tegas terhadap pembangunan yang dilakukan dikawasan konservasi 1 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Palmatak

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Review Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yangterdiri dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada, dengan mensinkronisasikan antara Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Palmatak pada hasil evaluasi capaian target kinerja Tahun 2024:

1. Proses Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Palmatak tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Palmatak tahun 2025 adalah program dan kegiatan prioritas yang telah di usulankan melalui mekanisme baik secara langsung bersetuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi Dinas Instansi, Desa Kelurahan serta tokoh masyarakat.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam **Tabel 2.4.1** berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET KINERJA TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET KINERJA TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**CATATAN PENTING**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**Rp 4.197.025.422,11**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**Rp 4.197.025.422,11**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**100 %**	**Rp 3.922.489.736,11**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**100 %**	**Rp 3.922.489.736,11**	
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan SKPD yang Disediakan	**100%**	**Rp 22.800.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan SKPD yang Disediakan	**100%**	**Rp 22.800.000,00**	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	**100%**	**Rp 78.308.539,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	**100%**	**Rp 78.308.539,00**	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**100 %**	**Rp 173.427.147,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**100 %**	**Rp 173.427.147,00**	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**100 %**	**Rp 0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**100 %**	**Rp 0**	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Unit Peralatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**100 %**	**Rp 0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Unit Peralatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**100 %**	**Rp 0**	
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 38.632.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp 38.632.000,00**	
7	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Desa**	**Rp 38.632.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**7 Desa**	**Rp 38.632.000,00**	
8	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kabupaten Kepulauan	Jumlah Laporan **Pemberdayaan Lembaga**	**Desa**	**Rp 0**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kabupaten Kepulauan Anambas,	Jumlah Laporan **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat**	**7 Desa**	**Rp 0**	

		Anambas, Kecamatan Palmatak	**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** di Wilayah Kecamatan				Kecamatan Palmatak	**Kecamatan** di Wilayah Kecamatan			
C	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**Rp 37.043.681,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**Rp 37.043.681,00**	
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	**100 %**	**Rp 37.043.681,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	**100 %**	**Rp 37.043.681,00**	
D	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**Rp 6.024.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**Rp 6.024.000,00**	
10	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100 %**	**Rp 6.024.000,00**	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100 %**	**Rp 6.024.000,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Palmatak pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan tugas desentralisasi otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Palmatak. Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palmatak

No	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja			Besaran / Volume	Catatan
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Orang /Bulan	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Persentase Administrasi Umum	1 Paket	

			Pemerintah Daerah	Tangga yang Disediakan	Perangkat Daerah		
05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	
06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	

11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Laporan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
14	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

15	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Dokumen	
16	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Laporan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Awal Kecamatan Palmatak

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sebagai berikut:

- Meningkatkan dan Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu.
- Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah kecamatan.
- Meningkatkan Profesionalisme Aparatur didalam menyelenggarakan organisasi kecamatan.
- Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masyarakat.

Maka Kecamatan Palmatak mempunyai *tujuan*: Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Palmatak secara Optimal yang secara rinci seperti tersebut di bawah ini:

1. Tujuan dan sasaran misi 1:
    a. Tujuan
        - Mewujudkan perikehidupan yang agamis yang berdasarkan budaya melayu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan masyarakat.
    b. Sasaran
        - Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan yang akan berdampak positif kepada tatanan kehidupan beragama di masyarakat.
        - Dapat membentuk masyarakat Kecamatan Palmatak yang agamis sehingga terciptanya suasana kehidupan yang kondusif.
2. Tujuan dan sasaran misi 2:
    a. Tujuan
        - Meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun perekonomian di

Kecamatan Palmatak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan parameter pembangunan di kabupaten kepulauan anambas.

b. Sasaran

- Terciptanya sentra-sentra perekonomian baru di masyarakat.
- Tercapainya pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Palmatak.

3. Tujuan dan sasaran misi 3:

a. Tujuan

- Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional didalam menyelenggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai kabupaten kepulauan anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu, yang Dilandasi Iman dan Taqwa.

b. Sasaran

- Tercapainya kualitas SDM dengan indikator misi sebanyak 5 (lima) orang Tenaga terdidik dalam kependudukan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat memiliki kemampuan melakukan koordinasi pelaksana kebijakan kepala daerah, memiliki kemampuan inovatif, pendeteksian dini dan antisipatif, memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik.
- Dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebanyak 11.840 jiwa dan 3265 KK Se-Kecamatan Palmatak.

4. Tujuan dan sasaran misi 4:

a. Tujuan

- Mewujudkan rasa kebersamaan dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Palmatak.

b. Sasaran

- Memberikan pelayanan yang baik tentang masalah kependudukan, pertanahan,

pembinaan kelurahan dan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dll), serta koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum.

- Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan
3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

4.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan:**

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Terdiri dari Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Terdiri dari Sub Kegiatan :
    1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terdiri dari Sub Kegiatan :
    1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meliputi Kegiatan :**

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari Sub Kegiatan;

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meliputi Kegiatan:**

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari Sub Kegiatan;

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meliputi Kegiatan :**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari Sub Kegiatan;

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Anggaran Kecamatan Palmatak Tahun 2025 menyesuaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dimana tupoksi Kecamatan Palmatak menitik beratkan kepada pelayanan masyarakat sesuai arahan dan kebijakan Bupati. Anggaran Belanja Kecamatan Palmatak di tahun 2025 sebesar Rp. 4.919.752.672 dimana ada 4 Program 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan.

Tabel 4.2.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palmatak

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kerja	Capaian Program				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.900.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		12 Bulan	Rp5.169.632.141
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 102.720.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	Rp 102.720.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 26.760.000	Dana Transfer Umum/ Dana		12 Laporan	Rp 22.800.000

			Daerah pada SKPD			Alokasi Umum			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 6.622.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 500.000
05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 17.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 500.000
06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 500.000
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 64.883.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 25.000.000
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69.560.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 24.114.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp50.695.971	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp20.000.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 48.268.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp 20.000.000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.293.188.488	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp 20.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rp.0	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		14 Unit	Rp 2.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Rp.0	Dan Transfer/Dana Alokasi Umum		14 Unit	0

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
14	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Rp 127.284.270	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		7 Laporan	Rp 192.000.000
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Rp 70.943	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		7 Laporan	Rp 105.500.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
16	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		300 Orang	Rp 180.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
18	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 50.000.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi		7 Dokumen	Rp 20.000.000

			Partisipatif			Umum			
19	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 59.700.000	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		7 Laporan	Rp 10.000.000

BAB V
P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Palmatak dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas. Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Kecamatan Palmatak Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Palmatak. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Palmatak ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Kecamatan Palmatak ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan dan Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Kharimah" (Anambas Bermadah 2025).

TebangLadan, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT PALMATAK,

AJMAIN, S.Pd.SD
Pembina Tk.I/III.d
NIP.196905131991081001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN
Alamat: Jl. Panglima Dahman No. 01 Payamaram, Payalaman, Kepualauan Anambas, Kepulauan Riau 29796
Pos-el Kute Siantan@anambaskab.go.id

Payalaman, 16 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 800.1.09/97/KKS.Prog/SD/07/2025

No	Naskah Dinas / Barang yang Dikirmkan	Banyaknya	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025	1 Berkas	Demikian dismpaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal, 16 Juli 2025

Penerima,

.....
.....
.....

Pengirim,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Camat Kute Siantan,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

YULIANA, S.Pi
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197808312002122007

Nomor Telephon : .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN KUTE SIANTAN



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

" Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inovatif "

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) periode tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan tahun 2021-2026 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2025. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang Program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan pada Tahun Anggaran 2025.

Harapan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan kute siantan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kabupaten kepulauan anambas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan RPJMD Kabupaten kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Payalaman, 16 Juli 2025

Plt. CAMAT KUTE SIANTAN

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN KUTE SIANTAN KEPULAUAN ANAMBAS

YULIANA, S.Pi
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197808312002122007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Llau dan Tahun Berjalan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 27
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 44
3.3. Program dan Kegiatan 45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50
BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Realisasi Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024
Tabel 2.1.2 Realisasi Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.3 Isu-Isu dan Permasalahan Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kute Siantan - Kabupaten Kepulauan Anambas
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Kute Siantan - Kabupaten Kepulauan Anambas
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Kute Siantan - Kabupaten Kepulauan Anambas
Tebel 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Tebel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Maju Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai dokumen publik yang

Merupakan pedoman penyusunan rancangan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses penyusunan rancangan RPJMD ini juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan stakeholder sebagai bagian dari perencanaan partisipatif. Dengan pertimbangan tersebut, rancangan RPJMD menghasilkan kajian akademis berupa evaluasi capaian pembangunan, rumusan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penetapan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Di dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus didasarkan pada hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 berpedoman pada:

1.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kerja Kecamatan Kute Siantan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dengan Renstra Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.1.2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Renstra Kecamatan Kute Siantan.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kecamatan Kute Siantan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga dirumus untuk menunjang visi, misi kepala daerah pada Tahun 2025 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir Unsur Kecamatan dan Non Urusan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
16. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
17. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan adalah untuk menjamin kesesuaian dokumen rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga bisa melakukan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan dan melakukan perubahan terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kute Siantan tahun lalu (tahun **n-3**) dan capaian tahun (tahun **n-1**), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegitan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun-tahun sebelumnya.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Menggambarkan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator keberhasilan serta penjelasan output dan outcome yang diinginkan.

Bab V. Penutup

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kute Siantan Tahun Lalu dan Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Kute Siantan adalah Kecamatan yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan mengacu pada tahun anggaran 2025 yang telah disahkan dan terhadap capaian Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Tahun 2021-2026.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2024
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   - Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun anggaran 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

Tabel 2.1.1

Adapun Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kute Siantan Tahun 2024 Sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN

ORGANISASI PRANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTE SIANTAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : DESEMBER

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
			%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.762.430.107,00**	**92,09**	**3.128.002.159,00**					**634.427.948,00**	**634.427.948,00**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.735.000,00**	**0,73**	**17.160.000,00**					**12.575.000,00**	**12.575.000,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.330.000,00	0,23	7.010.000,00	75,13	0,17	98,66	0,23	2.320.000,00	2.320.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.116.500,00	0,22	5.460.000,00	59,89	0,13	94,15	0,21	3.656.500,00	3.656.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.418.500,00	0,13	0,00	0,00	0,00	87,23	0,12	5.418.500,00	5.418.500,00
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5.870.000,00	0,14	4.690.000,00	79,90	0,11	100,00	0,14	1.180.000,00	1.180.000,00
II	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.325.086.679,00**	**56,91**	**1.983.964.953,00**					**341.121.726,00**	**341.121.726,00**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.246.679,00	54,34	1.922.234.953,00	86,58	47,05	100,00	54,34	298.011.726,00	298.011.726,00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.690.000,00	2,20	52.990.000,00	59,08	1,30	100,00	2,20	36.700.000,00	36.700.000,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.990.000,00	0,15	2.870.000,00	47,91	0,07	62,94	0,09	3.120.000,00	3.120.000,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.160.000,00	0,22	5.870.000,00	64,08	0,14	96,72	0,22	3.290.000,00	3.290.000,00
III	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**4.722.900,00**	**0,12**	**0,00**					**4.722.900,00**	**4.722.900,00**
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.722.900,00	0,12	0,00	0,00	0,00	52,50	0,06	4.722.900,00	4.722.900,00
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**28.056.200,00**	**0,69**	**12.338.200,00**					**15.718.000,00**	**15.718.000,00**
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.930.000,00	0,17	6.930.000,00	100,00	0,17	100,00	0,17	0,00	0,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.250.000,00	0,32	5.408.200,00	40,82	0,13	62,26	0,20	7.841.800,00	7.841.800,00
12	Sosialisasi Peraturang Perundang - Undangan	7.876.200,00	0,19	0,00	0,00	0,00	242,12	0,47	7.876.200,00	7.876.200,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
			%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	**ADMIISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**248.019.158,00**	**6,07**	**105.967.500,00**					**142.051.658,00**	**142.051.658,00**
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.837.556,00	1,86	30.911.500,00	40,76	0,76	100,00	1,86	44.926.056,00	44.926.056,00
14	PenyediaanPerlengkapan Rumah Tangga	6.937.757,00	0,17	4.620.000,00	66,59	0,11	97,44	0,17	2.317.757,00	2.317.757,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.823.360,00	0,22	1.872.000,00	21,22	0,05	32,26	0,07	6.951.360,00	6.951.360,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.984.595,00	0,27	6.967.000,00	63,43	0,17	97,32	0,26	4.017.595,00	4.017.595,00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.955.890,00	0,27	0,00	0,00	0,00	161,69	0,43	10.955.890,00	10.955.890,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.480.000,00	3,29	61.597.000,00	45,80	1,51	93,26	3,07	72.883.000,00	72.883.000,00
VI	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**125.686.875,00**	**3,08**	**125.686.875,00**					**0,00**	**0,00**
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.686.875,00	3,08	125.686.875,00	100,00	3,08	100,00	3,08	0,00	0,00
VII	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**991.563.280,00**	**24,27**	**882.204.631,00**					**109.358.649,00**	**109.358.649,00**
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.650.000,00	0,51	15.620.000,00	75,64	0,38	98,79	0,50	5.030.000,00	5.030.000,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.913.280,00	23,76	866.584.631,00	89,25	21,21	100,00	23,76	104.328.649,00	104.328.649,00
VIII	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**9.560.015,00**	**0,23**	**680.000,00**					**8.880.015,00**	**8.880.015,00**
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.080.015,00	0,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	4.080.015,00	4.080.015,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000,00	0,13	680.000,00	12,41	0,02	100,00	0,13	4.800.000,00	4.800.000,00
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**167.973.477,00**	**4,11**	**156.707.000,00**					**11.266.477,00**	**11.266.477,00**
X	Pemberdayaan Masyarakatan Tingkat Kecamatan	167.973.477,00	4,11	156.707.000,00					11.266.477,00	11.266.477,00
26	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	161.653.477,00	3,96	156.707.000,00	96,94	3,84	97,07	3,84	4.946.477,00	4.946.477,00
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.320.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	94,15	0,15	6.320.000,00	6.320.000,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
			%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.077.090,00	0,49	7.230.000,00					12.847.090,00	12.847.090,00
XII	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentranan Dan Ketertiban Umum	20.077.090,00	0,49	7.230.000,00					12.847.090,00	12.847.090,00
28	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.077.090,00	0,49	7.230.000,00	36,01	0,18	100,00	0,49	12.847.090,00	12.847.090,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	59.261.200,00	1,45	52.260.000,00					7.001.200,00	7.001.200,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial Penugasan Kepala Daerah	**59.261.200,00**	**1,45**	**52.260.000,00**					**7.001.200,00**	**7.001.200,00**
29	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.460.000,00	1,31	52.260.000,00	97,76	1,28	100,00	1,31	1.200.000,00	1.200.000,00
30	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.801.200,00	0,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	5.801.200,00	5.801.200,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	75.758.164,00	1,85	50.192.500,00					25.565.664,00	25.565.664,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**75.758.164,00**	**1,85**	**50.192.500,00**					**25.565.664,00**	**25.565.664,00**
31	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.283.200,00	0,20	7.375.500,00	89,04	0,18	95,52	0,19	907.700,00	907.700,00
32	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	67.474.964,00	1,65	42.817.000,00	63,46	1,05	99,89	1,65	24.657.964,00	24.657.964,00
	JUMLAH TOTAL	**4.085.500.038,00**	**100,00**	**3.394.391.659,00**	**83,08**	**83,08**	**95,61**	**99,65**	**691.108.379,00**	**691.108.379,00**

Payalaman,31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

MUSTAJAB, S.Pd.SD

NIP: 196803101993011011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ,

WIWIN NURAENI, S.A.P

NIP. 197612202020010012009

Tabel 2.1.2

Adapun Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 Sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN

ORGANISASI PRANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTE SIANTAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JUNI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DPA SETELAH PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN			FISIK			
					REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.977.017.100,00**	**3.886.044.776,50**	**92,87**	**1.046.256.729,00**					**2.839.788.047,50**	**2.839.788.047,50**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**67.029.000,00**	**32.585.000,00**	**0,78**	**0,00**					**32.585.000,00**	**32.585.000,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.370.000,00	7.180.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	97,92	0,17	7.180.000,00	7.180.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.386.000,00	4.485.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.000,00	4.485.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.258.000,00	7.220.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	52,08	0,09	7.220.000,00	7.220.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.930.000,00	3.380.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	3.380.000,00	3.380.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.155.000,00	3.700.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8.930.000,00	6.620.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00
7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**3.215.899.079,09**	**3.244.957.346,59**	**77,55**	**897.285.271,00**					**2.347.672.075,59**	**2.347.672.075,59**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.090.104.797,09	3.106.530.551,86	74,24	885.005.271,00	28,49	21,15	70,43	52,29	2.221.525.280,86	2.221.525.280,86
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.409.600,00	127.789.600,00	3,05	12.280.000,00	9,61	0,29	58,33	1,78	115.509.600,00	115.509.600,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.384.682,00	10.637.194,73	0,25	0,00	0,00	0,00	14,06	0,04	10.637.194,73	10.637.194,73
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3.440.244,00**	**4.567.244,00**	**0,11**	**0,00**					**4.567.244,00**	**4.567.244,00**
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.440.244,00	4.567.244,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567.244,00	4.567.244,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**43.246.000,00**	**27.511.000,00**	**0,66**	**0,00**					**27.511.000,00**	**27.511.000,00**
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.960.000,00	3.710.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.766.000,00	12.883.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883.000,00	12.883.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peranturang Perundang - Undangan	13.520.000,00	10.918.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918.000,00	10.918.000,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DPA SETELAH PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN			FISIK			
					REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.06	**ADMIISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**244.035.974,00**	**256.575.347,00**	**6,13**	**56.395.598,00**					**200.179.749,00**	**200.179.749,00**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.993.878,00	90.015.039,00	2,15	39.815.598,00	44,23	0,95	94,42	2,03	50.199.441,00	50.199.441,00
7.01.01.2.06.0003	PenyediaanPerlengkapan Rumah Tangga	9.480.206,00	9.480.206,00	0,23	0,00	0,00	0,00	25,00	0,06	9.480.206,00	9.480.206,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.934.800,00	27.382.280,00	0,65	3.930.000,00	14,35	0,09	45,35	0,30	23.452.280,00	23.452.280,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.467.650,00	13.467.650,00	0,32	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	13.467.650,00	13.467.650,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.567.440,00	31.309.440,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.309.440,00	31.309.440,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.592.000,00	84.920.732,00	2,03	12.650.000,00	14,90	0,30	20,00	0,41	72.270.732,00	72.270.732,00
7.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**291.390.927,91**	**207.868.913,91**	**4,97**	**0,00**					**207.868.913,91**	**207.868.913,91**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.958.440,00	76.795.473,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.795.473,00	76.795.473,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169.432.487,91	131.073.440,91	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.073.440,91	131.073.440,91
7.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**99.105.860,00**	**97.063.860,00**	**2,32**	**90.485.860,00**					**6.578.000,00**	**6.578.000,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.210.000,00	18.168.000,00	0,43	11.590.000,00	63,79	0,28	76,00	0,33	6.578.000,00	6.578.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.895.860,00	78.895.860,00	1,89	78.895.860,00					0,00	0,00
7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.870.015,00**	**14.916.065,00**	**0,36**	**2.090.000,00**					**12.826.065,00**	**12.826.065,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.400.015,00	8.286.065,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.065,00	8.286.065,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.470.000,00	6.630.000,00	0,16	2.090.000,00	31,52	0,05	72,30	0,11	4.540.000,00	4.540.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**192.403.096,00**	**139.357.688,00**	**3,33**	**25.384.000,00**					**113.973.688,00**	**113.973.688,00**
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakatan Tingkat Kecamatan	192.403.096,00	139.357.688,00	3,33	25.384.000,00					113.973.688,00	113.973.688,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	175.313.096,00	139.357.688,00	3,33	25.384.000,00	18,21	0,61	48,78	1,62	113.973.688,00	113.973.688,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DPA SETELAH PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN			FISIK			
					REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				%	RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.322.000,00	30.018.100,00	0,72	0,00					30.018.100,00	30.018.100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentranan Dan Ketertiban Umum	65.322.000,00	30.018.100,00	0,72	0,00					30.018.100,00	30.018.100,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	65.322.000,00	30.018.100,00	0,72	0,00	0,00	0,00	26,18	0,19	30.018.100,00	30.018.100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	116.528.000,00	90.169.000,00	2,15	0,00					90.169.000,00	90.169.000,00
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial Penugasan Kepala Daerah**	**116.528.000,00**	**90.169.000,00**	**2,15**	**0,00**					**90.169.000,00**	**90.169.000,00**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	84.760.000,00	81.250.000,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250.000,00	81.250.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.768.000,00	8.919.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.000,00	8.919.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**66.439.400,00**	**38.767.438,22**	**0,93**	**0,00**					**38.767.438,22**	**38.767.438,22**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**66.439.400,00**	**38.767.438,22**	**0,93**	**0,00**					**38.767.438,22**	**38.767.438,22**
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.611.600,00	5.240.800,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.800,00	5.240.800,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	53.827.800,00	33.526.638,22	0,80	0,00	0,00	0,00	6,17	0,05	33.526.638,22	33.526.638,22
	JUMLAH TOTAL	**4.417.709.596,00**	**4.184.357.002,72**	**100,00**	**1.071.640.729,00**	**25,61**	**23,73**	**26,03**	**59,66**	**3.112.716.273,72**	**3.112.716.273,72**

PENGGUNA ANGGARAN,

YULIANA, S.Pi

NIP. 197808212002122007

Payalaman, 03 Juli 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ,

WIWIN NUR AENI, S.A.P

NIP. 19761220202010012009

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;
   - Target Kinerja Program/Kegiatan tercapai, lambatnya pencapaian disebabkan pada tantangan untuk menata kembali sektor Keuangan;
   - Adanya program kegiatan yang mendadak sehingga tidak terangkum di Perencanaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-3) s.d Tahun 2024 (n-1) Kabupaten Kepualaun Anambas dalam **Tabel 2.1.3** berikut :

Tabel 2.1.3

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00	10 Dokumen	28 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	3 Dokumen	5 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	100,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	100,00	14 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan	100,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	12 Laporan	14 Laporan	100,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100,00**			**100,00**
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	3 Paket	27 Paket	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	18 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00	1 Paket	17 Paket	100,00
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	3 Paket	100,00
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	2 Paket	10 Paket	100,00
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	8 Laporan	20 Laporan	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	2 Unit	27 Unit	27 Unit	100,00	2 Unit	31 Unit	100,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	6 Unit	100,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100,00
				Realisasi Target	**Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)**				**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	6 Unit	100,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00	12 Unit	36 Unit	100,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**					**0,00**			**100,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					**0,00**			**100,00**
7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**					**100,00**			**100,00**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	0 Laporan	4 Laporan	100,00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**0,00**			**100,00**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	200,00	0 Laporan	6 Laporan	100,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**					**100,00**			**100,00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**100,00**			**100,00**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00	0 Orang	4 Orang	100,00
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**					**100,00**			**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masy.	0 Lembaga Masy.	0 Lembaga Masy.	0 Lembaga Masy.	0,00	0 Lembaga Masy.	- Lembaga Masy.	0,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga Masy.	5 Lembaga Masy.	5 Lembaga Masy.	5 Lembaga Masy.	100,00	0 Lembaga Masy.	10 Lembaga Masy.	100,00
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	- Unit	0,00
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan**					**100,00**			**100,00**
7.01.03.2.03.05	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	0 Dokumen	10 Dokumen	100,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**					**100,00**			**100,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**100,00**			**100,00**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					**100,00**			**100,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**100,00**			**100,00**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00	- Orang	2 Orang	100,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	- Laporan	2 Laporan	100,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	- Dokumen	10 Dokumen	100,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**100,00**			**100,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**100,00**			**100,00**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	15 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	- Dokumen	2 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.17	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	- Dokumen	2 Dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kute Siantan berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Kute Siantan secara garis besar dituangkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Kute Siantan yaitu:

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pulik di Kecamatan Kute Siantan.
2. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesioanal.
3. Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah di wilayah Kecamatan Kute Siantan.
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Kute Siantan.

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Kute Siantan antara lain:

1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kute Siantan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kute Siantan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Kute Siantan.
4. Meningkatnya partisipasi gender di Kecamatan kute siantan

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kute Siantan dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut:

TABEL. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTE SIANTAN

NO	Indikator	SPM / Standar	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	Indeks Komposit (RB)	CC (>50-60) Cukup	CC (>50-60) Cukup	B (>60-70) Baik	B (>60-70) Baik	CC (51,76)	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (>60-70) Baik	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	AKIP / SAKIP	CC (>50-60) Cukup	CC (>50-60) Cukup	B (>60-70) Baik	B (>60-70) Baik	CC (51,76)	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (>60-70) Baik	
3	Persentase Kepuasan layanan Masyarakat	-	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	B (76,61-88,30) Baik	B (76,61-88,30) Baik	B (76,61-88,30) Baik	B (76,61-88,30) Baik	B (81,29) Baik	B (81,29) Baik	B (82,00) Baik	B (84,00)	B (76,61-88,30) Baik	
4	Persentase Desa Membangun (Desa Sangat Tertinggal menuju Desa Maju))	-	Indeks Komposit (IDM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambasadalah:
   a. Pelayanan informasi, pelayanan kartu keluarga, pelayanan KTP, pendampingan Dana Desa.
   b. Memfasilitasi Musrenbang tingkat desa dan kecamatan serta pelayanan rekomendasi perijinan.
   c. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
   d. Pelayanan pendistribusian Beras Sejahtera (rastra), memfasilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosian (PMKS), Forum Anak, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) penyelenggaraan MTQ/STQ, penanganan bencana alam, pembinaan peranan wanita dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan karang taruna dan generasi muda.
2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi
   a. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi kependudukan.
   b. Usulan musrenbang kecamatan dan desa kurang diakomodir oleh instansi terkait dan musrembang kabupaten.
3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan

   Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan pelayanan kurang optimal, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis prioritas yang direncanakan:
   a. Pelayanan Publik
   b. Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga Berbasis Teknolgi

c. Lomba Desa tingkat Kecamatan dan Kabupaten
d. Pelaksanaan MTQ / STQ
e. Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta Tingkat Kabupaten
f. Peningkatan SDM
g. Penyaluran Rastra
h. Koordinasi bersama instansi vertical
i. Pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
j. Pembinaan karang taruna
k. Pemilihan kepala desa, Pemilihan Badan Permusyawaran Desa
l. Terdapatnya Potensi Migas yang merupakan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahaan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam rangka Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan paraturan yang ada betapa besar kompleksnya Tugas dan Fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan Tugas Fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana dan prasarana sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Secces Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Karang Bintang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

1. Memamfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok, fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memamfaatkan / menerapkan kemajuan tekhnologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memamfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memamfaatkan peran swasta untuk melengkapi saran dan prasarana serta menggali potensi sumber daya alam yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memamfaatkan tekhnologi yang canggih.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam **Tabel 2.3** berikut :

TABEL. 2.3

ISU-ISU DAN PERMASALAHAN PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KUTE SIANTAN - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
1	Kesekretariatan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 UU ASN	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 Distribusi dan Penerimaaan ASN sesuai dengan Hasil Analisa Anjab Perangkat Daerah
		2 Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai Anjab	1 Adanya moratorium pegawai	1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	1 Program Tugas Belajar dan Diklat dan Bimtek
		3 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	1 Terealisasinya Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun Anggaran 2021
2	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan	1 Sosialisasi perda perijinan kepada masyarakat	1 Perda pelimpahan kewenangan perijinan, perda retribusi
		2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat	1 Penempatan Tugas Satpol PP	1 Penambahan Personil Satpol PP
3	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Kecamatan Kute Siantan belum memiliki Bangunan Gedung Perkantoran	1 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkantoran Kecamatan Kute Siantan	1 Terealisasinya Pembangunan Gedung Perkantoran Kecamatan Kute Siantan pada Tahun 2021
			2 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi	1 Tersedianya Anggaran Pengadaan sarpras pelayanan Publik belum	1 Terlaksanaanya Pengadaan sarpras pelayanan Publik pada tahun 2021
			3 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas	1 Pelayanan informasi public kepada masyarakat berbasi TIK	1 Pelatihan Pengelolaan website pelayanan
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1 Praktek outsourching	1 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan kute	1 Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha	1 Mebuka Usaha Mandiri berbasis UMKM
				2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja	2 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Bidang Rigger,Scabolding dan Operator Alat Berat
5	Pemberdayaan Masyarakat	1 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan	1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat	1 Terealisasinya Anggaran Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat
			2 Lemahnya penerapan Swadaya yang diterapkan olehPemerintahan Desa	1 Perlu Sosialiasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Peningkatan Monotoring dan Evaluasi oleh Perangkat Daerah DP4MD

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
6	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1 Minimnya ketersediannya pasar tradisional di wilayah kecamatan kute siatan	1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan kute siantan	1 Terealisasinya pembangunan Pasar Rakyat Tipe D di Desa Kecamatan Kute Siantan
			2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	1 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis	1 Perlu Penjelasan Status tentang kegagalan konstruksi dalam pembangunan pasar desa payalaman
7	Pendidikan	1 Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 Meningkatnyan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa	1 Pembanguan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Kute Siantan	1 Terealisasinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Kute Siantan Tahun 2021
		2 Bidang Kejuruan (STM)	1 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja	1 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata	1 TerealisasinyaPembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata Tahun 2021
8	Kesehatan	1 Tingkat Palayanan kesehatan masih rendah	1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis	1 Mendistribusian Tegana medis sesuai kebutuhan	1 Tersedianya Kebutuhan Tenaga Medis sesuai dengan kebutuhan
			2 Kurangnya Sapras Kesehatan	1 Pengadaan Sapras Kesehatan	1 Pembangunan PUKESMAS baru di Kecamatan Kute Siantan
9	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	1 Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage	1 Pembagunan Pabrik Es	1 Terealisasinya Pembagunan Pabrik Es
			2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan	1 Pembangunan Pasar Ikan Bersih	1 Pembangunan Sarana Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKM) Pengelolaan Hasil Laut
		2 Lemahnya Pengawasan SDKP	1 Adanya ganguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing	1 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan	1 Terealisasinya Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan
		3 Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	1 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan	1 Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Teluk Bayur dan Matak	1 Terealisasinya Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Desa Teluk Bayur dan Matak
10	Perencanaan Pembangunan	1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1 Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah	1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang	1 Terlaksananya hasil keputusan musrenbang yang menjadi skala prioritas pembangunan

NO	PERMASALAHAN		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	SOLUSI	SARAN DAN HARAPAN
1	2		3	4	5
11	Pembangunan	1 Pemeliharaan Ruas Jalan masih rendah	1 Minimnya pelasanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau matak	1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis	1 Terlaksananya pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala di ruas jalan kec.kute siantan
		2 ketersedian Air Minum	1 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1 Peningkatan Pembangunan SPAM	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan SPAM (Konektifity jaringan distribusi + SR)
		3 Gedung Kantor Pemerintahan	1 Belum Terbangunan Gedung perkantoran kecamatan Kute Siantan	1 Perlu pembangunan gendung perkantoran kecamatan kute siantan	1 Terealisasinya pembangunan gendung perkantoran kecamatan kute siantan
				2 Perumahan Pembangunan Dinas Kecamatan kute siantan	2 Terealisasinya Pembangunan Perumahan Dinas Kecamatan kute siantan
12	Lingkungan	1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan	1 Pembangunan Infrastruktur dikawasan mangrove	1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove	1 Perlu adanya tidakan tegas terhadap pembangunan yang dilakukan dikawasan konservasi
		2 Persampahan	1 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir	1 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Kute Siantan	1 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Kute Siantan

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Review Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang terdiri dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada, dengan mensinkronisasikan antara Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan pada hasil evaluasi capaian target kinerja Tahun 2024:

1. Proses Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 adalah program dan kegiatan prioritas yang telah di usulankan melalui mekanisme baik secara langsung bersetuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi Dinas Instansi, Desa Kelurahan serta tokoh masyarakat.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini digambarkan dalam **Tabel 2.4** berikut :

TABEL. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTE SIANTAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN				**5.109.387.455,00**				**5.109.387.455,00**	
	KECAMATAN				**5.109.387.455,00**				**5.109.387.455,00**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**4.210.546.490,00**		**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**4.210.546.490,00**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**74.398.149,00**		**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**74.398.149,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	23.485.525,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	23.485.525,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.422.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.422.800,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	11.999.550,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	11.999.550,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.166.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.166.924,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	6.794.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	6.794.100,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.529.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	13.529.250,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.123.774.544,00**		**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.123.774.544,00**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.000.871.289,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.000.871.289,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.549.075,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.549.075,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	9.354.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	9.354.180,00	
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**5.762.900,00**		**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**5.762.900,00**	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.762.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.762.900,00	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**61.643.400,00**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**61.643.400,00**	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.839.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.839.000,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	44.562.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	44.562.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	10.242.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	10.242.400,00	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**334.091.627,00**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**334.091.627,00**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	147.056.875,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	147.056.875,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12.154.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12.154.500,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.310.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.310.600,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.520.152,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.520.152,00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.084.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.084.500,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	133.965.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	133.965.000,00	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**509.788.350,00**		**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**509.788.350,00**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	355.088.350,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	355.088.350,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	154.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	154.700.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.082.487.520,00**		**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.082.487.520,00**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.428.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.057.059.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.057.059.520,00	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**18.600.000,00**		**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**18.600.000,00**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.500.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	15.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	15.100.000,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**7.591.200,00**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**7.591.200,00**	
A	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**7.591.200,00**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**7.591.200,00**	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	7.591.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	7.591.200,00	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**		**667.774.545,00**		**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**		**667.774.545,00**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**662.407.845,00**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**662.407.845,00**	
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Masy	199.967.355,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Masy	199.967.355,00	
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masy	462.440.490,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masy	462.440.490,00	
B	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan**		**5.366.700,00**		**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan**		**5.366.700,00**	
1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	5.366.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	5.366.700,00	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**63.234.500,00**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**63.234.500,00**	
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**63.234.500,00**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**63.234.500,00**	
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	63.234.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	63.234.500,00	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**64.143.620,00**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**64.143.620,00**	
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**64.143.620,00**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**64.143.620,00**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Orang	38.236.120,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Orang	38.236.120,00	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	25.907.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	25.907.500,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**96.097.100,00**		**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**96.097.100,00**	
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**96.097.100,00**		**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**96.097.100,00**	
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	16.526.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	16.526.500,00	
2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	5.708.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	5.708.200,00	
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	73.862.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	73.862.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut adalah Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanisme diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan Riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing - masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Usulan Aspirasi Masyarakat dan Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi prioritas di tengah - tengah masyarakat.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.5** berikut :

TABEL. 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTE SIANTAN

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Kursi sofa dan Meja Kursi Kerja Kec.Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Sarana Meubiler Kecamatan Kute Siantan	100.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
2	Pengadaan Seragam /Perlengkapan Pramuka Kec.Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Seragam /Perlengkapan Pramuka Kec.Kute Siantan	100.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
3	Pengadaan Satu Set Sound Sistem Karang Taruna Desa Batu Ampar Kec.Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Sound Sistem Karang Taruna Desa Batu Ampar Kec.Kute Siantan	110.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
4	Dukungan Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kec. Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kec. Kute Siantan	275.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
5	Pengadaan Meubiler untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kecamatan Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Meubiler untuk diserahkan kepada Masyarakat di Kecamatan Kute Siantan	200.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
6	Pengadaan Baju PKK dan Baju Majelis Taqlim Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Seragam Baju PKK dan Baju Majelis Taqlim Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan	130.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
7	Pengadaan AC untuk diserahkan kepada Mesjid Nurul Huda Desa Payalaman Kec. Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Pendingin ruangan untuk diserahkan kepada Mesjid Nurul Huda Desa Payalaman Kec. Kute Siantan	200.000.000,00	Pokir / Reses DPRD
8	Penyiapan Lahan Perkantoran Kecamatan Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Tersedia Lahan Perkantoran Kec. Kute Siantan seluas 5 Ha	1.500.000.000,00	Lahan Hibah
9	Pembangunan Kawasan Sport Center Kec. Kute Siantan	Desa Teluk Bayur	Tersedianya Kawasan Sport Center Kec. Kute Siantan	1 Ha	Dalam Proses Hibah
10	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) + Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)	Kec. Kute Siantan	Tersedianya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) + Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)	2.600.000.000,00	Lahan Kantor Camat Kute Siantan
11	Pembangunan pasar modern (Type D) Kec. Kute Siantan	Desa Payalaman	Tersedianya Pembangunan pasar modern (Type D) Kec. Kute Siantan	4.500.000.000,00	DAK Afirmasi
12	Pemugaran Keramat Gunung Kuatang + Jungle Tracking	Desa Batu Ampar	Terlaksananya Pemugaran Keramat Gunung Kuatang + Jungle Tracking	1.800.000.000,00	Wisata Budaya
13	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Terlaksananya Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Kute Siantan	4.800.000.000,00	Dalam Proses Hibah
14	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kec. Kute Siantan	Kec. Kute Siantan	Terlaksananya Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kec. Kute Siantan	750.000.000,00	APBD
15	Pengadaan dan Pemasangan Guadril Desa Payalaman	Desa Payalaman	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Guadril Desa Payalaman	320.000.000,00	150 Meter
16	Pengadaan Media Informasi (Vidio Tronik)	Kec. Kute Siatan	Terlaksananya Pengadaan Media Informasi (Vidio Tronik)	2.350.000.000,00	Kantor Camat, Payalaman, Matak)
17	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	(Batu ampar – Matak), (Payalaman – Teluk Bayur)	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	9.750.000.000,00	DAK Afirmasi
18	IPAL Komunal	Batu Ampar, Payalaman, Matak, Teluk Bayur	Terlaksananya IPAL Komunal	3.200.000.000,00	APBD
19	Pembangunan Embung Desa Matak (Geomembran) + Bangunan Reservoil dan Jaringan Distribusi	Desa Matak	Terlaksananya Pembangunan Embung Desa Matak (Geomembran) + Bangunan Reservoil dan Jaringan Distribusi	8.500.000.000,00	APBD

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
20	Pembangunan sumur Dalam terlindungi Desa Paya	Desa Payalaman	Terlaksananya Pembangunan sumur Dalam terlindungi Desa Payalaman (Konektifity jaringan distribusi + SR)	7.750.000.000,00	APBD
21	Pembangunan Balai Kesenian dan Buduya	Desa Payamaran	Terlaksananya Pembangunan Balai Kesenian dan Buduya	1.250.000.000,00	APBD
22	Pembangunan Pukesmasn KSN Kute Siantan	Desa Payamaran	Terlaksananya Pembangunan Pukesmasn KSN Kute Siantan	3.600.000.000,00	DAK Afirmasi
23	Pembangunan Rumah Khusus Tenaga Medis Perbatasan	Lahan Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus Tenaga Medis Perbatasan	900.000.000,00	DAK AFIRMASI
24	Pembangunan Rumah Khusus Bidan Perbatasan	Lahan Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus Bidan Perbatasan	900.000.000,00	DAK AFIRMASI
25	Pembangunan Perumahan Khusus – Kebutuhan Kh	Lahan Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pembangunan Perumahan Khusus – Kebutuhan Khusus Sosial	2.000.000.000,00	DAK AFIRMASI
26	Pembuatan Sertifikat Tanah Kecamatan Kute Siantan	Kute Siantan	Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah Kecamatan Kute Siantan	5Ha	APBD
27	Pembangunan Pelantar Beton Desa Batu Ampar – Desa Payalaman	Batu Ampar - Payalaman	Terlaksananya Pembangunan Pelantar Beton Desa Batu Ampar – Desa Payalaman	2.000.000.000,00	APBD
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat	Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat	675.000.000,00	APBD
29	Pengadaan Pentas (Panggung Rengging) + Tenda	Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pengadaan Pentas (Panggung Rengging) + Tenda	435.000.000,00	APBD
30	Pengadaan Kursi Rapat	Kantor Camat Kute Siantan	Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat	212.500.000,00	APBD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tersebut tercantum dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan dilakukan dengan penelaahan kebijakan nasional yang disesuaikan dari visi-misi presiden dan wakil presiden, dimana visi misi sesuai dengan RPJPN 2005-2029, adalah;

Visi:

"**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong**".

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Kebijakan Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Gubenur dan Wakil Gubenur terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029.

Adapun tema Pembangunan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025 adalah ”**Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjunjung nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut;

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan inftrastruktur wilayah.
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor -faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, serta rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Tahun 2021-2026. Adapun rancangan tema pembangunan Prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif"**, dengan Rancangan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.
2. Pengembangan dan pemantapan sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025 dan prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada **Table 3.3** berikut:

TABEL. 3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTE SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMABAS TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTE SIANTAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.109.387.455,00**				**5.370.295.759,00**
7.01	**KECAMATAN**				**5.109.387.455,00**				**5.370.295.759,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.210.546.490,00**				**4.197.739.115,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**74.398.149,00**				**74.398.149,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	10 Dokumen	23.485.525,00	DAU		10 Dokumen	23.485.525,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	1 Dokumen	10.422.800,00	DAU		1 Dokumen	10.422.800,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	4 Dokumen	11.999.550,00	DAU		4 Dokumen	11.999.550,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	1 Dokumen	8.166.924,00	DAU		1 Dokumen	8.166.924,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	4 Dokumen	6.794.100,00	DAU		4 Dokumen	6.794.100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	1 Laporan	13.529.250,00	DAU		1 Laporan	13.529.250,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.123.774.544,00**				**2.123.774.544,00**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	14 Orang	2.000.871.289,00	DAU		14 Orang	2.000.871.289,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Dokumen	108.000.000,00	DAU		12 Dokumen	108.000.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	1 Dokumen	5.549.075,00	DAU		1 Dokumen	5.549.075,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	1 Dokumen	9.354.180,00	DAU		1 Dokumen	9.354.180,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			**5.762.900,00**				**5.762.900,00**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Laporan	5.762.900,00	DAU		12 Laporan	5.762.900,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**61.643.400,00**				**76.497.400,00**
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Dokumen	6.839.000,00	DAU		12 Dokumen	6.839.000,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	3 Orang	44.562.000,00	DAU		4 Orang	59.416.000,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	14 Orang	10.242.400,00	DAU		14 Orang	10.242.400,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**334.091.627,00**				**304.680.252,00**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	25 Paket	147.056.875,00	DAU		20 Paket	117.645.500,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Paket	12.154.500,00	DAU		12 Paket	12.154.500,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Paket	14.310.600,00	DAU		12 Paket	14.310.600,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Paket	13.520.152,00	DAU		12 Paket	13.520.152,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Laporan	13.084.500,00	DAU		12 Laporan	13.084.500,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Laporan	133.965.000,00	DAU		12 Laporan	133.965.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**509.788.350,00**				**509.788.350,00**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Unit	355.088.350,00	DAU		12 Unit	355.088.350,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	2 Unit	154.700.000,00	DAU		2 Unit	154.700.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.082.487.520,00**				**1.082.487.520,00**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Laporan	25.428.000,00	DAU		12 Laporan	25.428.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	12 Laporan	1.057.059.520,00	DAU		12 Laporan	1.057.059.520,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**18.600.000,00**				**20.350.000,00**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	2 Unit	3.500.000,00	DAU		3 Unit	5.250.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Payalaman	24 Unit	15.100.000,00	DAU		24 Unit	15.100.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**			**7.591.200,00**				**15.182.400,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**7.591.200,00**				**15.182.400,00**
7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	6 Laporan	7.591.200,00	DAU		12 Laporan	15.182.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan**			**667.774.545,00**				**898.994.790,00**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**662.407.845,00**				**893.628.090,00**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	2 Lembaga Masy	199.967.355,00	DAU		2 Lembaga Masy	199.967.355,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	2 Lembaga Masy	462.440.490,00	DAU		3 Lembaga Masy	693.660.735,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan**			**5.366.700,00**				**5.366.700,00**
7.01.03.2.03.05	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	1 Dokumen	5.366.700,00	DAU		1 Dokumen	5.366.700,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**			**63.234.500,00**				**63.234.500,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**63.234.500,00**				**63.234.500,00**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	3 Laporan	63.234.500,00	DAU		3 Laporan	63.234.500,00
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PersentasePengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**			**64.143.620,00**				**99.047.854,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**64.143.620,00**				**99.047.854,00**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	17 Orang	38.236.120,00	DAU		21 Orang	47.232.854,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	6 Dokumen	25.907.500,00	DAU		12 Dokumen	51.815.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**96.097.100,00**				**96.097.100,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**96.097.100,00**				**96.097.100,00**
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	1 Dokumen	16.526.500,00	DAU		1 Dokumen	16.526.500,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	1 Dokumen	5.708.200,00	DAU		1 Dokumen	5.708.200,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan	5 Laporan	73.862.400,00	DAU		5 Laporan	73.862.400,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan pada tahun 2025 dan perkiraan maju pada Tahun 2026, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor - faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah:

1. Bidang Urusan (Non urusan) fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bidang Urusan Kecamatan Administrasi.

Rumusan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada **Table 4.1** berikut :

TABEL. 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTE SIANTAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KUTE SIANTAN							**4.878.364.930,00**	**4.338.813.736,00**	**3.546.215.925,08**	**-1.332.149.004,92**							**4.737.474.330,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.878.364.930,00**	**4.338.813.736,00**	**3.546.215.925,08**	**-1.332.149.004,92**							**4.737.474.330,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.878.364.930,00**	**4.338.813.736,00**	**3.546.215.925,08**	**-1.332.149.004,92**							**4.737.474.330,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.896.331.460,00**	**3.898.121.240,00**	**3.344.119.186,86**	**0,00**							**3.896.331.460,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	74.398.099,00	67.029.000,00	29.675.000,00	-44.723.099,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		74.398.099,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	23.485.525,00	15.370.000,00	7.180.000,00	-16.305.525,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			23.485.525,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.422.800,00	12.386.000,00	3.400.000,00	-7.022.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			10.422.800,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.999.500,00	11.258.000,00	6.480.000,00	-5.519.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			11.999.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.166.924,00	10.930.000,00	3.380.000,00	-4.786.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			8.166.924,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.794.100,00	8.155.000,00	3.700.000,00	-3.094.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			6.794.100,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.529.250,00	8.930.000,00	5.535.000,00	-7.994.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			13.529.250,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.111.871.289,00	3.215.899.079,09	2.746.431.459,97	634.560.170,97			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		2.111.871.289,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.000.871.289,00	3.090.104.797,09	2.608.004.665,24	607.133.376,24	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			2.000.871.289,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	108.000.000,00	110.409.600,00	127.789.600,00	19.789.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			108.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	15.384.682,00	10.637.194,73	7.637.194,73	Kab. Kepulauan Anambas, Semboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			3.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.762.900,00	3.440.244,00	4.567.244,00	-1.195.656,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		5.762.900,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.762.900,00	3.440.244,00	4.567.244,00	-1.195.656,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			5.762.900,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.081.400,00	43.246.000,00	27.511.000,00	-39.570.400,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		67.081.400,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	6.839.000,00	3.960.000,00	3.710.000,00	-3.129.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			6.839.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	25.766.000,00	12.883.000,00	-37.117.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			50.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	10.242.400,00	13.520.000,00	10.918.000,00	675.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			10.242.400,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	334.680.252,00	244.035.974,00	236.337.540,00	-98.342.712,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		334.680.252,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	117.645.500,00	49.993.878,00	75.761.153,00	-41.884.347,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			117.645.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.154.500,00	9.480.206,00	6.600.875,00	-5.553.625,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			12.154.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.310.600,00	20.934.800,00	25.678.680,00	11.368.080,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			14.310.600,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.520.152,00	13.467.650,00	12.066.660,00	-1.453.492,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			13.520.152,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13.084.500,00	21.567.440,00	31.309.440,00	18.224.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			13.084.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	163.965.000,00	128.592.000,00	84.920.732,00	-79.044.268,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			163.965.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	199.700.000,00	291.390.927,91	187.617.017,89	-12.082.982,11			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		199.700.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	121.958.440,00	43.501.501,00	-1.498.499,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			45.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	154.700.000,00	169.432.487,91	144.115.516,89	-10.584.483,11	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			154.700.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.082.487.520,00	20.210.000,00	97.063.860,00	-985.423.660,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		1.082.487.520,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.428.000,00	20.210.000,00	18.168.000,00	-7.260.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			25.428.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.057.059.520,00	0,00	78.895.860,00	-978.163.660,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			1.057.059.520,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.350.000,00	12.870.015,00	14.916.065,00	-5.433.935,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		20.350.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	5.250.000,00	5.400.015,00	8.286.065,00	3.036.065,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			5.250.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	15.100.000,00	7.470.000,00	6.630.000,00	-8.470.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			15.100.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
2.	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Kute Siantan)**				-	**0 Persen**	**135.182.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-135.182.400,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	135.182.400,00	0,00	0,00	-135.182.400,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		0,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	135.182.400,00	0,00	0,00	-135.182.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
3.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**530.286.616,00**	**192.403.096,00**	**46.115.200,00**	**0,00**							**530.286.616,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	530.286.616,00	192.403.096,00	46.115.200,00	-484.171.416,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		530.286.616,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	17.090.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	490.286.616,00	175.313.096,00	46.115.200,00	-444.171.416,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			490.286.616,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
4.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**123.234.500,00**	**65.322.000,00**	**30.018.100,00**	**0,00**							**123.234.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	123.234.500,00	65.322.000,00	30.018.100,00	-93.216.400,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		123.234.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	123.234.500,00	65.322.000,00	30.018.100,00	-93.216.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			123.234.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
5.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-				-	-	**117.232.854,00**	**116.528.000,00**	**87.196.000,00**	**0,00**							**117.232.854,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	117.232.854,00	116.528.000,00	87.196.000,00	-30.036.854,00			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		117.232.854,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				21 Orang	21 Orang	67.232.854,00	84.760.000,00	81.250.000,00	14.017.146,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			67.232.854,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	31.768.000,00	5.946.000,00	-44.054.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			50.000.000,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
6.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**76.097.100,00**	**66.439.400,00**	**38.767.438,22**	**-5.708.200,00**							**70.388.900,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	76.097.100,00	66.439.400,00	38.767.438,22	-37.329.661,78			-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		70.388.900,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	16.526.500,00	12.611.600,00	5.240.800,00	-11.285.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			16.526.500,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.708.200,00	0,00	0,00	-5.708.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			0,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	53.862.400,00	53.827.800,00	33.526.638,22	-20.335.761,78	Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah			53.862.400,00	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	JUMLAH								**4.878.364.930,00**	**4.338.813.736,00**	**3.546.215.925,08**	**-548.753.730.731,26**							**4.737.474.330,00**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Program - program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kute Siantan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2025, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
4. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai sarana

peningkatan kinerja. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja juga memberikan feedback yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Kute Siantan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RKPD) Kecamatan Kute Siantan tahun anggaran 2025 dapat tersusun. Dengan mengharap Keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama, yaitu terwujudnya ***"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera".***

Ditetapkan di : Payalaman
Pada tanggal : 16 Juli 2025

Plt. CAMAT KUTE SIANTAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN KUTE SIANTAN

YULIANA, S.Pi
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197808312002122007